

WILAYAH RAWAN PANGAN DAN GIZI KRONIS DI PAPUA, KALIMANTAN BARAT DAN JAWA TIMUR



Mewa Ariani
Handewi P. Saliem
Gatot Sroe Hardono
Tri Bastuti Purwantini



PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2007

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wilayah rawan pangan dan gizi kronis di Papua,
Kalimantan Barat dan Jawa Timur / Mewa Ariani
... [et al.]. -- Bogor : Pusat Analisis
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2008.
..... hlm. ; 24 cm.

ISBN : 978-979-3566-62-7

1. Gizi - Abnormalis. I. Mewa Ariani

616.39

Dewan Editor :

Pantjar Simatupang
Bonar Sinaga
Kedi Suradisastra
Yusmichad Yusdja
Felix Sitorus
Mahyudin Syam

Desain dan Tata Letak :

Agus Suwito

Diterbitkan oleh :

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian
Jl. A. Yani No. 70, Bogor
Telp. : (0251) – 333964
Fax. : (0251) – 314496
E-mail : caser@indosat.net.id, publikasi_psekp@yahoo.co.id
Website : <http://www.pse.litbang.deptan.go.id>

ISBN : No. 978-979-3566-62-7

Hak Cipta pada penulis. Tidak diperkenankan memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari penulis.

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT

Sejak tahun 2005, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), telah menerbitkan Buku Tematik yang merupakan Laporan Hasil Penelitian Terbaik peringkat 1 sampai 3, yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelumnya. Buku Tematik diharapkan dapat dibaca oleh khalayak yang lebih luas, sehingga dari sisi format dan sistematika penulisan telah disesuaikan dengan keragaman pembacanya, agar lebih mudah dipahami. Untuk maksud tersebut, dibentuk Dewan Editor yang terdiri dari beberapa orang pakar yang kompeten dalam bidang keredaksian dan publikasi ilmiah dari Badan Litbang Pertanian maupun Institut Pertanian Bogor.

Buku “Wilayah Rawan Pangan dan Gizi Kronis di Papua, Kalimantan Barat dan Jawa Timur” ini merupakan Laporan Hasil Penelitian Terbaik peringkat 2 dengan judul awal “Analisis Wilayah Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis serta Alternatif Penanggulangannya”. Penelitian dilakukan sebagai respon terhadap Dewan Ketahanan Pangan dan *World Food Program* yang menerbitkan Peta Kerawanan Pangan Indonesia. Hasil pemetaan menunjukkan sebanyak 100 Kabupaten dari 265 Kabupaten di Indonesia tergolong rawan pangan dan gizi kronis. Hasil pemetaan dapat juga digunakan sebagai petunjuk bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi mitigasi yang tepat untuk menangani kerawanan pangan kronis. Rumusan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lahan, tenaga kerja dan teknologi spesifik lokasi/wilayah untuk meningkatkan produksi pangan.

PSEKP menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Editor, penulis, dan semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan bagi semua pihak yang selama ini *concern* mendalami permasalahan ketahanan pangan serta berbagai hal yang terkait dengannya.

Bogor, Agustus 2007

Kepala Pusat,

Dr. Tahlim Sudaryanto
NIP. 080 035 289

KATA PENGANTAR EDITOR

Upaya Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) untuk mendokumentasikan hasil penelitian terbaiknya dalam wujud buku tematik patut mendapat apresiasi dan dukungan. Sebagai lembaga yang menggeluti bidang penelitian, penerbitan buku ini diharapkan dapat memacu semangat para peneliti untuk meningkatkan kualitas hasil karyanya, membangkitkan gairah kompetisi yang sehat, sekaligus sebagai media untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan PSEKP kepada para pengguna.

Sesuai dengan mandat yang diberikan, tugas utama Dewan Editor adalah membantu dalam memperbaiki format, tampilan, dan sistematika penyusunan buku sehingga lebih menarik dan mudah dipahami oleh beragam kalangan pembaca. Dewan Editor tidak terlalu memberi penekanan pada perbaikan yang sifatnya substansial kepada Tim Penulis, tetapi hanya memberikan saran dan masukan yang konstruktif agar tulisan lebih terarah dan berbobot. Diakui bahwa, karena kendala yang bersifat teknis ataupun non-teknis, tidak semua saran mampu diakomodasi oleh Tim Penulis. Saran pemuatan peta kabupaten yang berkaitan dengan rawan pangan dan gizi, misalnya, tidak dapat dipenuhi karena alasan tersebut. Demikian pula halnya dengan saran menarasikan sebagian tabel. Walaupun demikian, upaya untuk mewujudkan sebuah karya buku tematik yang terbaik telah dilakukan secara maksimal.

Dewan Editor mengucapkan terima kasih kepada kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Dewan Editor untuk mengedit buku ini. Dewan Editor mengakui bahwa hasil akhir buku ini masih jauh dari sempurna. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk perbaikan buku tematik di masa mendatang. Kepada Tim Penulis, Dewan Editor juga menyampaikan apresiasi atas jerih payah dan kerja keras untuk memperbaiki tulisannya.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi dan program pembangunan pertanian yang efektif sehingga mampu mengangkat martabat dan kesejahteraan masyarakat pertanian Indonesia.

Editor

EXTENDED ABSTRACT

This research is basically conducted to follow up the mapping results of food insecure areas prepared by Food Security Board (FSB) and World Food Program (WFP) in 2005. The objectives of this research are: (1) to group 100 chronic food and nutrition insecure regencies based on 10 indicators determined by FSB and WFP, and follow it up with classification of those 100 regencies based on type of the regency and the degree of food insecurity; and (2) to map out food and nutrition insecure areas at sub-district level in the selected regencies; (3) to identify characteristics and determinants of food and nutrition insecurity at regency and household level, and (4) to formulate alternative strategy policy to cope with such insecure food and nutrition. The locations of this research are in Papua Province (one regency) and two regencies each in East Java and West Kalimantan Provinces.

Result shows that classifying chronic food and nutrition insecure regencies in quintile do not indicate unique dispersion pattern. The use of those 10 indicators was unable to show the absolute food insecurity status for any of the regency because the score of the 1st quintile (the most insecure group) from each indicator could be higher than that of in the 5th quintile (the most secure group).

For the group based on type of the region, this research was successfully identified 10 types of indicators which can be used to improve the FSB-WFP-version characteristic information of 100 chronic food and nutrition insecure regencies. Such indicators cover agriculture and food availability aspects in a broad sense as well as the income aspect. On the classification of regency based on degree of food insecurity using cross indicator criteria of expenditure share and the share of food sufficiency shows that there are 20 regencies at which no households included in food insufficient category.

The use of food insecurity regency indicators in FSB and WFP maps need to be improved because it seems that it could only consider the availability of the data instead of “theoretical reason” causing the direct factors affecting chronic food and nutrition insecurity. As a result, the regional potential aspect which is known as the main character of food insecurity is ignored. In this respect, the weaknesses are: (1) the selected indicators reflect more on poverty factor, not in food insecurity, (2) the exclusion of other local staple foods consumed by the people, such as sago and taro, and (3) inadequately considered its relevance with context of the problem. These weaknesses could also be seen from inflexibility of indicator measurement and data accuracy along with its calculation.

Analysis at sub-district level within the sample regencies was able to map chronic food and nutrition insecure by using data which reflect regional potential and directly related to food insecurity aspect. However,

the use of the indicators in the mapping was not uniform in all regencies due to the shortage of data and information at sub-district level.

Food insecure regions are characterized by typical topography condition (sloping, hilly, and mountainous) with different levels of disaster and climate uncertainty or low land with low intensity of rain. The quality of human resource (education, skills) is low with high proportion of poor people. Large number of people is still depending on agricultural sector with limited access to education, health, transportation, and capital. These characteristics are the main root problems causing the chronic food and nutrition insecurity.

By considering the abovementioned situation, the relevant alternative strategy policies are: (1) increasing purchasing power of the people through business diversification, (2) creating rural-based job opportunity in agricultural and non-agricultural sectors, (3) improving quality of human resource through providing adequate education and health facilities, (4) developing physical infrastructures, (5) opening regional isolation, (6) improving financial accessibility, and (7) strengthening political commitment at the local government level including their legislative institution.

In term of consumption point of view, developing food consumption diversification is the strategic option to strengthen food security at household level. However, strengthening food security requires support from or in line with increasing food production and household income as well as improving food distribution.

In relation to the social and environmental aspects, plan to overcome chronic food and nutrition insecurity should include integrated problem solving within short and long term policy orientation. The implementation of such policy requires an inter-sector synergism involving the private sectors and local community. Regional economic empowerment need to include the aspect of strengthening life sources that could guarantee the achievement of sustainable regional and household food security. In addition, the empowerment should also be able to promote the community to mobilize the local assets to meet life demand and to overcome various problems and threats without losing their identity.

RINGKASAN

Penelitian ini pada dasarnya ingin menindaklanjuti hasil pemetaan kabupaten rawan pangan oleh Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan World Food Program (WFP) tahun 2005. Tujuan penelitian adalah : 1) Mengelompokkan 10 kabupaten rawan pangan dan gizi kronis menurut 10 indikator yang ditetapkan DKP dan WFP dan mengidentifikasi serta mengelompokkan 10 kabupaten tersebut menurut tipe wilayah dan derajat kerawanan pangan dan 2) Memetakan wilayah rawan pangan dan gizi tingkat kecamatan di kabupaten contoh penelitian, mengidentifikasi karakteristik dan faktor-faktor penyebab rawan pangan dan gizi tingkat wilayah dan rumah tangga, serta merumuskan alternatif strategi kebijakan penanggulangannya. Lokasi penelitian contoh meliputi satu kabupaten di Provinsi Papua dan dua kabupaten masing-masing di Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Barat.

Hasil penelitian menunjukkan, pengelompokan kabupaten rawan pangan dan gizi kronis dalam kuintil sesuai 10 indikator DKP-WFP tidak mengindikasikan pola sebaran yang unik (khas). Penggunaan 10 indikator tersebut tidak dapat menunjukkan status rawan pangan yang mutlak untuk setiap kabupaten karena nilai kuintil I (kelompok yang paling rawan) dari masing-masing indikator dapat lebih tinggi dibandingkan nilai pada kuintil V (kelompok yang kerawanannya paling rendah).

Pada pengelompokan menurut tipe wilayah, penelitian ini berhasil mengidentifikasi 10 indikator tipe wilayah yang dapat digunakan untuk melengkapi informasi karakteristik 10 kabupaten rawan pangan dan gizi kronis versi DKP-WFP. Indikator tersebut mencakup aspek pertanian dan ketersediaan pangan dalam arti luas serta aspek pendapatan. Pada pengelompokan kabupaten menurut derajat kerawanan pangan menggunakan kriteria indikator silang pangsa pengeluaran dengan pangsa kecukupan energi diketahui adanya 20 kabupaten yang tidak memiliki rumah tangga kurang pangan.

Penggunaan indikator kabupaten rawan pangan dalam peta DKP dan WFP memerlukan penyempurnaan karena terdapat kesan lebih mengutamakan ketersediaan data dan kurang memperhatikan “alasan teoritis” penyebab langsung terjadinya rawan pangan dan gizi kronis. Akibatnya aspek potensi wilayah yang juga sebagai penciri utama rawan pangan terabaikan. Kelemahan tersebut antara lain: (1) indikator terpilih lebih mencerminkan faktor kemiskinan bukan rawan pangan, (2) belum memasukan seluruh jenis pangan pokok lokal yang dikonsumsi masyarakat seperti sagu dan talas, dan (3) kurang mempertimbangkan relevansi dengan konteks masalah. Kelemahan juga terlihat dari kurangnya fleksibilitas pengukuran indikator dan akurasi data dan perhitungannya.

Analisis tingkat mikro di kabupaten contoh berhasil memetakan kecamatan rawan pangan dan gizi kronis menggunakan data yang meref-

leksikan potensi wilayah dan terkait langsung dengan aspek kerawanan pangan. Namun demikian, pada pemetaan tersebut penggunaan indikator tidak dapat seragam di seluruh kabupaten karena keterbatasan data dan informasi tingkat kecamatan.

Wilayah rawan pangan dicirikan kondisi alam topografi yang tidak datar (berlereng, berbukit dan bergunung) dengan potensi bencana dan iklim yang tidak menentu atau dataran rendah dengan curah hujan rendah. Kualitas sumberdaya manusia (pendidikan, ketrampilan) masih rendah. Proporsi penduduk miskin masih tinggi. Sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian, dan sarana-prasarana: pendidikan, kesehatan, transportasi dan akses terhadap permodalan terbatas. Karakteristik diatas sekaligus sebagai akar penyebab utama terjadinya rawan pangan dan gizi kronis.

Dari situasi di atas, alternatif strategi kebijakan yang relevan adalah (1) peningkatan daya beli masyarakat melalui diversifikasi usaha, (2) penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian dan non pertanian berbasis pedesaan, (3) peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, (4) peningkatan sarana-prasarana fisik, (5) membuka keterisolasian wilayah, (6) peningkatan akses permodalan, disamping (7) peningkatan komitmen politik dari pemerintah daerah dan lembaga legislatifnya.

Dari sisi konsumsi peningkatan keragaman konsumsi pangan adalah salah satu opsi strategis guna meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Namun demikian peningkatan ketahanan pangan juga membutuhkan dukungan upaya peningkatan produksi pangan dan pendapatan rumah tangga serta upaya perbaikan distribusi pangan.

Terkait sisi sosial dan lingkungan, perencanaan penanggulangan rawan pangan harus mencakup pemecahan masalah secara terpadu dengan orientasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Implementasi kebijakan memerlukan sinergi lintas sektor dan melibatkan peran swasta maupun masyarakat setempat. Pemberdayaan perekonomian daerah perlu memperhitungkan aspek penguatan sumber-sumber kehidupan yang menjamin tercapainya ketahanan pangan wilayah dan rumah tangga secara berkelanjutan serta mampu membangkitkan masyarakat sebagai penggerak berbagai aset untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah serta ancaman tanpa menghilangkan jati diri.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT	i
KATA PENGANTAR EDITOR	ii
EXTENDED ABSTRACT	iii
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xvi
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Karakteristik Rawan Pangan dan Gizi	3
1.2.1. Identifikasi Wilayah/Rumah Tangga Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis	5
1.2.2. Karakteristik Wilayah/Rumah Tangga Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis	9
1.2.3. Faktor-faktor Penyebab Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis	10
1.3. Tujuan dan Keluaran Penelitian	12
 II. PENGELOMPOKKAN DAN INDIKATOR WILAYAH RAWAH PANGAN DAN GIZI KRONIS	13
2.1. Pengelompokkan Wilayah Rawan Pangan dan Gizi Kronis	13
2.1.1. Pengelompokkan Menurut 10 Indikator	13
2.1.2. Pengelompokkan Menurut Tipe Wilayah	22
2.1.3. Pengelompokkan Menurut Derajat Kerawanan Pangan	27
2.1.4. Kritikan dan Penyempurnaan Indikator Wilayah Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis	30
2.2. Indikator dan Pemetaan Wilayah Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis Tingkat Kecamatan	35
2.2.1. Provinsi Papua	35
2.2.2. Provinsi Kalimantan Barat	39
2.2.3. Provinsi Jawa Timur	45
2.3. Karakteristik dan Penyebab Wilayah Rawan Pangan/Gizi Kronis serta Alternatif Kebijakan Penanggulangannya di Provinsi Papua	52

III.	KARAKTERISTIK DAN PENYEBAB RAWAN PANGAN DAN GIZI	53
3.1.	Provinsi Papua	53
3.1.1.	Karakteristik Wilayah dan Rumah Tangga	53
3.1.2.	Penyebab Rawan Pangan dan Rawan Gizi kronis	71
3.1.3.	Alternatif Kebijakan Penanggulangan Rawan Pangan dan Gizi Kronis	75
3.2.	Provinsi Kalimantan Barat	80
3.2.1.	Karakteristik Wilayah dan Rumah Tangga	80
3.2.2.	Penyebab Rawan Pangan dan Gizi Kronis	108
3.2.3.	Alternatif Penanggulangan Rawan Pangan dan Gizi Kronis	112
3.3.	Provinsi Jawa Timur	115
3.3.1.	Karakteristik Wilayah dan Rumah Tangga	115
3.3.2.	Penyebab Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis	141
3.3.3.	Alternatif Kebijakan Penanggulangan	143
3.4.	Sintesa Penyebab Rawan Pangan dan Gizi Kronis serta Alternatif Kebijakan Penanggulangannya	146
IV.	RANGKUMAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	150
4.1.	Rangkuman	150
4.2.	Implikasi Kebijakan	151
	DAFTAR PUSTAKA	153

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Jenis Indikator Penentuan Wilayah Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis.....	7
2.1. Sebaran Kabupaten dan Nilai dari Masing-masing Indikator Menurut Kuintil.....	14
2.2. Sebaran Kabupaten Menurut Indikator Rasio Konsumsi Normatif	16
2.3. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Penduduk Miskin	17
2.4. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik.....	18
2.5. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi DesaTanpa Akses Jalan	18
2.6. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Penduduk Wanita Buta Huruf	19
2.7. Sebaran Kabupaten Menurut Angka Harapan Hidup	19
2.8. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Berat Badan Balita Dibawah Standar	20
2.9. Sebaran Kabupaten Menurut Tingkat Kematian Bayi.....	20
2.10. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Rumah Tangga Tanpa Air Bersih	21
2.11. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Rumah Tangga dengan Jarak > 5 km dari Puskesmas	21
2.12. Sebaran Kabupaten Menurut Produksi Padi	22
2.13. Sebaran Kabupaten Menurut Produksi Palawija	23
2.14. Sebaran Kabupaten Menurut Produksi Perkebunan.....	23
2.15. Sebaran Kabupaten Menurut Populasi Ruminansia	24
2.16. Sebaran Kabupaten Menurut Populasi Unggas	24
2.17. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Petani Gurem.....	25

2.18.	Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Angkatan Kerja	25
2.19.	Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah	26
2.20.	Sebaran Kabupaten Menurut Pendapatan Per Kapita.....	26
2.21.	Sebaran Kabupaten Menurut Pangsa Pengeluaran Pangan Rumah Tangga.....	27
2.22.	Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Rumah Tangga Rawan Pangan	28
2.23.	Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Rumah Tangga Rentan Pangan	29
2.24.	Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Rumah Tangga Kurang Pangan	29
2.25.	Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Rumah Tangga Tahan Pangan.....	30
2.26.	Kandungan Energi Sereal per 100 gram	32
2.27.	Keragaan Indikator Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis Tingkat Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua	36
2.28.	Tingkat Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Jumlah Skor dan Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua	37
2.29.	Keragaan Indikator Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.....	40
2.30.	Tingkat Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Jumlah Skor dan Kecamatan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.....	41
2.31.	Keragaan Indikator Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis Tingkat Kecamatan di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.....	43
2.32.	Tingkat Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Jumlah Skor dan Kecamatan di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.....	44

2.33.	Keragaan Indikator Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur	46
2.34.	Tingkat Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Jumlah Skor dan Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur	47
2.35.	Keragaan Indikator Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa..	50
2.36.	Tingkat Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Jumlah Skor dan Kecamatan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur Timur	51
3.1.	Karakteristik Sumberdaya Alam di Kabupaten Jayawijaya ...	53
3.2.	Karakteristik Potensi Lahan Pertanian di Kabupaten Jayawijaya	54
3.3.	Karakteristik Sumberdaya Manusia di Kabupaten Jayawijaya	56
3.4.	Karakteristik Rumah Tangga Rawan Pangan dan Gizi Kronis Di Kabupaten Jawawijaya, 2006.....	56
3.5.	Perkembangan Peranan masing-masing Sektor terhadap Pembentukan PDRB Atas Harga Berlaku di Kabupaten Jayawijaya	57
3.6.	Laju Pertumbuhan Sektor Pembentukan PDRB atas Harga Konstan di Kabupaten Jayawijaya	58
3.7.	Pendapatan Rumah tangga Rawan Pangan dan Gizi Kronis Menurut Sumbernya di Kabupaten Jayawijaya, 2006 (%).....	59
3.8.	Karakteristik Sarana dan Prasarana di Kabupaten Jayawijaya	60
3.9.	Kondisi Kesehatan Rumah Tangga Rawan Pangan dan Gizi kronis di Kabupaten Jayawijaya, 2006	61
3.10.	Akses Rumah Tangga terhadap Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Jawawijaya, 2006 (%)	62
3.11.	Faktor Determinan Keragaman Konsumsi Pangan di Kabupaten Jayawijaya, 2006.....	67

3.12.	Jumlah Rumah Tangga yang Mengalami Kekurangan Pangan di Kabupaten Jayawijaya, 2006 (%)	68
3.13.	Pembagian Peran antara laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Jayawijaya	70
3.14.	Karakteristik Sumberdaya Alam Kabupaten Sambas dan Landak	81
3.15.	Tata Guna lahan di Kabupaten Sambas dan Landak (%)	81
3.16.	Jumlah keluarga, penduduk, dan kepadatan Penduduk di Kabupaten Sambas, Tahun 2002 – 2004	82
3.17.	Karakteristik Rumah tangga Contoh di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006	82
3.18.	Perkembangan Peranan masing-masing Sektor terhadap Pembentukan PDRB di Kabupaten Sambas, tahun 2000 – 2005 (%)	84
3.19.	Laju Pertumbuhan Sektor Pembentukan PDRB atas Harga Konstan di Kabupaten Sambas, tahun 2000-2005 (%)	85
3.20.	Proporsi Sumber Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Sambas dan Landak (%)	86
3.21.	Akses Rumahatangga terhadap Permodalan di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006	86
3.22.	Persepsi Rumah tangga terhadap Pasar tenaga Kerja di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006	87
3.23.	Akses Rumah Tangga terhadap Pasar di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006	88
3.24.	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Penerangan dan Fasilitas Air Minum di Kabupaten Sambas dan Landak (%)..	89
3.25.	Jumlah Sarana Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Sambas dan Landak, 2004	90
3.26.	Proporsi Rumah Tangga menurut Kondisi Rumah di Kabupaten Sambas dan Landak, 2004 (%)	91
3.27.	Kondisi Rumah dari Rumah Tangga di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (%)	92

3.28.	Kondisi Kesehatan Rumah Tangga Rawan Pangan di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006	93
3.29.	Akses Rumah Tangga Rawan Pangan terhadap Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sambas dan Landak (%).....	94
3.30.	Persepsi Rumah Tangga terhadap Posyandu di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (%)	95
3.31.	Akses Rumah Tangga Rawan Pangan terhadap Pendidikan di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (%).....	96
3.32.	Keragaan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Beberapa Komoditas Tanaman Pangan utama di Kabupaten Sambas dan Landak Tahun 2004	97
3.33.	Keragaan Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat serta Populasi Ternak di Kabupaten Sambas dan Landak tahun 2004	98
3.34.	Penguasaan Lahan Pertanian Rumah tangga di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (ha)	99
3.35.	Nilai Penguasaan Ternak Rumah Tangga di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (Rp).....	99
3.36.	Nilai Penguasaan Aset Rumah tangga di kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (Rp).....	100
3.37.	Pola Penyimpanan Makanan Pokok Rumah Tangga di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (%).....	102
3.38.	Situasi Konsumsi Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (%)	102
3.39.	Keragaan Zat Gizi Utama Yang Sering Dikonsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Sambas dan Landak menurut Jenis Pangan, 2006 (%)	103
3.40.	Keragaan Diversifikasi Konsumsi Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006	104
3.41.	Hasil Dugaan Parameter yang Mempengaruhi Tingkat Diversifikasi Konsumsi Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Sambas	105

3.42.	Jumlah Rumah Tangga yang Mengalami Kekurangan Pangan Setahun yang lalu di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (%)	107
3.43.	Persepsi Rumah Tangga tentang Kondisi Kelaparan di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (%).....	107
3.44.	Karakteristik Sumberdaya Alam Kabupaten Bondowoso, 2004	116
3.45.	Karakteristik Sumberdaya Alam Kabupaten Sampang, 2004	117
3.46.	Luas lahan menurut penggunaannya di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2004	118
3.47.	Kinerja Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bondowoso, 2004	120
3.48.	Potensi Sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan di Kabupaten Sampang	122
3.49.	Karakteristik Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2006.....	123
3.50.	Perkembangan Pangsa Sektor dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Bondowoso Atas Harga Konstan (%)	125
3.51.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2006 (%)	126
3.52.	Akses Rumah tangga terhadap Pasar di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2006	127
3.53.	Sarana dan Prasarana di Kabupaten Bondowoso, 2004	129
3.54.	Sarana dan Prasarana di Kabupaten Sampang, 2004	131
3.55.	Luas Panen dan Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Bondowoso, 2004	134
3.56.	Luas panen dan Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Sampang, 2004	134
3.57.	Produksi Pangan Hasil Ternak di Kabupaten Bondowoso (Kg).....	135
3.58.	Produksi Pangan Hasil Ternak di Kabupaten Sampang (kg) ..	135

3.59.	Situasi Konsumsi Pangan Rumah tangga Rawan Pangan di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2006 (%).....	136
3.60.	Skor Diversifikasi Konsumsi Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2006	138
3.61.	Faktor Determinan Keragaman Konsumsi Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan Di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2006.....	139
3.62.	Proporsi Rumah tangga yang Mengalami Kekurangan Pangan di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, Jawa Timur, 2006 (%)	140
3.63.	Persepsi Rumah tangga terhadap Kondisi Kelaparan di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2006 (%).....	141
3.64.	Penyebab Wilayah dan Rumah tangga Rawan Pangan dan Gizi Kronis	147
3.65.	Alternatif Strategi Kebijakan Penanggulangan Rawan Pangan dan Gizi Kronis	148

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Klasifikasi Kerawanan Pangan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya	38
2.2. Klasifikasi Kerawanan Pangan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sambas	42
2.3. Klasifikasi Kerawanan Pangan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Landak.....	45
2.4. Klasifikasi Kerawanan Pangan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bondowoso.....	48
2.5. Klasifikasi Kerawanan Pangan Tingkat Kecamatan di Kabupaten. Sampang.....	49

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesepakatan global berupa *Millenium Development Goals* (MDGs) yang terdiri dari 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator menegaskan bahwa tahun 2015 setiap negara diharapkan dapat menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuh dari kondisi pada tahun 1990 (Statistic Division, 2005). Di Indonesia, peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional sejak satu dasawarsa yang lalu. Hal ini selain terkait dengan komitmen Indonesia sebagai salah satu penanda tangan kesepakatan dalam MDGs juga sejalan dengan Deklarasi Roma dalam *World Food Summit* tahun 1996 yang menegaskan bahwa diharapkan dari 800 juta penduduk dunia yang kelaparan dapat dikurangi separuhnya pada tahun 2015.

Di sisi lain, kerawanan pangan dan gizi sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, mengabaikan masalah kerawanan pangan dan gizi berarti mengabaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari *Human Development Report (HDR)* tahun 2003 diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia hanya menempati urutan ke 112 dari 175 negara, merosot dari urutan ke 105 pada HDR tahun 1999 (Irawan, 2004).

Kebijakan peningkatan ketahanan pangan yang ditetapkan dalam kerangka pembangunan nasional tersebut berimplikasi bahwa pengkajian ketahanan pangan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan menjadi penting (Soetrisno, 1997). Beberapa kajian tentang ketersediaan dan konsumsi pangan menunjukkan bahwa sampai tahun 2004 ketersediaan pangan per kapita secara nasional cenderung berlebih dibandingkan tingkat konsumsi riil penduduk (Sawit dan Ariani, 1997; Ariani *et al.*, 2000; DKP, 2005). Studi Saliem *et al.* (2001) menunjukkan walaupun ketahanan pangan di tingkat regional (Provinsi) tergolong tahan pangan terjamin namun di Provinsi yang bersangkutan masih ditemukan rumah tangga yang tergolong rawan pangan dengan proporsi yang tinggi. Hasil analisis Badan Pusat Statistik (BPS) (DKP dan FAO, 2005) menemukan bahwa lebih dari setengah jumlah Kabupaten/kota di Indonesia memiliki prevalensi balita kurang gizi lebih dari 25%, sedangkan proporsi penduduk yang mengkonsumsi energi kurang dari 2100 Kalori/orang/hari sebesar 64%. Selain itu, masih ada 37,4 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar 114,8 juta penduduk (53,4% dari total penduduk) hidup di bawah garis kemiskinan Bank Dunia (US\$ 2/orang/hari).

Pada tahun 2004 muncul kembali kasus gizi buruk yang pada awalnya terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, kemudian diikuti oleh provinsi lainnya. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, secara nasional sekitar 27,5% (5 juta) anak balita

menderita gizi kurang, diantaranya 1,5 juta anak dengan status gizi buruk, dan 110 Kabupaten/kota mempunyai prevalensi balita gizi kurang (termasuk gizi buruk) diatas 30%. Menurut *World Health Organization* (WHO), prevalensi gizi buruk Indonesia termasuk dalam kategori sangat tinggi (Departemen Kesehatan, 2005).

Ketahanan pangan di suatu wilayah mempunyai sifat multi-dimensional yang ditentukan oleh berbagai faktor ekologis, sosial ekonomi dan budaya, serta melibatkan berbagai sektor. Mengacu pada karakteristik yang beragam tersebut, maka pemecahan masalah ketahanan pangan wilayah harus bersifat holistik, konsisten, terpadu, dan tepat sasaran. Namun demikian, untuk efisiensi waktu dan tenaga, perlu dicari faktor-faktor dominan untuk menentukan wilayah rawan pangan, agar masalah pangan dan gizi yang ada di wilayah tersebut dapat ditangani dengan lebih baik.

Kajian penelitian kerawanan pangan dan kerawanan gizi kronis sebetulnya sudah banyak dilakukan sejak tahun 1960-an dan program-program yang dilaksanakan terutama untuk mencegah dan menanggulangi rawan pangan juga sudah banyak. Namun demikian, program-program tersebut tampaknya tidak berkelanjutan dan tidak mampu membangkitkan potensi dalam sistem pangan lokal yang sangat mungkin untuk dapat mengatasi persoalan pangan tingkat komunitas (masyarakat).

Penetapan dan pemetaan wilayah rawan pangan sampai tingkat Kabupaten dengan menggunakan 10 indikator yang mencakup 30 provinsi di Indonesia telah dilakukan oleh DKP dan *World Food Programme* (WFP) (2005) dalam bentuk Peta Kerawanan Pangan Indonesia (PKPI). Dengan menggunakan indikator komposit, peta tersebut menunjukkan bahwa berdasar data tahun 2002, terdapat 100 Kabupaten dari 265 Kabupaten di Indonesia yang tergolong rawan pangan kronis. Sesuai dengan tujuan penyusunan peta, hasil pemetaan tersebut merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai petunjuk bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi mitigasi yang tepat untuk menangani kerawanan pangan kronis. Namun cakupan pemetaan hanya sampai tingkat Kabupaten, sehingga secara operasional hasil pemetaan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemetaan dalam skala yang lebih detail, sampai tingkat kecamatan dan atau desa. Hal ini penting agar penanggulangan wilayah rawan pangan dan rawan gizi kronis tersebut dapat ditangani secara tepat sasaran.

Untuk melakukan pemetaan wilayah sampai tingkat kecamatan/desa di 100 Kabupaten yang tergolong rawan pangan kronis tersebut memerlukan waktu, tenaga, dan dana yang sangat besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan 100 Kabupaten yang tergolong rawan pangan kronis menurut tipe wilayah dan derajat kerawanan pangan. Dengan pengelompokan tersebut, rumusan alternatif penanggulangan wilayah rawan pangan dan rawan gizi kronis, termasuk rumah tangga rawan pangan dan gizi dapat mengacu pada rumusan yang

disusun dengan menggunakan data primer dari kabupaten terpilih. Rumusan hasil analisis ini dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan, tenaga kerja dan teknologi spesifik lokasi wilayah untuk meningkatkan produksi pangan. Selain itu, diharapkan juga akan terbangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian wilayah. Seiring dengan meningkatnya ketersediaan pangan, pendapatan wilayah, serta rumah tangga rawan pangan dan gizi kronis, meningkatnya akses rumah tangga terhadap pangan dan pelayanan kesehatan diharapkan tingkat ketahanan pangan wilayah dan rumah tangga menjadi semakin mantap.

1.2. Karakteristik Rawan Pangan dan Gizi

Rawan pangan dan gizi pada dasarnya merupakan refleksi dari situasi kecukupan pangan dan gizi individu pada komunitas atau kelompok masyarakat di suatu wilayah, sebagai dampak ketidaklancaran akses terhadap pangan, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Pada tahun 2003 diperkirakan sekitar 840 juta orang di berbagai pelosok dunia mengalami kelaparan, sebagian besar diantaranya berada di Asia Selatan dan Sub Sahara (FAO, 2003). Kasus rawan pangan dan gizi banyak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, disamping faktor determinan lain.

Di Indonesia, rawan pangan dan gizi sesungguhnya bukan merupakan isu baru. Kasus rawan pangan telah dikenal sejak dekade 60-an, bahkan pada masa penjajahan Jepang. Insiden rawan pangan sudah terjadi dan dikenal dengan istilah "*hunger oedem*" (HO) atau busung lapar. Busung lapar dapat terjadi karena kondisi kekurangan pangan yang kronis dan umumnya dipicu oleh faktor kemiskinan atau bencana alam. Proses busung lapar membutuhkan waktu antara 2 hingga 6 bulan (Martianto, 2005). Dijelaskan oleh Martianto (2005) bahwa pada masa kekurangan pangan tingkat konsumsi energi biasanya hanya mencapai 50-60 % dari yang dibutuhkan, sehingga cadangan energi tubuh makin banyak terkuras dan berdampak pada berat badan yang semakin berkurang. Pada gilirannya, kemampuan dan produktivitas kerja menjadi semakin rendah. Kasus terbaru rawan pangan terjadi pada tahun 2005 lalu di Kabupaten Yahukimo, Papua.

Meskipun sering disamakan artinya, tetapi rawan gizi atau gizi kurang sebenarnya memiliki cakupan masalah yang lebih kompleks dibandingkan rawan pangan. Derajat terendah dari gizi kurang atau gizi kurang tingkat berat sering disebut sebagai gizi buruk. Gizi kurang tidak semata-mata terjadi karena faktor kelaparan dan kemiskinan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh masalah lain, seperti pola asuh, sanitasi, dan krisis sosial, politik dan ekonomi. Analisis gizi kurang lebih sering fokus pada kasus untuk anak balita karena anak balita lebih sensitif terhadap kekurangan zat gizi dibandingkan orang dewasa.

Secara spasial, wilayah Jawa dan Nusa Tenggara telah dikenal sebagai wilayah dengan prevalensi rumah tangga rawan pangan dan gizi tinggi. Oleh sebab itu, beberapa penelitian mengenai rawan pangan dan gizi terdahulu difokuskan di kedua wilayah tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Martianto (1999) di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur antara lain menunjukkan: (1) proporsi rumah tangga rawan pangan (asupan energi < 70% dari kecukupan) di Jawa Barat bervariasi antara 49,3 – 55,3%, sedangkan di NTT proporsi tersebut bervariasi antara 10,4 – 36,0%; (2) semakin baik agroekologi semakin rendah proporsi rumah tangga rawan pangan; dan (3) sekitar 35,4% rumah tangga di Jawa Barat memiliki anggota yang mengalami gizi kurang. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan rumah tangga yang memiliki anggota mengalami gizi kurang di NTT yang mencapai 74,3%.

Melalui pendekatan antropometri hasil penelitian Adi (1999) di Pasuruan menyebutkan: (1) meskipun hasil penelitian tidak menemukan kasus balita gizi buruk, tetapi sekitar 55% rumah tangga teridentifikasi memiliki balita dengan status gizi kurang hingga sedang (<80 % baku), (2) proporsi rumah tangga tidak tahan pangan mencapai 95% di daerah dengan lahan berpotensi kurang, sedangkan di daerah dengan potensi lahan baik sebesar 81%, dan (3) perbedaan agroekologi menentukan tingkat ketersediaan pangan dan proporsi rumah tangga yang tahan pangan, tetapi tidak menyebabkan perbedaan yang nyata secara statistik pada status gizi balita.

Analisis data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1996 dan 1999 oleh Martianto dan Ariani (2001) menunjukkan adanya peningkatan prevalensi penduduk kurang gizi (asupan energi < 70% dari angka kecukupan) dari 14,4% menjadi 23,2% atau meningkat dari 28,3 juta jiwa menjadi 47,8 juta jiwa dalam periode 1996-1999. Sekitar 30,7 juta penduduk kurang gizi tersebar di provinsi-provinsi di Jawa. Peningkatan prevalensi ini diduga merupakan dampak krisis ekonomi yang terjadi pada periode 1997/1998. Krisis ekonomi juga telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 37,5 juta jiwa (18,2%).

Hasil kajian Saliem *et al.* (2001) menggunakan Susenas 1999 memberikan informasi bahwa proporsi rumah tangga rawan pangan di Indonesia sebesar 30% (33% di perdesaan dan 27% di perkotaan). Provinsi yang memiliki proporsi rumah tangga rawan pangan tertinggi, adalah Jambi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Studi tentang situasi gizi pada rentang waktu yang lebih panjang dilakukan oleh Atmarita dan Fallah (2004). Hasil studi menunjukkan telah terjadi penurunan prevalensi gizi kurang pada balita sebesar 10% (dari 37,5% menjadi 27,5%) pada periode 1989-2003. Dengan berbagai intervensi yang telah dan akan dilakukan, diperkirakan pada tahun 2015 prevalensi gizi kurang akan menjadi sekitar 19,4%, dimana 5,7% diantaranya merupakan angka prevalensi gizi buruk.

Publikasi kasus busung lapar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pertengahan tahun 2005, yang kemudian diikuti dengan kasus-kasus di provinsi lain, mendorong pihak pemerintah daerah melakukan pembaruan data dan informasi status gizi, khususnya pada anak balita, di wilayah kerjanya. Laporan Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (2005) menunjukkan, jumlah kasus gizi buruk di provinsi tersebut tercatat sebanyak 12.846 anak, marasmus 419 anak, kwashiorkor 7 anak, Marasmus-Kwasiorkor 16, anak dan meninggal 34 anak. Sementara itu, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah kasus gizi buruk 1.356 anak, marasmus 510 anak, kwashiorkor 22 anak, marasmus-kwasiorkor 17 anak, dan meninggal 23 anak.

1.2.1. Identifikasi Wilayah/Rumah Tangga Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis

Identifikasi wilayah/rumah tangga rawan pangan dan gizi kronis sangat penting dilakukan untuk mendapatkan indikator yang dapat digunakan dalam melakukan tindakan intervensi untuk mengatasi wilayah atau rumah tangga dengan kategori rawan pangan. Mengidentifikasi wilayah/rumah tangga rawan pangan dan rawan gizi kronis dapat dikatakan identik dengan mengidentifikasi wilayah/rumah tangga miskin. Kedua aspek tersebut saling mempengaruhi walaupun per definisi belum tentu sama. Kelaparan yang disebabkan oleh rawan pangan kronis dapat diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat mengkonsumsi energi kurang 60% dari kebutuhan energi (standar kebutuhan fisiologis sebesar 2.200 Kalori/kap/hari).

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat memperoleh pendapatan yang rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, baik makanan maupun nonmakanan. Selain itu, masalah kerawanan pangan kronis berhubungan erat dengan kemiskinan dan mengakibatkan rendahnya konsumsi pangan dan gizi secara berkelanjutan (Radhakrishna dan Reddy, 2002). Kajian-kajian yang terkait dengan hal tersebut telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan sudut pandang yang berbeda-beda.

Identifikasi Wilayah Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah melakukan identifikasi wilayah miskin di 27 provinsi di Indonesia pada tahun 1991-1993 dengan menelaah secara komprehensif berbagai karakteristik wilayah yang diduga sebagai penyebab terjadinya wilayah miskin. Karakteristik yang diidentifikasi adalah aspek sumber daya alam, teknologi, sumber daya manusia, sarana/prasarana dan kelembagaan yang ada di suatu wilayah (PSE, 1992; PSE, 1993).

Raharto dan Romdiati (2001) mengemukakan bahwa untuk mengetahui kemiskinan tingkat wilayah dapat menggunakan Indikator ekonomi

dan sosial. Indikator ekonomi berupa akses terhadap sumber-sumber (pekerjaan berupah dan lahan pertanian), dan akses terhadap prasarana dan sarana ekonomi (transportasi umum, listrik, pasar, pelayanan finansial/bank). Sedangkan Indikator sosial berupa akses terhadap fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan (Puskesmas, air bersih) serta fasilitas informasi/komunikasi (radio/TV, kantor pos, telepon).

Sementara itu, indikator yang digunakan oleh FAO (2001) dalam Martianto dan Ariani (2001) untuk menganalisis ketahanan pangan/kerawanan pangan adalah indikator *outcome* yaitu : 1) persentase populasi yang defisit energi, 2) rata-rata ketersediaan energi untuk dikonsumsi per kapita, 3) peranan padi-padian dan umbi-umbian terhadap produk total energi yang tersedia untuk dikonsumsi, 4) umur harapan hidup pada saat lahir, 5) angka kematian bayi/anak balita, 6) prevalensi kurang energi dan protein (KEP) anak balita, dan 7) prevalensi KEP orang dewasa (*Body Mass Index*/BMI < 18,5).

Menurut Adnyana (2005) ketersediaan lahan per kapita (*land-man ratio*) juga menjadi kriteria penting untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan nasional. Indikator yang digunakan oleh Saliem *et al.* (2001), untuk pemetaan wilayah rawan pangan tingkat kabupaten dan kecamatan di Provinsi D.I.Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung berbeda antarwilayah disesuaikan dengan potensi wilayah dan ketersediaan data. Jenis indikator yang digunakan antara lain luas areal puso, penurunan profuktivitas padi 5 tahun terakhir, KEP balita, kepala keluarga (KK) miskin, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/kapita, ketersediaan padi dan palawija terhadap kebutuhan penduduk, ketersediaan pangan sumber protein nabati terhadap kebutuhannya, ketersediaan populasi ternak per kapita, dan ketersediaan produk perkebunan setara beras.

Departemen Kesehatan telah lama mempunyai program untuk mengidentifikasi dan memetakan wilayah rawan pangan dan rawan gizi yang dipilah menurut provinsi, kabupaten dan kecamatan melalui kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Indikator yang digunakan ada tiga, yaitu jumlah penduduk miskin, jumlah anak balita kurang energi dan protein (KEP), serta proporsi lahan puso tanaman padi. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun, dan sekarang telah dilakukan revitalisasi SKPG. Revitalisasi bukan pada jenis indikator yang dipakai, tetapi lebih intensif untuk memfungsikan sistem isyarat dini dan intervensi, serta pencegahan kejadian luar biasa (KLB) melalui sistem pelaporan, diseminasi informasi, dan penyediaan data gizi secara reguler seperti pemantauan status gizi untuk semua kelompok umur, pemantauan konsumsi gizi, analisis data Susenas (Departemen Kesehatan, 2005).

Badan Bimas Ketahanan Pangan (2001) juga mempunyai kegiatan yang terkait dengan penentuan dan pemetaan wilayah rawan pangan melalui kegiatan SKPG sektor pertanian. Dari kegiatan ini diharapkan tersedia peta perimbangan konsumsi pangan dan peta rawan pangan dan gizi; tersusun indikasi gejala terjadinya kerawanan pangan dan rumusan

saran kebijakan pembangunan bidang pangan. Indikator yang digunakan adalah: 1) indikator sektor pertanian, 2) indikator kesehatan dan sosial ekonomi, serta 3) indikator yang bersifat lokal spesifik. Indikator sektor pertanian dibedakan untuk daerah potensi produksi padi dan bukan padi. Jenis indikator untuk wilayah potensi padi yaitu: a) luas tanam dengan luas sasaran tanam, b) penerapan teknologi, c) luas areal kerusakan/areal puso, d) luas panen, dan e) penurunan produktivitas. Indikator kesehatan berupa prevalensi KEP, sedangkan indikator sosial ekonomi berupa jumlah keluarga miskin. Indikator spesifik lokasi berupa indikator kualitatif yang memperkuat situasi rawan pangan dengan gejala antara lain: meningkatnya kejahatan (pencurian), beralihnya pola konsumsi pangan dari pangan pokok ke pangan alternatif, banyaknya lahan pertanian yang diberakan karena keterbatasan biaya produksi, banyaknya pengiriman tenaga kerja di daerah lahan marjinal, dan meningkatnya %tase penjualan tabungan ternak.

Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan *World Food Programme/WFP* (2005) membuat peta kerawanan pangan kronis Indonesia atau *Food Insecurity Atlas (FIA)* untuk tingkat kabupaten. Peta kerawanan pangan ini merupakan peta tematik yang menggambarkan sebaran wilayah menurut tingkat kerawanan pangan di Indonesia. Jumlah indikator yang digunakan ada 10 jenis seperti pada Tabel 1.1. Selain itu, DKP dan WFP (2005) juga membuat peta kerawanan pangan transien dengan indikator yang terkait dengan aspek lingkungan alam dan iklim. Indikator yang digunakan adalah : 1) areal tak berhutan, 2) area yang terkena puso, 3) daerah yang rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor, dan 4) fluktuasi curah hujan.

Tabel 1.1. Jenis Indikator Penentuan Wilayah Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis

Dimensi Ketahanan Pangan	Jenis Indikator Penentuan Wilayah Rawan Pangan dan Rawan Gizi kronis	Satuan
Ketersediaan Pangan (<i>Food Availability</i>)	1. Kebutuhan konsumsi normatif terhadap ketersediaan sereal	%
Akses terhadap Pangan (<i>Food Access</i>)	1. Penduduk dibawah garis kemiskinan	%
	2. Rumah tangga yang tidak dapat mengakses listrik	%
	3. Infrastruktur jalan yang bisa dilalui kendaraan roda 4	%
Dimensi Penyerapan Pangan (<i>Utilization</i>)	1. Angka kematian bayi waktu lahir	%
	2. Umur harapan hidup anak usia 1 tahun	thn
	3. Anak yang kurang gizi	%
	4. Penduduk yang dapat mengakses air bersih	%
	5. Penduduk yang tinggal lebih 5 km dari Puskesmas	%
	6. Wanita buta huruf	%

Sumber : DKP dan WFP (2005)

Identifikasi Rumah Tangga Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis

Kajian ketahanan atau kerawanan pangan di Indonesia telah banyak dilakukan. Sebagai contoh pada tahun 1990, Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi (PSKPG), Lembaga Penelitian (LP), Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerja sama dengan Departemen Kesehatan melakukan penelitian analisis data ketahanan pangan secara intensif di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan unit analisis rumah tangga. Kriteria ketahanan pangan adalah tingkat kecukupan energi rata-rata per hari per unit konsumen selama satu tahun. Selanjutnya definisi rumah tangga rawan pangan adalah rumah tangga yang konsumsi energi selama setahun $\leq 70\%$ dan tidak terdapat bulan-bulan yang konsumsi energinya $\geq 70\%$ (kerawanan pangan kronis) atau rumah tangga yang konsumsi energinya $\leq 70\%$ dan terdapat bulan-bulan yang konsumsi energinya $\geq 70\%$ (rawan pangan transien).

Kajian yang dilakukan oleh Sukandar *et al.* (2001) dengan menggunakan Korelasi Spearman dapat menghasilkan indikator ketahanan pangan spesifik lokasi. Indikator untuk desa hortikultura adalah jumlah ayam dewasa yang dimiliki, luas rumah, dan daya listrik; untuk desa nelayan: luas rumah; dan untuk desa padi: luas sawah irigasi teknis, dan jumlah ayam dewasa. Selain itu, kriteria tidak tahan pangan (rawan pangan) rumah tangga yang digunakan adalah rumah tangga yang tingkat kecukupan konsumsi protein atau energi lebih kecil 75%. Departemen Kesehatan (1996) dalam Badan Bimas Ketahanan Pangan (2004) membuat klasifikasi tingkat konsumsi energi (TKE) seperti berikut: 1) defisit berat bila TKE $< 70\%$, 2) defisit tingkat sedang bila TKE 70-79%, 3) defisit tingkat ringan bila TKE 80-90%, 4) normal bila TKE 90-119%, dan 5) kelebihan/diatas angka kecukupan energi bila TKE $> 120\%$.

Aswatini, dkk (2003) melakukan kajian ketahanan pangan, kemiskinan, dan isu-isu demografi di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini indikator rumah tangga tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki persediaan pangan stabil (diukur dari persediaan makan selama jangka waktu satu musim panen sampai dengan panen berikutnya dengan frekuensi makan 3 kali atau lebih per hari) dan memiliki pengeluaran untuk protein (hewani+nabati). Batasan rumah tangga kurang pangan yang digunakan adalah rumah tangga yang memiliki persediaan pangan/makanan pokok stabil tetapi hanya mempunyai pengeluaran untuk protein hewani/nabati saja, atau memiliki persediaan pangan kurang stabil tetapi mempunyai pengeluaran untuk protein hewani+nabati. Kriteria rumah tangga tidak tahan pangan adalah rumah tangga yang dicirikan oleh: 1) persediaan pangan stabil tetapi tidak memiliki pengeluaran untuk pangan sumber protein; 2) persediaan pangan kurang stabil, hanya memiliki pengeluaran untuk protein hewani atau nabati atau tidak untuk kedua-duanya; 3) persediaan pangan tidak stabil, memiliki pengeluaran untuk pangan sumber protein; dan 4) persediaan pangan tidak stabil, hanya memiliki pengeluaran untuk protein hewani atau nabati atau tidak kedua-duanya.

Studi etnografi tentang kerawanan pangan di enam negara yang berbeda termasuk USA menggunakan indikator: 1) ketidakcukupan asupan makanan secara individu, 2) efek fisik akibat kelaparan, 3) rendahnya ketersediaan pangan rumah tangga, 4) rendahnya tingkat kecukupan zat gizi, 5) ketidakpastian tambahan pangan mendatang, 6) menurunnya pilihan dan kontrol terhadap pangan, dan 7) menurunnya kesepakatan/penerimaan sosial (FANTA, 2004). Sementara menurut tim survey pemantauan kelaparan tahun 2004, secara kuantitatif, seseorang dikatakan lapar apabila tingkat konsumsi energi lebih kecil 70%, sedangkan secara kualitatif apabila dalam dua bulan terakhir terjadi penurunan frekuensi atau porsi makan harian disertai penurunan berat badan karena alasan rendahnya pendapatan atau rendahnya ketersediaan pangan (Anonim, 2005a).

1.2.2. Karakteristik Wilayah/Rumah Tangga Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis

Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian tahun 1991-1992 (PSE, 1992; PSE, 1993) menunjukkan bahwa karakteristik wilayah miskin/rawan pangan adalah: 1) sumber daya alam: lahan kurang subur, dominan lahan kering, pendayagunaan lahan tidak optimal, dan adanya degradasi lahan, sumber daya air untuk kebutuhan pertanian relatif terbatas; 2) teknologi: adopsi teknologi rendah, ketersediaan sarana produksi terbatas, adanya serangan hama/penyakit; 3) sumber daya manusia: tingkat pendidikan rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat kesehatan masyarakat rendah, lapangan pekerjaan terbatas, adanya tradisi atau adat istiadat yang menghambat; dan 4) sarana/prasarana dan kelembagaan: daerah terisolir, modal terbatas, kelembagaan sarana produksi pertanian tidak berfungsi maksimal, pemilikan/penguasaan lahan sempit, sistem bagi hasil tidak adil dan tingkat upah yang rendah; serta terbatasnya sarana jalan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sarana untuk pemasaran hasil produksi pertanian.

Karakteristik kelompok masyarakat rawan pangan adalah sebagian besar petani/buruh tani, bertempat tinggal di perdesaan yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan ekonomi perdesaan serta belum memiliki posisi tawar yang menguntungkan (Sekretariat DKP, 2002). Sementara itu, menurut Rimbawan dan Baliwati (2002) kelompok masyarakat rawan terhadap pangan dan gizi dapat dibedakan seperti berikut: 1) lokasi/tempat tinggalnya di masyarakat disebut rawan ekologis, misalnya daerah terpencil; 2) kedudukan/posisinya di masyarakat disebut rawan sosio-ekonomis, misalnya kelompok miskin; dan 3) umur dan jenis kelamin disebut rawan biologis, misalnya bayi dan anak sekolah, wanita hamil dan menyusui, penderita penyakit dan orang yang sedang dalam penyembuhan, penderita cacat, mereka yang diasingkan dan para jompo. Selanjutnya dikatakan golongan rawan

biologis umumnya dijumpai pada kelompok miskin dan tidak memiliki lahan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saliem *et al.* (2002) menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga rawan pangan dicirikan dengan: a) umur kepala keluarga dan isteri berusia produktif, berpendidikan rendah, terdapat anak yang putus sekolah, b) penguasaan lahan pertanian dan ternak terbatas, c) tidak semua rumah tangga menyimpan pangan pokok dan walaupun menyimpan dalam jumlah yang kecil, d) rata-rata pendapatan dibawah garis kemiskinan dan sebagian besar pendapatan berasal dari sektor pertanian, dan e) pangsa pengeluaran pangan sangat dominan dimana proporsi terbesar untuk kelompok padi-padian.

Irawan dan Irawan (2005) dengan menggunakan data Susenas 2002 menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga dengan tingkat kemiskinan tinggi/rawan pangan adalah rumah tangga yang pendidikan dan produktivitas pekerjaan kepala keluarganya rendah, jumlah anggota keluarganya besar, luas lantai rumah per kapita kecil, tanpa akses air bersih untuk minum dan listrik. Selanjutnya dikatakan secara umum penduduk miskin di Indonesia bergantung pada sumber daya alam, seperti kegiatan pertanian dan pertambangan dan sebagian besar berdomisli di perdesaan.

1.2.3. Faktor-faktor Penyebab Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis

Anak balita di Indonesia banyak yang mengalami kurang gizi. Penyebab hal tersebut adalah makanan tidak seimbang dan penyakit infeksi karena persediaan pangan dan pola asuh anak tidak memadai, serta sanitasi /air bersih dan pelayanan kesehatan dasar tidak memadai (Anonim, 2000). Adanya krisis ekonomi dan kemiskinan, ketidakstabilan harga, dan kerawanan sosial menyebabkan adanya wilayah-wilayah yang mengalami kelaparan dan rendahnya kualitas makanan yang dikonsumsi oleh penduduk (Martianto dan Ariani, 2001).

Sementara itu, menurut Rimbawan dan Baliwati (2002) penyebab terjadinya rawan produksi dan cadangan pangan adalah bencana alam (banjir, longsor, kekeringan); gangguan hama/penyakit; pencemaran lingkungan; terbatasnya sarana, prasarana, teknologi dan perangsang produksi; pertambahan penduduk; lahan marginal dan konversi lahan. Selanjutnya juga dikatakan penyebab terjadinya rawan konsumsi pangan adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, adat dan kepercayaan yang terkait dengan tabu makanan. Robinson (1999) menyatakan bahwa kondisi rawan pangan (*food insecurity*) secara sederhana berarti kondisi pangan yang tidak terpenuhi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Dalam wujud nyata di masyarakat tercermin dari ketersediaan dan konsumsi pangan yang tidak memadai, harga-harga pangan yang tidak

terjangkau, gizi kurang, dan pada tingkat yang parah berupa kelaparan dan kematian.

Hardinsyah dan Martianto (2001) mengemukakan bahwa sisi gelap ketahanan pangan disebabkan beberapa titik kelemahan, yaitu: 1) ketimpangan kebijakan makro dan mikro ekonomi, 2) dengan pembangunan ekonomi dianggap urusan pangan akan beres, 3) pembangunan pertanian bias perkotaan, 4) lemahnya sinergi agribisnis dan ketahanan pangan, 5) lemahnya sistem informasi ketahanan pangan, 6) bias pembangunan pada beras, 7) degradasi nilai kepedulian sosial, dan 8) lemahnya kelompok pendukung kebijakan. Menurut FAO (2001) penyebab kerawanan pangan adalah tidak tersedianya pangan, daya beli rendah, tidak cukup pangan pada tingkat rumah tangga, distribusi makanan antaranggota rumah tangga tidak tepat. Faktor utama penyebab terjadinya status gizi kurang pada anak balita adalah rawan pangan, kondisi kesehatan dan sanitasi buruk, pola asuh dan pemberian makanan tambahan yang salah.

Sementara itu, menurut *United Nation Development Program* (UNDP) China (2001) penyebab terjadinya rawan pangan pada rumah tangga adalah sangat kompleks seperti situasi sosial politik pertanian dan petaninya, rendahnya luas lahan pertanian produktif per kapita, rendahnya produktivitas dan kesuburan lahan, anomali iklim, rendahnya teknik pertanian modern yang berdampak pada rendahnya produksi pangan, serta rendahnya daya beli rumah tangga sebagai akibat terbatasnya pendapatan dari *off farm*. AusAID (2004) menyatakan derajat kerawanan pangan dapat bervariasi menurut umur, status, jenis kelamin, pendapatan, lokasi dan etnis. Namun penyebab utamanya adalah kemiskinan.

Penyebab penurunan jumlah dan frekuensi makan adalah karena menurunnya pendapatan dan peningkatan harga pangan (Anonim, 2005a). Sementara itu, menurut Witoro (2003) penyebab utama rawan pangan di negara-negara sedang berkembang adalah lemahnya akses terhadap tanah untuk memproduksi pangan. Berbagai kasus lain, kurang pangan dan kemiskinan disebabkan oleh kebijakan perdagangan internasional dan nasional, serta berbagai bencana alam dan sosial, seperti kekeringan, banjir, perang, atau krisis ekonomi.

Orang yang mengalami rawan pangan adalah setiap orang yang berada dibawah garis kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin apabila tidak mampu mengkonsumsi energi sebesar 2100 kalori per kapita dan membeli kebutuhan dasar nonpangan seperti pakaian dan perumahan. Di Indonesia untuk membeli kebutuhan pangan minimum sebesar Rp 82.328 per bulan, sedangkan untuk kebutuhan dasar nonpangan sebesar Rp 28.957, sehingga batas garis kemiskinan sebesar Rp 111.285 per bulan per kapita. Dengan demikian seseorang yang berada dibawah garis kemiskinan termasuk rawan pangan (Anonim, 2004). Kerawanan pangan menyangkut banyak aspek, tidak terbatas pada masalah produksi saja. Kerawanan pangan kronis terus terjadi sebagai akibat kombinasi dari praktek budi daya tanaman nonpadi yang kurang baik, buruknya infrastruktur pendukung produksi dan pemasaran serta pengangguran.

Kerawanan pangan terselubung diakibatkan oleh perilaku makan atau menu yang kurang beragam (DKP dan FAO, 2005).

1.3. Tujuan dan Keluaran Penelitian

Berdasarkan justifikasi dan latar belakang permasalahan seperti diuraikan di atas, tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua kegiatan seperti berikut:

Tujuan Kegiatan I:

- 1) Mengelompokkan 100 kabupaten rawan pangan dan rawan gizi kronis di Indonesia menurut 10 indikator yang telah ditetapkan oleh DKP dan WFP.
- 2) Mengidentifikasi dan mengelompokkan 100 kabupaten menurut tipe wilayah dan derajat kerawanan pangan

Keluaran Kegiatan I :

- 1). Pengelompokan kabupaten rawan pangan dan rawan gizi kronis di Indonesia menurut 10 indikator yang telah ditetapkan oleh DKP dan WFP.
- 2). Pengelompokan kabupaten rawan pangan dan rawan gizi kronis di Indonesia menurut tipe wilayah dan derajat kerawanan pangan

Tujuan Kegiatan II :

- 1). Memetakan wilayah rawan pangan dan rawan gizi kronis sampai tingkat kecamatan di wilayah (kabupaten) penelitian.
- 2). Mengidentifikasi karakteristik dan faktor-faktor penyebab rawan pangan dan gizi kronis tingkat wilayah dan rumah tangga.
- 3). Merumuskan alternatif strategi kebijakan penanggulangan wilayah dan rumah tangga rawan pangan dan rawan gizi kronis dalam upaya menurunkan jumlah rumah tangga miskin dan kelaparan.

Keluaran Penelitian II:

- 1). Peta wilayah rawan pangan dan rawan gizi kronis sampai tingkat kecamatan di wilayah (kabupaten) penelitian.
- 2). Karakteristik wilayah dan rumah tangga rawan pangan dan rawan gizi kronis serta faktor-faktor penyebabnya.
- 3). Rumusan alternatif kebijakan penanggulangan wilayah dan rumah tangga rawan pangan dan gizi kronis.

II. PENGELOMPOKKAN DAN INDIKATOR WILAYAH RAWAH PANGAN DAN GIZI KRONIS

2.1. Pengelompokkan Wilayah Rawan Pangan dan Gizi Kronis

2.1.1. Pengelompokkan Menurut 10 Indikator

Seperti telah diuraikan terdahulu bahwa terdapat 100 kabupaten rawan pangan dan gizi kronis berdasarkan indeks komposit dari 10 indikator yaitu: (1) rasio konsumsi normatif per kapita, (2) proporsi penduduk yang dibawah garis kemiskinan, (3) proporsi rumah tangga tanpa akses listrik, (4) desa tanpa akses ke jalan, (5) proporsi perempuan buta huruf, (6) angka harapan hidup, (7) berat badan balita di bawah standar, (8) angka kematian bayi, (9) rumah tangga tanpa akses ke air bersih, dan (10) proporsi rumah tangga dengan jarak > 5 km dari puskesmas. Sesuai dengan tujuan awalnya, penyusunan Peta Kerawanan Pangan Indonesia (PKPI) atau *Food Insecurity Atlas* (FIA) telah berhasil mengidentifikasi lokasi atau titik-titik rawan pangan di seluruh wilayah Indonesia yang dapat digunakan sebagai basis bagi para pengambil keputusan dalam menyusun rencana aksi mengatasi rawan pangan secara terfokus. Namun demikian, tidak dapat ditutupi bahwa dalam peta tersebut masih mengandung kelemahan yang dapat mengundang perdebatan.

Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah mencoba mengelaborasi hasil pemilihan kabupaten rawan pangan (100 kabupaten) dalam pengelompokan berdasarkan masing-masing indikator dari 10 indikator yang digunakan untuk menyusun peta tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui posisi relatif masing-masing kabupaten dalam setiap indikator karena dalam PKPI fokus bahasan lebih pada pembentukan indeks komposit. Sosialisasi hasil PKPI yang hanya merujuk pada indeks komposit dan cenderung tidak memberikan penjelasan lain yang memadai mengenai kinerja kabupaten berdasar evaluasi indikator-indikator operasional secara individu tak pelak menuai protes dan kritik dari beberapa daerah yang menurut hasil PKPI tergolong rawan.

Pengelompokkan kabupaten 100 rawan pangan menurut ranking indeks komposit disajikan pada Tabel 2.1. Pada tabel tersebut, ranking kabupaten sesuai indeks komposit dibagi dalam 5 kelompok kuintil (*quintil*) secara berurutan dari derajat paling rawan (Kabupaten Jayawijaya) hingga derajat rawan yang paling ringan (Kabupaten Bungo). Derajat paling rawan pada kuintil 1 dan seterusnya sampai derajat paling ringan pada kuintil V. Oleh karena pembagian kelompok menurut kuintil mencerminkan urutan sistematis, seharusnya nilai-nilai indikator secara individu dari masing-masing kelompok kuintil juga mencerminkan urutan atau selang urutan yang sistematis pula.

Akan tetapi, berdasarkan pada Tabel 2.1, tidak ada satupun indikator yang secara konsisten menghasilkan tata urutan seperti yang

diharapkan. Dari kuintil I hingga kuintil V tidak ditemukan adanya pola linear yang konsisten dari nilai-nilai indikator kerawanan pangan. Sebagai contoh pada indikator rasio kecukupan konsumsi normatif, nilai maksimum yang terdapat pada kuintil I jauh lebih tinggi dibandingkan nilai maksimum kuintil V. Padahal kuintil I merupakan kelompok 20 kabupaten dengan ranking terendah dalam indeks komposit yang dianggap memiliki derajat rawan terparah.

Dari 10 indikator, terdapat 2 indikator yang memiliki nilai maksimum terlihat berubah linear dengan perubahan kuintil, yaitu indikator proporsi rumah tangga tanpa akses listrik dan indikator proporsi perempuan buta huruf. Namun demikian, pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai minimum dari kedua indikator tidak menunjukkan pola perubahan linear yang konsisten. Dari situasi di atas dapat disimpulkan bahwa pengelompokan kabupaten-kabupaten rawan pangan dalam kuintil berdasarkan 10 indikator tidak menunjukkan pola sebaran nilai yang unik (khas). Artinya, penggunaan 10 indikator tidak dapat menunjukkan status rawan pangan yang mutlak (absolut) untuk setiap kabupaten.

Implikasi dari hal tersebut, pemasyarakatan penggunaan PKPI perlu disertai penjelasan memadai mengenai status rawan pangan yang dimaksud dalam peta tersebut. Hal ini penting untuk menghindari kesan menghakimi daerah-daerah yang berada pada derajat rawan pangan yang parah (daerah merah). Idealnya, hasil pemetaan rawan pangan seperti itu dapat menjadi cermin dan bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan dan program terkait penanggulangan rawan pangan. Selain faktor ketepatan pemilihan indikator, situasi tersebut diduga juga dipengaruhi oleh tingkat validitas data yang digunakan sebagai input dalam menyusun indeks dari masing-masing indikator kerawanan pangan.

Salah satu manfaat dari penyusunan peta kerawanan pangan adalah diketahuinya posisi relatif masing-masing kabupaten dalam setiap kriteria indikator yang digunakan. Dari sisi penyusunan rencana aksi atau program penanggulangan rawan pangan, informasi posisi tersebut penting dalam memberikan petunjuk kepada pengambil keputusan mengenai arah atau fokus kebijakan dan program yang penting dan perlu segera dilaksanakan. Posisi relatif masing-masing kabupaten rawan pangan pada setiap indikator kerawanan pangan dapat disimak pada Tabel 2.2 hingga Tabel 2.11.

Seperti dilakukan pada Tabel 2.1, penyusunan Tabel 2.2 hingga Tabel 2.11 juga dilakukan dengan cara mengelompokkan kabupaten dalam kuintil sesuai urutan nilai kabupaten pada setiap indikator. Akan tetapi, pembagian kuintil dalam subbab ini tidak dapat dilakukan tepat dengan memisahkan masing-masing 20 kabupaten untuk setiap kuintil karena dalam salah satu indikator (indikator angka harapan hidup), kabupaten yang berada pada batas kuintil berbeda memiliki nilai yang sama. Dalam hal demikian, maka batas kuintil digeser hingga mendapat-

kan nilai awal kuintil yang berbeda dari nilai akhir kuintil sebelumnya. Urutan ke kanan nama kabupaten dalam setiap kuintil menunjukkan posisi ranking kabupaten dengan nilai indikator yang lebih baik.

Dari ke-10 tabel (Tabel 2.2-Tabel 2.11) dapat disimak bahwa, meski suatu kabupaten telah tergolong daerah dengan derajat kerawanan pangan tinggi (sesuai Tabel 2.1) tetapi sebenarnya tidak seluruh indikator dari kabupaten tersebut bernilai buruk (merah). Sebagai contoh, menurut indeks komposit, Kabupaten Jayawijaya adalah Kabupaten yang menempati ranking pertama dengan derajat kerawanan paling tinggi di Indonesia. Akan tetapi dari rincian Tabel 2.2 hingga Tabel 2.11, “bobot” faktor terbesar yang menyebabkan Kabupaten Jayawijaya berada pada posisi tersebut adalah karena tingginya proporsi wanita buta huruf, diikuti proporsi desa tanpa akses listrik dan akses ke jalan. Di sisi lain, nilai indikator angka harapan hidup dan tingkat kematian bayi relatif tinggi karena berada pada kuintil III. Bahkan untuk indikator berat badan balita di bawah standar Kabupaten ini berada pada kuintil V atau kelompok 20 persen Kabupaten terbaik.

Tabel 2.2. Sebaran Kabupaten Menurut Indikator Rasio Konsumsi Normatif

Rasio Konsumsi Normatif (kg/kap)	Kabupaten
≥ 1.0	Sorong, Muna, Sikka, Muara Enim, Kupang, Ende, Yapen Waropen, Rokan Hulu, Sumba Barat, Banggai Kepulauan, Maluku Tengah, Bungo, Serang, Indragiri Hulu, Kep. Mentawai, Maluku Tenggara, Biak Numfor, Fak-fak, Mimika, Belitung
0.69-0.99	Lampung Barat, Belu, Lombok Timur, Lembata, Lahat, Lombok Barat, Maluku Utara, Morowali, Tanjung Jabung Barat, Aceh Singkil, Nias, Paniai, Jayapura, Merauke, Flores Timur, Selayar, Alor, Buol, Maluku Tenggara Barat, Kuantan Sengingi
0.47-0.68	Lombok Tengah, Toli-toli, Aceh Selatan, Manggarai, Timor Tengah Utara, Simeulue, Poso, Gorontalo, Brebes, Pontianak, Indragiri Hilir, Sanggau, Nabire, Lebak, Sintang, Musi Rawas, Rokan Hilir, Ketapang, Kapuas Hulu, Manokwari
0.29-0.46	Pasaman, Sumbawa, Bengkayang, Pamekasan, Dompu, Sarolangun, Donggala, Sumba Timur, Sawahlunto/Sijunjung, Polmas, Musi Banyuasin, Barito Kuala, Tapanuli Selatan, Ogan Komering Ilir, Mandailing Natal, Bengkulu Selatan, Sambas, Bima, Tapanuli Tengah, Timor Tengah Selatan
< 0.28	Bondowoso, Tulang bawang, Sampang, Aceh Barat, Hulu Sungai Utara, Buru, Sumenep, Probolinggo, Situbondo, Puncak Jaya, Bangkalan, Landak, Jember, Way Kanan, Jeneponto, Jayawijaya, Majene, Hulu Sungai Tengah, Lampung Utara, Boalemo

Sumber: DKP dan WFP, 2005

Dari ilustrasi tentang Kabupaten Jayawijaya di atas dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: (1) kebijakan dan program penanggulangan rawan pangan di masa mendatang seharusnya difokuskan pada aspek-aspek atau indikator yang membuat posisi kabupaten berada pada kuintil terendah atau kuintil I, (2) dengan memperhatikan ketiga indikator dengan nilai terendah yang membuat posisi kabupaten tersebut berada pada urutan terparah, tampaknya dalam pembuatan peta seperti PKPI perlu dibuat batasan yang jelas mengenai rawan pangan. Apabila seluruh indikator ingin dipertahankan, tampaknya akan lebih adil bila dalam penggunaan indikator diberi *rating* (bobot) sehingga bias dalam penetapan prioritas dan target program penanggulangan rawan pangan dapat dihindari atau diminimumkan.

Tabel 2.3. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Penduduk Miskin

Penduduk miskin (%)	Kabupaten
> 34.8	Puncak Jaya, Manokwari, Paniai, Jayawijaya, Nabire, Maluku Tenggara Barat, Sumba Barat, Yapen Waropen, Biak Numfor, Sumba Timur, Sampang, Fak-fak, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Timor Tengah Selatan, Musi Banyuasin, Aceh Barat, Musi Rawas, Kupang, Simeulue
29.6-34.8	Bengkulu Selatan, Gorontalo, Pamekasan, Lampung Utara, Lembata, Manggarai, Lombok Barat, Mimika, Buru, Boalemo, Bangkalan, Nias, Poso, Brebes, Tapanuli Tengah, Polmas, Way Kanan, Lahat, Timor Tengah Utara, Jayapura
24.9-29.5	Sorong, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Sumenep, Banggai Kepulauan, Morowali, Rokan Hulu, Majene, Lombok Tengah, Buol, Lombok Timur, Dompu, Landak, Sumbawa, Kuantan Sengingi, Bondowoso, Probolinggo, Muna
18.6-24.8	Tapanuli Selatan, Bima, Muara Enim, Jenepono, Toli-toli, Mandailing Natal, Donggala, Selayar, Ogan Komering Ilir Ende, Lampung Barat, Belu, Situbondo, Sikka, Sorolangun, Jember, Kep. Mentawai, Indragiri Hulu, Sintang, Indragiri Hilir
< 18.6	Ketapang, Tanjung Jabung Barat, Maluku Utara, Bengkayang, Tulang Bawang, Kapuas Hulu, Flores Timur, Sawah Lunto/Sijunjung, Sambas, Pasaman, Pasaman, Lebak, Belitung, Bungo, Hulu Sungat Tengah, Hulu Sungai Utara, Sanggau, Rokan Hilir, Pontianak, Serang, Barito Kuala

Sumber: DKP dan WFP, 2005

Tabel 2.4. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik

Proporsi RT tanpa listrik (%)	Kabupaten
>= 62.8	Puncak Jaya, Paniai, Jayawijaya, Sumba Barat, Nabire, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Way Kanan, Belu, Tulang Bawang, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, Lampung Barat, Yapen Waropen, Landak, Kep. Mentawai, Alor, Sorong, Fak-Fak, Lembata
47.0-62.7	Kupang, Merauke, Banggai Kepulauan, Sikka, Sarolangun, Indragiri Hilir, Buru, Morowali, Buol, Manokwari, Maluku Utara, Mandailing Natal, Muna, Sintang, Boalemo, Maluku Tenggara Barat, Gorontalo, Lampung Utara, Polmas, Simeulue
46.9-38.0	Bungo, Bengkulu Selatan, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Indragiri Hulu, Maluku Tenggara, Nias, Musi Banyuasin, Tanjung Jabung Barat, Poso, Selayar, Biak Numfor, Flores Timur, Sanggau, Pasaman, Aceh Barat, Ketapang, Kuantan Sengingi, Rokan Hulu, Ende
24.2-37.9	Dompu, Donggala, Toli-Toli, Lombok Timur, Jayapura, Aceh Singkil, Rokan Hilir, Majene, Kapuas Hulu, Sawah Lunto/Sijunjung, Maluku Tengah, Bengkayang, Jeneponto, Lahat, Lebak, Tapanuli Tengah, Hulu Sungai Utara, Lombok Barat, Muara Enim, Bima
< 24.2	Tapanuli Selatan, Lombok Tengah, Sumenep, Mimika, Hulu Sungai Tengah, Sampang, Pontianak, Bangkalan, Belitung, Barito Kuala, Aceh Selatan, Sambas, Sumbawa, Bondowoso, Probolinggo, Serang, Jember, Brebes, Situbondo, Pamekasan

Sumber: DKP dan WFP, 2005

Tabel 2.5. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Desa Tanpa Akses Jalan

Proporsi desa tanpa akses jalan (%)	Kabupaten
>= 32.4	Puncak Jaya, Paniai, Jayawijaya, Maluku Tenggara Barat, Nabire, Sorong, Manokwari, Kep. Mentawai, Tanjung Jabung Barat, Nias, Mimika, Indragiri Hilir, Simeulue, Landak, Polmas, Alor, Manggarai, Sanggau, Merauke, Barito Kuala
15.2-28.2	Maluku Tengah, Kapuas Hulu, Bengkayang, Lembata, Jayapura, Musi Banyuasin, Timor Tengah Selatan, Sambas, Sikka, Ogan Komering Ilir, Pontianak, Tapanuli Selatan, Maluku Tenggara, Ende, Sintang, Fak-Fak, Donggala, Rokan Hilir, Lampung Barat, Hulu Sungai Utara
9.0-15.1	Sumba Barat, Sarolangun, Maluku Utara, Lebak, Tapanuli Tengah, Sumba Timur, Morowali, Buru, Aceh Barat, Ketapang, Flores Timur, Indragiri Hulu, Mandailing Natal, Rokan Hulu, Aceh Singkil, Sampang, Tulang Bawang, Selayar, Buol, Yapen Waropen
3.6-8.9	Kuantan Sengingi, Majene, Poso, Kupang, Belu, Sawahlunto/Sijunjung, Bungo, Pamekasan, Hulu Sungai Tengah, Way Kanan, Banggai Kepulauan, Musi Rawas, Biak Numfor, Timor Tengah Utara, Bengkulu Selatan, Probolinggo, Pasaman, Gorontalo, Sumenep, Jeneponto
< 3.6	Muara Enim, Sumbawa, Belitung, Lahat, Toli-toli, Aceh Selatan, Serang, Muna, Bima, Situbondo, Lombok Tengah, Bangkalan, Lampung Utara, Boalemo, Brebes, Lombok Barat, Jember, Bondowoso, Lombok Timur, Dompu

Sumber: DKP dan WFP, 2005

Tabel 2.6. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Penduduk Wanita Buta Huruf

Proporsi wanita buta huruf (%)	Kabupaten
>= 25.5	Jayawijaya, Manokwari, Yapen Waropen, Sampang, Bondowoso, Situbondo, Lombok Tengah, Sumenep, Paniai, Jeneponto, Bangkalan, Lombok Barat, Probolinggo, Pamekasan, Sumba Barat, Jember, Lombok Timur, Nabire, Brebes, Dompu
18.4-25.4	Timor Tengah Selatan, Fak-Fak, Muna, Nias, Merauke, Belu, Timor Tengah Utara, Polmas, Sanggau, Sumbatimur, Bengkayang, Sintang, Bima, Kupang, Kapuas Hulu, Buru, Mimika, Flores Timur, Pontianak, Landak
11.3-18.3	Selayar, Jayapura, Manggarai, Sawahlunto/Sijunjung, Sumbawa, Sambas, Sorong, Sikka, Puncak Jaya, Ketapang, Sarolangun, Ende, Serang, Barito Kuala, Lebak, Musi Rawas, Lembata, Musi Banyuasin, Donggala, Kep. Mentawai
6.9-11.2	Tulang Bawang, Majene, Biak Numfor, Alor, Banggai Kepulauan, Muara Enim, Bengkulu Selatan, Hulu Sungai Utara, Ogan Komering Ilir, Bungo, Lampung Barat, Belitung, Way Kanan, Aceh Barat, Pasaman, Tapanuli Tengah, Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Hulu Sungai Tengah
< 6.9	Rokan Hulu, Morowali, Tanjung Jabung Barat, Boalemo, Toli-Toli, Lahat, Indragiri Hulu, Lampung Utara, Maluku Utara, Gorontalo, Mandailing Natal, Rokan Hilir, Buol, Maluku Tengah, Poso, Maluku Tenggara, Indragiri Hilir, Kuantan Sengingi, Maluku Tenggara Barat, Tapanuli Selatan

Sumber: DKP dan WFP, 2005

Tabel 2.7. Sebaran Kabupaten Menurut Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (th)	Kabupaten
<= 61.5	Sampang, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sambas, Sumbawa, Bima, Bondowoso, Barito Kuala, Merauke, Probolinggo, Sumba Timur, Dompu, Jember, Banggai Kepulauan, Maluku Tenggara Barat, Sumenep, Hulu Sungai Tengah, Bangkalan, Situbondo, Poso, Toli toli
61.6 – 63.1	Pamekasan, Musi Rawas, Donggala, Lebak, Mandailing Natal, Pasaman, Simeulue, Sawahlunto/ Sijunjung, Majene, Sumba Barat, Buol, Aceh Singkil, Maluku Utara, Ogan Komering Ilir, Alor, Sikka, Polmas, Yapen Waropen
63.2 – 64.9	Rokan Hulu, Landak, Belu, Morowali, Lahat, Lampung Barat, Serang, Bengkulu Selatan, Kupang, Jeneponto, Maluku Tengah, Muara Enim, Brebes, Muna, Biak Numfor, Aceh Selatan, Tulang Bawang, Jayawijaya, Sorong, Manggarai, Hulu Sungai Utara
65.0 – 66.1	Indragiri Hulu, Flores Timur, Ende, Tapanuli Selatan, Kuantan Sengingi, Ketapang, Kapuas Hulu, Lampung Utara, Timor Tengah Utara, Buru, Tapanuli Tengah, Bungo, Timor Tengah Selatan, Jayapura, Gorontalo, Rokan Hilir, Lembata, Pontianak, Boalemo, Nabire
> 66.1	Way Kanan, Sanggau, Manokwari, Paniai, Puncak Jaya, Selayar, Tanjung Jabung Barat, Sintang, Maluku Tenggara, Nias, Belitung, Musi Banyuasin, Kep. Mentawai, Bengkayang, Indragiri Hilir, Mimika, Aceh Barat, Fak-Fak, Sarolangun

Sumber: DKP dan WFP, 2005

Tabel 2.8. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Berat Badan Balita Dibawah Standar

Proporsi berat balita di bawah standar (%)	Kabupaten
>= 39.8	Nias, Rokan Hilir, Simeulue, Aceh Barat, Bangkalan, Pamekasan, Timor Tengah Selatan, Boalemo, Belu, Landak, Timor Tengah Utara, Lampung Utara, Dompu, Kupang, Lombok Barat, Hulu Sungai Tengah, Sumba Barat, Kapuas Hulu, Gorontalo, Sikka
34.9 – 39.7	Tulang Bawang, Tapanuli Tengah, Ketapang, Lombok Timur, Manggarai, Sumbawa, Sumenep, Probolinggo, Lembata, Alor, Buol, Brebes, Sampang, Ogan Komering Ilir, Bima, Toli Toli, Flores Timur, Polmas, Bondowoso, Barito Kuala
29.6 – 34.8	Pontianak, Sumba Timur, Lombok Tengah, Bengkayang, Indragiri Hulu, Selayar, Hulu Sungai Utara, Sarolangun, Sintang, Tanjung Jabung Barat, Way Kanan, Jeneponto, Majene, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Pasaman, Mandailing Natal, Jember, Rokan Hulu, Sawahlunto/ Sijunjung
25.9 – 29.5	Banggai Kepulauan, Buru, Poso, Maluku Utara, Sambas, Situbondo, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Sanggau, Tapanuli Selatan, Morowali, Sorong, Musi Rawas, Ende, Donggala, Musi Banyuasin, Muara Enin, Muna, Bengkulu Selatan
< 25.9	Yapen Waropen, Bungo, Maluku Tengah, Lahat, Serang, Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Fak-Fak, Manokwari, Biak Numfor, Mimika, Indragiri Hilir, Lampung Barat, Kuantan Sengingi, Belitung, Maluku Tenggara Barat, Lebak, Maluku Tenggara, Kep.Mentawai

Sumber: DKP dan WFP, 2005

Tabel 2.9. Sebaran Kabupaten Menurut Tingkat Kematian Bayi

Tingkat kematian bayi (%)	Kabupaten
>= 63.8	Sampang, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sambas, Sumbawa, Bima, Bondowoso, Merauke, Probolinggo, Banggai Kepulauan, Sumba Timur, Dompu, Jember, Barito Kuala, Sawahlunto/ Sijunjung, Maluku Tenggara Barat, Sumenep, Landak, Bangkalan
56.7 – 63.7	Poso, Situbondo, Toli-toli, Pamekasan, Musi Rawas, Donggala, Hulu Sungai Tengah, Mandailing Natal, Pasaman, Simeulue, Lebak, Majene, Sumba Barat, Buol, Aceh Singkil, Polmas, Maluku Utara, Yapen Waropen, Ogan Komering Ilir, Alor
49.2 – 56.6	Sikka, Rokan Hulu, Belu, Jeneponto, Morowali, Lampung Barat, Lahat, Biak Numfor, Maluku Tengah, Serang, Jayawijaya, Bengkulu Selatan, Kupang, Muara Enim, Brebes, Muna, Aceh Selatan, Tulang Bawang, Pontianak, Sorong
44.0 – 49.1	Manggarai, Timor Tengah Utara, Indragiri Hulu, Ende, Kuantan Sengingi, Tapanuli Selatan, Ketapang, Kapuas Hulu, Hulu Sungai Utara, Lampung Utara, Buru, Tapanuli Tengah, Timor Tengah Selatan, Jayapura, Bungo, Flores Timur, Gorontalo, Manokwari, Selayar, Rokan Hilir, Boalemo
< 43.9	Lembata, Puncak Jaya, Nabire, Paniai, Sanggau, Way Kanan, Sintang, Tanjung Jabung Barat, Maluku Tenggara, Nias, Musi Banyuasin, Kep.Mentawai, Bengkayang, Belitung, Aceh Barat, Indragiri Hilir, Mimika, Fak-fak, Sarolangun

Sumber: DKP dan WFP, 2005

Tabel 2.10. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Rumah Tangga Tanpa Air Bersih

Proporsi RT tanpa air bersih (%)	Kabupaten
>= 70.9	Paniai, Pontianak, Indragiri Hilir, Sambas, Nabire, Kep. Mentawai, Sintang, Sorong, Puncak Jaya, Jayawijaya, Landak, Selayar, Merauke, Sanggau, Ketapang, Yapen Waropen, Jayapura, Rokan Hulu, Mandailing Natal, Aceh Singkil
59.9 – 70.8	Way Kanan, Bengkayang, Manokwari, Aceh Selatan, Aceh Barat, Biak Numfor, Lebak, Fak-Fak, Ogan Komering Ilir, Donggala, Indragiri Hulu, Muara Enim, Rokan Hilir, Jeneponto, Kuantan Sengingi, Lampung Barat, Maluku Utara, Kapuas Hulu, Buru, Tapanuli Tengah
52.5 – 59.8	Buol, Musi Banyuasin, Lahat, Sumba Barat, Situbondo, Bondowoso, Tanjung Jabung Barat, Tapanuli Selatan, Polmas, Toli-Toli, Mimika, Bengkulu Selatan, Brebes, Musi Rawas, Majene, Belitung, Lembata, Manggarai, Flores Timur, Hulu Sungai Tengah
42.0 – 52.4	Morowali, Barito Kuala, Maluku Tenggara, Serang, Lampung Utara, Tulang Bawang, Timor Tengah Selatan, Bungo, Simeulue, Maluku Tenggara Barat, Poso, Sikka, Sawahlunto/ Sijunjung, Jember, Alor, Muna, Hulu Sungai Utara, Probolinggo, Belu, Nias
< 42.0	Boalemo, Sumenep, Pasaman, Sarolangun, Gorontalo, Maluku Tengah, Banggai Kepulauan, Pamekasan, Kupang, Timor Tengah Utara, Lombok Barat, Sampang, Bangkalan, Bima, Sumba Timur, Lombok Timur, Ende, Dompu, Lombok Tengah, Sumbawa

Sumber: DKP dan WFP, 2005

Tabel 2.11. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Rumah Tangga dengan Jarak > 5 km dari Puskesmas

Proporsi RT > 5 km dari puskesmas (%)	Kabupaten
>= 51.3	Way Kanan, Kapuas Hulu, Sintang, Banggai Kepulauan, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Kuantan Sengingi, Sanggau, Landak, Morowali, Simeulue, Aceh Barat, Tulang Bawang, Sumba Barat, Musi Rawas, Lebak, Tapanuli Selatan, Bangkalan, Maluku Utara, Sambas
42.0 – 51.2	Ketapang, Lampung Barat, Mandailing Natal, Manggarai, Buol, Selayar, Lampung Utara, Pasaman, Nias, Sampang, Sawahlunto/ Sijunjung, Musi Banyuasin, Lahat, Jayawijaya, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Majene, Belitung, Ende, Lombok Barat, Bengkayang
35.6 – 41.9	Boalemo, Flores Timur, Merauke, Rokan Hulu, Muna, Rokan Hilir, Gorontalo, Manokwari, Bondowoso, Donggala, Sumba Timur, Toli-toli, Yapen Waropen, Situbondo, Poso, Fak-Fak, Mimika, Nabire, Paniai, Puncak Jaya
29.3 – 35.5	Sumenep, Lembata, Jeneponto, Alor, Pontianak, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Hulu Sungai Tengah, Muara Enim, Bima, Sorong, Jayapura, Biak Numfor, Ogan Komering Ilir, Kupang, Maluku Tenggara Barat, Kep. Mentawai, Sikka, Tapanuli Tengah
< 29.3	Probolinggo, Jember, Pamekasan, Maluku Tenggara, Hulu Sungai Utara, Lombok Tengah, Sarolangun, Lombok Timur, Bengkulu Selatan, Timor Tengah Selatan, Maluku Tengah, Brebes, Belu, Buru, Timor Tengah Utara, Barito Kuala, Serang, Sumbawa, Dompu, Polmas

Sumber: DKP dan WFP, 2005

2.1.2. Pengelompokkan Menurut Tipe Wilayah

Terdapat 10 indikator tipe wilayah yang dapat dikumpulkan untuk menambah informasi karakteristik 100 kabupaten rawan pangan dan gizi kronis. Indikator tersebut berkaitan dengan aspek pertanian dan ketersediaan pangan dalam arti luas serta aspek pendapatan. Adapun keragaan dari masing-masing indikator tipe wilayah disajikan pada Tabel 2.12 sampai Tabel 2.21. Dengan adanya data ini menepis anggapan bahwa indikator yang digunakan untuk pembuatan peta sangat terbatas sesuai ketersediaan data, tanpa memperhatikan apakah indikator tersebut sesuai dan memiliki pengaruh langsung terhadap kerawanan pangan dan gizi kronis atau tidak.

Seperti pada analisis sebelumnya, data tipe wilayah ini juga dilakukan pengelompokkan menjadi lima kuintil. Kuintil I adalah nilai yang menunjukkan derajat kerawanan pangan terberat sampai pada kuintil V yang berarti derajatnya paling ringan. Indikator tipe wilayah yang muncul berdasarkan kuintil I di Kabupaten Jayawijaya adalah: produksi padi, populasi ruminansia dan unggas, serta pendapatan penduduk per kapita. Sementara di Kabupaten Sambas adalah produksi palawija dan populasi ruminansia, sedangkan Kabupaten Landak hanya populasi ruminansia. Di Kabupaten Sampang adalah populasi perkebunan dan anak tidak sekolah, sedangkan di Kabupaten Bondowoso hanya proporsi petani gurem.

Tabel 2.12. Sebaran Kabupaten Menurut Produksi Padi

Produksi padi (ton/kap)	Kabupaten
< 0.058	Maluku Utara, Fak-Fak, Biak Numfor, Paniai, Puncak Jaya, Maltenggara, Mimika, Yapen Waropen, Jayawijaya, Banggai Kep, Belitung, Nabire, Kepulauan Mentawai, Mal Tenggara Barat, Jayapura, Indragiri Hulu, Timor Tengah Selatan, Maluku Tengah, Muna, Selayar
0.058-0.167	Sorong, Alor, Ende, Majene, Boalemo, Manokwari, Lembata, Sikka, Flores, Timur, Buru, Kupang, Sumenep, Pamekasan, Buol, Rokan Hulu, Bungo, Kuantan Sengingi, Nias, Sarolangun, Sampang
0.168-0.272	Sintang, Sanggau, Morowali, Sumba Barat, Sumba Timur, Gorontalo, Muara Emin, Bangkalan, Lampung Utara, Serang, Probolinggo, Lombok Barat, Lombok Timur, Brebes, Tanjung Jabung Barat, Merauke, Lampung Barat, Jeneponto, Situbondo, Pontianak
0.273-0.403	Lahat, Ketapang, Hulu Sungai Utara, Sawahlunto/Sijunjung, Bengkayang, Jember, Rokan Hilir, Kapuas Hulu, Tapanuli Tengah, Musi Banyuasin, Poso, Toli-toli, Lebak, Way Kanan, Aceh Selatan, Simelue, Aceh Singkil, Manggarai, Tulang Bawang, Mandailing Natal
> 0.403	Musi Rawas, Lombok Tengah, Polewali Mamasa, Bengkulu Selatan, Sambas, Donggala, Bima, Hulu Sungai Tengah, Pasaman, Belu, Ogan Komering Ilir, Landak, Aceh Barat, Tapanuli Selatan, Dompu, Sumbawa, Indragiri Hilir, Timor Tengah Utara, Barito Kuala, Bondowoso

Sumber : Provinsi dalam Angka, 2004

Tabel 2.13. Sebaran Kabupaten Menurut Produksi Palawija

Produksi Palawija (ton/kap)	Kabupaten
< 0.028	Maluku Utara, Fak-Fak, Biak Numfor, Simelue, Sambas, Tanjung Jabung Barat, Manokwari, Sorong, Barito Kuala, Rokan Hilir, Hulu Sungai Utara, Muara Enim, Mimika, Belitung, Indragiri Hulu, Tapanuli Tengah, Kuantan Sengingi, Ketapang, Maluku Tenggara, Lahat
0.028-0.053	Musi Rawas, Toli-toli, Morowali, Aceh Barat, Sarolangun, Aceh Selatan, Hulu Sungai Tengah, Lampung Barat, Kepulauan Mentawai, Bengkulu Selatan, Buol, Rokan Hulu, Lombok Timur, Polewali Mamasa, Nias, Mandailing Natal, Indragiri Hilir, Serang, Puncak Jaya, Tapanuli Selatan
0.054-0.125	Sanggau, Lombok Tengah, Lebak, Kapuas Hulu, Banggai Kep, Pontianak, Yapen Waropen, Brebes, Merauke, Bungo, Sintang, Nabire, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyu Asin, Sawahlunto/ Sijunjung, Paniai, Dompu, Majene, Jayapura
0.126-0.390	Poso, Donggala, Ogan Komering Ilir, Maluku Tenggara Barat, Aceh Singkil, Sumbawa, Gorontalo, Pasaman, Bima, Pamekasan, Sumba Timur, Boalemo, Situbondo, Buru, Bangkalan, Landak, Jember, Selayar, Muna, Flores Timur
> 0.390	Bengkayang, Sikka, Ende, Kupang, Probolinggo, Alor, Sumba Barat, Sampang, Sumenep, Belu, Lembata, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Manggarai, Jeneponto, Jayawijaya, Way Kanan, Lampung Utara, Bondowoso, Tulang Bawang

Sumber : Provinsi dalam Angka, 2004

Tabel 2.14. Sebaran Kabupaten Menurut Produksi Perkebunan

Produksi Perkebunan (ton/kap)	Kabupaten
< 0.0071	Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Bungo, Belitung, Serang, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Maluku Utara, Puncak Jaya, Mimika, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Brebes, Sampang, Dompu, Fak-Fak, Alor, Bima, Sumba Barat
0.0071-0.0191	Sumbawa, Bangkalan, Jember, Nabire, Merauke, Manokwari, Lombok Timur, Sumba Timur, Pamekasan, Sorong, Jayawijaya, Kupang, Jayapura, Lebak, Lombok Tengah, Manggarai, Jeneponto, Situbondo, Muna, Probolinggo
0.0192- 0.0465	Sikka, Yapen Waropen, Paniai, Biak Numfor, Lembata, Belu, Aceh Selatan, Pasaman, Morowali, Lombok Barat, Bondowoso, Ketapang, Lampung Utara, Rokan Hilir, Ende, Sumenep, Maluku Tengah, Boalemo, Tulang Bawang, Flores Timur
0.0466- 0.1070	Gorontalo, Sawahlunto/ Sijunjung, Sintang, Ogan Komering Ilir, Bengkulu Selatan, Kapuas Hulu, Tapanuli Tengah, Maluku Tenggara Barat, Sanggau, Maluku Tenggara, Tapanuli Selatan, Pontianak, Simelue, Donggala, Buru, Mandailing Natal, Majene, Nias, Kepulauan Mentawai, Landak
> 0.1070	Rokan Hulu, Banggai Kep, Bengkayang, Polewali Mamasa, Lahat, Toli Toli, Sambas, Buol, Way Kanan, Lampung Barat, Muara Enim, Poso, Musi Banyu Asin, Aceh Barat, Selayar, Indragiri Hulu, Aceh Singkil, Indragiri Hilir, Kuantan Sengingi, Musi Rawas

Sumber : Provinsi dalam Angka, 2004

Tabel 2.15. Sebaran Kabupaten Menurut Populasi Ruminansia

Populasi ruminansia (ekor/kap)	Kabupaten
<0.060	Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Polewali Mamasa, Majene, Maluku Utara, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Belitung, Jayawijaya, Fak-Fak, Yapen Waropen, Landak, Hulu Sungai Utara, Sanggau, Indragiri Hilir, Sambas, Pontianak
0.060-0.109	Ketapang, Manggarai, Probolinggo, Kepulauan Mentawai, Barito Kuala, Pasaman, Tanjung Jabung Barat, Biak Numfor, Bengkayang, Sintang, Jember, Boalemo, Serang, Nabire, Rokan Hilir, Lahat, Maluku Tenggara, Muara Enim, Musi Banyuasin, Sarolangun
0.110-0.153	Lombok Timur, Brebes, Ende, Rokan Hulu, Toli Toli, Ogan Komering Ilir, Sumba Barat, Muna, Pamekasan, Morowali, Musi Rawas, Lampung Utara, Sikka, Bangkalan, Hulu Sungai Tengah, Bengkulu Selatan, Sorong, Alor, Kapuas Hulu, Manokwari
0.154-0.273	Merauke, Donggala, Buol, Situbondo, Bungo, Lampung Barat, Indragiri Hulu, Jayapura, Sampang, Lombok Barat, Lombok Tengah, Way Kanan, Maluku Tengah, Kuantan Sengingi, Sumenep, Lebak, Flores Timur, Jenepono, Poso, Banggai Kepulauan
> 0.273	Gorontalo, Belu, Aceh Selatan, Bima, Lembata, Tulang Bawang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Aceh Singkil, Sumbawa, Dompu, Sawahlunto/Sijunjung, Aceh Barat, Bondowoso, Buru, Sumba Timur, Simelue, Kupang, Maluku Tenggara Barat, Selayar

Sumber : Provinsi dalam Angka, 2004

Tabel 2.16. Sebaran Kabupaten Menurut Populasi Unggas

Populasi Unggas (ekor/kapita)	Kabupaten
< 0.9	Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Polewali Mamasa, Majene, Maluku Utara, Paniai, Puncak Jaya, Morowali, Buol, Boalemo, Pasaman, Jayawijaya, Toli Toli, Kepulauan Mentawai, Timor Tengah Utara, Maluku Tenggara Barat, Gorontalo, Bengkulu Selatan
0.9-1.2	Bima, Pontianak, Selayar, Sumenep, Donggala, Jenepono, Lahat, Situbondo, Maluku Tenggara, Dompu, Fak-Fak, Sampang, Poso, Jember, Yapen Waropen, Indragiri Hilir, Sintang, Belitung, Lombok Timur, Ogan Komering Ilir
1.3-2.0	Lampung Barat, Manggarai, Lombok Barat, Tulang Bawang, Muara Enim, Sorong, Probolinggo, Sarolangun, Rokan Hilir, Pamekasan, Sanggau, Sumba Barat, Simelue, Bangkalan, Rokan Hulu, Landak, Bengkayang, Sikka, Timor Tengah Selatan, Maluku Tengah
2.1-3.3	Musi Rawas, Lombok Tengah, Kuantan Sengingi, Lebak, Lembata, Kapuas Hulu, Biak Numfor, Mimika, Musi Banyu Asin, Sumbawa, Belu, Alor, Nabire, Flores Timur, Ketapang, Sawahlunto/Sijunjung, Sumba Timur, Merauke, Banggai Kepulauan Way Kanan
> 3.3	Indragiri Hulu, Manokwari, Brebes, Barito Kuala, Lampung Utara, Sambas, Tanjung Jabung Barat, Jayapura, Buru, Serang, Bungo, Kupang, Bondowoso, Muna, Ende, Aceh Selatan, Hulu Sungai Utara, Aceh Barat, Hulu Sungai Tengah, Aceh Singkil

Sumber : Provinsi dalam Angka, 2004

Tabel 2.17. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Petani Gurem

Proporsi Petani Gurem (%)	Kabupaten
> 32.46	Belu, Timor Tengah Selatan, Kupang, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, Probolinggo, Hulu Sungai Tengah, Bondowoso, Maluku Tenggara, Lombok Tengah, Situbondo, Jember, Brebes, Lebak, Bima, Jenepono, Manggarai, Mandailing Natal, Serang
17.76-32.46	Tapanuli Tengah, Lombok Timur, Nias, Hulu Sungai Utara, Pasaman, Jayapura, Maluku Tengah, Jayawijaya, Sorong, Lombok Barat, Belitung, Majene, Sambas, Kepulauan Mentawai, Timor Tengah Utara, Flores Timur, Gorontalo, Ogan Komering Ilir, Ende, Tapanuli Selatan
12.94-17.75	Alor, Polewali Mamasa, Sumba Barat, Sawahlunto/ Sijunjung, Simelue, Buru, Toli Toli, Aceh Singkil, Selayar, Merauke, Bengkayang, Ketapang, Barito Kuala, Kuantan Sengingi, Sumbawa, Banggai Kep, Donggala, Pontianak, Indragiri Hulu, Sumba Timur
7.54-12.93	Way Kanan, Lembata, Nabire, Dompur, Lampung Utara, Boalemo, Sikka, Musi Rawas, Bungo, Tulang Bawang, Manokwari, Musi Banyu Asin, Kapuas Hulu, Lahat, Muna, Fak-fak, Morowali, Sarolangun, Bengkulu Selatan, Lampung Barat
< 7.54	Buol, Muara Enim, Maluku Utara, Biak Numfor, Poso, Sampang, Sintang, Sanggau, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Tanjung Jabung Barat, Indragiri Hilir, Landak, Maluku Tenggara Barat, Mimika, Aceh Selatan, Aceh Barat, Yapen Waropen, Paniai, Puncak Jaya

Sumber : Provinsi dalam Angka, 2004

Tabel 2.18. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Angkatan Kerja

Proporsi angkatan kerja (%)	Kabupaten
< 64.2	Aceh Selatan, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru, Toli-Toli, Buol, Rokan Hilir, Maluku Tenggara Barat, Serang, Kepulauan Mentawai, Kuantan Sengingi, Majene, Biak Numfor, Gorontalo, Boalemo, Tanjung Jabung Barat, Sorong, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bungo
64.2-68.6	Aceh Singkil, Mimika, Maluku Utara, Selayar, Flores Timur, Pontianak, Aceh Barat, Belitung, Poso, Jember, Probolinggo, Alor, Timor Tengah Selatan, Situbondo, Rokan Hulu, Lebak, Simelue, Jenepono, Sawahlunto/ Sijunjung, Bangkalan
68.7-72.3	Bengkayang, Morowali, Lombok Timur, Muara Enim, Belu, Bondowoso, Timor Tengah Utara, Tulang Bawang, Kupang, Sampang, Polewali Mamasa, Musi Banyu Asin, Lampung Utara, Lembata, Sikka, Ketapang, Pamekasan, Musi Rawas, Lampung Barat, Pasaman
72.4-76.7	Bima, Donggala, Brebes, Sanggau, Sumenep, Lombok Barat, Tapanuli Tengah, Landak, Jayapura, Ogan Komering Ilir, Banggai Kepulauan Muna, Sumbawa, Dompur, Bengkulu Selatan, Paniai, Fak-Fak, Sumba Timur, Sambas, Sarolangun
> 76.7	Way Kanan, Lahat, Barito Kuala, Sumba Barat, Hulu Sungai Utara, Manggarai, Kapuas Hulu, Merauke, Hulu Sungai Tengah, Lombok Tengah, Mandailing Natal, Manokwari, Puncak Jaya, Nias, Tapanuli Selatan, Ende, Sintang, Nabire, Yapen Waropen, Jayawijaya

Sumber : Provinsi dalam Angka, 2004

Tabel 2.19. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah

Prop anak tak sekolah (%)	Kabupaten
> 6.0	Yapen Waropen, Gorontalo, Jeneponto, Sikka, Boalemo, Sumba Timur, Sampang, Sawahlunto/ Sijunjung, Toli Toli, Selayar, Polewali Mamasa, Sumba Barat, Sambas, Belu, Timor Tengah Selatan, Donggala, Ende, Hulu Sungai Utara, Paniai, Tapanuli Tengah, Manggarai
4.8-6.0	Kupang, Musi Banyu Asin, Buol, Lombok Barat, Sintang, Majene, Belitung, Pontianak, Poso, Merauke, Ogan Komering Ilir, Bengkulu, Ketapang, Muna, Musi Rawas, Dompu, Flores Timur, Sumenep, Lombok Timur
3.6-4.7	Morowali, Probolinggo, Bima, Pasaman, Brebes, Bondowoso, Bangkalan, Timor Tengah Utara, Muara Enim, Maluku Tenggara Barat, Indragiri Hulu, Tulang Bawang, Sumbawa, Situbondo, Alor, Fak-Fak, Tanjung Jabung Barat, Lebak, Jember, Kapuas Hulu
2.5-3.5	Bungo, Sorong, Sarolangun, Sanggau, Buru, Jayawijaya, Biak Numfor, Lampung Barat, Way Kanan, Lembata, Barito Kuala, Puncak Jaya, Pamekasan, Banggai Kep, Maluku Tengah, Rokan Hulu, Mandailing Natal, Lombok Tengah, Hulu Sungai Tengah, Maluku Tenggara
< 2.5	Manokwari, Mimika, Nias, Kuantan Sengingi, Landak, Maluku Utara, Lampung Utara, Lahat, Bengkulu Selatan, Serang, Aceh Singkil, Jayapura, Tapanuli Selatan, Kepulauan Mentawai, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Nabire, Simelue, Aceh Selatan, Aceh Barat

Sumber : Provinsi dalam Angka, 2004

Tabel 2.20. Sebaran Kabupaten Menurut Pendapatan Per Kapita

Pendapatan (RP000/kap)	Kabupaten
< 686	Simelue, Kepulauan Mentawai, Serang, Alor, Flores Timur, Nabire, Sorong, Puncak Jaya, Mimika, Lembata, Sumba Barat, Manggarai, Timor Tengah Selatan, Maluku Tengah, Jayawijaya, Way Kanan, Timor Tengah Utara, Belu, Pamekasan, Fak-Fak
686-973	Buru, Sampang, Sikka, Lampung Barat, Buol, Jeneponto, Brebes, Muna, Ende, Polewali Mamasa, Bondowoso, Lombok Barat, Sumba Timur, Rokan Hulu, Lampung Utara, Hulu Sungai Tengah, Tulang Bawang, Gorontalo, Maluku Utara, Bengkulu Selatan
974-1359	Bangkalan, Sintang, Maluku Tenggara, Lebak, Jember, Maluku Tenggara Barat, Sumenep, Pasaman, Selayar, Banggai Kep, Bima, Ogan Komering Ilir, Poso, Bungo, Sarolangun, Nias, Majene, Lahat, Boalemo, Aceh Singkil
1360-1819	Probolinggo, Musi Rawas, Aceh Barat, Merauke, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, Sambas, Situbondo, Mandailing Natal, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Landak, Kupang, Bengkulu, Kapuas Hulu, Sanggau, Ketapang, Tapanuli Tengah, Sawahlunto/ Sijunjung, Toli Toli
> 1819	Hulu Sungai Utara, Yapen Waropen, Jayapura, Tapanuli Selatan, Musi Banyu Asin, Dompu, Aceh Selatan, Belitung, Tanjung Jabung Barat, Morowali, Biak Numfor, Barito Kuala, Pontianak, Muara Enim, Manokwari, Sumbawa, Paniai, Lombok Tengah, Lombok Timur, Donggala

Sumber : Provinsi dalam Angka, 2004

Tabel 2.21. Sebaran Kabupaten Menurut Pangsa Pengeluaran Pangan Rumah Tangga

Pangsa pengeluaran pangan (%)	Kabupaten
> 74.7	Yapen Waropen, Manokwari, Kepulauan Mentawai, Mandailing Natal, Landak, Kuantan Sengingi, Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Polewali Mamasa, Rokan Hulu, Nias, Brebes, Kupang, Majene, Maluku Tenggara Barat, Tapanuli Selatan, Boalemo, Sarolangun, Sawahlunto/ Sijunjung, Sampang
72.9-74.7	Indragiri Hilir, Kapuas Hulu, Sumba Timur, Lembata, Banggai Kep, Jeneponto, Way Kanan, Timor Tengah Utara, Morowali, Musi Banyu Asin, Bengkulu Selatan, Manggarai, Tapanuli Tengah, Musi Rawas, Buol, Poso, Maluku Tengah, Dompu, Hulu Sungai Utara, Gorontalo
70.8-72.8	Selayar, Sanggau, Belitung, Lahat, Buru, Bima, Hulu Sungai Tengah, Pasaman, Bungo, Aceh Singkil, Indragiri Hulu, Ende, Lombok Timur, Muara Enim, Barito Kuala, Sintang, Pontianak, Lebak, Maluku Tenggara, Maluku Utara
67.9-70.7	Lampung Barat, Alor, Bengkayang, Ketapang, Ogan Komering Ilir, Aceh Selatan, Tanjung Jabung Barat, Bangkalan, Aceh Barat, Jayapura, Tulang Bawang, Paniai, Lombok Barat, Flores Timur, Lombok Tengah, Muna, Sumenep, Donggala, Bondowoso, Pamekasan
< 67.9	Puncak Jaya, Fak-Fak, Sambas, Toli Toli, Lampung Utara, Belu, Situbondo, Sikka, Sumbawa, Merauke, Probolinggo, Simelue, Rokan Hilir, Serang, Mimika, Jember, Jayawijaya, Sorong, Nabire, Biak Numfor

Sumber: Provinsi dalam Angka, 2004

Data berdasarkan tipe wilayah ini berfungsi sebagai data tambahan yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan dan program yang terkait dengan penanggulangan rawan pangan dan gizi kronis, terutama pada tingkat wilayah, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar kebijakan yang ditetapkan tidak bias dan tepat sasaran, maka indikator yang digunakan juga harus tepat jenis, pengukuran, dan lain-lainnya.

2.1.3. Pengelompokkan Menurut Derajat Kerawanan Pangan

Dalam perhitungan derajat kerawanan pangan, rumah tangga di kelompokkan dalam empat tingkatan yaitu: 1) tahan pangan, 2) rentan pangan, 3) kurang pangan dan 4) rawan pangan. Analisis ini dilakukan untuk menambah informasi karakteristik 100 kabupaten rawan pangan dan gizi kronis yang dihasilkan oleh DKP dan WFP. Sehingga data dan informasi untuk 100 kabupaten menjadi lebih komprehensif, dapat dilihat dari berbagai aspek, tidak hanya dari 10 indikator yang telah disebut sebelumnya.

Pengelompokkan kabupaten menurut derajat kerawanan pangan dan kuintil disajikan pada Tabel 2.22 sampai 2.25. Berdasarkan hasil analisis Susenas tahun 2005, proporsi rumah tangga rawan pangan paling besar (47,4%) adalah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, diikuti Kabupaten Ogan Komering Ilir (44,9%) dan Kabupaten Jayawijaya (42,2%). Rumah tangga rentan pangan adalah rumah tangga yang konsumsi energinya mencukupi, namun pangsa pengeluarannya lebih besar dari 60%. Rumah tangga rentan pangan banyak ditemukan di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Lampung (Way Kanan, Lampung Barat), Sumatera Selatan (Muara Enim, Musi rawas), Riau (Kuantan Sengingi) dan Sumatera Barat (Pasaman, sawahlunto/Sijunjung) dengan proporsi yang mencapai lebih dari 80 persen.

Rumah tangga kurang pangan adalah rumah tangga yang konsumsi energinya kurang dari 80%, namun proporsi pengeluaran pangan-nya lebih kecil dari 60%. Lebih dari 20 kabupaten tidak mempunyai rumah tangga yang termasuk kategori kurang pangan. Oleh karena itu rumah tangga ini termasuk dalam kuintil V, dan tertulis nilai 0 seperti pada Tabel 2.24. Demikian pula, banyak rumah tangga yang tidak termasuk dalam kategori tahan pangan seperti pada Tabel 2.25.

Tabel 2.22. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Rumah Tangga Rawan Pangan

Rumah tangga Rawan Pangan (%)	Kabupaten
> 26.2	Maluku Tenggara Barat, Ogan Komering Ilir, Jayawijaya, Sikka, Buol, Kapuas Hulu, Biak Numfor, Lampung Utara Lembata, Timor Tengah Selatan, Musi Banyu Asin, Sumba Barat, Sumenep, Sorong, Lahat, Belitung, Bengkulu Selatan, Kupang, Maluku Utara, Situbondo
18.8 - 26.2	Nias, Tulang Bawang, Sarolangun, Manggarai, Bangkalan, Buru, Paniai, Bondowoso, Pamekasan, Maluku Tenggara, Brebes, Muna, Pontianak, Sintang, Bima, Mandailing Natal, Sawahlunto/Sijunjung, Alor, Bengkayang, Sampang
13,9 - 18,7	Sanggau, Way Kanan, Nabire, Muara Emin, Sambas, Ende, Aceh Selatan, Bungo, Lombok Barat, Musi Rawas, Ketapang, Toli Toli, Sumba Timur, Lebak, Jember, Mimika, Hulu Sungai Tengah, Landak
9.3 - 13.8	Sumbawa, Maluku Tengah, Puncak Jaya, Probolinggo, Hulu Sungai Utara, Belu, Gorontalo, Jeneponto, Lampung Barat, Tapanuli Selatan, Rokan Hilir, Pasaman, Jayapura, Morowali, Poso, Indragiri Hulu, Tanjung Jabung Barat, Donggala, Selayar, Majene
< 9,3	Serang, Lombok Timur, Lombok Tengah, Timor Tengah Utara, Dompu, Rokan Hulu, Flores Timur, Barito Kuala, Polewali Mamasa, Kuantan Sengingi, Boalemo, Banggai Kepulauan, Fak-fak, Tapanuli Tengah, Kepulauan Mentawai, Merauke, Manokwari, Yapen Waropen, Simelue, Aceh Singkil

Sumber : SUSENAS , 2005 (Diolah)

Tabel 2.23. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Rumah Tangga Rentan Pangan

Rumah tangga Rentan Pangan (%)	Kabupaten
≥ 74.0	Tulang Bawang, Flores Timur, Paniai, Polewali Mamasa, Landak, Barito Kuala, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Puncak Jaya, Tapanuli Tengah, Banggai Kep, Sawahlunto/ Sijunjung, Kuantan Sengingi, Way Kanan, Muara Emin, Musi Rawas, Sumba Timur, Pasaman, Selayar, Lampung Barat
65.0- 73.9	Lebak, Hulu Sungai Tengah, Lampung Utara, Aceh Barat, Ketapang, Maluku Tenggara, Tanjung Jabung Barat, Sintang, Manggarai, Musi Banyu Asin, Indragiri Hilir, Bima, Aceh Selatan, Lahat, Belu, Belitung, Bengkulu Selatan, Sampang, Rokan Hilir, Morowali
57.0- 64.9	Lombok Tengah , Bengkayang, Kapuas Hulu, Rokan Hulu, Sumba Barat, Sambas, Hulu Sungai Utara, Sarolangun, Donggala, Bondowoso, Lombok Timur, Indragiri Hulu, Jenepono, Sanggau, Buol, Poso, Lombok Barat, Boalemo, Timor Tengah Selatan, Lembata
44.9 - 56.9	Brebes, Probolinggo, Kupang, Biak Numfor, Bangkalan, Pamekasan, Timor Tengah Utara, Majene, Gorontalo, Alor, Mimika, Situbondo, Nias, Sumbawa, Maluku Tengah, Jayapura, Ogan Komering Ilir, Dompu, Bungo, Pontianak
< 44.9	Aceh Singkil, Simelue, Manokwari, Merauke, Yapen Waropen, Kepulauan Mentawai, Fak-Fak, Jayawijaya, Maluku Utara, Toli-Toli, Jember, Buru, Ende, Sikka, Sorong, Nabire, Muna, Maluku Tenggara Barat, Serang, Sumenep

Sumber : SUSENAS , 2005 (Diolah)

Tabel 2.24. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Rumah Tangga Kurang Pangan

Rumah tangga Kurang Pangan (%)	Kabupaten
> 9, 9	Muna, Serang, Sorong, Probolinggo, Ende, Sumenep, Dompu, Mimika, Pamekasan, Jayapura, Buru, Maluku Tengah, Timor Tengah Utara, Fak-Fak, Buol, Majene, Jember, Nabire, Maluku Utara, Jayawijaya, Sumbawa
5.6 – 9.9	Lombok Tengah, Bangkalan, Toli-Toli, Bungo, Boalemo, Bondowoso, Sambas, Ketapang, Jenepono, Situbondo, Bengkayang, Sikka, Alor, Kupang, Brebes, Pontianak, Gorontalo, Lombok Timur, Nias
3.1 -5.5	Sintang, Belu, Biak Numfor, Paniai, Selayar, Donggala, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Poso, Barito Kuala, Landak, Maluku Tenggara Barat, Sumba Barat, Bima, Sarolangun, Banggai Kep, Polewali Mamasa, Kuantan Sengingi, Lombok Barat, Hulu Sungai Utara
0.1 – 3,0	Kepulauan Mentawai, Pasaman, Sawahlunto/Sijunjung, Ogan Komering Ilir, Mandailing Natal
0.0	Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Hulu Sungai Tengah, Timor Tengah Selatan, Sampang, Kapuas Hulu, Sanggau, Maluku Tenggara, Lembata, Aceh Barat, Rokan Hilir, Tanjung Jabung Barat, Indragiri Hulu, Aceh Selatan, Lebak Belitung, Bengkulu Selatan, Lampung Barat, Lampung Utara, Tulang Bawang, Way Kanan, Aceh Singkil, Simelue, Flores Timur, Manggarai, Sumba Timur, Manokwari, Merauke, Puncak Jaya, Yapen Waropen, Morowali, Lahat, Muara Emin, Musi Banyuasin, Musi Rawas

Sumber : SUSENAS , 2005 (Diolah)

Tabel 2.25. Sebaran Kabupaten Menurut Proporsi Rumah Tangga Tahan Pangan

Rumah tangga Tahan Pangan (%)	Kabupaten
0.0	Belitung, Bengkulu Selatan, Lampung Barat, Lampung Utara, Tulang Bawang, Way Kanan, Aceh Singkil, Simelue, Lembata, Sumba Timur, Manokwari, Merauke, Paniai, Yapen Waropen, Selayar, Lahat, Muara Emin, Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Kepulauan Mentawai, Sawahlunto/ Sijunjung, Ogan Komering Ilir
3.1- 11.3	Nias, Timor Tengah Selatan, Mandailing Natal, Kapuas Hulu, Pasaman, Maluku Tenggara Barat, Landak, Sumba Barat, Bima, Sampang, Kuantan Sengingi, Puncak Jaya, Manggarai, Indragiri Hilir, Sintang, Maluku Tenggara, Jayawijaya, Banggai Kep, Tapanuli Selatan
11.4 - 16.4	Bondowoso, Aceh Selatan, Sumenep, Ketapang, Sarolangun, Biak Numfor, Morowali, Barito Kuala, Aceh Barat, Polewali Mamasa, Rokan Hilir, Belu, Nabire, Situbondo, Pontianak, Pamekasan, Kupang, Lombok Barat, Bengkayang
116.5 - 22.5	Maluku Tengah, Sanggau, Toli Toli, Sorong, Sikka, Lebak, Sambas, Flores Timur, Tapanuli Tengah, Donggala, Hulu Sungai Tengah, Jeneponto, Tanjung Jabung Barat, Lombok Timur, Jayapura, Alor, Bangkalan, Mimika
> 22.5	Majene, Bungo Sumbawa, Maluku Utara, Dompu, Hulu Sungai Utara, Poso, Boalemo, Brebes, Muna, Timor Tengah Utara, Indragiri Hulu, Gorontalo, Buol, Buru, Probolinggo, Jember, Lombok Tengah, Rokan Hulu, Serang, Ende, Fak-Fak

Sumber : SUSENAS , 2005 (Diolah)

2.1.4. Kritikan dan Penyempurnaan Indikator Wilayah Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis

DKP dan WFP (2005) telah mengeluarkan peta rawan pangan yang telah menjadi rujukan pemerintah dalam menetapkan kebijakan/program di setiap instansi, seperti telah dituangkan dalam hasil Musrenbang Nasional bulan April 2006 yang diselenggarakan oleh Bappenas. Peta rawan pangan tersebut sangat bermanfaat bagi pengambil kebijakan, namun demikian masih diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan agar pelaksanaan program tepat sasaran dalam penanganannya sesuai dengan tujuan penyusunan peta, yaitu sebagai salah satu alat yang dapat digunakan sebagai petunjuk bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi mitigasi yang tepat untuk menangani kerawanan pangan kronis. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penyempurnaan dalam pembuatan peta yang akan datang agar dapat diperoleh hasil yang lebih akurat mencakup beberapa hal seperti ketepatan istilah rawan pangan, jenis indikator yang digunakan dan cara pengukurannya.

1. Istilah yang tepat “rawan pangan” atau “kemiskinan”

Peraturan Pemerintah RI No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan mendefinisikan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya

pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasarkan definisi tersebut, status rawan pangan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakcukupan pangan bagi rumah tangga atau wilayah (kabupaten). Dari 100 kabupaten rawan pangan yang teridentifikasi, kabupaten yang memiliki ketersediaan pangan lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi pangannya hanya sekitar 10 persen. Bahkan kabupaten Jayawijaya yang dianggap paling rawan pangan, indikator konsumsi normatifnya termasuk pada kelompok kuintil V (paling baik).

Aspek lain yang masih berkaitan erat dengan rawan pangan adalah akses ekonomi terhadap pangan, yang dalam hal ini tercermin dari jumlah rumah tangga miskin, dan distribusi pangan yang terkait dengan infrastruktur jalan. Dengan demikian, dari 10 indikator yang digunakan menyusun PKPI hanya ada 3 indikator yang berpengaruh langsung terhadap akses pangan, sedangkan sisanya merupakan variabel tidak langsung terhadap pangan. Sebagai contoh, bagaimana kaitan langsung antara akses listrik dengan rawan pangan? Karena banyaknya indikator yang tidak terkait langsung dengan pangan, maka para pemangku kepentingan di tingkat wilayah terutama para gubernur dan bupati memberi reaksi keras apabila wilayahnya dinyatakan wilayah rawan pangan, padahal ketersediaan pangannya melimpah. Seharusnya penetapan indikator dan pembobotan indeks komposit senantiasa memperhatikan hal tersebut.

Merujuk pada beberapa hal diatas, tampaknya istilah wilayah miskin lebih tepat daripada wilayah rawan pangan karena indikator yang digunakan lebih luas. Raharto dan Romdiati (2001) mengemukakan bahwa untuk mengetahui kemiskinan tingkat wilayah dapat menggunakan indikasi seperti berikut: 1) indikator ekonomi: akses terhadap sumber-sumber (pekerjaan berupah dan lahan pertanian), akses terhadap prasarana dan sarana ekonomi (transportasi umum, listrik, pasar, pelayanan finansial/bank); 2) indikator sosial: akses terhadap fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan (Puskesmas, air bersih) serta fasilitas informasi/komunikasi (radio/TV, kantor pos, telepon).

2. Pengukuran indikator ketersediaan pangan

Indikator ketersediaan pangan dihitung dengan perbandingan konsumsi normatif terhadap produksi serealial bersih per kapita. Serealial yang dihitung dalam indikator tersebut adalah padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Lalu bagaimana dengan sagu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Kawasan Timur Indonesia seperti Provinsi Maluku dan Papua? Selain sagu, masyarakat Papua juga banyak mengkonsumsi keladi/talas. Apakah dengan dalih tidak tersedia data, komoditas sagu dan keladi tidak dimasukkan dalam kelompok serealial, padahal salah satu ketepatan membuat rumusan kebijakan adalah apabila didukung dengan fakta dan data yang akurat?

Mengapa penjumlahan produksi keempat komoditas tersebut per kapita per hari langsung dibagi dengan konsumsi normatif serealisa 300 gram/kapita/hari. Bukankan angka 300 gram/kapita/hari tersebut rata-rata untuk konsumsi beras, bukan serealisa? Nilai energi dari masing-masing komoditas serealisa tersebut berbeda seperti Tabel 2.26, sehingga seharusnya penjumlahan serealisa tidak dalam kuantitas kg tetapi dalam bentuk zat gizi (energi) dan dibagi dengan energi dari beras.

Tabel 2.26. Kandungan Energi Serealisa per 100 gram

No.	Jenis Serealisa	Kalori
1.	Beras Giling	360
2.	Jagung kuning	307
3.	Tepung Sagu	353
4.	Ubikayu	146
5.	Ubijalar	123
6.	Tales	98

Sumber : Depkes, 1998

3. Relevansi pemilihan indikator

Tampaknya pemilihan indikator yang digunakan untuk menentukan wilayah rawan pangan lebih ditekankan pada aspek ketersediaan data tingkat kabupaten yang sudah ada di BPS daripada pertimbangan indikator yang diduga kuat mempengaruhi rawan pangan wilayah. Seperti telah disebutkan dalam pedoman umum pencegahan dan penanggulangan masalah pangan (DKP, 2003), kerawanan pangan dapat dilihat dari sisi produksi, konsumsi dan distribusi. Dari aspek produksi, rawan pangan adalah kemampuan memproduksi tidak seimbang dengan pemenuhan kebutuhan. Dari aspek konsumsi adalah, ketidakmampuan membeli pangan karena tidak ada daya beli atau masyarakat miskin; sedangkan dari aspek distribusi adalah ketidakseimbangan pasokan untuk memenuhi permintaan sehingga terjadi kelangkaan pangan di suatu tempat, waktu, pada jumlah dan harga yang memadai. Selanjutnya juga dikatakan bahwa kerawanan pangan dapat dideteksi secara dini melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang mencakup tiga indikator, yaitu indikator pertanian (luas tanam, luas panen, luas kerusakan, penurunan produktivitas); indikator kesehatan (jumlah gizi kurang dan gizi buruk), dan indikator keluarga miskin (jumlah KK miskin atau keluarga prasejahtera dan sejahtera 1).

Pertanyaannya adalah, mengapa indikator pertanian tidak muncul dalam penentuan rawan pangan wilayah? Indikator yang muncul lebih dominan pada aspek konsumsi, sedangkan aspek ketersediaan dan distribusi pangan sangat minimal. Apakah tidak tersedia data atau memang tidak muncul setelah melalui tahapan pengolahan data. Selain itu, mengapa indikator yang digunakan hanya produksi tanaman pangan, bagaimana dengan kabupaten yang tidak mempunyai potensi tanaman

pangan tetapi berpotensi tanaman perkebunan, perikanan, ataupun peternakan. Kalaupun tidak ada data, dapat dicarikan alternatif misalnya dengan indikator PDRB tingkat kabupaten yang dapat menggambarkan kemampuan daerah. Gambaran kemampuan ekonomi daerah cukup relevan dalam pembahasan rawan pangan apalagi dalam era otonomi daerah.

4. Fleksibilitas Pengukuran indikator

Pada beberapa kasus di daerah ditemukan kritikan terkait dengan fleksibilitas dari masing-masing indikator seperti berikut :

- a). Di Provinsi Papua (khususnya di Kabupaten Jayawijaya), sebagian besar jalan tidak dapat dilalui roda empat, namun antarkecamatan dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat. Apakah hal ini dimasukkan dalam *indikator jalan yang dapat dilalui roda empat*. Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Barat banyak jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, tetapi dapat dilalui dengan ojek yang jumlahnya semakin banyak, dan banyak wilayah yang hanya dapat dijangkau dengan jalan air, menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama.
- b). Selain Puskesmas, pemerintah juga membangun puskesmas pembantu (pustu) dan poliklinik desa (polindes) untuk mempermudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan. Apakah pustu dan polindes yang pada hakekatnya berfungsi sama dengan puskesmas juga dimasukkan dalam *indikator yang terkait dengan Puskesmas*. Mengapa jarak yang digunakan antara tempat tinggal penduduk dan Puskesmas minimal 5 km, bagaimana kalau jaraknya lebih kecil 5 km tetapi jalannya jelek dan topografinya tidak datar; sebaliknya jaraknya lebih dari 5 km tetapi jalannya baik, sehingga waktu tempuh lebih cepat.
- c). Di Provinsi Jawa Timur terutama di daerah “tapal kuda”, yang penduduknya banyak berasal dari etnis Madura yang lebih mementingkan penguasaan huruf arab dibandingkan huruf latin (nasional). Hal ini yang menyebabkan para orangtua merasa berkewajiban menyekolahkan anaknya di Madrasah atau Pondok Pesantren daripada di sekolah umum (pendidikan formal). Akibatnya, banyak penduduk yang dapat membaca huruf Al Qur’an, tetapi tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Sementara itu, indikator buta huruf pada wanita yang berumur 15 tahun ke atas adalah wanita yang tidak dapat membaca dan menulis. Dengan definisi tersebut, angka buta huruf di wilayah “tapal kuda” menjadi relatif tinggi, meskipun mereka mengenal dan menguasai huruf arab. Apakah hal seperti ini tidak dapat dimasukkan dalam *indikator jumlah wanita yang buta huruf* ?

- d). Di Kabupaten Sampang dan Bondowoso, banyak ditemukan rumah tangga yang dapat akses listrik dengan cara menyambung aliran dari tetangganya. Sehingga, walaupun mereka tidak memiliki meteran listrik sendiri (tidak berlangganan), mereka dapat menikmati fasilitas listrik. Di pihak lain, juga ditemukan rumah tangga yang dapat akses listrik dari perusahaan BUMN dan swasta, sehingga mereka juga tidak mempunyai meteran sendiri. Apakah kedua kasus tersebut termasuk dalam *indikator penduduk tanpa akses listrik* ?
- e). Di Provinsi Kalimantan Barat, air yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat adalah air hujan yang ditampung dalam wadah terbuat dari semen yang dikenal dengan istilah penampung air hujan (PAH). Dalam penggunaannya, masyarakat juga menggunakan air tawas dan zat lainnya agar air menjadi bersih, jernih, dan layak untuk dikonsumsi setelah direbus. Sementara itu, indikator air bersih yang digunakan dalam penentuan rawan pangan adalah air yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung. Memperhatikan perbedaan tersebut, maka walaupun masyarakat menggunakan air yang layak untuk dipakai (terutama untuk minum), namun karena berasal dari air hujan maka dianggap tidak memenuhi kriteria. Terkait hal ini, terdapat sindiran dari *stakeholder* setempat bahwa selama definisi yang digunakan masih terfokus pada air yang bersumber dari PAM, maka semua wilayah di Provinsi Kalimantan Barat selamanya akan termasuk “wilayah merah” untuk indikator air bersih.

5. Keakuratan Data

Ditemukan kasus, dimana petugas pengumpul data tidak teliti memasukkan data untuk penentuan wilayah rawan pangan tersebut. Di salah satu kabupaten, tidak terdapat akses listrik, sehingga dalam form isian seharusnya ditulis 100 persen, namun karena kurang hati-hati, ditulis 0 %. Di Kabupaten Jayawijaya, jumlah anak balita yang menderita gizi buruk sangat sedikit dan jumlah terbanyak di kota Wamena. Pada situasi ini bukan berarti di kecamatan lainnya tidak ada kasus gizi buruk, akan tetapi karena tidak ada laporan dari kecamatan ke ibukota Kabupaten akibat keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi. Keragu-raguan tentang keakuratan data statistik yang terkait dengan proses pengumpulan data dapat ditelusuri salah satunya ialah kasus Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur yang merupakan lumbung pangan nasional dan memiliki fasilitas lain relatif baik, terdapat 8 kabupaten yang termasuk rawan pangan. Sementara di provinsi lain di Pulau Jawa, seperti Provinsi Jawa Barat dan Di. Yogyakarta tidak ada kabupaten rawan pangan. Di Provinsi Jawa Tengah hanya ada 1 kabupaten rawan pangan. Hasil seperti ini tentu memancing pertanyaan dari banyak kalangan.

2.2. Indikator dan Pemetaan Wilayah Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis Tingkat Kecamatan

Telah dipaparkan dalam metodologi penelitian bahwa pemetaan wilayah rawan pangan dan rawan gizi kronis tingkat kecamatan direncanakan menggunakan 10 indikator seperti dalam pembuatan peta rawan pangan dan rawan gizi kronis tingkat Kabupaten. Namun, hampir di semua kabupaten contoh tidak diperoleh data yang mencakup 10 indikator tersebut. Jenis data yang ada sangat terbatas dan keakuratan data juga dipertanyakan. Apalagi di Kabupaten Jayawijaya, ketersediaan data sangat minimal, bahkan sudah dua tahun ini (2004 dan 2005) hampir seluruh instansi tidak ada kegiatan dikarenakan dana APBD dan dana otonomi khusus (otsus) telah disalahgunakan. Hanya instansi yang mendapat alokasi dana APBN yang masih memiliki kegiatan pengumpulan data (walaupun dalam jumlah yang terbatas).

2.2.1. Provinsi Papua

Kabupaten Jayawijaya

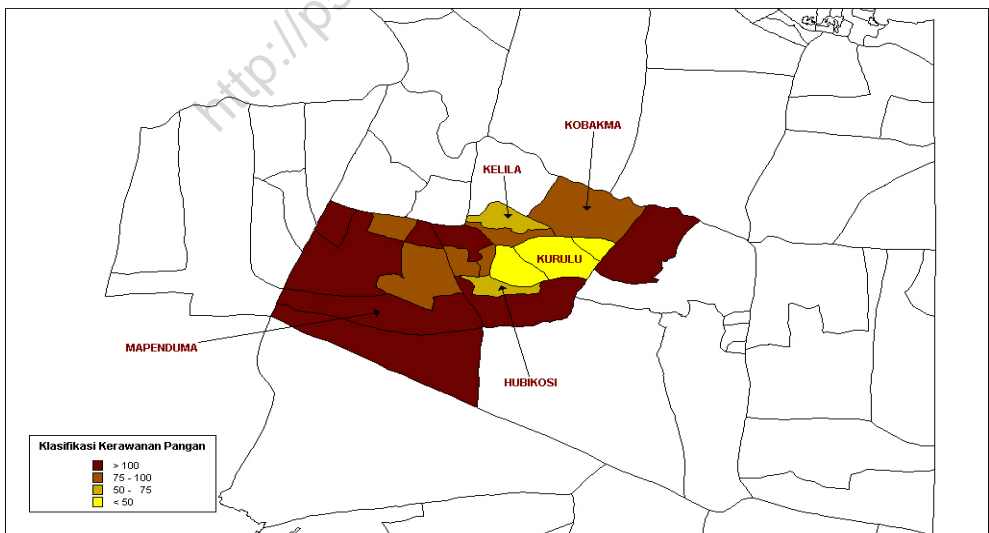
Indikator yang digunakan untuk menentukan kecamatan rawan pangan dan rawan gizi kronis di Kabupaten Jayawijaya didominasi indikator pertanian dalam arti luas, yaitu produksi tanaman pangan dan hortikultura, produksi kopi, dan populasi ternak. Pemilihan indikator ini selain memperhatikan ketersediaan data juga dikaitkan dengan potensi wilayahnya. Sebagai contoh, di Kabupaten Jayawijaya dipilih komoditas kopi karena di kabupaten ini termasuk wilayah potensi tanaman kopi robusta. Untuk melihat kemampuan dari masing-masing kecamatan dalam penyediaan pangan guna memenuhi kebutuhan penduduk di kecamatan yang bersangkutan, maka data produksi dan populasi dibagi dengan jumlah penduduk, sehingga diperoleh data produksi/populasi per kapita (Tabel 2.27).

Penentuan skor untuk masing-masing indikator dilakukan secara relatif antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Sebagai contoh, skor 1 apabila produksi padi per kapita per tahun di kecamatan tertentu paling besar, dan skor 2 apabila produksi padi di kecamatan lainnya lebih rendah dibandingkan kecamatan yang mendapat skor 1. Demikian seterusnya untuk kecamatan yang lain. Semakin rendah produksi padi per kapita per tahun, skor yang dimiliki oleh kecamatan semakin tinggi. Dengan cara seperti ini, tingkat kerawanan pangan dan gizi di setiap kecamatan dapat diketahui berdasarkan perolehan jumlah skor. Semakin tinggi jumlah skor yang dimiliki oleh kecamatan, berarti tingkat kerawanan pangan dan gizi di kecamatan tersebut juga semakin tinggi. Dengan kata lain, terdapat hubungan positif antara jumlah skor dengan tingkat kerawanan pangan dan gizi. Tingkat kerawanan pangan dan gizi di masing-masing kecamatan di Kabupaten Jayawijaya disajikan pada Tabel 2.28.

Setelah diketahui perolehan skor, langkah selanjutnya adalah membuat peta rawan pangan dan rawan gizi kronis tingkat kecamatan di Kabupaten Jayawijaya dengan cara mengelompokkan kecamatan sesuai perolehan skor. Pengelompokkan wilayah dalam pembuatan peta rawan pangan tingkat kabupaten yang dilakukan oleh DKP dan WFP (2005) sebanyak 6 kelompok. Dalam penelitian ini hanya dibuat 4 kelompok, karena jumlah kecamatannya tidak banyak, sehingga variasi jumlah skor juga tidak besar. Pengelompokkan kecamatan seperti berikut:

- Kelompok I dengan jumlah skor ≥ 100 yaitu kecamatan Wamena, Gamelia, Tiom, Kenyam, Mapenduma dan Apalapsili.
- Kelompok II dengan jumlah skor 75-100 yaitu kecamatan Maki, Pirime, Kobakma dan Bolakme
- Kelompok III dengan jumlah skor 50-75 yaitu kecamatan Hubikosi dan Kelila.
- Kelompok IV dengan jumlah skor < 50 yaitu kecamatan Kurulu, Abenaho dan Asologoimo.

Hasil pemetaan klasifikasi kerawanan pangan kecamatan menurut pengelompokkan jumlah skor dapat dilihat pada Gambar 2.1. Berdasarkan data pada Tabel 2.28, kecamatan yang paling rawan adalah kecamatan Mapenduma. Untuk menjangkau kecamatan ini harus menggunakan pesawat. Selain kecamatan Mapenduma, kecamatan yang untuk mencapainya harus menggunakan pesawat dari Wamena adalah Kenyam, Kobakme, dan Apalapsili. Untuk mencapai kecamatan Tiom, diperlukan perjalanan dengan kendaraan roda empat sekitar 4 jam dan jalan kaki sekitar 3 hari.



Gambar 2.1. Klasifikasi Kerawanan Pangan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya

Dengan pertimbangan aksesibilitas infrastruktur terutama jalan dan kendaraan, maka kecamatan contoh untuk Kabupaten Jayawijaya adalah Kurulu. Untuk menjangkau kecamatan ini dapat menggunakan kendaraan umum roda empat namun hanya sampai di ibukota kecamatan (jarak 21 km), selanjutnya untuk menjangkau desa seperti desa Abusa (lokasi penelitian) harus berjalan kaki selama 1 jam (sekitar 5 km) dengan kondisi jalan setapak, melewati jembatan yang terbuat dari bambu/batang pohon sebanyak 5 buah dan melewati pagar sebanyak 4 buah.

2.2.2. Provinsi Kalimantan Barat

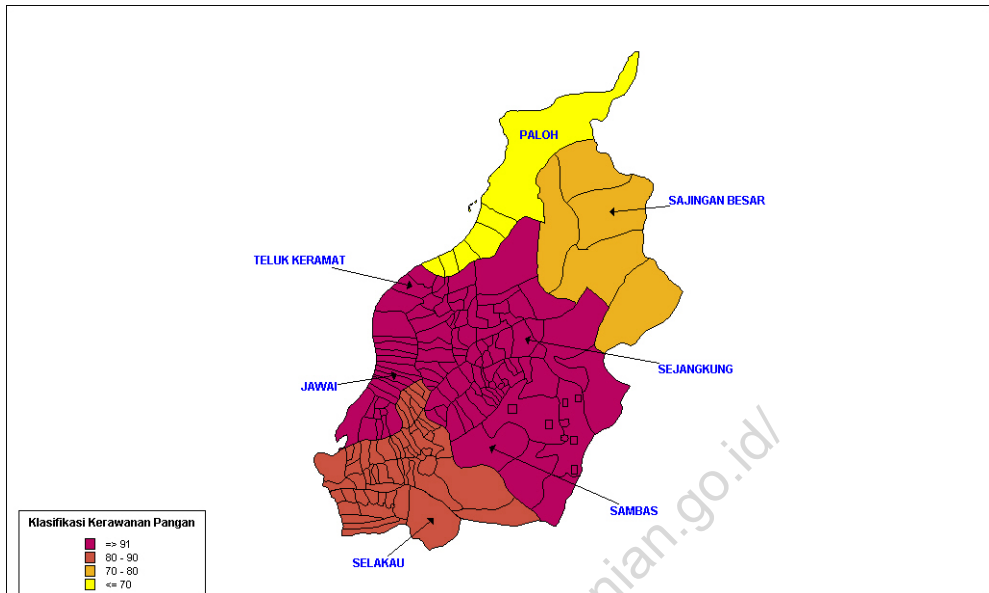
Kabupaten Sambas

Jumlah indikator di Kabupaten Sambas yang sesuai dengan indikator yang digunakan oleh DKP dan WFP (2005) hanya tiga buah, yaitu KEP, KK miskin, dan RT dengan akses air bersih. Namun demikian, indikator pertanian yang dapat dipakai dan tersedia datanya sangat banyak, yaitu ada 10 indikator yang secara umum berupa indikator dari tanaman pangan, ternak, dan karet. Tanaman karet termasuk salah satu tanaman potensi di Kabupaten Sambas. Adapun jenis indikator pertanian adalah: (1) tanaman pangan : produksi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar; rencana luas tanam padi terhadap realisasi dan kerusakan tanaman padi; (2) produksi karet; dan (3) populasi ternak: ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Keragaan indikator rawan pangan dan rawan gizi untuk Kabupaten Sambas disajikan pada Tabel 2.29.

Hasil perhitungan penjumlahan skor dari setiap indikator untuk setiap kecamatan disajikan pada Tabel 2.30. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan pembuatan peta rawan pangan dan rawan gizi kronis dengan cara mengelompokkan kecamatan menjadi empat kelompok seperti berikut:

- Kelompok I dengan jumlah skor ≥ 91 yaitu kecamatan Sambas, Sebawi, Sajad, Jawai Selatan, Teluk Keramat, Sejangkung
- Kelompok II dengan jumlah skor antara 80-90 yaitu kecamatan Selakau, Pemangkat, Sempuruk, Tebas
- Kelompok III dengan jumlah skor antara 70-79 yaitu kecamatan Galing, Sajingan Besar, Tekarang
- Kelompok IV yaitu dengan skor ≤ 70 yaitu kecamatan Jawai, Subah dan Paloh

Berdasarkan pengelompokkan tersebut kecamatan yang tingkat kerawanan pangan dan gizi kronis paling tinggi adalah kecamatan Sambas, Sebawi, Sajad, Jawai Selatan, Teluk Keramat, Sejangkung (Gambar 2.2). Setelah berdiskusi dengan instansi terkait dengan mempertimbangkan infrastruktur dan kondisi wilayah, maka lokasi penelitian ditetapkan kecamatan Sambas.



Gambar 2.2. Klasifikasi Kerawanan Pangan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sambas

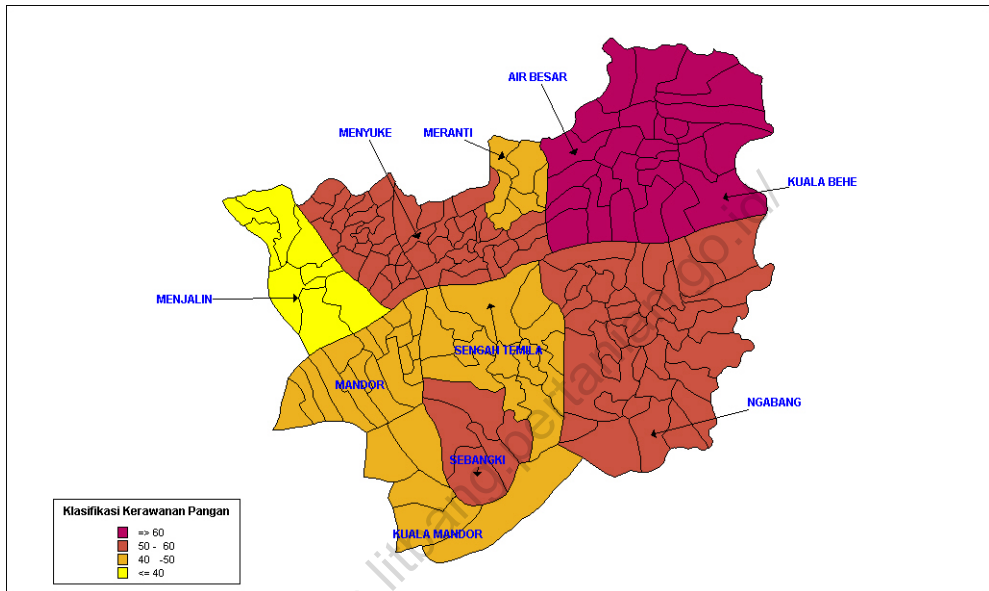
Kabupaten Landak

Jumlah indikator di Kabupaten Landak yang sesuai dengan indikator yang digunakan oleh DKP dan WFP (2005) hanya tiga buah yaitu KEP, KK miskin, dan IMR. Namun demikian indikator pertanian yang dapat dipakai terdapat 7 indikator yaitu: produksi padi, jagung; rencana luas tanam terhadap realisasi tanaman padi; produksi karet, populasi ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Keragaan indikator rawan pangan dan rawan gizi untuk Kabupaten Landak disajikan pada Tabel 2.31.

Hasil perhitungan penjumlahan skor dari setiap indikator untuk setiap kecamatan disajikan pada Tabel 2.32. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan pembuatan peta rawan pangan dan rawan gizi kronis dengan cara mengelompokkan kecamatan menjadi empat kelompok seperti berikut :

- Kelompok I dengan jumlah skor ≥ 60 yaitu kecamatan Air Besar, Kuala Behe
- Kelompok II dengan jumlah skor antara 50-59 yaitu kecamatan Sebangki, Ngabang, Mempawa Hulu, Menyuke
- Kelompok III dengan jumlah skor antara 41-49 yaitu kecamatan Senga Tembila, Mandor, Meranti
- Kelompok IV yaitu dengan skor ≤ 40 yaitu kecamatan Menjalin

Hasil pemetaan klasifikasi kerawanan pangan kecamatan menurut pengelompokkan jumlah skor dapat dilihat pada Gambar 2.3. Berdasarkan pengelompokkan tersebut, kecamatan yang tingkat kerawanan pangan dan gizi kronis paling tinggi adalah kecamatan Air Besar dan Kuala Behe. Namun setelah berdiskusi dengan instansi terkait dan dengan mempertimbangkan infrastruktur dan kondisi wilayah maka lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Menyuke.



Gambar 2.3. Klasifikasi Kerawanan Pangan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Landak

2.2.3. Provinsi Jawa Timur

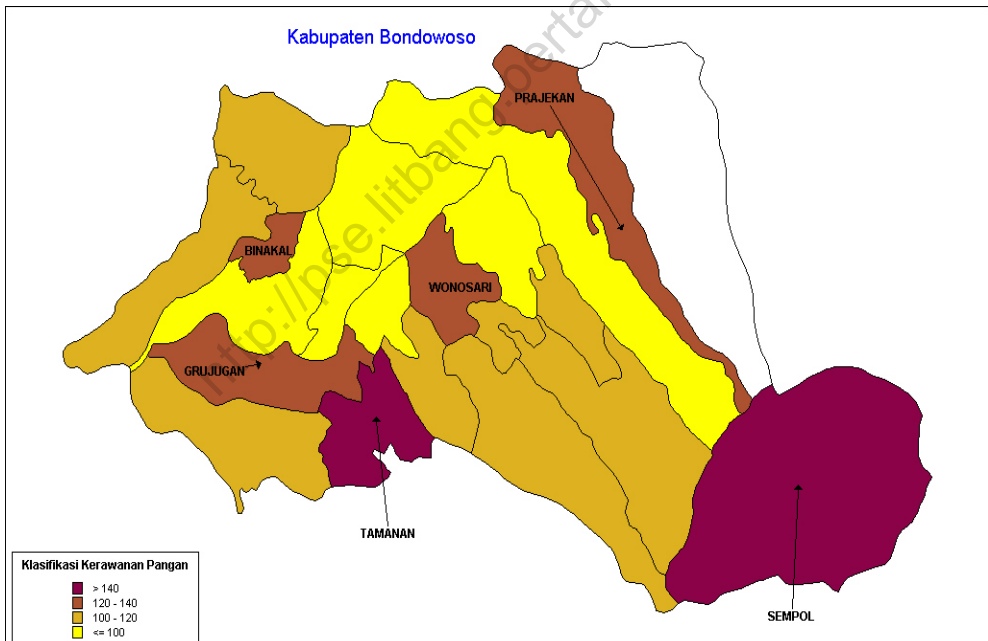
Kabupaten Bondowoso

Jumlah indikator di Kabupaten Bondowoso yang sesuai dengan indikator yang digunakan oleh DKP dan WFP (2005) ada enam buah, yaitu: KEP, KK miskin, RT tanpa akses air bersih, RT tanpa akses listrik, BB balita dibawah standar, dan wanita buta huruf. Selain indikator tersebut, juga digunakan indikator pertanian yaitu produksi per kapita untuk komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan luas kerusakan padi. Keragaan indikator rawan pangan dan rawan gizi untuk Kabupaten Bondowoso disajikan pada Tabel 2.33.

Hasil perhitungan penjumlahan skor dari setiap indikator untuk setiap kecamatan disajikan pada Tabel 2.34. Semakin tinggi jumlah skor berarti tingkat kerawanan pangan dan gizi kronis semakin tinggi pula. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan pembuatan peta rawan pangan dan rawan gizi kronis dengan cara mengelompokkan kecamatan menjadi empat kelompok seperti berikut:

- Kelompok I dengan jumlah skor ≥ 140 yaitu kecamatan Tamanan dan Sempol
- Kelompok II dengan jumlah skor antara 120-140 yaitu kecamatan Grujukan, Wonosari, Binakal, dan Prajejan
- Kelompok III dengan jumlah skor antara 100-120 yaitu kecamatan Maesan, Pujer, Tlogosari, Sukasari, Sumber Wringin, Pakem, Wringin
- Kelompok IV yaitu dengan skor ≤ 100 yaitu kecamatan Tapen, Tenggara, Bondowoso, Curahdamai, Tegal Ampel, dan Klabang.

Hasil pemetaan klasifikasi kerawanan pangan kecamatan menurut pengelompokkan jumlah skor dapat dilihat pada Gambar 2.4. Berdasarkan pengelompokkan tersebut kecamatan yang tingkat kerawanan pangan dan gizi kronis paling tinggi adalah kecamatan Tamanan dan Sempol. Setelah berdiskusi dengan instansi terkait dengan mempertimbangkan infrastruktur, kondisi wilayah, dan kekritisitas penduduk akibat program Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka lokasi penelitian ditetapkan kecamatan Binakal.



Gambar 2.4. Klasifikasi Kerawanan Pangan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Sampang

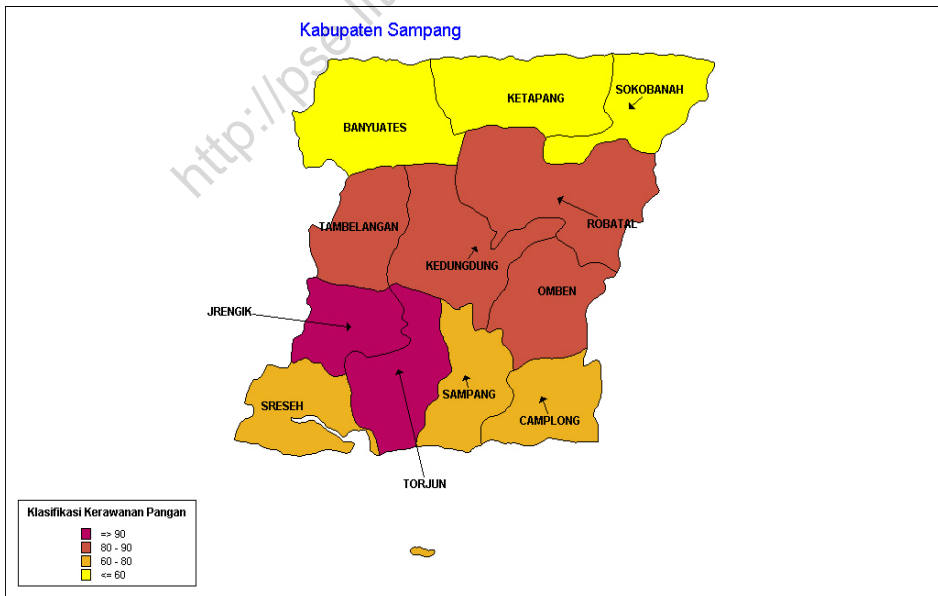
Jumlah indikator di Kabupaten Sampang yang sesuai dengan indikator yang digunakan oleh DKP dan WFP (2005) ada enam buah yaitu

KEP, KK miskin, RT dengan akses air bersih, RT akses listrik, BB balita dibawah standar, dan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Selain indikator tersebut, juga digunakan beberapa indikator pertanian yaitu: produksi pangan setara beras (PSB), luas tanaman padi terhadap luas sasaran, luas kerusakan tanaman padi, produksi padi terhadap rata-rata produksi 5 tahun, populasi ternak besar, kecil dan unggas(Tabel 2.35).

Hasil perhitungan penjumlahan skor dari setiap indikator untuk setiap kecamatan disajikan pada Tabel 2.36. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan pembuatan peta rawan pangan dan rawan gizi kronis dengan cara mengelompokkan kecamatan menjadi empat kelompok seperti berikut:

- Kelompok I dengan jumlah skor ≥ 90 yaitu kecamatan Torjun dan Jrengik
- Kelompok II dengan jumlah skor antara 80-90 yaitu kecamatan Kedundung, Robatal, Tambelangan, dan Omben
- Kelompok III dengan jumlah skor antara 60-79 yaitu kecamatan Sampang, Sreseh, dan Camplong,
- Kelompok IV yaitu dengan skor ≤ 59 yaitu kecamatan Ketapang, Banyuates, dan Sokabahan.

Berdasarkan pengelompokkan tersebut kecamatan yang tingkat kerawanan pangan dan gizi kronis paling tinggi adalah kecamatan Jrengik dan kecamatan ini dipilih sebagai lokasi penelitian (Gambar 2.5).



Gambar 2.5. Klasifikasi Kerawanan Pangan Tingkat Kecamatan di Kabupaten. Sampang

2.3. Karakteristik dan Penyebab Wilayah Rawan Pangan/Gizi Kronis serta Alternatif Kebijakan Penanggulangannya di Provinsi Papua

Luas Provinsi Papua hampir 3,5 kali Pulau Jawa, namun sebagian besar masih berupa hutan. Pada tahun 2001, Papua mendapat otonomi khusus yang ditetapkan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. Dengan adanya status ini Papua berusaha mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh DKP dan WFP (2005), semua Kabupaten yang ada di Provinsi Papua termasuk wilayah rawan pangan dan rawan gizi kronis. Uraian berikut akan membahas karakteristik wilayah dan rumah tangga di Kabupaten Jayawijaya, penyebab rawan pangan dan rawan gizi kronis serta alternatif kebijakan penanggulangannya.

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>

Tabel 2.1. Sebaran Kabupaten dan Nilai dari Masing-masing Indikator Menurut Kuintil

Kuintil	Nama Kabupaten	Nilai dan Jenis Indikator									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Sumba Barat, Landak, Nabire, Manokwari, Yapen Waropen, Merauke, Manggarai, Sampang, Belitung, Simelue, Lombok Barat, Sambas, Sorong, Banggai Kepulauan, Nias, Biak Numfor, Maluku Tenggara Barat	0,15- 11,4	13,3- 53,5	11,6- 99,3	0,9- 93,3	1,7- 76,6	57,5- 66,8	17,3- 57,7	39,5- 82,1	29,6- 98,5	30,8- 75,0
II	Sumba Timur, Bondowoso, Mimika, Fak-fak, Bangkalan, Timor Tengah Selatan, Alor, Kapuas Hulu, Sintang, Lombok Tengah, Aceh Singkil, Polewali Mamasa, Lombok Timur, Barito Kuala, Sumenep, Lembata, Probolinggo, Musi Rawas, Pamekasan, Sanggau	0,13- 5,0	8,0- 41,6	0,9- 82,8	0,0- 45,2	7,0- 44,8	57,5- 68,7	24,3- 50,7	33,4- 81,9	17,6- 87,5	16,4- 83,3
III	Buol, Kupang, Indragiri Hulu, Way Kanan, Mandailing Natal, Ketapang, Kepulauan Mentawai, Bima, Belu, Morowali, Situbondo, Ogan Komering Ilir, Selayar, Dompu, Ende, Maluku Utara, Sikka, Donggala, Maluku Tenggara, Jeneponto	0,20- 4,2	18,0- 38,2	1,8- 72,0	0,0- 50,0	2,9- 42,4	58,6- 67,1	10,5- 46,3	39,7- 76,7	20,3- 88,2	14,5- 89,1
IV	Pontianak, Aceh Barat, Lampung Barat, Jember, Jayapura, Tulang Bawang, Toli toli, Poso, Majene, Hulu Sungai Utara, Indragiri Hilir, Aceh Selatan, Sawahlunto/ Sijunjung, Timor Tengah Utara, Muna, Sumbawa, Lampung Utara, Musi Banyu Asin, Lebak, Bengkulu	0,14- 1,1	11,3- 37,2	5,4- 69,1	0,4- 44,0	2,5- 29,3	58,1- 68,4	16,5- 52,5	35,7- 79,2	14,4- 96,0	14,8- 74,2
V	Rokan Hilir, Maluku Tengah, Buru, Serang, Hulu Sungai Tengah, Brebes, Flores Timur, Kuantan Sengingi, Boalemo, Tanjung Jabung Barat, Tapanuli Tengah, Lahat, Rokan Hulu, Sarolangun, Pasaman, Muara Enim, Bengkulu Selatan, Gorontalo, Tapanuli Selatan, Bungo	0,18- 1,7	10,3- 38,3	5,2- 58,3	1,0- 48,9	1,1- 25,7	61,3- 68,9	18,1- 55,0	32,6- 61,7	38,4- 72,2	16,1- 67,7

Sumber : DKP dan WFP, 2005.

Keterangan: 1 = rasio konsumsi normatif per kapita; 2 = proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan; 3 = proporsi RT tanpa akses listrik; 4 = desa tanpa akses ke jalan; 5 = proporsi perempuan buta huruf; 6 = angka harapan hidup; 7 = berat badan balita di bawah standar; 8 = angka kematian bayi; 9 = RT tanpa akses air bersih, dan 10 = proporsi RT dengan jarak > 5 km dari Puskesmas.

Tabel 2.27. Keragaan Indikator Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis Tingkat Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

Kecamatan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (kg/kapita/th)							Produksi Kopi (kg/kapita/th)	Populasi Ternak (ekor/kapita/th)			Akses jalan !)
	Padi	Jagung	Ubi jalar	Ubi kayu	Keladi	Sayuran	Buah		Besar	Kecil	Unggas	
1. Wamena	7,78	2,18	0,51	1,99	3,45	90,13	5,27	0,42	0,020	0,840	0,520	1
2. Hubikosi	37,41	4,72	3,02	7,97	12,10	3,69	24,96	0,57	0,028	0,927	0,537	1
3. Kurulu	41,28	5,07	2,15	10,69	10,02	382,81	24,06	0,37	0,059	0,853	1,132	1
4. Abenaho	-	6,16	3,01	15,83	4,77	210,80	13,16	0,94	0,014	1,108	1,541	1
5. Asologoimo	24,78	5,54	2,28	6,60	13,85	236,23	20,56	4,03	0,020	0,886	0,959	1
6. Makki	-	3,12	1,81	6,39	6,57	203,75	4,08	0,77	0,001	0,792	0,505	1
7. Gamelia	-	3,53	1,66	5,34	4,66	121,63	2,10	0,08	0,003	0,781	0,611	1
8. Tiom	-	1,37	1,21	2,73	2,09	75,77	7,56	1,50	0,001	0,913	0,427	1
9. Kenyam	25,95	1,39	2,62	2,41	1,84	82,77	0,63	0,30	-	0,802	0,333	0
10. Mapenduma	-	10,41	1,44	3,69	1,59	63,01	0,38	0,04	0,004	0,721	0,307	0
11. Pirime	-	116,93	0,96	3,00	3,86	168,87	10,31	0,82	-	0,936	0,392	1
12. Kobakma	1,78	4,02	1,93	9,56	3,72	87,66	0,58	0,11	-	1,303	1,245	0
13. Kelila	-	4,71	1,70	18,37	6,91	289,05	17,14	1,95	0,003	1,063	0,500	1
14. Bolakme	-	2,71	1,51	6,64	3,09	262,12	8,66	2,52	0,011	0,835	0,413	1
15. Apalabsili	-	1,59	1,03	3,27	4,44	126,26	1,26	0,06	-	0,530	0,087	0

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya (2004); BPS Jayawijaya (2003)

Tabel 2.28. Tingkat Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Jumlah Skor dan Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

Kecamatan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura							Produksi Kopi	Populasi Ternak			Akses jalan !)	Total Skor
	Padi	Jagung	Ubi jalar	Ubi kayu	Keladi	Sayuran	Buah		T. Besar	T. Kecil	Unggas		
1. Wamena	5	12	15	15	11	10	9	9	3	9	7	1	106
2. Hubikosi	2	7	1	5	2	15	1	8	2	5	6	1	55
3. Kurulu	1	5	5	3	3	1	2	10	1	8	3	1	43
4. Abenaho	7	3	2	2	6	5	5	5	4	2	1	1	43
5. Asologoimo	4	4	4	7	1	4	3	1	3	7	4	1	47
6. Makki	7	10	7	8	5	6	10	7	8	12	8	1	89
7. Gamelia	7	8	9	9	8	9	11	13	7	13	5	1	100
8. Tiom	7	15	12	13	13	14	8	4	8	6	9	1	110
9. Kenyam	3	14	3	14	14	12	13	11	9	11	12	2	118
10. Mapenduma	7	2	11	10	15	13	15	15	6	14	13	2	123
11. Pirime	7	1	14	12	9	7	6	6	9	4	11	1	87
12. Kobakma	6	6	6	4	10	11	14	12	9	1	2	2	82
13. Kelila	7	8	8	1	4	2	4	3	7	3	8	1	55
14. Bolakme	7	11	10	6	12	3	7	2	5	10	10	1	84
15. Apalabsili	7	13	13	11	7	8	12	14	9	15	14	2	115

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, 2004 (data diolah)
BPS Jayawijaya, 2003 (data diolah).

Tabel 2.29. Keragaan Indikator Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

Kecamatan	Produksi Tanaman Pangan (kg/Kap)				Produksi Karet (Kg/ Kap)	Rencana thd realisasi tanam (%)	Luas Keru- sakan (%)	Populasi Ternak (ekor/Kapita)			KEP (%)	KK Miskin (%)	Akses thd air bersih (%)
	Padi	Ja- gung	Ubi Kayu	Ubi Jalar				T. Besar	T. Kecil	Unggas			
Selakau	896,9	0,16	2,8	1,2	3,2	96,7	1,7	0,01	0,02	2,2	25,4	33,4	63,4
Pemangkat	345,1	0,00	4,5	1,4	0,1	90,9	0,4	0,00	0,02	3,1	27,7	11,3	79,1
Semparuk	652,3	0,00	8,3	1,9	0,0	98,7	0,0	0,00	0,00	0,7	5,7	26,3	47,9
Tebas	924,0	2,15	4,4	2,3	19,1	69,0	0,7	0,01	0,01	0,5	23,7	24,0	66,9
Tekarang	512,6	5,16	40,3	60,5	0,0	118,4	0,0	0,01	0,02	1,7	25,9	38,3	26,9
Sambas	774,9	0,44	9,0	0,0	101,4	64,5	0,0	0,01	0,01	0,5	32,5	25,8	51,9
Subah	706,6	2,71	29,5	2,2	39,2	138,5	0,5	0,10	0,03	0,4	11,0	26,7	53,3
Sebawi	334,8	0,00	0,0	0,0	0,0	100,1	0,0	0,00	0,00	0,3	19,8	34,9	46,0
Sajad	1268,6	0,00	0,0	0,0	0,0	96,3	0,1	0,00	0,00	0,5	30,9	23,2	16,3
Jawai	275,0	0,42	11,5	2,7	0,0	177,8	1,9	0,01	0,03	0,6	14,4	20,6	75,8
Jawai Selatan	5,8	0,00	0,0	0,0	0,0	170,4	0,0	0,00	0,06	1,1	19,6	22,4	46,0
Teluk Keramat	69,4	0,00	1,1	0,6	102,4	120,9	0,0	0,03	0,01	1,4	34,7	7,2	31,2
Galing	673,9	0,42	6,9	3,6	72,1	119,8	3,7	0,03	0,02	1,6	29,3	18,7	20,0
Sejangkung	51,8	0,00	5,6	0,0	164,2	103,0	3,8	0,00	0,00	0,6	44,7	33,8	12,3
Sajingan Besar	4379,2	5,82	4,7	0,0	91,5	200,0	0,0	0,00	0,02	0,2	28,8	69,3	56,3
Paloh	456,1	0,00	2,5	0,0	8,6	135,6	0,0	0,03	0,05	1,6	7,6	13,5	50,8

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sambas, 2005
Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, 2005

Tabel 2.30. Tingkat Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Jumlah Skor dan Kecamatan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

Kecamatan	Produksi Tanaman Pangan (kg/Kap)				Produksi Karet (Kg/Kap)	Rencana thd realisasi tanam (%)	Luas Keru- sakan (%)	Populasi Ternak (ekor/Kapita)			KEP (%)	KK Miskin (%)	Akses thd air bersih (%)	Total
	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar				Besar	Kecil	Unggas				
Selakau	4	7	11	8	9	12	6	3	4	2	8	12	4	90
Pemangkat	11	8	9	7	10	14	3	4	4	1	10	2	1	84
Semparuk	8	8	5	6	11	11	1	4	6	7	1	10	9	87
Tebas	3	4	10	4	7	15	5	3	5	9	7	8	3	83
Tekarang	9	2	1	1	11	8	1	3	4	3	9	15	12	79
Sambas	5	5	4	10	3	16	1	3	5	9	14	9	7	91
Subah	6	3	2	5	6	4	4	1	3	10	3	11	6	64
Sebawi	12	8	14	10	11	10	1	4	6	11	6	14	10	117
Sajad	2	8	14	10	11	13	2	4	6	9	13	7	14	113
Jawai	13	6	3	3	11	2	7	3	3	8	4	5	2	70
Jawai Selatan	16	8	14	10	11	3	1	4	1	6	5	6	10	95
Teluk Keramat	14	8	13	9	2	6	1	2	5	5	15	1	11	92
Galing	7	6	6	2	5	7	8	2	4	4	12	4	13	80
Sejangkung	15	8	7	10	1	9	9	4	6	8	16	13	15	121
Sajingan Besar	1	1	8	10	4	1	1	4	4	12	11	16	5	78
Paloh	10	8	12	10	8	5	1	2	2	4	2	3	8	65

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sambas, 2005 (data diolah)
Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, 2005 (data diolah)

Tabel 2.31. Keragaan Indikator Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis Tingkat Kecamatan di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat

Kecamatan	Ketersediaan pangan (kg/kap)		Produksi Karet/kap	Rencana thd realisasi tanam (%)	Populasi Ternak per Kapita			KEP (%)	KK Miskin (%)	IMR (%)
	Padi	Jagung			Besar	Kecil	Unggas			
Sebangki	0,14	0,3	12,3	0,50	0,016	0,35	1,1	31,6	32,6	5,1
Ngabang	0,02	3,0	65,6	0,56	0,015	0,04	0,4	22,1	36,3	6,9
Senga Tembila	0,26	0,7	129,7	1,46	0,046	0,12	0,9	15,3	27,8	26,6
Mandor	0,14	0,4	180,9	1,38	0,047	0,26	2,0	10,8	44,5	9,9
Menjalin	0,16	2,0	181,8	1,42	0,100	0,56	3,1	24,1	50,5	0,0
Mempawa Hulu	0,13	2,8	3,1	0,88	0,017	0,06	0,9	18,4	52,6	0,0
Menyuke	0,20	0,7	228,8	1,01	0,001	0,04	0,4	9,0	52,6	2,8
Meranti	0,14	0,5	13,4	0,04	0,045	0,24	0,9	2,1	43,7	25,8
Kuala Behe	0,01	1,8	1,3	0,24	0,035	0,14	0,2	28,6	63,9	85,9
Air Besar	0,05	1,2	14,3	1,16	0,019	0,02	0,6	30,3	36,9	5,1

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Landak, 2005
Dinas Pertanian Kesehatan Landak, 2005

Tabel 2.32. Tingkat Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Jumlah Skor dan Kecamatan di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat

Kecamatan	Ketersediaan pangan (kg/kap)		Produksi Karet/kap	Rencana thd realisasi tanam (%)	Populasi Ternak per Kapita			% KEP	% KK Miskin	IMR	Total
	Padi	Jagung			Besar	Miskin	Unggas				
Sebangki	4	9	8	3	8	2	3	10	2	3	52
Ngabang	7	1	5	4	9	8	6	6	3	4	53
Senga Tembila	1	6	4	10	3	6	4	4	1	7	46
Mandor	4	8	3	8	2	3	2	3	6	5	44
Menjalin	3	3	2	9	1	1	1	7	7	1	35
Mempawa Hulu	5	2	9	5	7	7	4	5	8	1	53
Menyuke	2	6	1	6	10	8	6	2	8	2	51
Meranti	4	7	7	1	4	4	4	1	5	6	43
Kuala Behe	8	4	10	2	5	5	7	8	9	8	66
Air Besar	6	5	6	7	6	9	5	9	4	3	60

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Landak, 2005 (data diolah)
Dinas Pertanian Kesehatan Landak, 2005 (data diolah)

Tabel 2.33. Keragaan Indikator Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur

Kecamatan	Ketersediaan pangan (kg/kapita/th)				Luas Kerusakan Padi (%)	Balita BBLR (%)	KEP (%)	Wanita B Huruf (%)	RT tanpa akses air bersih (%)	KK Miskin (%)	RT tanpa akses listrik (%)
	Padi	Jagung	U Kayu	U Jalar							
Maesan	232,71	140,34	30,53	4,48	0,31	0,87	16,50	10,85	64,29	51,77	2,83
Grujugan	215,62	117,10	11,33	0,00	4,80	1,19	14,16	56,13	55,37	47,19	9,13
Tamanan	160,29	106,38	134,53	0,00	0,99	1,53	18,86	92,61	61,31	61,66	3,74
Pujer	325,24	90,56	40,39	1,77	0,00	1,3	20,17	18,52	63,24	38,52	25,28
Tlogosari	340,09	176,23	42,04	4,80	6,50	1,25	43,73	37,92	53,11	39,2	11,03
Sukosari	387,36	323,43	44,26	17,87	12,29	2,15	17,51	35,23	49,35	57,88	35,18
Sbr Wringin	226,24	174,91	130,71	9,00	14,20	0,76	9,09	59,42	64,75	43,75	7,94
Tapen	275,85	231,89	40,19	0,31	0,02	0	4,51	71,06	55,2	41,66	0,00
Wonosari	418,72	44,12	25,06	0,00	11,99	3,18	9,84	30,92	56,96	44,58	8,21
Tenggarang	420,41	39,44	0,00	2,99	4,30	0	4,75	13,47	58,9	35,54	4,23
Bondowoso	92,35	20,54	14,81	0,44	2,94	0,47	2,48	3,82	34,23	35,51	3,21
Curahdami	362,47	98,22	141,43	5,91	0,10	0,46	6,00	14,89	58,15	52,92	29,48
Binakal	266,79	110,02	221,04	18,95	1,11	0,42	12,84	79,48	61,9	58,68	42,76
Pakem	508,13	285,47	294,69	0,00	0,01	2,41	6,30	63,98	60,16	54,62	69,11
Wringin	120,30	469,28	665,86	8,36	0,01	1,89	8,74	77,89	60,49	51,96	13,27
Tegalampel	87,37	310,22	322,08	11,29	0,00	1,27	10,82	40,78	56,86	54,14	13,30
Klabang	205,38	265,00	945,51	2,70	3,57	2,13	7,49	19,24	57,96	29,98	24,37
Sempol	0,00	33,59	7,37	2,71	0,00	0,76	25,80	44,12	68,91	28,92	100,00
Prajeikan	180,24	270,83	435,16	0,00	8,90	1,01	15,55	48,05	60,02	39,04	27,22
Cerme	247,58	391,42	258,22	0,00	5,14	tad	7,93	59,75	60,13	60,99	35,67

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2005

Tabel 2.34. Tingkat Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Jumlah Skor dan Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur

Kecamatan	Ketersediaan pangan (kg/kapita)				luas keru- sakan Padi (%)	Balita BBLR (%)	KEP (%)	Wanita Buta huruf (%)	RT tanpa akses air bersih (%)	KK Miskin (%)	RT tanpa akses listrik (%)	Total Skor
	Padi	Jagung	U Kayu	U Jalar								
Maesan	11	11	15	8	5	6	15	2	18	12	2	105
Grujugan	13	12	18	16	11	8	13	13	5	11	8	128
Tamanan	16	14	9	19	6	12	17	20	15	20	4	152
Pujer	7	16	13	12	1	11	18	5	17	5	13	118
Tlogosari	6	9	12	7	13	9	20	9	3	7	9	104
Sukosari	4	3	11	2	16	15	16	8	2	17	16	110
Sbr Wringin	12	10	10	4	17	5	9	14	19	9	6	115
Tapen	8	8	14	14	3	1	2	17	4	8	1	80
Wonosari	3	17	16	20	15	17	10	7	7	10	7	129
Tenggarang	2	18	20	9	10	1	3	3	10	4	5	85
Bondowoso	18	20	17	13	8	4	1	1	1	3	3	89
Curahdami	5	15	8	6	4	3	4	4	9	14	15	87
Binakal	9	13	7	1	7	2	12	19	16	18	18	122
Pakem	1	5	5	17	6	16	5	16	13	16	19	119
Wringin	17	1	2	5	2	13	8	18	14	13	10	103
Tegalampel	19	4	4	3	1	10	11	10	6	15	11	94
Klabang	14	7	1	11	9	14	6	6	8	2	12	90
Sempol	20	19	19	10	1	5	19	11	20	1	20	145
Prajeikan	15	6	3	18	14	7	14	12	11	6	14	120
Cerme	10	2	6	15	12	tad	7	15	12	19	17	

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2005 (data diolah)

Tabel 2.35. Keragaan Indikator Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur

Kecamatan	Pertanian PSB	% Luas tanam thd sasaran	% Luas Keru- sakan	% Prod thd Rataan	Populasi Ternak per kapita (ekor/kapita)			KEP (%)	KK Miskin (%)	BBLR (%)	Akses thd Listrik (%)	Akses thd Air Bersih	yg tdk dilalui roda 4
					Besar	Kecil	Unggas						
Sampang	28.728	0,4	0,0	100,5	0,13	0,06	0,76	47,7	82,7	21,0	65,1	87,9	5,6
Camplong	24.046	32,4	0,0	102,1	0,10	0,03	0,67	27,3	91,2	13,2	35,5	34,1	0,0
Omben	24.425	8,0	0,0	93,3	0,13	0,03	0,89	30,5	89,0	27,1	18,0	67,9	0,0
Torjun	26.192	15,4	3,9	97,4	0,08	0,01	0,66	42,7	85,7	23,2	58,4	51,4	0,0
Jrengik	14.376	23,2	10,1	97,4	0,15	0,03	1,38	44,1	96,9	22,1	8,0	42,6	0,0
Sreseh	26.055	0,6	0,0	97,8	0,13	0,06	2,69	36,9	77,2	29,3	100,0	37,7	16,7
Tambelangan	29.766	33,1	2,1	95,1	0,09	0,03	1,23	61,1	96,2	17,7	11,0	46,2	0,0
Kedundung	41.065	3,5	1,4	96,8	0,19	0,03	1,32	37,7	88,0	20,0	14,2	28,1	0,0
Robatal	101.799	20,7	0,0	96,3	0,08	0,00	0,44	28,1	91,0	6,7	16,8	32,4	0,0
Ketapang	64.403	51,0	0,0	98,2	0,28	0,02	1,27	34,1	80,1	24,1	30,9	89,7	0,0
Sokabanan	67.415	48,3	0,0	81,7	0,20	0,04	1,02	14,4	75,2	5,7	16,3	40,5	8,3
Banyuates	49.640	21,1	0,0	102,0	0,178	0,02	2,48	23,8	86,9	0,1	17,3	43,4	5,0

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, 2005

Tabel 2.36. Tingkat Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Jumlah Skor dan Kecamatan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur

Kecamatan	Pertan PSB	KEP (%)	KK Miskin (%)	BBLR (%)	Akses thd Listrik (%)	Akses thd Air Bersih	% L tanam thd sasaran	% Luas Keru- sakan	% Produk- tivitas thd Rataan	PopTernak per kap			yg tdk di lalui r 4	Total
										Besar	Kecil	Unggas		
Sampang	7	11	4	7	2	2	12	1	3	6	1	9	3	68
Camplong	11	3	10	4	4	10	4	1	1	9	7	10	3	77
Omben	10	5	8	11	6	3	9	1	11	7	5	8	1	85
Torjun	8	9	5	9	3	4	8	4	6	12	11	11	1	91
Jrengik	12	10	12	8	12	7	5	5	7	5	8	3	1	95
Sreseh	9	7	2	12	1	9	11	1	5	8	2	1	5	73
Tambelangan	6	12	11	5	11	5	3	3	10	10	6	6	1	89
Kedundung	5	8	7	6	10	12	10	2	8	3	4	4	1	80
Robatal	1	4	9	3	8	11	7	1	9	11	12	12	1	89
Ketapang	3	6	3	10	5	1	1	1	4	1	10	5	1	51
Sokabanan	2	1	1	2	9	8	2	1	12	2	3	7	4	54
Banyuates	4	2	6	1	7	6	6	1	2	4	9	2	2	52

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, 2005 (data diolah)

III. KARAKTERISTIK DAN PENYEBAB RAWAN PANGAN DAN GIZI

3.1. Provinsi Papua

3.1.1. Karakteristik Wilayah dan Rumah Tangga

Sumber Daya Alam

Luas wilayah Kabupaten Jayawijaya adalah 52.916 km² atau sekitar 12,54 persen luas wilayah Provinsi Papua dan termasuk salah satu kabupaten yang lahannya sangat subur. Secara umum, Kabupaten Jayawijaya dapat dibagi sebagai berikut: a) wilayah yang bergunung-gunung tinggi (1500-3000 m dpl) di bagian tengah dan selatan, b) lembah-lembah (>1500 m dpl) pada bagian tengah, dan c) wilayah bergunung-gunung yang lebih rendah pada bagian utara. Sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pegunungan, lereng, dan berbukit. Dari luas wilayah tersebut, 30,6% dengan kemiringan antara 0-15%; 1,8% dengan kemiringan antara 15-40%, dan sisanya dengan kemiringan lebih besar dari 40%.

Secara geologis, wilayah ini termasuk wilayah rawan gempa khususnya di bagian Timur. Selain itu juga termasuk rawan banjir di sepanjang DAS Baliem dan Wamena terutama pada musim hujan. Rata-rata curah hujan di Wamena tahun 2003 adalah 2012 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan adalah 216 hari. Kondisi cuaca di wilayah ini juga tidak menentu, sehingga sering terjadi kegagalan panen pada musim kering panjang atau musim hujan karena banjir dan hujan es (*frost*).

Di Kabupaten Jayawijaya terdapat sungai terpanjang yaitu sungai Baliem yang airnya keruh. Khusus di distrik (kecamatan) Kurulu juga ada sungai Elagora dan Kurugi dan telaga alam yang masyarakat menyebutkan dengan istilah "*Hisakuba*" yang artinya kolam besar. Ketiga sungai dan telaga ini dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk sumber air minum, tempat mencuci hasil panen, mencuci pakaian, dan tempat mandi. Secara terinci kondisi sumber daya alam di kabupaten Jayawijaya seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Karakteristik Sumber daya Alam di Kabupaten Jayawijaya

Aspek	Karakter
Topografi	- 30,6% wilayah dengan kemiringan 0-15%; 1,8% kemiringan 15-40% dan 67,6% kemiringan > 40% - 52,0% wilayah dengan ketinggian 0-100 m, 0,13% antara >100-500 m, 0,6% antara >500-1000m dan 47,3% diatas 1000m
Jenis tanah	Aluvial, litosol, podsolik coklat kelabu, tekstur tanah halus
Iklim	Rata-rata curah hujan tahun 2002 : 1671mm; 2003 : 2012 mm jumlah hari hujan tahun 2002 248 dan 2003 : 216, kelembaban sekitar 85,3% dan suhu antara 15-26,7 OC
Hidrologi	Sungai terpanjang adalah sungai Baliem. Di Kecamatan. Kurulu ada sungai Elagora dan Kurugi dan telaga alam " <i>Hisakuba</i> ".
Sumber:	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prop. Papua, 2004; Tim Peneliti PPUS UNIPA.

Lahan pertanian di Kabupaten Jayawijaya sangat luas, yaitu mencapai 11,0% dari total lahan pertanian di Provinsi Papua yang sebagian besar berupa lahan kering (91,1%). Namun demikian, dari luasan tersebut, masih belum semua lahan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Lahan sawah yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 6,7% dari potensinya dan sebagian besar masih berupa sawah irigasi sederhana (Tabel 3.2). Pemanfaatan lahan masih sangat terbatas disebabkan oleh banyak faktor yaitu sarana penunjang (alat dan mesin pertanian), sumber daya manusia (aparatur dan petani), tenaga kerja maupun modal usaha yang masih terbatas baik jumlah maupun kualitasnya (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2004)

Tabel 3.2. Karakteristik Potensi Lahan Pertanian di Kabupaten Jayawijaya

Aspek	Karakter
Potensi lahan pertanian	Total : 1.018.752 ha, lahan yang sudah dimanfaatkan: 74,3%, terdiri dari sawah : 0,9% dan lahan kering : 91,1%
Kondisi sawah	Sudah dimanfaatkan 6,7% berupa 67,9% irigasi sederhana, 16,4% irigasi perdesaan dan 15,6% tadah hujan
Kondisi lahan kering	Sudah dimanfaatkan 74,6% berupa 1,2% pekarangan; 52,5% tegal/kebun; 20,6% ladang/huma dan sisanya belum diusahakan
Hidrologi	Sungai terpanjang adalah sungai Baliem. Di kec. Kurulu ada sungai Elagora dan Kurugi dan telaga alam "Hisakuba".

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua, 2004

Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2003 adalah 222.976 jiwa. Daris sejumlah tersebut, sekitar 51,6% adalah wanita. Pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,66% per tahun lebih tinggi daripada rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk pada tahun 2002 hanya 8,15 orang/km², namun demikian merupakan terpadat ketiga untuk tingkat kabupaten di Provinsi Jayawijaya. Kabupaten terpadat adalah Biak Numfor (37,0 orang/km²), kemudian diikuti oleh Kabupaten Nabire (13,43 orang/km²). Namun pada tahun 2003, kepadatan penduduk di Kabupaten Jayawijaya mengalami peningkatan yaitu menjadi 17,58 orang/km².

Dari jumlah Kepala Keluarga (KK) yang dilakukan pendataan, ternyata sekitar 63,8% KK tidak tamat SD dan yang tergolong miskin sekali sebesar 77,56%, sedangkan KK dengan status miskin sebesar 10,5%. Dengan demikian jumlah KK yang termasuk sejahtera relatif kecil yaitu hanya 11,94%. Selain dari aspek kemiskinan, masyarakat Papua juga tertinggal dari aspek pendidikan dan lain-lainnya. Akibat dari beberapa hal tersebut, mereka hanya menjadi penonton pembangunan

lewat televisi atau bahkan di pasar, dimana semua kios dimiliki oleh pendatang, walaupun sudah ada pembagian dalam lapangan kerja. Dalam perdagangan, misalnya adanya aturan bahwa masyarakat Baliem menjual hasil pertanian seperti padi, ubi dan sayuran; sedangkan pendatang boleh menjual barang kelontong atau barang-barang yang mereka tidak punya. Selo Soemardjan dalam Dyah (1996) membandingkan masyarakat Baliem seperti masyarakat Jakarta sekitar 200 tahun lalu.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Sesuai definisi yang digunakan oleh BPS dan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), batasan usia kerja adalah 15 tahun keatas. Dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2004, TPAK laki-laki dan perempuan untuk Provinsi Papua masing-masing adalah 87,84% dan 60,27%. Sementara itu, TPAK di Kabupaten Jayawijaya lebih rendah yaitu 81,35 untuk laki-laki dan 54,84 untuk perempuan. BPS, mendefinisikan kesempatan kerja dengan banyaknya lapangan kerja yang terisi yang tercermin dari jumlah yang bekerja.

Seseorang dikategorikan bekerja apabila melakukan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Sementara, yang dimaksud dengan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yaitu proporsi penduduk yang terserap dalam pasar kerja. Hasil data Sakernas 2004, TKK untuk Kabupaten Jayawijaya lebih tinggi daripada rata-rata tingkat provinsi yaitu 97,0% untuk laki-laki dan 99,36% untuk perempuan.

Dari persentase penduduk usia 15 tahun keatas, sekitar 90,1% diantaranya berstatus bekerja, sedangkan sisanya termasuk mencari kerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga. Dari mereka yang bekerja tersebut, sekitar 95% bekerja dengan lapangan usaha di sektor primer terutama di sektor pertanian. Bila dilihat berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas dibayar lebih tinggi daripada stastus pekerjaan lainnya, kemudian diikuti dengan status berusaha dibantu pekerja tidak tetap. Secara lebih terperinci karakteristik sumber daya manusia di Kabupaten Jayawijaya dikaitkan dengan kemiskinan dan lapangan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Sementara itu hasil analisis data primer juga menunjukkan bahwa pendidikan KK dan isteri hanya setingkat SD tidak tamat dan bekerja pada sektor pertanian (Tabel 3.4). Di Kabupaten Jayawijaya, istri adalah tenaga kerja utama dalam usahatani keluarga, karena kegiatan pertanian lebih banyak dilakukan oleh isteri. KK dan anak laki-laki hanya mempersiapkan dan mengolah lahan serta membuat pagar, sedangkan penanaman, penyiangan, dan memasarkan hasil dilakukan oleh para wanita (istri dan anak perempuan). Komoditas dominan yang ditanam adalah ubi jalar dan kacang-kacangan.

Tabel 3.3. Karakteristik Sumber Daya Manusia di Kabupaten Jayawijaya

Aspek	Karakteristik
Pendidikan KK	Tidak tamat SD (63,8%), tamat SD/SLTP (24,9%) tamam SLTS keatas (11,3%)
Status Kemiskinan	Miskin sekali (77,56%) dan miskin (10,5%)
TPAK	Laki-laki : 81,4 % dan perempuan : 54,8 %
TKK	LK : 97; PR : 99,4
Kegiatan Penduduk Usia > 15 tahun	Bekerja (90,05%), mencari kerja (1,55%), sekolah (5,59%), mengurus RT (2,58%) dan lainnya (0,23%)
Pekerjaan penduduk menurut lapangan usaha	Primer (95,64%), sekunder (0,92%) dan tersier (3,44%)
Pekerjaan penduduk menurut status pekerjaan utama	Berusaha sendiri (0,96%), berusaha dibantu pekerja tidak tetap (45,11%), berusaha dibantu buruh/pekerja tetap (0,69%), buruh/karyawan (3,59%) dan pekerja bebas/pekerja tidak dibayar (46,65%)

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia (IPM dan Analisa Sistem Pembangunan Manusia (ASPM) Provinsi Papua, 2004 dan Statistik Kesra Provinsi Papua, 2004

Tabel 3.4. Karakteristik Rumah Tangga Rawan Pangan dan Gizi Kronis di Kabupaten Jayawijaya, 2006

Karakteristik rumah tangga	Nilai
KK : - Umur (th)	43,8
- Pendidikan (th)	4,3
- Pekerjaan utama	Pertanian
Isteri : - Umur (th)	36,7
- Pendidikan (th)	3,5
- Pekerjaan utama	Pertanian
Jumlah anggota keluarga (orang)	8,5
Jumlah anak (orang)	4,7
Jml ART anak usia balita (0-5 th) ¹⁾	1.5 (67)
Jml ART yang putus sekolah (Orang) ¹⁾	3.2 (33.3)
Jml ART yang bersekolah (Orang)	1.7
Jml ART yang bekerja (Orang)	4.8
Jml ART yang bekerja < 15 tahun (Orang)	0.2
Jml ART yang bekerja >= 15 tahun (Orang)	4.6

Sumber : Data Primer

Keterangan : Angka () jumlah responden (%) yang menjawab

¹⁾ Rataan dari jumlah responden yang menjawab

Sesuai dengan pola kekerabatan pada masyarakat Baliem, jumlah anggota rumah tangga relatif besar karena dalam satu rumah tidak hanya keluarga inti tetapi juga keluarga besar terutama dari keluarga pihak isteri. Selain itu dalam satu rumah tangga (satu hunian yang terdiri dari beberapa honay) terdiri dari beberapa keluarga inti, karena jumlah isteri lebih dari satu, namun dalam pengelolaan sumber daya (keuangan dan

tenaga dalam rumah tangga) merupakan satu manajemen. Hal ini yang mengakibatkan rata-rata jumlah anggota keluarga relatif besar yaitu 8,5 orang dengan besar anak mencapai 4,7 orang. Tingginya jumlah anak yang putus sekolah diduga karena jarak sekolah dengan tempat tinggal yang jauh dan pengetahuan orang tua akan pentingnya sekolah masih rendah.

Perekonomian

Dalam bahasan ini, perekonomian Kabupaten Jayawijaya didekati dengan karakteristik pertumbuhan dan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang disajikan atas harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan riil perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Apabila PDRB dibagi dengan jumlah penduduk masing-masing tahun maka akan tercermin tingkat perkembangan pendapatan per kapita penduduk. PDRB juga merupakan salah satu alat pengkajian dan evaluasi terhadap kebijakan dan hasil pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

PDRB atas harga berlaku pada tahun 2004 sebesar Rp. 756,4 milyar, sedangkan atas harga konstan sebesar Rp. 552,2 milyar. Nilai PDRB tahun 2004 lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula PDRB per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang sama seperti di atas. PDRB per kapita pada tahun 2004 sebesar Rp. 3,59 juta, sedangkan pada tahun 2003 dan 2002 masing-masing sebesar Rp. 3,25 juta dan Rp. 2,97 juta. Hal ini menunjukkan terjadi perkembangan nilai PDRB melebihi dari perkembangan jumlah penduduk.

Kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Jayawijaya adalah dari sektor pertanian. Kontribusi ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 67,5% seperti terlihat pada Tabel 3.5. Setelah sektor pertanian, pangsa terbesar kedua dalam pembentukan PDRB berasal dari sektor jasa-jasa dan perdagangan, hotel, dan restoran.

Tabel 3.5. Perkembangan Peranan masing-masing Sektor terhadap Pembentukan PDRB Atas Harga Berlaku di Kabupaten Jayawijaya

Sektor	2000	2001	2002	2003	2004
1. Pertanian	65,31	66,04	66,89	68,18	67,54
2. Pertambangan & penggalan	0,69	0,64	0,56	0,57	0,56
3. Industri pengolahan	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21
4. Listrik & air minum	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
5. Bangunan	5,76	5,25	4,68	4,61	4,50
6. Perdagangan hotel & restoran	8,52	8,21	7,93	7,92	8,12
7. Pengangkutan & komunikasi	3,25	2,99	2,81	2,82	2,85
8. Keuangan, persewaan & jasa perush.	2,34	1,17	1,20	1,14	2,40
9. Jasa-jasa	13,68	15,29	15,50	14,32	13,60
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kabupaten Jayawijaya 2004

Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jayawijaya paling besar pada tahun 2001 yaitu 7,62%, namun untuk tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. Pada tahun 2004, pertumbuhan lebih tinggi daripada tahun 2002 dan 2003 yaitu 5,73%. Peningkatan ini dipicu peningkatan kontribusi yang besar dari sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, yaitu mencapai 102,31%, padahal pada tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan. Peningkatan sektor keuangan ini terkait dengan adanya alokasi dana operasi khusus (otsus) untuk semua kabupaten di Provinsi Papua.

Sektor pertanian mempunyai peranan yang besar dalam pembentukan PDRB, namun pertumbuhan dari sektor ini relatif kecil hanya mencapai 5,45% pada tahun 2004, lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2003. Kontribusi terbesar dari sektor pertanian adalah sub sektor peternakan terutama peternakan babi, kemudian kehutanan, dan perkebunan. Peternakan babi secara tradisional merupakan salah satu usaha unggulan bagi masyarakat asli Kabupaten Jayawijaya. Pertumbuhan untuk sektor perdagangan hotel dan restoran pada tahun 2004 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2003. Secara terperinci pertumbuhan dari masing-masing sektor disajikan pada Tabel 3.6. Walaupun PDRB Kabupaten Jayawijaya selalu meningkat, namun dampaknya tidak dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama penduduk asli karena terbatasnya pendidikan dan pengetahuan mereka serta adanya pengaruh sistem sosial dan budaya yang tidak memberikan ruang gerak yang lebih luas untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik.

Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan Sektor Pembentukan PDRB atas Harga Konstan di Kabupaten Jayawijaya

Sektor	2001	2002	2003	2004
Pertanian	6,92	1,91	6,53	5,45
Pertambangan & penggalan	7,58	1,03	4,68	4,43
Industri pengolahan	5,54	5,71	3,61	4,62
Listrik & air minum	8,68	7,78	7,67	5,36
Bangunan	6,49	4,01	6,24	0,18
Perdagangan hotel & restoran	5,90	5,61	5,70	6,29
Pengangkutan & komunikasi	1,80	3,96	3,00	3,63
Keuangan, persewaan & jasa perush.	(48,10)	13,91	(2,95)	102,31
Jasa-jasa	23,43	10,45	(9,54)	1,75
Jumlah	7,62	3,89	3,52	5,73

Sumber : PDRB Kab. Jayawijaya 2004

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Jayawijaya adalah sektor pertanian. Hasil analisis data primer mendukung keragaan tersebut, sekitar 80,4 persen pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga berasal dari sektor pertanian, terutama hasil dari lahan tegalan berupa ubi jalar/keladi, sayuran seperti wortel, kol, serta kacang tanah (Tabel 3.7).

Tabel 3.7. Pendapatan Rumah Tangga Rawan Pangan dan Gizi Kronis Menurut Sumbernya di Kabupaten Jayawijaya, 2006 (%)

Sumber pendapatan	Nilai
1. Pertanian	80,44
- Usahatani nonpadi	7,29
-Tegal/Pekarangan/Kolam	36,68
- Peternakan	2,06
- Nelayan	0,41
- Luar Usahatani	34,01
2. Nonpertanian	19,56
- Pedagang	16,91
- Jasa	2,65
Total Pendapatan	100,00
(Rp /kapita/tahun)	(1.886.487)

Sumber : Data Primer

Pendapatan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk membeli minyak goreng, gula, pakaian dan transportasi. Mereka memenuhi kebutuhan keluarga dari hasil usahatani atau pemberian dari kerabatnya, sehingga mereka tidak mengenal atau melakukan transaksi pinjam meminjam. Hanya 53,3% rumah tangga yang pernah membeli makanan pokok (ubi jalar) dengan sistem pembelian tidak menentu (87,5%) dan setiap minggu (12,5%). Mereka membeli makanan pokok tersebut di pasar kecamatan (46,2%) dan pasar kabupaten (53,8%).

Sumber pendapatan dari sektor nonpertanian berasal dari kegiatan sebagai pedagang hasil pertanian yang dilakukan oleh para isteri atau saudara/anak perempuan. Hasil pertanian yang dijual umumnya berupa sayuran atau kacang tanah, sedangkan ubi jalar sebagian besar dikonsumsi sendiri. Sekitar 64,3% rumah tangga menjual hasil pertaniannya ke pasar kabupaten yaitu pasar Jibama dan sisanya ke pasar kecamatan.

Rendahnya pendapatan rumah tangga dari sektor nonpertanian terkait dengan keterbatasan lapangan kerja di Kabupaten Jayawijaya. Selain itu juga karena ketrampilan dan pendidikan yang dimilikinya sangat rendah, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Terdapat kesan penduduk enggan meninggalkan daerahnya untuk mencari kerja, dan mereka puas dengan usaha pertanian sebagai sumber pendapatan utamanya.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Kabupaten Jayawijaya masih terbatas. Sampai tahun 2005, belum terdapat mal, supermarket atau pasar modern. Di kabupaten ini hanya terdapat satu pasar yang bangunan fisiknya sangat terbatas yang dikenal dengan pasar Jibama. Barang dagangan terutama hasil pertanian, yang dijual diletakkan diatas bangunan panjang atau di dalam noken yang diletakkan di dalam dan di

halaman blok pasar. Di kabupaten ini terdapat 12 hotel namun belum ada yang berbintang. Belum ada kantor pos dan giro besar, yang ada hanyaah kantor pos dan giro pembantu sejumlah 5 buah.

Sarana listrik sangat terbatas, hanya di ibukota Kabupaten (Wamena) dan sering mengalami pemadaman karena terbatasnya daya listrik. Demikian pula untuk sarana air bersih dari PAM, hanya ada di Wamena (Tabel 3.8). Mulai pada tahun 2004, terjadi pemutusan air dari PAM terutama di instansi-instansi pemerintah karena tidak ada dana untuk membayar penggunaan air tersebut. Pengucuran dana dari pemerintah daerah (Pemda) untuk setiap instansi tidak terealisasi.

Tabel 3.8. Karakteristik Sarana dan Prasarana di Kabupaten Jayawijaya

Perihal	Karakteristik
Pasar	Hanya ada 1 pasar tradisional dengan bangunan fisik yang terbatas
Kesehatan	Jumlah dokter umum 8 orang, dokter gigi 3 orang, dokter spesialis 3 buah; RSUD negeri 1 buah dan swasta 1 buah; Puskesmas/Pustu : 144 orang
Listrik/air bersih dari PAM	Hanya ada di Wamena

Sumber : Data sekunder

Bentuk bangunan rumah masyarakat Baliem di Jayawijaya berbeda dari kondisi perumahan di wilayah lainnya, seperti di Pulau Jawa. Rumah sebagai tempat tinggal adalah hak milik bersama, hasil dari pembukaan lahan yang dilakukan secara bergotong royong. Hasil analisis data primer, rata-rata luas bangunan rumah adalah 65 m² atau rata-rata 9,3 m/kapita. Semua bangunan rumah terdiri dari kayu, bahan pengikat rotan, dan jerami sebagai atap dan alas tidur. Di tengah bangunan yang disebut *honay* dan *ebey* terdapat perapian untuk penghangat ruangan di malam hari dan untuk mengusir nyamuk. Jenis lantai berasal dari ranting-ranting yang agak besar (dinamakan *jagat*). Hanya ada satu pintu untuk keluar masuk, tanpa jendela dan ruangan sangat gelap. Ventilasi udara rumah tergolong buruk atau tidak sehat.

Sumber penerangan malam hari hanya dari sinar rembulan, dan hanya 6,7% rumah tangga yang menggunakan lilin. Sumber air minum adalah air sungai (46,7%), kolam (40,0%) dan mata air (13,3%). Air tersebut langsung diminum tanpa dilakukan perebusan terlebih dahulu. Mereka juga tidak mempunyai fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang memadai, fasilitas untuk pembuangan dilakukan di alam terbuka (sungai, kebun, atau hutan terdekat). Kondisi MCK yang demikian ditambah kebiasaan penduduk setempat yang jarang mandi menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungannya seperti terlihat pada Tabel 3.9.

Kasus diare dan muntaber di Kecamatan Kurulu sudah dalam kategori luar biasa (KLB) karena pada waktu penelitian dilaksanakan sudah ada yang meninggal sebanyak 20 orang. Sekitar 55% rumah tangga contoh pernah mengalami diare dan sekitar 67% mengalami muntaber dalam sebulan terakhir (Tabel 3.9). Dalam upaya pengobatan penyakit diare dan muntaber, Dinas Kesehatan Kabupaten menempatkan tenaga medis beserta obat-obatan yang diperlukan ke wilayah yang terjangkau penyakit tersebut yang berlokasi di kantor-kantor desa setempat untuk mempermudah masyarakat menjangkaunya. Selain penyakit, pada rumah tangga ini juga terdapat anggota keluarga yang meninggal dan kurang gizi.

Tabel 3.9. Kondisi Kesehatan Rumah Tangga Rawan Pangan dan Gizi kronis di Kabupaten Jayawijaya, 2006

Uraian	Nilai
1) Jumlah bayi yang meninggal (orang)	1,7
2) Jumlah anak yang meninggal (orang)	1,3
3) RT yg anggota keluarga mengalami kurang gizi (%)	14,3
4) Keluhan kesehatan yg dialami RT (%)	
- Panas Dingin	45,5
- Diare	55,6
- Sesak Napas	50,0
- Muntaber	66,7
- Malaria	50,0
- Penyakit kulit	33,3
5) RT yg sudah berobat (%)	100,0

Sumber : Data primer.

Kegiatan posyandu sebetulnya telah ada sejak dahulu, namun sejak reformasi dan era otonomi daerah justru mengalami stagnasi bahkan tidak ada lagi kegiatan penimbangan posyandu. Program kesehatan di Kabupaten Jayawijaya banyak yang tidak berjalan karena pada tahun 2004 dan 2005 dana outsus dikorupsi oleh Bupati, walaupun ada dana sangat sedikit sekali. Dinas kesehatan pernah mengajukan dana sebesar 1-2 M, namun yang turun hanya Rp.100 juta, sehingga untuk operasional menjadi sangat kecil karena dibagi-bagi untuk berbagai kegiatan. Akibatnya lomba balita sehat terakhir diadakan pada tahun 1999 dan program posyandu juga tidak berjalan karena jumlah bidan terbatas. Setiap kecamatan sebetulnya ada Puskesmas, namun bidan hanya ada di 2 Puskesmas dan sarana/jumlah tenaga medis sangat terbatas.

Sejak kejadian busung lapar di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawijaya, diaktifkan kembali kegiatan posyandu, namun belum menjangkau semua desa. Pada tahun 2005, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan UNICEF mengaktifkan posyandu. Jumlah posyandu yang sudah aktif dan melapor sejumlah 10 buah. Dari data primer diperoleh informasi bahwa hanya 6,7% rumah tangga yang mengetahui ada posyandu dan hanya 16,7% yang membawa anaknya ke posyandu.

Sementara, alasan rumah tangga yang tidak membawa anaknya ke posyandu karena anaknya takut (69,3%) dan jarak posyandu dengan rumahnya yang jauh (30,8%).

Kartu sehat atau kartu Gakin merupakan fasilitas pemerintah untuk masyarakat miskin agar dapat akses dalam pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya. Kartu sehat ini secara nasional sudah diluncurkan sejak krisis ekonomi tahun 1998/1999 melalui program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Kesehatan. Namun demikian, baru 40% rumah tangga yang memiliki kartu ini, itupun baru diberi paling lama 6 bulan terakhir (Tabel 3.10).

Tabel 3.10. Akses Rumah Tangga terhadap Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya, 2006 (%)

Uraian	Nilai
1) RT memiliki Kartu Sehat	40,00
2) Lama pemilikan Kartu Sehat	
- bulan ini	34,3
- 6 bulan ini	66,7
3) RT yang sudah menggunakan Kartu Sehat	42,9
4) Yang dirujuk ke Rumah Sakit	20,0
5) Jenis Penyakit yang dirujuk	
- Demam berdarah	33,33
- Muntaber	33,33
- Malaria	-
- Flu Tulang	33,33

Sumber : Data Primer

Selain di bidang kesehatan, pemerintah juga memberi bantuan pendidikan sejak krisis ekonomi yang dikenal dengan program JPS pendidikan berupa beasiswa kepada anak sekolah dari keluarga miskin. Pemerintah juga meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan harapan siswa SD tidak dipungut SPP. Hasil analisis data primer terdapat 54,6% anak yang masih sekolah setingkat SD; 36,7% SLTP dan 9,1% SLTA dengan besar SPP per bulan berturut-turut rata-rata Rp 5.500, Rp 36.400, dan Rp 100.000. Dari sejumlah anak yang sekolah tersebut, terdapat 66,7% anak SD dan 33,3% anak setingkat SLTP yang mendapat bantuan pemerintah dalam bentuk SPP per bulan.

Keragaan Sektor Pertanian

Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang potensi pertaniannya sangat tinggi dengan hasil utama berupa sayuran, ubi jalar, dan kopi. Lahan di Kabupaten Jayawijaya termasuk subur, namun dikelola dengan teknologi yang sangat sederhana. Walaupun demikian, ada teknologi lokal dalam pengelolaan lahan yaitu membiarkan babi mengeruk dan membalik tanah yang akan

dipakai untuk menanam ubi baru, serta membuat parit-parit di sekitar lahan kebun ubi, kemana air mengalir sehingga air tidak menggenangi tanaman.

Lahan yang diperoleh dari klen diusahakan untuk tanaman ubi jalar dan keladi yang dikerjakan secara gotong royong diantara anggota klen yang sama dan dengan sistem ladang berpindah dengan masa tenggang 3-4 tahun. Setiap lahan dapat ditanami sekitar 3-4 kali, kemudian baru pindah ke lahan yang lain. Di masa lalu pada era Gubernur Suebu, pernah dicoba dikembangkan kebijakan dimana pemerintah daerah memberi bantuan dana untuk "membeli" tanah yang dapat digunakan oleh penduduk untuk aktifitas produksi pangan secara berkelompok. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak berjalan lama. Sampai sekarang belum ada transaksi sewa menyewa dan jual beli lahan pertanian serta tidak ada tunakisma kecuali pendatang. Dahulu pembukaan lahan dilakukan bersama-sama dalam satu kelompok kemudian dibagi di antara anggota kelompoknya yang dipimpin oleh ketua adat/kepala suku. Namun sekarang pembukaan lahan sudah jarang dilakukan karena kepala suku sudah merasa enak tinggal di kota.

Budaya bertani masyarakat Jayawijaya masih didominasi kegiatan "pemburu dan pengumpul". Teknologi budi daya yang diterapkan masih sederhana dan alami, belum menggunakan teknologi modern seperti penggunaan pupuk organik dan pestisida. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air sungai, dikarenakan masyarakat minum air sungai secara langsung tanpa proses pemasakan. Selain itu juga dikhawatirkan merusak tatanan sosial yang telah berlaku di masyarakat.

Masyarakat menanam tanaman secara monokultur dan tidak serempak. Demikian pula dalam memanen hasil seperti ubi jalar tidak dilakukan secara serentak, tetapi dipilih yang umbinya besar. Karena peranan umbi sebagai pangan pokok dan hanya dijual dalam jumlah kecil untuk membeli minyak goreng, garam, dan lain-lain, maka pola panen seperti tersebut diatas juga bertujuan untuk menyimpan umbi (sebagai "lumbung hidup"). Terkait dengan tanaman ubi jalar Niko A. Lokobal dalam Deritana *et al.* (2000) menceritakan hubungan ubi jalar dengan manusia :

"Ubi itu dalam hubungan kehidupan sehari-hari sangat dekat dengan seorang perempuan. Seorang ibu bercerita kepada saya bahwa dalam melakukan panen ubi jalar mereka hanya memilih ubi yang besar sedang ubi yang masih kecil disimpan untuk dipanen kemudian hari. Sangat janggal untuk memanen ubi sekaligus karena ubi-ubi kecil itu akan menjerit dan batangnya kemudian akan kering dan layu. Ubi tumbuh karena adanya pengorbanan wanita, maka ubi sangat dekat hubungannya dengan manusia. Tanpa ubi, orang disini tidak dapat hidup. Oleha karena itu, ubi harus diperlakukan secara hormat dan hati-hati. Sebelum dicuci, ibu tahu ubi mana yang akan dimakan suami, anak dirinya, dan tamu"

Jenis ubi jalar yang ada di Kabupaten Jayawijaya sangat banyak dan berbeda varietasnya antara ubi untuk manusia dan babi seperti berikut: 1) ubi asli untuk manusia (varietas Humpuk, Alugulek, Musaneken, Velalehe, Wenabuge); 2) ubi untuk babi (varietas Musan, Tamueh, dan Soporken), 3) ubi merah yang banyak dijual (varietas Tinta, wortel). Ubi asli (kultivar yang ada sejak dulu) biasanya berumur antara 6-8 bulan. Ubi yang kini banyak diusahakan petani berumur antara 3-4 bulan. Saat ini sedang diupayakan penanaman kembali ubi jalar yang berumur panjang karena daya simpannya lebih lama.

Di Kabupaten Jayawijaya juga terdapat sawah untuk tanaman padi. Pada tahun 2004, realisasi luas tanam mencapai 516 hektar atau sekitar 61,9% dari sasarannya dengan produktivitas rata-rata 2,9 ton/ha. Padi ditanam pada lahan yang sebelumnya digunakan untuk menanam ubi jalar, sehingga dikhawatirkan luas lahan untuk ubi jalar terus menyusut. Di pihak lain, peranan ubi tidak hanya sebagai pangan pokok masyarakat tetapi juga untuk ritus keagamaan dan makanan babi. Kekhawatiran ini juga diungkapkan oleh seorang ketua suku Dani dalam Deritana *et al.* (2000):

"Pengembangan sawah memang bagus karena selain pendatang, orang disini juga suka makan. Tapi saya sedih melihat ketika berdiri diatas bukit Pugima, banyak tanah subur bekas kebun ubi yang sudah jadi sawah. Kebun ubi sedikit demi sedikit akan tergusur ke bukit. Dengan sawah orang muda hanya melihat jumlah uang, tapi sebenarnya ada yang lebih penting yang mereka tidak tahu. Jika sawah menjadi banyak, babi-babi akan makan dimana, karena babi penting artinya bagi kami".

Bertani merupakan bagian aktivitas yang sangat penting terutama bagi perempuan. Terdapat pembagian kerja dalam bertani. Laki-laki membuka ladang, membuat parit, mencari kayu dan membuat pagar, membalikkan tanah dengan cara tradisional menggunakan *digging stick*, namun sebagian petani sudah ada yang menggunakan sekop besi. Sementara itu, tugas perempuan adalah menanam, merawat, memanen, dan menjual hasil yang sistemnya dilakukan sendiri-sendiri

Hasil analisis data primer, menunjukkan bahwa rata-rata penguasaan lahan pertanian rumah tangga mencapai 3,31 ha berupa ladang (1,65 ha), kebun (1,31 ha) dan kolam (0,35 ha). Walaupun lahan yang dikuasai sangat luas, namun tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, terutama untuk menanam ubi jalar karena lahan sering tergenangi air pada waktu musim hujan. Kejadian ini hampir berulang setiap tahun, sehingga sering terjadi gagal panen ubi jalar, yang berdampak pada kejadian rawan pangan masyarakat setempat.

Bagi masyarakat Baliem, mengusahakan ternak babi dapat dibilang sebagai kewajiban karena fungsi babi dalam kegiatan sosial sangat banyak, seperti sebagai mahar, ritual adat/keagamaan, kematian, dan lain-lain. Babi juga sebagai simbol status sosial, semakin banyak

ternak yang dimiliki berarti status sosial keluarga tersebut semakin tinggi. Harga babi sekitar Rp 5 juta sampai 10 juta per ekor, lebih mahal daripada harga sapi (Rp 2 juta- 5 juta/ekor). Pemilikan ternak babi pada rumah tangga contoh berkisar antara 1-16 ekor dengan rata-rata 5 ekor per rumah tangga. Rata-rata nilai penguasaan ternak pada rumah tangga contoh adalah Rp 37,6 juta dan kontribusi terbesar (99,3%) berasal dari ternak babi, kemudian sapi (0, 5%) dan ayam ras.

Pola Konsumsi Pangan

Status gizi seseorang atau masyarakat berkaitan erat dengan kebiasaan makan orang atau masyarakat. Jenis makanan dan frekuensi makan menjadi penting artinya dalam konteks standar gizi. Makanan minimal harus mengandung zat-zat gizi yang diperlukan tubuh, seperti karbohidrat sebagai sumber tenaga, protein sebagai sumber pembangun, lemak, vitamin, dan mineral. Kebiasaan penduduk di pegunungan Jayawijaya umumnya dua kali sehari dan apabila terjadi banjir, frekuensi makan hanya 1 kali/hari. Pola ini berlangsung karena ibu sebagai penyedia makanan tidak dapat pulang pada tengah hari untuk mempersiapkan makanan bagi anggota keluarganya. Akibatnya, keluarga hanya makan pada pagi hari sebelum ibu berangkat ke kebun dan sore hari setelah ibu kembali dari kebun.

Makanan pokok utama adalah ubi jalar yang dimasak dengan cara dibakar atau dikenal dengan "bakar batu" (cara masak tradisional). Namun, bagi rumah tangga yang sudah mengenal alat masak, seperti panci/belanga, mereka juga terbiasa memasak ubi jalar dengan cara direbus. Hasil analisis data primer, apabila terjadi kondisi paceklik, akan terjadi perubahan baik dalam hal jumlah maupun jenis dan kualitas ubi jalar. Rumah tangga yang mengurangi jumlah ubi jalar yang dikonsumsi sebesar 61,5%, sedangkan yang beralih ke jenis lain seperti keladi sebesar 30,8% dan sisanya beralih ke kualitas ubi jalar yang dikonsumsi.

Jenis sayur dan buah-buahan yang dikonsumsi tergantung dari apa yang diusahakannya dari lahan pertaniannya atau dari hutan. Sayuran yang umum dikonsumsi adalah daun ubi jalar yang berasal dari produksi sendiri. Daun ubi jalar diolah dengan cara direbus dan air rebusan tersebut diberi minyak sayur atau minyak goreng sedikit untuk menambah rasa. Selain itu, cara pengolahan daun ubi jalar dengan cara dibakar bersama ubi jalar, biasanya daun ubi jalar ditaruh diatas ubi jalar yang dibakar diatas batu yang membara, yang dikenal bakar batu. Pola makan masih tergantung dari yang ada disekitarnya. Jika mereka menjual hasil produksinya digunakan untuk membeli beras, tahu, garam, minyak goreng, dll.

Hasil analisis data primer makanan sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi oleh rumah tangga dominan adalah ubi jalar + umbi lainnya (66,7%), diikuti ubi jalar + beras (20,0%) dan ubi jalar + pisang

(13,3%). Sementara itu, untuk pangan sumber protein nabati yang sering dikonsumsi adalah kacang-kacangan seperti kacang merah, sedangkan untuk protein hewani adalah ikan segar + daging babi (66,7%) dan ikan segar+ikan awetan (33,3%). Sebagian besar jenis pangan yang dikonsumsi berasal dari produksi sendiri atau dari hutan, kecuali ikan awetan yang berasal dari pembelian dan sekitar 75% beras diperoleh dari pemerintah.

Makanan bayi adalah air susu ibu (ASI) dan makanan pengganti (MP) ASI berupa umbi dan pisang yang dihaluskan. Pada waktu ASI, bayi sehat-sehat, namun setelah tidak mengkonsumsi ASI, anak menjadi kurus-kurus karena ibu pergi ke kebun. Anak dititipkan tetangganya, sehingga pola asuh tidak baik. Pada bayi tidak ditemukan gizi buruk karena umumnya orang Papua menyusui anaknya, namun pada anak balita berlaku sebaliknya, karena pemberian makanan tambahan (PMT) tidak diperhatikan.

Tugas seorang wanita di Papua sangat berat, selain berkebun, mengurus babi, menjual hasil kebunnya, dan menyiapkan makanan untuk keluarga. Wanita sudah dibeli dengan pemberian mahar berupa hewan babi. Selain itu, ada budaya bahwa uang adalah milik laki-laki. Sehingga pola asuh anak diserahkan kepada anak yang lain atau saudara/tetangga, anak cenderung dilepas. Anak-anak diberi pisang, ubi, keladi, dan belalang, bahkan tikus. Pemberian MP-ASI dari pemerintah berupa biskuit dan bubur. Namun untuk bubur, mereka kesulitan untuk memasaknya, karena ada budaya "bakar batu" dalam memasak makanan dan peralatan masak sangat terbatas. Dahulu, proporsi bantuan MP-ASI 20% berupa biskuit dan 80% berupa bubur, sekarang akan dibuat 50% bubur dan 50% biskuit.

Jumlah rumah tangga yang menyimpan beras hanya 13,0% dengan jumlah simpanan sekitar 12,5 kg. Beras tersebut berasal dari pembelian (50%) dan bantuan dari raskin (50%). Sementara itu, ubi jalar yang disimpan berasal dari produksi sendiri, selain dalam bentuk lumbung hidup (ubi jalar yang masih ditanah), rumah tangga juga menyimpan ubi jalar di rumahnya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Apabila telah habis, rumah tangga akan memanen ubi jalar lagi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan pada umumnya panen ubi jalar dilakukan setiap hari. Sebetulnya telah diperkenalkan cara pengolahan ubi jalar agar tahan lama, yaitu dengan cara diserut dan dikeringkan, namun masyarakat tidak menyukainya karena sudah terbiasa mengkonsumsi ubi jalar dalam bentuk ubi bakar atau ubi rebus.

Dalam penelitian ini data keragaman konsumsi pangan rumah tangga dikumpulkan dengan cara mengingat kembali (*recall*) 1 hari yang lalu dan pangan dikelompokkan menjadi 12 kelompok (padi-padian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, daging, telur, ikan, susu, kacang-kacangan, minyak/lemak, gula, dan lainnya). Semakin banyak kelompok pangan yang dikonsumsi, berarti keragaman konsumsi pangan semakin tinggi dan kualitas konsumsi semakin baik. Hasil analisis data primer menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga mengkonsumsi 5 kelompok

pangan yang berarti 42,7% dari yang seharusnya (kisaran 2-8 kelompok pangan).

Hasil analisis regresi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman konsumsi pangan rumah tangga menunjukkan bahwa faktor determinan yang signifikan adalah penguasaan lahan pertanian per kapita dan keikutsertaan rumah tangga dalam kegiatan sosial (Tabel 3.11). Lahan pertanian yang luas tidak menjamin terjadinya keragaman konsumsi pangan. Hal ini dikarenakan pola tanam yang diusahakan adalah monokultur ubi jalar sepanjang tahun. Keikutsertaan rumah tangga dalam kegiatan sosial berdampak positif terhadap keragaman konsumsi pangannya.

Tabel 3.11. Faktor Determinan Keragaman Konsumsi Pangan di Kabupaten Jayawijaya, 2006

Peubah	Parameter dugaan	T-hitung
Intersep	2.869469 ^A	4.671
Luas lahan/kapita (LMAN)	-2.002380 ^B	-1.859
Pendidikan isteri (PDIS)	0.162928	0.963
Pendapatan total rumah tangga (YTOT)	1.0968087E-8	0.324
Keikutsertaan kegiatan sosial (DKSO)	3.130612 ^A	3.807

R² = 0.7075; F-Value = 6.047

Keterangan: A dan B masing-masing menunjukkan status nyata pada selang kepercayaan 1% dan 10%.

Hampir setiap bulan rumah tangga di Kabupaten Jayawijaya mengalami kekurangan pangan (Tabel 3.12). Bahkan pada bulan Desember, jumlah rumah tangga yang kekurangan pangan semakin besar karena pada bulan ini terjadi musim hujan. Area tanam ubi jalar dilanda banjir, sehingga menjadi busuk, atau rusak. Genangan air ini dapat berlangsung 1-2 bulan dan terjadi setiap tahun. Penyebab utama banjir adalah penggundulan hutan akibat eksploitasi penggunaan kayu bakar dan pendangkalan DAS Baliem, sehingga tidak mampu menampung semua air hujan.

Hasil analisis persepsi rumah tangga tentang kondisi kelaparan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 86,7% rumah tangga khawatir tidak cukup makan pada masa yang datang; 60,0% rumah tangga pernah melakukan perubahan jenis pangan pokok yang mempunyai nilai sosial lebih rendah, misalnya mencari makanan di hutan; 93,3% rumah tangga mengurangi frekuensi makan atau jumlah makanan; 86,7% rumah tangga merasa tidak cukup makan; dan 33,3% rumah tangga yang anggota keluarganya mengalami kurang gizi.

Tabel 3.12. Jumlah Rumah Tangga yang Mengalami Kekurangan Pangan di Kabupaten Jayawijaya, 2006 (%)

Bulan	Jayawijaya
Januari	66,67
Februari	66,67
Maret	86,67
April	66,67
Mei	66,67
Juni	46,67
Juli	53,33
Agustus	66,67
September	46,67
Oktober	46,67
November	66,67
Desember	86,67

Sumber : Data Primer

Kelembagaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Kehidupan masyarakat Jayawijaya yang dikenal dengan masyarakat Baliem sangat unik dan khas. Melihat penampilan mereka sehari-hari timbul kesan bahwa mereka adalah orang-orang yang sederhana dengan peralatan yang termasuk jaman batu.

Pola Kekerabatan dan Pemukiman

Berbeda dengan masyarakat suku Jawa atau Sunda, pemukiman masyarakat Baliem lebih menyebar. Dalam suatu wilayah tertentu hanya terdiri dari beberapa pemukiman tradisional yang disebut *sili*, yang pada umumnya termasuk dalam klen yang sama. Pemukiman mereka cenderung bergeser tidak ditepi jalan tetapi di punggung bukit-bukit dengan alasan keselamatan babi-babi yang dimilikinya dan mendekati ladangnya. Terdapat kecenderungan bahwa yang tinggal di tepi jalan adalah orang-orang muda. Untuk menyelamatkan babinya dari kendaraan bermotor, mereka meninggikan pagar halaman rumah. Setiap rumah yang berada dipinggir jalan selalu diberi pagar yang agak tertutup dan relatif tinggi.

Setiap pemukiman berisi satu keluarga besar yang dapat berisi tiga generasi, yang didalamnya terdapat keluarga batih dengan orang tuanya, beberapa isteri dan anggota keluarga lainnya. Satu buah pemukiman umumnya terdiri dari satu atau lebih *honey* (pondok untuk laki-laki) dan beberapa *ebey* (pondok untuk perempuan) dengan bentuk bangunan yang sama, dapur dan kandang babi (hanya disekat dengan kayu) dalam bentuk bangunan yang memanjang di sebelah kanan atau kiri. Terdapat pemisahan pondok antara laki-laki atau suami dan pondok perempuan

atau isteri. Pada umumnya, satu *ebey* dihuni oleh satu isteri dengan ibu, kakak/adik ipar, atau anaknya. Seorang isteri mendapat tungku perapian untuk memasak yang terpisah dengan isteri lainnya, tetapi masih dalam satu bangunan memanjang yang sama.

Setiap klen mempunyai pimpinan yang disebut kepala klen dan beberapa klen juga berkelompok serta mempunyai pimpinan yang disebut kepala klen besar. Kepala klen mempunyai kekuasaan atas tanah klennya di berbagai lokasi dan mempunyai hak untuk membagi tanahnya kepada warganya berdasarkan jumlah isteri. Selain mempunyai wewenang dalam hal pembagian lahan, kepala klen juga memimpin upacara adat, seperti kematian, perkawinan; menentukan kapan mulai membuka ladang, bahkan mempunyai wewenang untuk mengusir warganya dari keanggotannya apabila tidak cocok dengan kepala klen.

Namun dengan dilarangnya perang oleh pemerintah yang merupakan salah satu tugas pokok laki-laki, sedikit demi sedikit membuat berkurangnya peranan dan fungsi kepala klen. Disisi lain, masyarakat sudah merasakan peranan pemimpin formal (petugas pemerintah), seperti aparat tingkat kecamatan atau desa, sehingga kepala klen melibatkan aparat pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Pola Kepemilikan Tanah

Tanah adalah milik masyarakat Baliem yang pengelolaannya diatur oleh klen berdasarkan musyawarah adat. Tanah tidak hanya tempat untuk menyambung hidup, tetapi juga untuk memikat anggota-anggota suatu kampung tertentu didalam suatu klen tertentu. Berkaitan dengan hal ini, penduduk pendatang tidak dapat memiliki tanah melalui jual beli, tetapi hanya hak pakai. Hampir semua lahan yang berlokasi di sekitar jalan besar masih dimiliki oleh penduduk asli, namun kendaraan angkutan umum yang melewati jalan tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh pendatang.

Masyarakat Baliem tidak menjual tanah dengan alasan tanah menjadi sempit dan akan mengganggu kelangsungan hidup keturunannya. Mereka menyadari apabila tanah dijual, maka keturunannya di masa mendatang tidak lagi dapat bertahan di wilayah tersebut. Pemberian hak pakai tanah kepada pendatang harus berdasarkan musyawarah adat yang dikoordinasi oleh kepala klen. Hal ini memperlihatkan sikap komunal dari masyarakat Baliem. Umumnya, setiap klen memiliki tanah di beberapa lokasi yang batas-batasnya hanya dibatasi secara alami, yaitu berupa batu, pohon, sungai, dan lain-lain. Tanah belum memiliki bukti kepemilikan seperti surat tanah.

Pembagian Peran Laki-laki dan Perempuan

Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan telah dilakukan secara turun temurun seperti pada Tabel 3.13 dan pembagian kerja

tersebut relatif tidak mengalami perubahan. Pada awalnya peran perempuan hanya berkebun, memelihara babi, mengasuh anak, dan pekerjaan rumah tangga. Namun, dengan tuntutan kebutuhan hidup yang baru seperti pakaian, alat dapur/makan, membayar sekolah, dan lain-lain; maka peran perempuan menjadi bertambah, yaitu menjual hasil kebunnya ke pasar kota. Dengan beban kerja yang berat dan banyak, perempuan sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk mengikuti kegiatan lain seperti PKK, posyandu, keagamaan, dan lain-lain.

Tabel 3.13. Pembagian Peran antara Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Jayawijaya

Laki-laki	Perempuan
-Perang	-Berkebun
-Menjaga keamanan kampung	-Memelihara babi
-Mengawal isteri	-Pekerjaan rumah tangga
-Menyelenggarakan pesta adat	-Mengasuh anak
-Merawat benda-benda adat	-Menjual hasil kebun
-Membuka hutan/kebun baru	

Sumber : www.papuaweb.org/dlib/lap/watch/2000-gizi.pdf

Dengan tidak adanya perang antarklen, maka laki-laki kehilangan salah satu pekerjaan utamanya. Walaupun memiliki waktu luang, mereka tidak mengambil alih atau membantu pekerjaan yang dibebankan kepada perempuan. Banyak ditemukan di jalan-jalan para isteri membawa hasil ladangnya seperti ubi jalar (hipere) dalam jumlah banyak menggunakan *noken* dengan berjalan kaki dari ladang ke rumahnya, didampingi dengan para suami yang juga berjalan kaki tetapi dengan tangan kosong.

Pasar sebagai Transaksi Dagang dan Fungsi Sosial

Pasar, selain tempat untuk jual beli hasil pertanian juga menjadi tempat interaksi sosial di antara masyarakat Baliem yang berlainan klen. Situasi pasar pada umumnya adalah para wanita berjualan hasil pertaniannya, tetapi para laki-laki hanya duduk-duduk sekedar mengobrol dengan sesama laki-laki dengan mengisap rokok. Terdapat kesan, pasar berfungsi seperti gedung pertemuan karena merupakan tempat berinteraksi bagi kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai wilayah. Mereka saling memberi kabar atau informasi tentang keadaan masing-masing daerahnya dan juga sekaligus tempat untuk merundingkan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Penjual hasil pertanian hanyalah penduduk setempat, karena pendatang tidak diperbolehkan menjual hasil pertanian. Pendatang dibolehkan menjual barang kelontong atau barang yang mereka tidak menjualnya di kios-kios dan tidak di pasar hasil pertanian seperti pasar Jibama yang ada di Wamena. Jenis hasil pertanian yang diperjualbelikan adalah ubi jalar, jagung, sayur-sayuran seperti wortel, kol, labu, terong

belanda, buah merah, keladi, pisang, dan lain-lain. Selain itu juga, diperdagangkan barang kerajinan tradisional, seperti noken (jaringan besar berfungsi sebagai wadah bawaan). Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti garam, minyak goreng, vetsin, atau babi.

Tampaknya diantara pedagang telah menyepakati harga dagangan yang dilakukan setiap hari sehingga harga barang sejenis di setiap pedagang relatif sama. Yang mengherankan adalah bagaimana mereka menentukan harga dagangan dengan volume tertentu, karena mereka tidak mengenal timbangan atau ukuran melainkan berdasarkan pengalaman dengan menggunakan tangan. Dalam transaksi tidak dilakukan tawar menawar, karena harga yang ditawarkan adalah harga tetap.

Penjual hasil pertanian berasal dari wilayah yang berjauhan dan datang dengan berjalan kaki melewati bukit-bukit dan gunung-gunung. Sebagai gambaran, dari Kecamatan Tiom ke pasar Wamena harus ditempuh jalan kaki selama tiga hari. Tidak semua desa dapat dilalui kendaraan roda empat karena pada umumnya jalan yang ada masih jalan setapak dan kondisi jalan tidak datar. Kalaupun ada jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat, jumlah kendaraan sangat sedikit sehingga frekuensi kendaraan yang menghubungkan desa dengan pasar sangat rendah. Ongkos transportasi sangat mahal. Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan *hardtop* dari kecamatan Kelila ke pasar Wamena mencapai Rp 70.000 per orang, sedangkan barang untuk satu noken biayanya Rp 10.000.

3.1.2. Penyebab Rawan Pangan dan Rawan Gizi kronis

Kabupaten Jayawijaya adalah kabupaten yang paling rawan dari 265 kabupaten di Indonesia menurut 10 indikator. Dengan menggunakan indikator tipe wilayah dan derajat kerawanan pangan, Kabupaten Jayawijaya yang menunjukkan kondisi tersebut. Berdasarkan karakteristik yang telah diuraikan seperti diatas dan diskusi dengan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan, kelompok masyarakat, serta hasil studi literatur, dan intuisi peneliti, penyebab kerawanan pangan dan rawan gizi kronis di Kabupaten Jayawijaya sangat kompleks mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan perhatian pemerintah. Secara lebih terinci penyebab kerawanan pangan dan rawan gizi kronis seperti berikut.

a. Topografi wilayah yang bergunung/berbukit-bukit

Kabupaten Jayawijaya memiliki wilayah yang bergunung/berbukit dan lereng dengan tingkat kemiringan lebih dari 45 derajat. Jarak antar-rumah tangga atau kampung/desa berjauhan dan berada diantara bukit-bukit. Kegiatan banyak dilakukan dengan berjalan kaki, mendaki, dan menuruni bukit-bukit yang cukup terjal, menyeberangi sungai kecil atau sungai Baliem yang lebar melalui jembatan gantung yang terbentang di atasnya.

Kondisi demikian menyebabkan waktu tempuh menjadi lebih panjang, sehingga berpengaruh pada volume dan mutu hasil pertanian yang diperdagangkan. Pada tahun 2005, satu dari enam kecamatan yang mengalami rawan pangan dan rawan gizi kronis diakibatkan tanah longsor, sehingga terisolasi dengan wilayah lain dan gagal panen karena lahan pertanian tertutupi dengan longsor tanah tersebut.

b. Musim yang tidak menentu (kering/hujan/*frost*)

Di Kabupaten Jayawijaya sering terjadi perubahan iklim yang ekstrim, misalnya curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan banjir bahkan pada waktu tertentu terjadi hujan es (*frost*) dan juga kekeringan yang menyebabkan kegagalan panen ubi jalar. Pada bulan Oktober-Desember masyarakat pergi ke hutan untuk mencari kelapa hutan (sumber lemak dan protein) sebagai makanan pokok alternatif atau substitusi. Pada musim ini umumnya kebun ubi jalar tidak terawat dimana ukuran umbi kecil-kecil dan jumlahnya juga sedikit, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.

DAS Baliem sudah mengalami pendangkalan akibat sedimen sungai yang tinggi dan tidak dilakukan pembersihan. Akibatnya, apabila turun hujan, sungai Baliem tidak mampu menampung air hujan secara keseluruhan. Kasus rawan pangan di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2005 terjadi di 6 kecamatan, dimana 4 kecamatan diantaranya (termasuk Kecamatan Kurulu lokasi penelitian) termasuk rawan pangan kronis dikarenakan banjir dan 1 kecamatan termasuk kecamatan transien karena terjadi *frost*. Eksploitasi penggunaan kayu bakar menyebabkan hutan-hutan menjadi gundul, tidak mampu menyerap air hujan secara maksimal.

c. Keterisolasian wilayah dan sarana transportasi terbatas

Sebagian besar jalan yang menghubungkan antardesa atau antar kecamatan masih berupa jalan setapak yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Topografi wilayah yang berbukit-bukit menyebabkan banyak wilayah yang terisolasi dan sulit dijangkau. Selain itu, jumlah kendaraan roda empat yang menghubungkan antara wilayahpun juga terbatas. Biaya transportasi sangat mahal apalagi dengan kenaikan harga bahan bakar minyak. Untuk pemasaran hasil pertanian, mengakibatkan margin pemasaran sangat tinggi.

Hasil kajian oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Papua, margin pemasaran dari produsen sampai pasar Wamena untuk ikan kakap merah mencapai Rp 5000 per kg, sehingga harga di tingkat konsumen menjadi mahal. Hasil wawancara menemukan harga beras sekitar Rp 15.000 per kg, sedangkan harga beras "Raskin" mencapai Rp 10.000 per kg.

d. Pola pertanian yang masih tradisional dan ketersediaan pangan tergantung pada alam

Makanan pokok penduduk adalah ubi jalar yang ditanam secara monokultur dan dipanen sesuai kebutuhan. Teknik budi daya tanaman ubi jalar dan tanaman lain masih sederhana, tanpa pemupukan sehingga produktivitasnya juga rendah. Ubi jalar yang ditanam adalah varietas lokal yang umbinya sangat besar dan mempunyai daya simpan yang lama di tanah. Dengan masuknya kultivar baru yang menghasilkan umbi yang kecil dan umur simpan lebih pendek juga berpengaruh pada ketersediaan ubi jalar di masyarakat. Selama lima tahun terakhir, cenderung terjadi anomali iklim yang berdampak pada perubahan musim sehingga terjadi pergeseran waktu tanam. Pada musim hujan terjadi banjir dan *froze*, sedangkan pada musim kemarau terjadi kemarau panjang. Selain ubi jalar, makanan pokok masyarakat adalah keladi/talas, pisang, dan kelapa yang diperoleh di hutan-hutan. Mereka kadang-kadang mengkonsumsi beras, namun terbatas pada beras dari pemerintah seperti beras raskin.

e. Pemasaran hasil pertanian terbatas di ibukota kabupaten saja

Kabupaten Jayawijaya merupakan wilayah sentra produksi pertanian seperti sayuran, ubi jalar, kopi, dan lain-lain. Hasil pertanian ini hanya terserap untuk kebutuhan domestik sehingga terjadi *over supply*. Kelebihan hasil pertanian tidak dapat diserap karena terbatasnya sarana jalan darat. Pemasaran ke luar wilayah hanya dapat dilakukan di Kabupaten Merauke (jika ada pesawat hercules masuk Wamena) dan Jayapura (jika ada pesawat) dalam jumlah kecil. Dengan menggunakan angkutan udara, biaya cargo relatif mahal (Rp 5.000/kg). Karena mahal-nya biaya transportasi, produk pertanian dari Wamena kalah bersaing dengan Jawa Timur (Surabaya), sehingga kebutuhan untuk Kabupaten Merauke banyak disuplai dari Jawa Timur.

f. Proses pemekaran wilayah di era otonomi daerah

Banyak daerah yang perkembangan wilayahnya agak lambat karena baru pemekaran. Pemekaran Kabupaten Jayawijaya tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi juga kecamatan dan desa. Jumlah kecamatan di Kabupaten Jayawijaya sebelum pemekaran kabupaten adalah 28, namun setelah pemekaran akhir tahun 2003 jumlah kecamatan hanya 15. Pada tahun 2004, terjadi pemekaran kecamatan menjadi 34 kecamatan/distrik. Perhatian pemerintah daerah masih terfokus pada proses pemekaran dengan segala aspeknya, seperti pemilihan kepala daerah/kecamatan/desa, fasilitas perkantoran, dan lain-lain.

g. Penyimpangan dana APBN dan otonomi khusus tahun 2004 dan 2005

Penggunaan dana dari APBD dan otonomi khusus tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan perekonomian di Kabupaten Jayawijaya mengalami "kemandegan". Semua instansi yang

kegiatannya bersumber dari dana APBD dan otonomi khusus mengalami stagnasi, tidak ada kegiatan sama sekali. Kalaupun ada, kegiatan tidak maksimal karena keterbatasan dana. Sebagai contoh, dana yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya sekitar 1-2 milyar rupiah, tetapi dana yang diterima hanya 100 juta rupiah. Demikian pula, jumlah pegawai juga berkurang secara signifikan termasuk jumlah bidan karena mereka tidak menerima gaji pegawai. Akibatnya, program-program yang telah ditetapkan di masing-masing instansi tidak berjalan.

h. Pola paternalistik dan ikatan klen yang kuat

Pola pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sangat tegas dan tidak fleksibel. Walaupun salah satu tugas pokok laki-laki yaitu perang sudah ditiadakan, tetapi laki-laki tidak mau mengambil sebagian peran yang ditugaskan pada perempuan, misalnya untuk mengasuh anak. Padahal tugas perempuan selain mengasuh anak sangat banyak dan melelahkan. Selain itu, pola sosial budaya masyarakat juga menempatkan laki-laki sebagai penentu dalam segala segi kehidupan dan wanita sebagai penerima keputusan. Apabila jumlah babi yang dimiliki semakin banyak (padahal selama ini yang memelihara adalah wanita), maka suami akan menikah lagi dengan mahar berupa ternak babi tersebut.

i. Pengelolaan lahan komunal dan tergantung pada kepala klen/adat

Pembukaan lahan, kapan mulai mengolah lahan dan pembagian lahan untuk setiap anggota warganya tidak dilakukan secara sembarangan tetapi ditentukan oleh kepala klen/adat. Lahan dilarang untuk diperjual belikan, dan bagi yang ingin mengusahakan hanya diberi hak pakai. Sebetulnya masih banyak lahan yang dapat diusahakan, namun dengan aturan adat seperti tersebut diatas dan ada kecenderungan kepala klen lebih senang berada di perkotaan, maka pembukaan lahan juga mengalami stagnasi. Disisi lain, dengan dilarangnya jual beli lahan, investasi sulit untuk masuk dan pembangunan ekonomi juga terhambat.

j. Pendidikan dan pengetahuan masih rendah

Penduduk yang berumur 30-70 tahun sebagian besar buta huruf. Rendahnya pendidikan menyulitkan masyarakat untuk mengembangkan diri dalam aktivitas pembangunan. Apalagi adanya pola sosial-budaya yang kuat sehingga masyarakat hanya melakukan kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh adat.

Hampir semua orang tua di daerah pedalaman belum paham mengenai pentingnya pendidikan. Banyak orang tua berpikir anak dilahirkan untuk membantu orang tuannya. Sehingga begitu anak sudah berjalan dan dapat diperintah untuk mengerjakan sesuatu menjadi tumpuan harapan orang tuanya. Sebagian orang tua merasa rugi apabila anaknya mengikuti sekolah, sedangkan mereka harus menyediakan makannya. Mereka ingin mendapatkan hasil langsung ketika anaknya

pergi sekolah seperti ketika mereka pergi ke hutan dan langsung mendapat makanan (Kompas, 16 Maret 2005).

k. Konsumsi pangan tergantung pada komoditas yang ditanam dan di hutan

Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum sesuai dengan anjuran/pedoman pola makan sehat seperti pada pedoman Pola Pangan Harapan. Secara umum, jumlah, jenis dan mutu konsumsi masih rendah. Pola makan pokok adalah ubi jalar yang dikonsumsi hanya dengan daun ubi jalar atau daun pakis hutan. Peran minyak goreng bukan untuk menggoreng ikan atau daging, tetapi sebagai penyedap makan agar tidak "hambar". Minyak goreng disatukan dengan makanan tersebut dan ditambah dengan garam dan kadang-kadang penyedap rasa (bumbu masak). Pada umumnya mereka makan dua kali sehari, yaitu pagi dan sore hari.

Keadaan ini secara tidak langsung disebabkan karena ibu sebagai penyedia makanan tidak pulang pada siang hari. Ibu berangkat ke kebun pada pagi hari setelah anggota keluarga makan pagi dan kembali dari kebun sore hari. Kekurangan pangan dan gizi pada anak balita diikuti dengan status kesehatan yang kurang baik serta pola asuh yang salah, mengakibatkan banyaknya kasus gizi buruk bahkan busung lapar pada anak balita.

1. Peranan jender yang tidak seimbang

Terdapat pembagian kerja antara wanita dan laki-laki yang dilakukan secara turun temurun. Pembagian tugas tersebut memberatkan perempuan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jayawijaya Watch Project (2000) memperlihatkan perempuan perdesaan bekerja dua kali lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Kelebihan beban ini mengakibatkan perempuan tidak mempunyai waktu untuk pergi ke fasilitas kesehatan jika menderita sakit, tidak dapat membawa anak ke Posyandu, dan kehilangan kesempatan untuk mengikuti kegiatan wanita.

3.1.3. Alternatif Kebijakan Penanggulangan Rawan Pangan dan Gizi Kronis

Pembangunan manusia secara utuh hanya dapat dilakukan, apabila langkah teknis dan ekonomis dilaksanakan, setelah berbagai masalah sosial budaya suatu masyarakat diketahui dan dijadikan tumpuan dalam penentuan tahapan pelaksanaan pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan ketahanan pangan. Proses pembangunan juga merupakan konsep yang optimistik. Masyarakat yang sukarela bersedia untuk berpartisipasi dalam pembangunan karena mereka mempunyai harapan yang diharapkan akan terwujud melalui proses pembangunan tersebut.

Dalam hal ini, manusia baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat penyedia penggerak berbagai aset dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dan ancaman. Selain itu, pembangunan perdesaan akan berhasil apabila didasarkan potensi sumber daya alam dan manusia mampu memanfaatkan potensi tersebut secara optimal. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, masyarakat di Kabupaten Jayawijaya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lainnya misalnya di pulau Jawa atau Sumatera. Oleh karena itu tiga hal pokok yang harus dilakukan adalah :

a. Komitmen yang kuat dari pemerintah, legislatif dan masyarakat

Komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah, DPR, dan DPRD untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya merupakan unsur pokok dan utama. Mengingat, keterbelakangan wilayah ini tidak hanya pada aspek sumber daya manusia tetapi juga infrastrukturnya.

Namun, perlu diingat bahwa pembangunan yang dilaksanakan tetap harus memperhatikan modal sosial atau norma sosial, dan kearifan lokal, untuk menghindari distorsi-distorsi yang diperkirakan muncul agar pembangunan yang telah dicanangkan dapat berjalan lancar. Sejalan dengan hal ini, masyarakat juga mempunyai kemauan untuk mengembangkan diri untuk mengejar ketertinggalan tanpa kehilangan identitas diri. Masyarakat berpartisipasi di segala bidang pembangunan yang diprogramkan.

b. Membuka keterisolasian wilayah (antardesa/kecamatan/kabupaten)

Penyediaan jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat yang menghubungkan masyarakat antardesa atau antarkecamatan, bahkan antarKabupaten adalah penting untuk dilakukan. Hal ini untuk menghilangkan keterisolasian wilayah. Usaha ini tentu akan memerlukan waktu yang lama mengingat topografi wilayah di Kabupaten Jayawijaya yang berbukit-bukit sehingga pembukaan jalan akan memerlukan biaya yang sangat besar.

Pelaksanaan program ini dapat menggunakan dana pembangunan Provinsi Papua yang jumlahnya relatif besar dengan ditetapkannya sebagai daerah otonomi khusus. Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mempunyai *political will* yang kuat untuk mencanangkan kebijakan/program ini secara komprehensif dengan tahapan yang jelas dan berkelanjutan. Belajar dari pengalaman yang lalu, pemerintah tidak serius membuat jalan tembus yang menghubungkan Wamena dengan Jayapura. Pembuatan jalan ini sudah dirintis pada tahun 1980, namun pekerjaan tersebut mengalami kemandegan dan tidak ada realisasinya sampai sekarang.

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Penduduk Jayawijaya yang dikenal dengan masyarakat Baliem adalah masyarakat dengan pola pikir yang sederhana, melakukan sesuatu sesuai aturan yang selama ini sudah ada, patuh pada perintah terutama kepada kepala klen. Untuk merubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak diperlukan waktu yang cukup lama. Bukan berarti mereka tidak mau untuk melakukan perubahan, namun lebih disebabkan “ketidaktahuan” harus berbuat apa selain yang selama ini sudah dijalani. Sebagai contoh, sebagian besar laki-laki di wilayah ini sudah tidak memakai pakaian yang dikenal dengan sebutan *koteka*. Hal ini menunjukkan bahwa mereka juga mau melakukan perubahan pada dirinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dengan peningkatan partisipasi mereka terutama dimulai umur muda dan anak-anak terhadap pendidikan formal maupun informal. Dengan pendidikan, pola sikap, pola pikir dan pola tindak akan berubah. Ini merupakan sarana untuk memasukkan pembaharuan-pembaharuan seperti dalam hal pembangunan pertanian, kesehatan, dan lain-lain.

Selain ketiga hal pokok yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, beberapa kebijakan/program yang secara paralel perlu dilaksanakan adalah seperti berikut :

i. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama dengan mendirikan atau merehabilitasi sekolah dasar (SD) yang dekat dengan permukiman penduduk. Setiap kecamatan memang sudah ada Puskesmas, namun karena jarak antardesa atau antarkampung cukup jauh, maka perlu ditambah sarana kesehatan dengan peningkatan jumlah Puskesmas pembantu (Pustu) dan poliklinik desa (politdes).

ii. Peningkatan jumlah tenaga pertanian dan kesehatan

Perilaku hidup sehat dan hidup bersih masyarakat masih sangat rendah. Sementara jumlah petugas pertanian terutama PPL dan petugas kesehatan seperti bidan dan mantri kesehatan masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang pertanian dan kesehatan diperlukan penambahan tenaga-tenaga tersebut. Pengetahuan di bidang pertanian mencakup teknik budi daya dan teknologi pasca panen serta pemasarannya, sedangkan untuk kesehatan terutama dikaitkan dengan aspek kebersihan perumahan dan lingkungan, aspek kesehatan melalui imunisasi anak balita, MCK dan lain-lain.

Di Kabupaten Jayawijaya sering muncul kejadian luar biasa (KLB) muntaber yang merenggut puluhan orang meninggal, seperti kejadian pada bulan April 2006 dan juga peningkatan jumlah orang yang mende-

rita penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Mengingat, jarak antardesa dan kampung berjauhan, serta transportasi terbatas serta biaya hidup yang tinggi, maka agar para tenaga pertanian dan kesehatan tersebut "betah" dan dapat bekerja dengan baik maka tunjangan dalam bentuk uang maupun fasilitas harus memadai. Selain itu juga diperlukan upaya peningkatan motivasi dan mental tenaga pertanian dan kesehatan untuk dapat melayani masyarakat dengan baik dan sabar.

iii. Diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga yang melibatkan laki-laki

Sumber pendapatan rumah tangga selama ini hanya pada hasil pertanian dengan skala usaha yang kecil, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun untuk kehidupan yang sangat sederhana. Rata-rata jumlah anggota keluarga mereka besar, terdiri dari keluarga inti dan keluarga batih. Memperhatikan pola pembagian yang tegas antara laki-laki dan perempuan dan salah satu tugas laki-laki untuk berperang sudah tidak ada, maka orientasi penciptaan lapangan kerja sebaiknya untuk laki-laki dalam rangka memanfaatkan waktu luang mereka. Pemerintah sudah menciptakan lapangan kerja untuk jangka pendek melalui program padat karya membersihkan parit-parit dan jalan-jalan di wilayah kota. Penciptaan lapangan kerja jangka panjang dapat dilakukan dengan pengembangan industri kerajinan, industri berbasis pertanian, seperti buah merah, ubi jalar, kopi, industri pariwisata, dan lain-lain. Penciptaan lapangan kerja ini tidak hanya tugas dari pemerintah, tetapi semaksimal mungkin melibatkan pihak swasta.

iv. Pembukaan lahan untuk pengembangan areal tanaman ubi jalar

Ubi jalar mempunyai fungsi yang banyak, tidak hanya sebagai makanan pokok, tetapi juga untuk ritus keagamaan dan makanan babi. Secara sosial, manusia dengan ubi jalar mempunyai hubungan psikososial. Di sisi lain, sebagian lahan yang sebelumnya untuk tanaman ubi jalar sudah bergeser menjadi sawah untuk tanaman padi. Oleh karena itu, kebijakan pembukaan lahan untuk pengembangan areal tanam ubi jalar menjadi hal yang penting. Pada tahun 2005, pemerintah melaksanakan program pengembangan areal tanaman ubi jalar seluas 250 ha dengan cakupan 5 kelompok dengan dana APBN (dana Bantuan Langsung Masyarakat/BLM). Untuk setiap kelompok diberikan bantuan sebesar Rp 65 juta untuk biaya pembukaan lahan hingga panen, termasuk biaya alat dan tenaga kerja. Pada tahun 2006, direncanakan lahan yang dikembangkan seluas 500 ha dimana 150 ha menggunakan dana otonomi khusus. Ada 5 kelompok yang masing-masing mendapat dana Rp 80 juta. Selain itu, pemerintah hendaknya juga membantu petani lain dengan memberi bantuan bibit ubi jalar dan peralatannya.

v. Pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik

Salah satu penyebab kerawanan pangan adalah banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, upaya yang sebaiknya dilakukan adalah: a) mengeruk sedimen DAS Baliem, agar volume air hujan yang tertampung dalam jumlah banyak, sehingga tidak menimbulkan banjir pada lembah Baliem; b) penghijauan kembali hutan-hutan yang gundul akibat pengambil kayu untuk bangunan dan bahan bakar; serta 3) pembukaan lahan baru yang subur terutama pada daerah yang tidak banjir dan topografi yang mudah dijangkau dengan memperhatikan aspek lingkungan.

vi. Bantuan pangan berupa beras perlu ditinjau kembali

Masyarakat Baliem selama ini mengkonsumsi ubi jalar dan keladi sebagai makanan pokok utamanya dengan proses pemasakan yang khas ("bakar batu"). Pemerintah pernah memberi bantuan pangan berupa olahan ubi kayu "gogik" kepada masyarakat, namun makanan tersebut diberikan ke ternak babi karena tidak sesuai dengan pola makanannya.

Bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah berupa beras. Bagi mereka, bantuan ini menyulitkan karena tidak mempunyai panci untuk memasaknya, sehingga bantuan beras dimasak secara berkelompok dengan melibatkan rumah tangga yang mempunyai panci. Selain itu, untuk makan nasi, mereka juga masih memerlukan lauk-pauk yang proses masaknya juga pakai alat masak. Masyarakat di kota memang sudah mengenal makan nasi, namun harga beras di pasar sangat mahal sekitar Rp 10.000 - 15.000/kg. Kondisi ini diduga menyebabkan jumlah bantuan beras dalam bentuk program beras keluarga miskin (raskin) dan bantuan bencana alam yang sampai ke masyarakat relatif kecil. Diperoleh informasi dari masyarakat di desa, mereka hanya mendapat beras dua kilogram dan itupun tidak setiap bulan.

vii. Peningkatan pengetahuan pangan, gizi, dan kesehatan melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

Pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi serta perilaku hidup sehat dan bersih masih rendah. Oleh karena itu, upaya peningkatan pengetahuan dan pendidikan gizi dan kesehatan melalui KIE harus dilakukan secara kontinyu dengan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Posyandu perlu diaktifkan kembali. Pada tahap awal, kader posyandu dari pihak pemerintah seperti bidan, dan kemudian secara bertahap melibatkan masyarakat setempat untuk kelangsungan kegiatan ini.

viii. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan/program terkait dengan pangan, gizi, dan kesehatan

Pemerintah Pusat melalui Dewan Ketahanan Pangan telah membentuk tim yang melibatkan lintas sektor untuk menangani berbagai

permasalahan di bidang pangan termasuk masalah rawan pangan dan gizi kronis. Di Kabupaten Jayawijaya, tim telah terbentuk namun perlu diaktifkan kembali dan melakukan tindakan nyata dalam bentuk program atau kegiatan terkait dengan masalah pangan, gizi, dan kesehatan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah advokasi ke berbagai pihak terutama pemegang kendali daerah, seperti Bupati dan DPRD mengenai pertanian serta ketahanan pangan dan gizi.

ix. Kegiatan penyadaran jender

Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan kepala klen/adat dan tokoh masyarakat melalui pendekatan kelompok. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan yang lain, misalnya pelatihan praktis tentang kesehatan dan gizi, kegiatan pertanian, dan lain-lain.

3.2. Provinsi Kalimantan Barat

3.2.1. Karakteristik Wilayah dan Rumah Tangga

Sumber daya Alam

Luas wilayah Kabupaten Sambas adalah 6.394,7 km² atau sekitar 4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dari luasan tersebut seluas 537 230 Ha merupakan kawasan budi daya, dimana sebagian dari kawasan budi daya tersebut (70.298 ha) berupa lahan gambut. Secara geografis, wilayah Kabupaten Sambas didominasi oleh lahan dataran rendah dengan kemiringan < 2% yaitu seluas 224.651 ha. Jenis tanah yang dominan di Kabupaten Sambas adalah tanah aluvial mencapai 298.738 ha dan tanah podsolik merah kuning seluas 251.066 ha.

Kabupaten Landak memiliki luas areal 9.909,10 km² atau 5,67% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Dari luasan tersebut, 637.823 ha merupakan kawasan budi daya dan lahan gambut (114.214 ha). Di wilayah Kabupaten Landak dominan lahan dengan kemiringan > 40% yang mencapai luasan sebesar 354.785 ha. Jenis tanah yang dominan di Kabupaten Landak adalah podsolik merah kuning dengan total luas sebesar 606.535 ha. Dengan kondisi geografi dan topografi seperti itu, maka masalah aksesibilitas sarana dan prasarana di berbagai wilayah terutama daerah yang terpencil masih menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi, terutama terkait dengan masalah distribusi dan transportasi komoditas termasuk komoditas pangan (Tabel 3.14).

Lahan pertanian di Kabupaten Sambas relatif luas, yaitu 35% dari total wilayahnya. Luasan tersebut terdiri dari lahan sawah sekitar 10%, lahan kering 5%, dan kebun sekitar 20%. Selain itu, lahan hutan mencapai proporsi luas yang sama dengan lahan pertanian. Namun demikian, di Kabupaten Sambas masih terdapat lahan yang belum

termanfaatkan berupa semak belukar/alang-alang yang mencapai sekitar 18% (Tabel 3.15).

Tabel 3.14. Karakteristik Sumber daya Alam Kabupaten Sambas dan Landak

Aspek	Kabupaten Sambas	Kabupaten Landak
Geografi dan Topografi	32,1% wilayah dengan kemiringan < 2%; 27,0% kemiringan 2-15% ; 22,8% kemiringan 15 – 40 % dan 18,0% kemiringan >40 %	30,1% wilayah dengan kemiringan < 2%; 26,2% kemiringan 2-15% ; 1,1% kemiringan 15 – 40 % dan 42,6% kemiringan > 40%
Jenis tanah	Organosol, aluvial, podsolik, latasol dan podsolik merah kuning, tekstur tanah halus	Organosol, aluvial, podsolik, latasol dan podsolik merah kuning, tekstur tanah sedang
Iklim	Rata-rata curah hujan tahun 2004: 184 mm; 2003: 284 mm. Curah hujan tertinggi di Kecamatan Pemangkat dan terendah di Kecamatan Teluk Keramat. Jumlah hari hujan tahun 2004: 75 dan 2003: 117	Rata-rata curah hujan tahun 2003 sebesar 285 mm, curah hujan tertinggi pada bulan April mencapai 182 hari di Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Ngabang dan Menjalin 129 hari.

Sumber :BPS. Kalimantan Barat Dalam Angka, 2005.

Tabel 3.15. Tata Guna lahan di Kabupaten Sambas dan Landak (%)

No	Penggunaan lahan	Kabupaten Sambas	Kabupaten Landak
1.	Pemukiman	1,99	0,67
2.	Sawah	10,29	7,41
3.	Tanah kering	5,14	8,36
4.	Kebun	19,34	21,74
5.	Hutan	35,28	14,04
6.	Semak belukar/alang2	17,72	39,13
7.	Lain-lain	9,77	8,55

Sumber: BPS. Kalimantan Barat Dalam Angka, 2005

Sumber daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2004 adalah 476.162 jiwa. Dari sejumlah tersebut, sebesar 50,07% adalah wanita. Sedangkan untuk Kabupaten Landak pada periode yang sama jumlah penduduknya sebesar 307.142 jiwa, dengan proporsi penduduk wanita mencapai hampir 52% (Tabel 3.16).

Tabel 3.16. Jumlah Keluarga, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sambas, Tahun 2002 – 2004

Uraian	2002	2003	2004
Kepala keluarga	99.507	101.723	103.617
Jumlah penduduk (orang)	467.196	477.661	484.861
Rata-rata anggota rumah tangga (orang)	4,70	4,70	4,68
Jumlah desa	182	182	183
Kepadatan penduduk (orang/Km ²)	73	75	76
Kepadatan penduduk per desa (orang/desa)	2.567	2.625	2.650

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari waktu ke waktu jumlah keluarga, jumlah penduduk, dan kepadatannya menunjukkan peningkatan. Hal ini berimplikasi pada semakin besarnya tantangan pemenuhan kebutuhan pangan dan upaya penanggulangan kemiskinan serta mengatasi rawan pangan. Sektor pertanian merupakan penyerap tenaga terbesar di Kabupaten Sambas dimana pada tahun 2000 menyerap lebih dari 78% atau lebih dari 183 ribu dari total angkatan kerja. Karakteristik rumah tangga contoh di Kabupaten Sambas dan Landak disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17. Karakteristik Rumah Tangga Contoh di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006

Uraian	Kabupaten	
	Sambas	Landak
Umur KK (tahun)	45,44	42,47
Pendidikan formal KK(tahun)	5,36	8,75
Pekerjaan utama KK (%)		
1.Pertanian	100	82,35
2.Nonpertanian	-	17,65
Umur isteri (tahun)	41,4	37,12
Pendidikan formal isteri (tahun)	5,89	8,24
Pekerjaan utama isteri (%)		
1.Pertanian	90,91	76,92
2.Nonpertanian	9,09	23,08
Jumlah anggota RT (Orang)	4,55	4,65
Jumlah anak (Orang)	2,7	2,6
Jml ART anak usia balita (0-5 th) ¹⁾	1,27 (65)	1,0 (40)
Jml ART yang putus sekolah (Orang) ¹⁾	2,25 (20,0)	1,0 (10,0)
Jml ART yang bersekolah (Orang)	1,5	1,85
Jml ART yang bekerja (Orang)	1,6	1,75
Jml ART yang bekerja < 15 tahun (Orang)	-	-
Jml ART yang bekerja >= 15 tahun (Orang)	1,6	1,79

¹⁾ Rataan dari jumlah responden yang menjawab

Sumber: Data primer

Gambaran mikro di lokasi contoh Kabupaten Landak nampaknya tidak konsisten dengan kondisi makro wilayah. Penerima BLT di desa contoh yang menjadi salah satu indikator rumah tangga rawan pangan dan kriteria pengambilan contoh ternyata banyak ditemui penyimpangan sasaran, sehingga kondisi tingkat pendidikan KK/istri dan karakteristik rumah tangga yang dianalisis disini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi agregat wilayah Kabupaten Landak.

Sesuai dengan sumber daya perdesaan, sebagian besar KK bekerja di sektor pertanian, hanya sebagian kecil KK yang bekerja di non-pertanian. Untuk rumah tangga contoh di Kabupaten Sambas, 100% KK bekerja di sektor pertanian, namun untuk pekerjaan istri sebagian kecil masih ada yang bekerja di nonpertanian. Di Kabupaten Sambas dan Landak, jumlah anggota rumah tangga (JART) rata-rata berkisar 4 – 5 dengan jumlah anak antara 2 – 3 orang. Di kedua desa umumnya rumah tangga contoh memiliki anak balita dan memiliki anak yang putus sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mereka potensial memiliki masalah gizi dan kesehatan, karena anak balita merupakan salah satu golongan yang termasuk rentan terhadap gizi dan kesehatan. Selain itu, adanya ART yang putus sekolah (dalam hal ini diukur dari wajib belajar 9 tahun) mengindikasikan masih rendahnya kualitas pendidikan ART tersebut. Adanya anak yang putus sekolah disini menurut informasi responden penyebab utamanya adalah karena lokasi sekolah yang cukup jauh, dan sebagian menyatakan memang anaknya malas.

Sesuai dengan tujuan penelitian responden yang diteliti adalah rumah tangga rawan pangan, ternyata sebagian besar KK bekerja di sektor pertanian, sesuai dengan data pendataan BPS (2005) bahwa sebagian besar rumah tangga miskin di perdesaan bekerja di sektor pertanian, rawan pangan identik dengan kemiskinan. Sehubungan dengan hal diatas tampak bahwa pekerjaan utama KK adalah sebagai petani (pemilik maupun penggarap) baik sebagai petani sawah maupun lahan kering (kebun atau tegal) sesuai dengan wilayah agroekosistem. Di kedua lokasi penelitian JART yang bekerja berkisar 1,6 sampai dengan 1,75, artinya rata-rata istri responden juga bekerja baik di pertanian maupun nonpertanian. Disamping itu, sebagian KK juga bekerja di kegiatan *off-farm*, baik sebagai buruh tani maupun bekerja/mencari kayu di hutan, seperti yang banyak ditemukan di Kabupaten Sambas.

Perekonomian

Dalam bahasan ini, perekonomian Kabupaten Sambas didekati dengan karakteristik pertumbuhan dan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang disajikan atas harga konstan akan menggambarkan tingkat pertumbuhan riil perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Apabila PDRB dibagi dengan jumlah

penduduk masing-masing tahun, maka akan tercermin tingkat perkembangan pendapatan per kapita penduduk. PDRB juga merupakan salah satu indikator dan alat evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

PDRB Kabupaten Sambas atas harga berlaku pada tahun 2005 (harga konstan 1993) sebesar Rp 717,9 milyar. Nilai PDRB tahun 2005 lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula PDRB per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang sama. PDRB per kapita pada tahun 2005 sebesar Rp 5,76 juta, sedangkan pada tahun 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp 5,28 juta dan Rp 4,86 juta.

Kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Sambas adalah dari sektor pertanian. Kontribusi ini semakin menurun dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2003 mengalami peningkatan, yaitu dari 31,96% pada tahun 2002 menjadi 31,99% pada tahun 2003 (Tabel 3.18). Setelah sektor pertanian, kontribusi tinggi berikutnya berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai sekitar 30%.

Tabel 3.18. Perkembangan Peranan Masing-masing Sektor terhadap Pembentukan PDRB di Kabupaten Sambas, tahun 2000 – 2005 (%)

No.	Sektor	Kontribusi (%)					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Pertanian	32,29	32,06	31,96	31,99	31,83	31,72
2.	Pertambangan dan penggalian	0,23	0,25	0,26	0,27	0,27	0,29
3.	Industri pengolahan	17,01	16,86	16,67	16,55	16,43	16,30
4.	Listrik dan air minum	0,44	0,51	0,51	0,52	0,54	0,54
5.	Bangunan	2,20	2,17	2,16	2,12	2,07	2,04
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	30,73	30,54	30,38	30,20	30,17	30,05
7.	Pengangkutan dan komunikasi	6,32	6,47	6,71	6,91	7,09	7,32
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	5,93	6,06	6,17	6,25	6,27	6,32
9.	Jasa-jasa	4,85	5,07	5,18	5,19	5,33	5,41

Sumber : Renstra Kabupaten Sambas 2002-2006

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sambas periode 2000-2005 paling besar pada tahun 2005 yaitu 2,63% (Tabel 3.19). Pada tahun 2005, peningkatan ini dipicu oleh kontribusi yang besar dari sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai lebih dari 8% serta sektor pengangkutan dan komunikasi hampir 6%.

Tabel 3.19. Laju Pertumbuhan Sektor Pembentukan PDRB atas Harga Konstan di Kabupaten Sambas, tahun 2000-2005 (%)

No.	Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Pertumbuhan Ekonomi	1,38	2,50	2,16	2,13	2,39	2,63
2.	Pertumbuhan Sektor						
	- Pertanian	-4,87	1,78	1,83	2,24	1,86	2,30
	- Pertambangan dan penggalian	11,43	12,59	6,14	3,72	6,14	8,16
	- Industri pengolahan	5,34	1,65	1,00	1,39	1,62	1,85
	- Listrik dan air minum	31,71	16,48	2,90	3,76	6,15	4,26
	- Bangunan	4,63	1,40	1,40	0,25	0,22	0,81
	- Perdagangan, hotel dan restoran	2,46	1,86	1,64	1,53	2,27	2,23
	- Pengangkutan dan komunikasi	6,14	5,01	5,86	5,21	4,97	5,96
	- Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	9,07	4,68	3,97	3,49	2,80	3,41
	- Jasa-jasa	7,30	7,21	4,40	2,31	5,16	4,18

Sumber : Renstra Kabupaten Sambas 2002-2006

Di tingkat rumah tangga contoh di kedua kabupaten penelitian, sumber pendapatan rumah tangga dibedakan antara pertanian dan non-pertanian (Tabel 3.20). Pangsa pendapatan pertanian rumah tangga contoh di Kabupaten Sambas mencapai 76% dan Landak lebih dari 78%. Hal ini searah dengan kondisi jenis pekerjaan utama KK maupun istri di kedua desa penelitian yang sebagian adalah di sektor pertanian. Terlihat bahwa di sektor pertanian sendiri, pangsa pendapatan yang berasal dari luar usahatani memberi kontribusi yang dominan. Dalam hal ini, sebagian besar rumah tangga contoh adalah petani yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga bekerja di lahan orang lain dan atau menumpang garap pada lahan orang tua atau saudara. Sedangkan di Kabupaten Landak pendapatan rumah tangga yang berasal dari tegal/pekarangan/kolam cukup signifikan karena sebagian besar rumah tangga contoh memiliki kebun karet yang digarap sendiri.

Untuk pendapatan di luar pertanian, pangsa pendapatan yang bersumber dari lainnya di Sambas cukup dominan, dalam hal ini kebanyakan berasal dari pendapatan transfer (dari kiriman). Kiriman pada umumnya dari saudara/famili yang bekerja di luar daerah baik dalam negeri maupun dari luar negeri, seperti Malaysia dan Arab Saudi. Sedangkan di Kabupaten landak, sumber pendapatan rumah tangga contoh yang berasal dari jasa cukup besar (lebih dari 10%).

Modal usaha baik usaha pertanian maupun usaha nonpertanian biasanya diperoleh dari modal sendiri maupun dari pinjaman. Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa hanya sebagian kecil rumah tangga yang meminjam untuk modal usaha atau untuk kebutuhan sehari-hari yakni sekitar 2 – 3,6%. Sumber pinjaman yang berasal dari lembaga sosial, BMT dan koperasi cukup berperan dalam menyediakan pinjaman tersebut (Tabel 3.21). Di Kabupaten Sambas, rumah tangga meminjam modal

umumnya untuk modal usaha pertanian. Hal ini karena di desa contoh penelitian di Sambas terdapat program peremajaan tanaman jeruk, dimana bibit awalnya merupakan bantuan pemerintah. Untuk pengelolaan awal biasanya petani mencari pinjaman ke pihak lain. Sementara, di Landak selain untuk modal usaha, rumah tangga contoh juga meminjam untuk kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.

Tabel 3.20. Proporsi Sumber Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Sambas dan Landak (%)

Sumber Pendapatan	Kabupaten	
	Sambas	Landak
1. Pertanian	75,57	78,35
Usahatani padi	9,96	11,14
Usahatani nonpadi	9,59	2,42
Tegal/pekarangan/kolam	8,59	18,47
Peternakan	0,32	1,30
Nelayan	0,00	0,00
Luar usahatani	47,11	45,02
2. Nonpertanian	24,43	21,65
PNS/swasta/pensiunan	0,00	0,00
Usaha sendiri	0,00	1,18
Buruh industri	0,00	0,00
Buruh bangunan	0,00	1,50
Pedagang	1,49	1,94
Jasa	1,24	10,39
Lainnya	21,69	6,65
Total Pendapatan	100,00	100,00
(Rp /kapita/tahun)	(1509713)	(1698882)

Sumber: Data primer

Tabel 3.21. Akses Rumah Tangga terhadap Permodalan di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006

Uraian	Kabupaten	
	Sambas	Landak
1. Jumlah RMT yang pernah pinjam (%)	2,02	3,57
2. Sumber pinjaman (%)		
a. Koperasi	50,00	33,33
b. B M T	-	66,67
c. Lembaga sosial	50,00	-
3. Penggunaan pinjaman (%)		
a. Modal pertanian	100,00	-
b. Modal usaha	-	33,33
c. Pendidikan	-	33,33
d. Kebutuhan sehari-hari	-	33,33

Sumber: Data primer, 2006.

Pada umumnya kesempatan kerja di daerah perdesaan sangat terbatas, kecuali untuk sektor pertanian, Tabel 3.22. menyajikan persepsi rumah tangga contoh terhadap pasar tenaga kerja. Umumnya responden menyatakan bahwa mencari pekerjaan adalah susah. Adapun alasan utama sulitnya mencari pekerjaan adalah karena tidak ada lowongan selain ketrampilan terbatas. Sebagian mereka juga pernah mengalami ditolak ketika mencari pekerjaan. Selain tidak ada lowongan, alasan penolakan umumnya karena ketrampilan terbatas dan tidak sesuai kualifikasi. Sebagai ilustrasi, di desa contoh di Kabupaten Sambas kesempatan kerja yang tersedia adalah dominan pertanian. Bagi yang tidak memiliki lahan biasanya berburuh di lahan orang lain, namun demikian kesempatan pekerjaan berburuh terbatas dan musiman, sehingga banyak masyarakat yang pekerjaannya mencari kayu di hutan untuk dijual. Kebanyakan jenis kayu yang dicari adalah jenis kayu ringan sebagai bahan untuk pembuatan peti jeruk. Sebagian penduduk melakukan migrasi untuk bekerja di pengggajian kayu.

Tabel 3.22. Persepsi Rumah Tangga terhadap Pasar Tenaga Kerja di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006

Uraian	Kabupaten	
	Sambas	Landak
1. Persepsi rumah tangga dalam mencari pekerjaan (%)		
- Susah	100,00	87,50
- Mudah	-	12,50
2. Alasan susah cari pekerjaan (%)		
-Tidak ada lowongan	50,00	53,85
- Ketrampilan terbatas	18,75	30,77
- Pendidikan rendah	12,50	-
- Lainnya	18,75	7,69
-Tidak ada lowongan & pendidikan rendah	-	7,69
3. Jumlah responden yg menyatakan pernah ditolak cari pekerjaan (%)	31,25	33,33
4. Alasan kenapa ditolak dalam cari pekerjaan (%)		
- Tidak ada lowongan	60,00	100,00
- Ketrampilan terbatas	20,00	-
- Tidak sesuai kualifikasi	-	-
- Lainnya	20,00	-

Sumber: Data primer.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tujuan migrasi sebagian besar ke daerah Sumatera. Biasanya, migrasi dilakukan secara berkelompok yang dikoordinasikan oleh suatu perusahaan swasta. Sebenarnya jenis pekerjaan seperti di atas tersedia di daerah Kalimantan Barat/ Kalimantan Tengah dengan tingkat upah relatif sama, namun kebanyakan penduduk memilih merantau ke Sumatera karena oleh perusahaan yang memberangkatkan mereka diberi uang porsekot yang besarnya sekitar Rp 500 ribu untuk ditinggalkan pada keluarganya, sementara pekerja

tersebut merantau, sedangkan kalau bekerja dengan jenis pekerjaan yang sama di Kalimantan Barat/Kalimantan Tengah uang tersebut tidak diperoleh.

Pasar merupakan tempat transaksi jual beli suatu barang. Banyaknya rangkaian jual beli yang dialami oleh suatu komoditas sejak di produksi sampai pada konsumen akhir mempengaruhi efisiensi pemasaran produk-produk yang bersangkutan. Semakin banyak jumlah transaksi yang dialami suatu barang sebelum mencapai konsumen akhir semakin besar biaya pemasaran yang ditimbulkannya.

Pada Tabel 3.23 terlihat bahwa rumah tangga contoh di Kabupaten Sambas dan Landak sebagian besar memasarkan hasil produksinya untuk dijual. Perlu diketahui bahwa produk yang dipasarkan tidak hanya komoditas pangan tetapi juga berbagai jenis produk dari hasil tegal dan kebun. Umumnya mereka memasarkan hasil pada warung terdekat, pedagang keliling, dan pasar kabupaten.

Tabel 3.23. Akses Rumah Tangga terhadap Pasar di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006

Uraian	Kabupaten	
	Sambas	Landak
1. Jml RMT yg pernah menjual hasil produksi nya (%)	43.75	37.50
2. Tempat memasarkan hasil (%)		
- Warung terdekat	33.33	20.00
- Pasar desa	.	.
- Pasar kecamatan	.	.
- Pedagang keliling	33.33	20.00
- Pasar kabupaten	33.33	60.00
3. Proporsi yg dijual thd hasil		
- 100%	57.14	66.67
- 75 - < 100%	.	16.67
- > 50 - 75%	.	16.67
- > 30 - 50%	14.29	.
- 10 - 30%	28.57	.
4. Jml RMT yang pernah membeli makanan pokok	87.50	82.35
5. Sistim pembelian pangan (%)		
- Harian	42.86	26.67
- Mingguan	28.57	40.00
- Bulanan	.	26.67
- Tidak menentu	28.57	6.67
6. Sumber pembelian pangan (%)		
- Warung terdekat	93.33	81.25
- Pasar desa	.	12.50
- Pasar kecamatan	6.67	6.25
- Pedagang keliling	.	.
- Pasar kabupaten	.	.

Sumber: Data primer.

Kebutuhan pangan pokok rumah tangga rawan pangan sebagian besar berasal dari hasil membeli. Tingkat partisipasi rumah tangga yang pernah membeli makanan pokok di Kabupaten Sambas dan Landak masing-masing sekitar 87% dan 82%, sehingga hanya kurang dari 20% rumah tangga yang tidak pernah membeli makanan pokok karena sudah dicukupi dari hasil sendiri.

Di Kabupaten Sambas, cara pembelian makanan pokok sebagian besar masih harian, ini menunjukkan bahwa pola hidup rumah tangga tersebut masih “pola hidup hari ini”. Budaya menabung dan berhemat masih kurang. Kondisi ini terutama karena memang pendapatannya terbatas. Sementara di Kabupaten Landak umumnya membeli dengan periode mingguan. Sumber pembelian pangan tersebut yang dominan dari warung terdekat. Warung terdekat di desa penelitian menjadi tempat sumber pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari penduduk sekitarnya. Artinya membeli kebutuhan di warung terdekat tidak harus dengan cara tunai tetapi dapat dibayar di saat rumah tangga telah memiliki pendapatan. Selang waktu pinjaman ke warung tersebut tidak terbatas waktu, seringkali sampai seminggu-sebulan bahkan mungkin lebih dari satu bulan. Dalam hal demikian ada semacam ikatan emosional antara pemilik warung dengan rumah tangga sekitar warung tersebut dalam hal transaksi jual beli.

Sarana dan Prasarana

Dari Tabel 3.24 terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Sambas telah akses terhadap sumber penerangan yang berasal dari PLN, dimana pada tahun 2004 mencapai lebih dari 84%. Sedangkan di Kabupaten Landak sebagian besar (66,35%) rumah tangga masih menggunakan pelita/obor sebagai sumber penerangan. Untuk fasilitas air minum, sebagian besar (hampir 88%) rumah tangga di Kabupaten Sambas menggunakan air hujan. Sementara itu di Kabupaten Landak sekitar 61% menggunakan air sungai.

Tabel 3.24. Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Penerangan dan Fasilitas Air Minum di Kabupaten Sambas dan Landak (%)

Uraian	Sambas	Landak
Sumber Penerangan		
Listrik PLN	84,43	27,74
Listrik non-PLN	2,71	4,75
Petromak	0	1,31
Pelita	12,17	66,35
Lainnya	0,69	0,35
Akses terhadap fasilitas air minum		
PDAM	0	0
Pompa	0	0
Air hujan	87,64	3,47
Air sungai	3,92	61,32
Lainnya	8,44	35,21

Sumber: BPS. Kalimantan Barat Dalam Angka, 2005

Selain akses terhadap penerangan dan sumber air minum, tersedianya sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan merupakan aspek yang perlu diamati. Hal ini mengingat aspek pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia setelah kebutuhan akan pangan. Dalam hal demikian maka mencermati kondisi fasilitas pendidikan dan kesehatan erat kaitannya dengan upaya meningkatkan pemantapan ketahanan pangan atau upaya mengatasi masalah kerawanan pangan dan atau upaya menurunkan kemiskinan di suatu wilayah.

Rasio jumlah murid terhadap sekolah SD masing-masing sebesar 162 di Kabupaten Sambas dan 130 untuk Kabupaten Landak (Tabel 3.25). Sedangkan rasio guru terhadap murid SD masing-masing sebesar 18,3 di Kabupaten Sambas dan 22,5 di Kabupaten Landak. Untuk fasilitas pendidikan tingkat SLP dan SMU, rasio murid/jumlah sekolah serta murid/jumlah guru untuk Kabupaten Sambas masing-masing adalah 223,6 dan 12,8 untuk SLP dan 282,4 serta 14,4 untuk SMU. Untuk hal yang sama, keragaan di Kabupaten Landak masing-masing sebesar 182,9 dan 13,2 untuk SLP serta 241,9 dan 14 untuk SMU. Dari data tersebut terlihat bahwa fasilitas pendidikan di Kabupaten Landak secara umum lebih baik dibanding Kabupaten Sambas. Namun demikian, karena secara geografis kondisi sumber daya alam dan fasilitas jalan/transportasi relatif terbatas, kemungkinan besar secara kualitatif mutu pelayanan pendidikan di Sambas lebih baik.

Tabel 3.25. Jumlah Sarana Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Sambas dan Landak, 2004

Uraian	Sambas	Landak
Sarana Pendidikan		
Jumlah SD/murid/guru	391/63.208/3.453	379/49.477/2.200
Jumlah SLP/murid/guru	71/15.876/1.238	79/14.452/1.097
Jumlah SMU/murid/guru	17/4.801/ 334	29/7.014/ 501
Fasilitas Kesehatan		
Rumah Sakit/tempat tidur	3/165	1/14
Puskesmas	18	14
Puskesmas Pembantu	83	51
Puskesmas Keliling	17	0
Tenaga Paramedis	425	130
Dokter umum	23	8
Dokter Spesialis	2	0
Dokter Gigi	6	1

Sumber: BPS. Kalimantan Barat Dalam Angka, 2005

Untuk sarana kesehatan, akses rumah tangga terhadap fasilitas kesehatan yang ada relatif lebih baik di Kabupaten Sambas. Selain itu, kondisi perumahan atau tempat tinggal penduduk sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Bahkan, sering pula digunakan sebagai salah satu peubah dalam menentukan tingkat kemiskinan penduduk (Tabel 3.26).

Tabel 3.26. Proporsi Rumah Tangga menurut Kondisi Rumah di Kabupaten Sambas dan Landak, 2004 (%)

Uraian	Sambas	Landak
Luas Lantai Rumah - M ²		
≤ 19	1,85	1,47
20 – 49	44,91	69,74
50 – 99	44,06	26,29
100 – 149	7,22	1,35
150 +	1,95	1,15
Jenis atap yang terluas		
Beton	0	0,16
Genteng	0,69	1,01
Sirap	2,72	6,26
Seng	65,67	72,08
Asbes	0	0,33
Ijuk/rumbia	30,57	18,84
Lainnya	0,34	1,32

Sumber: BPS. Kalimantan Barat Dalam Angka, 2005

Dari Tabel 3.26 terlihat bahwa di Kabupaten Sambas maupun Landak sebaran rumah tangga dengan proporsi tertinggi berada pada rumah tangga yang memiliki luas lantai rumah antara 20 – 49 M² dan antara 50 – 99 M². Kedua kelompok tersebut menempati masing-masing sekitar 89% rumah tangga di Kabupaten Sambas dan 96% di Kabupaten Landak. Sementara itu untuk jenis atap, proporsi rumah tangga yang memiliki rumah dengan atap terluas dari seng dan ijuk/rumbia menempati persentase yang tinggi.

Dari Tabel 3.27 nampak bahwa status rumah dari responden contoh di Sambas dan Landak, selain milik, status numpang atau lainnya juga masih cukup banyak (31% di Sambas dan 36% di Landak). Rataan luas rumah per kapita dapat mencerminkan kesejahteraan. Menurut BPS (2004) standar luas minimum untuk hunian layak adalah 10 m² per kapita. Berdasarkan data pada tabel tersebut, rata-rata luas bangunan rumah ternyata sekitar 10 m² berarti memenuhi luas minimum standar.

Sesuai dengan kriteria rumah tangga rawan pangan yang identik dengan rumah tangga miskin, kondisi di Kabupaten Landak lebih baik. Sebagian besar rumah di Kabupaten Landak berupa tembok/½ tembok dan papan, sedangkan di Kabupaten Sambas sebagian besar berupa papan. Menarik untuk disimak adalah jenis atap yang dominan berupa seng dan rumbia. Di Kabupaten Sambas dan Landak, karena bentuk rumahnya sebagian besar adalah rumah panggung, maka jenis lantai dominan dari papan. Jenis penerangan rumah yang ditemukan sebagian besar sudah menggunakan listrik. Namun demikian sebagian besar masih menumpang, artinya tidak tercatat sebagai pelanggan, tetapi mengambil saluran dari tetangga yang berkisar 2-3 lampu dengan daya antara 15 – 25 watt.

Tabel 3.27. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (%)

Uraian	Sambas	Landak
1. Status tempat tinggal		
- Milik	68,75	64,71
- Sewa	-	5,88
- Numpang	25,00	17,65
- Lainnya	6,25	11,76
2. Luas bangunan rumah (m ²)	43	53
Luas bangunan rumah (m ² /kapita)	10,85	10,60
3. Jml orang yg tinggal serumah (Orang)	4	5
4. Jenis dinding (terluas)		
- Tembok/½ tembok	-	41,18
- Bilik/bambu	6,25	17,65
- Papan	93,75	35,29
- Triplek	-	5,88
5. Jenis atap (terluas)		
- Seng/asbes	50,00	47,06
- Rumbia	43,75	17,65
- Alang-alang/ijuk	6,25	11,76
- Lainnya	-	23,53
6. Jenis lantai (terluas)		
- Semen/bata merah	-	-
- Papan	-	11,76
	100,00	88,24
7. Sumber penerangan		
- Listrik	100,00	76,47
- Petromak	-	5,88
- Lampu minyak tanah	-	11,76
- Lainnya	-	5,88
8. Sumber air minum		
- Sumur pompa/timba	-	17,65
- Air hujan	93,75	35,29
- Air sungai	6,25	41,18
- Lainnya	-	5,88
9. Ventilasi udara		
- Baik	43,75	35,29
- Sedang	43,75	47,06
- Buruk	12,50	17,65
10. Jenis bahan bakar		
- Minyak tanah	6,25	11,76
- Kayu bakar	93,75	88,24
11. Rumah tangga yg mempunyai MCK di dalam rumah (%)	33,33	52,94
12. Fasilitas MCK		
- Milik sendiri	57,14	66,67
- Milik bersama	21,43	20,00
- Di alam terbuka	21,43	13,33
13. Fasilitas buang air		
- Kloset	14,29	11,76
- Sungai	14,29	23,53
- Kebun	35,71	11,76
- Lainnya	35,71	52,94

Sumber: Data primer, 2006.

Searah dengan data sekunder yang ada, sebagian besar rumah tangga contoh di Sambas menggunakan air hujan sebagai sumber air minum, sedangkan di Landak sebagian menggunakan air sungai. Sebagian besar rumah tangga contoh mempunyai MCK di dalam rumah. Selain kondisi sanitasi lingkungan, kondisi kesehatan anggota rumah tangga rawan pangan juga perlu dicermati (Tabel 3.28).

Tabel 3.28. Kondisi Kesehatan Rumah Tangga Rawan Pangan di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006

Uraian	Kabupaten	
	Sambas	Landak
- Jumlah bayi yang meninggal (orang/RMT)	3.5 (20)	.
- Jumlah anak yang meninggal (diluar bayi)	1.0 (20)	.
- Persen RMT yg ART mengalami kurang gizi	18.75	25.00
- Keluhan kesehatan menurut jenis penyakit yg diderita ART sebulan ini (%)		
<i>Panas dingin</i>	20.00	42.86
<i>Demam berdarah</i>	10.00	
<i>Batuk/pilek</i>		
<i>Diare</i>	18.18	20.00
<i>Sesak napas</i>	20.00	25.00
<i>Asma</i>	27.27	20.00
<i>Muntaber</i>	10.00	.
<i>Malaria</i>	18.18	20.00
<i>Penyakit kulit</i>	.	20.00
Jumlah rumah tangga yg sudah berobat krn Keluhan Kesehatan (%)	84.62	91.67

Sumber: Data primer, 2006.

Tabel 3.28 memperlihatkan bahwa proporsi ART yang mengalami kurang gizi masih cukup memprihatinkan. Namun demikian, kesadaran rumah tangga untuk berobat relatif baik yang ditunjukkan oleh persentase rumah tangga yang sudah berobat karena keluhan kesehatan mencapai 85% di Sambas dan 92% di Landak.

Kartu sehat atau kartu Gakin merupakan fasilitas pemerintah untuk masyarakat miskin agar dapat akses dalam pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya. Berdasarkan Tabel 3.29 ternyata partisipasi pemilikan kartu sehat pada rumah tangga contoh sebesar 18% di Landak dan 75% di Sambas. Lama pemilikan kartu tersebut di landak telah lebih dari setahun, sedangkan di Sambas sebagian besar sekitar 6 bulan atau satu tahun lalu.

Tabel 3.29. Akses Rumah Tangga Rawan Pangan terhadap Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sambas dan Landak (%)

Uraian	Sambas	Landak
Rumah tangga memiliki kartu sehat	75,00	17,65
Lama memiliki kartu sehat		
<i>bulan ini</i>	-	-
<i>6 bulan ini</i>	41,67	-
<i>tahun ini</i>	8,33	-
<i>tahun lalu</i>	33,33	-
<i>> tahun lalu,</i>	16,67	100,00
RMT yg sudah menggunakan kartu sehat	50,00	50,00
RMT yg ART dirujuk ke Rumah Sakit	35,71	28,57
Jenis Penyakit yang dirujuk		
<i>1.Kurang gizi</i>	-	25,00
<i>2.Malaria</i>	-	25,00
<i>3.Flu Tulang</i>	80,00	25,00
<i>4.Lainnya</i>	20,00	25,00

Sumber : Data Primer

Seperti diketahui, kartu sehat ini secara nasional sudah diluncurkan sejak terjadi krisis sekitar tahun 1998/1999 melalui program JPS Kesehatan. Pada tahun 2005 dilakukan pendataan ulang untuk masyarakat miskin terkait dengan penyempurnaan pemilikan kartu sehat. Dalam hal ini kartu tersebut dikengkapi dengan foto yang bersangkutan yang berupa kartu askes. Dengan demikian diharapkan penggunaan kartu ini lebih tertib dan tidak disalahgunakan. Walaupun dalam kenyataan banyak penduduk miskin tidak memiliki kartu tersebut, selama ini pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin yang tidak memiliki kartu sehat tetap mendapat keringanan antara lain dengan surat keterangan miskin dari aparat desa setempat.

Dari jumlah rumah tangga pemegang kartu, sebanyak 50 persen sudah memanfaatkannya. Di antara pengguna kartu tersebut sebagian (36% di Kabupaten Sambas dan 29% di Landak) perlu dirujuk ke rumahsakit (Tabel 3.29). Tampak bahwa jenis penyakit dominan yang dirujuk adalah flu tulang, sedangkan kasus kurang gizi hanya ditemukan di Kabupaten Landak yakni sekitar 25%. Jenis penyakit muntaber yang merupakan KLB saat penelitian tidak banyak yang dirujuk ke rumah sakit karena sebagian sudah dapat ditangani di pos-pos kesehatan di desa-desa kasus.

Posyandu merupakan program pemerintah dalam hal ini Depkes yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi situasi dan kondisi rawan gizi pada balita, sehingga dapat diwaspadai lebih dini. Data riwayat balita yang rutin diperiksa dan ditimbang di Posyandu dapat dimonitor dan dapat dijadikan sebagai data base untuk penanganan lanjutan. Pelaksanaan Posyandu sudah sejak Orde Baru. Kegiatan dan pendataan di Posyandu dapat memberikan informasi tentang situasi gizi terutama balita. Kegiatan ini penting agar penanganan kasus kekurangan gizi dan gizi buruk pada balita dapat sedini mungkin diantisipasi. Belakangan ini sudah dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan tersebut melalui program revitalisasi Posyandu.

Di Kabupaten Sambas, kegiatan ini dipadukan dengan arena bermain bagi anak balita agar anak tersebut lebih tertarik untuk mengunjungi Posyandu, sehingga alasan tidak mengunjungi posyandu karena anaknya takut ditimbang dan sebagainya dapat diatasi. Kegiatan Posyandu ditemukan di kedua lokasi penelitian (Tabel 3.30).

Berkaitan dengan penyuluhan kesehatan, tampak bahwa partisipasi masyarakat dalam penyuluhan kesehatan masih kurang, kecuali di Kabupaten Sambas partisipasinya mencapai 95%. Pemberi penyuluhan pada umumnya dari Puskesmas dan Kader Kesehatan. Sementara itu, alasan responden yang tidak membawa anaknya ke Posyandu sebagian besar karena anaknya penakut dan tidak mau dibawa ke Posyandu. Oleh karena itu program yang berusaha menyatukan kegiatan Posyandu dengan arena bermain anak merupakan salah satu langkah yang tepat.

Tabel 3.30. Persepsi Rumah Tangga terhadap Posyandu di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (%)

Uraian	Sambas	Landak
Pengetahuan tentang keberadaan Posyandu	100,00	100,00
RMT membawa Balita ke Posyandu	80,00	70,00
RMT yg rutin membawa Balita ke Posyandu	80,00	62,50
Alasan RMT tdk membawa Balita ke Posyandu		
1.Posyandu tidak aktif	-	20,00
2.Malas, tidak ada gunannya	33,33	20,00
3.Jaraknya jauh	-	-
4.Anaknya penakut	66,67	60,00
5.Tidak sempat	-	-
RMT yg mengatakan ada penyuluhan kesehatan (%)	64,29	47,06
Pemberi penyuluhan kesehatan		
1.Pengurus PKK/Kader	30,00	88,89
2.Puskesmas	70,00	11,11
4.Lembaga keagamaan	-	-
6.Lainnya	-	-

Sumber: Data primer, 2006.

Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga diakui dapat mempengaruhi kemudahan dalam adopsi teknologi. Sebagai gambaran pada tahun 2004 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menduduki urutan 111 dari 177 negara. Pada uraian sebelumnya dikemukakan bahwa pendidikan KK dan istri pada umumnya tidak tamat SD dan tamat SD. Tabel 3.31 memberi gambaran tentang akses rumah tangga contoh di daerah penelitian terhadap fasilitas pendidikan.

Pada Tabel 3.31 dapat dikemukakan bahwa anggota rumah tangga yang masih sekolah adalah pada tingkat sekolah dasar (SD). Meskipun telah ada program BOS dari pemerintah, sebagian besar SD masih memungut biaya sekolah dengan besaran nilai yang bervariasi. Sebelum program BOS, dalam penanggulangan dampak krisis juga pernah diluncurkan program JPS pendidikan, yang lebih dikenal dengan bea siswa pendidikan. Dana tersebut dialokasikan untuk rumah tangga miskin. Bentuk bantuan secara rinci ditampilkan pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31. Akses Rumah Tangga Rawan Pangan terhadap Pendidikan di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (%)

Uraian	Sambas	Landak
1. ART yang sekolah		
SD	75,00	50,00
SMP/ sederajat	25,00	27,78
SMA/ sederajat	-	22,22
2. Besar SPP/bulan (Rp)		
SD	3300	5357
SMP/ sederajat	3000	20600
SMA/ sederajat	-	142500
3. Bantuan utk ART sekolah		
SD	77,78	80,00
SMP/ sederajat	22,22	-
SMA/ sederajat	-	20,00
4. Sumber bantuan utk ART sekolah		
Pemerintah	88,89	60,00
LSM	11,11	-
Lainnya	-	40,00
5. Bentuk bantuan utk ART sekolah		
SPP	66,67	80,00
Buku/ATS	11,11	20,00
Seragam	-	-
Sepatu	22,22	-
Lainnya	-	-

Sumber : Data Primer, 2006.

Keragaan Sektor Pertanian

Luas areal panen, produksi, dan produktivitas berbagai komoditas tanaman pangan di suatu wilayah merupakan suatu indikator yang

menunjukkan kapasitas wilayah dalam menghasilkan pangan. Dari sisi pembangunan ketahanan pangan hal tersebut menunjukkan kemampuan wilayah dalam mendukung aspek ketersediaan. Sementara itu, untuk aspek keterjangkauan rumah tangga terhadap pangan yang tersedia didekati dari tingkat pendapatan rumah tangga. Terkait dengan produksi komoditas perkebunan (rakyat) dan atau populasi ternak, hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan akses rumah tangga terhadap sumber pendapatan yang pada akhirnya juga bermuara terhadap daya beli rumah tangga terhadap pangan.

Dari Tabel 3.32 dan 3.33 terlihat bahwa untuk komoditas tanaman pangan, Kabupaten Sambas relatif lebih baik dalam hal memproduksi pangan beras yang ditunjukkan oleh luas areal panen maupun produksi padi. Namun demikian, Kabupaten Landak memiliki kapasitas menghasilkan pangan nonberas (jagung dan ubi kayu) yang jauh lebih tinggi dibanding Kabupaten Sambas. Dalam hal demikian, apabila diversifikasi konsumsi pangan di wilayah Kabupaten Landak dapat dikembangkan, maka hal tersebut diharapkan menjadi strategi utama dalam mengatasi rawan pangan di wilayah tersebut. Pengembangan diversifikasi konsumsi tersebut dapat dilakukan antara lain dengan penekanan pada sosialisasi dan edukasi tentang makanan beragam, bergizi, dan seimbang diikuti dengan pengembangan industri pengolahan pangan berbahan baku lokal (jagung dan ubi kayu).

Tabel 3.32. Keragaan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Beberapa Komoditas Tanaman Pangan utama di Kabupaten Sambas dan Landak Tahun 2004

Uraian	Sambas	Landak
Padi (sawah + ladang)		
Luas panen (ha)	77.292	56.058
Produktivitas (ku/ha)	31,03	32,51
Produksi (ton)	239.856	182.220
Jagung		
Luas panen (ha)	151	3.385
Produktivitas (ku/ha)	16,56	18,85
Produksi (ton)	250	6.382
Kedelai		
Luas panen (ha)	759	14
Produktivitas (ku/ha)	11,84	11,43
Produksi (ton)	899	16
Ubi Kayu		
Luas panen (ha)	258	6.092
Produktivitas (ku/ha)	116,78	153,09
Produksi (ton)	3.013	93.261

Sumber: BPS. Kalimantan Barat dalam Angka, 2005

Untuk komoditas nonpangan, potensi produksi dan areal tanaman karet di Kabupaten Sambas dan Landak cukup tinggi, demikian pula dengan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan salah satu sumber pendapatan

rumah tangga di kedua kabupaten penelitian. Selain dua komoditas perkebunan tadi, Kabupaten Sambas juga potensial dengan komoditas jeruk. Hal ini ditunjukkan oleh data pada tahun 2004, dimana produksi jeruk di wilayah tersebut mencapai hampir 99 ribu ton.

Komoditas peternakan juga merupakan potensi sumber pendapatan dan penyediaan pangan bagi rumah tangga di kedua lokasi. Populasi ternak sapi, kambing, ayam buras, maupun ayam ras relatif tinggi. Khusus untuk populasi babi, hanya dominan di Kabupaten Landak. Pengusahaan ternak babi ini walaupun tidak secara langsung, terkait dengan budaya setempat dan juga agama yang banyak dianut oleh penduduk Kabupaten Landak yang memang sebagian besar (relatif dibanding kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Barat) nonmuslim. Data populasi ternak tersebut menunjukkan potensi penyediaan pangan sumber protein hewani yang cukup baik di kedua kabupaten penelitian. Namun demikian, untuk aspek konsumsi dan pemanfaatannya di tingkat rumah tangga masih harus dikaitkan dengan daya jangkauan dan atau daya beli rumah tangga terhadap ketersediaan pangan tersebut.

Tabel 3.33. Keragaan Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat serta Populasi Ternak di Kabupaten Sambas dan Landak tahun 2004

Uraian	Kabupaten Sambas	Kabupaten Landak
Karet Rakyat		
Luas areal (ha)	50.090	67.795
Produksi (ton)	18.945	31.811
Kelapa Sawit		
Luas panen (ha)	7.349	10.297
Produksi (ton)	12.157	20.120
Jeruk		
Produksi (ton)	98.819	98
Populasi Ternak (ekor)		
Sapi	8.125	7.010
Babi	7.320	27.642
Kambing	12.100	3.364
Ayam buras	512.500	196.368
Ayam ras pedaging	1.476.000	365.040

Sumber: BPS. Kalimantan Barat dalam Angka, 2005

Salah satu faktor penting pengusahaan pertanian adalah penguasaan terhadap aset produktif antara lain penguasaan lahan, alat pertanian, dan ternak. Tabel 3.34 memperlihatkan bahwa lahan yang dikuasai rumah tangga contoh di Kabupaten Sambas umumnya adalah lahan sawah tadah hujan, sementara di Kabupaten Landak selain sawah tadah hujan juga kebun yang umumnya diusahakan tanaman karet. Rataan luas penguasaan lahan di Kabupaten Sambas sekitar 0,3 ha sedangkan di Kabupaten Landak mencapai hampir 0,9 ha.

Tabel 3.34. Penguasaan Lahan Pertanian Rumah Tangga di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (ha)

Jenis Lahan	Sambas	Landak
1. Sawah		
a. Irigasi	-	-
b. Tadah Hujan	0,208	0,350
c. Pasang Surut	-	0,115
d. Rawa/Lebak	0,091	-
2. Ladang/Tegal	0,001	0,122
3. Kebun	-	0,297
4. Pekarangan	-	-
Total Luas Lahan	0,344	0,884

Sumber : Data primer.

Dari sisi keragaan nilai penguasaaan, ternak besar sapi, ternak kecil (babi) hanya di Kabupaten Landak dan ternak unggas yang umumnya hanya sebagai usaha sampingan (Tabel 3.35). Rataan nilai ternak yang dikuasai relatif rendah. Nilai ternak sapi yang dihitung dalam satu tahun ini adalah pertambahan nilai dari sapi dalam kurun waktu satu tahun tersebut dan bukan besaran nilai total sapi.

Tabel 3.35. Nilai Penguasaan Ternak Rumah Tangga di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (Rp)

Nilai Ternak	Sambas	Landak
Sapi	50.000	225.000
Kerbau	-	-
Babi	-	185.000
Ayam Ras	-	-
Ayam Buras	32.750	55.000
Bebek	10.000	-
Itik	-	-
Total nilai Ternak	92.750	465.000

Sumber: Data primer, 2006.

Alat pertanian merupakan asset produktif walaupun nilainya kecil, namun alat ini sangat bermanfaat sebagai modal kerja untuk usahatani. Penguasaan nilai asset yang rendah merupakan salah satu ciri rumah tangga miskin. Alat transportasi yang umum dimiliki rumah tangga contoh di Kabupaten Landak dan Sambas adalah sepeda motor dan atau sepeda. Sementara itu nilai aset alat rumah tangga yang cukup bernilai umumnya adalah televisi (Tabel 3.36).

Tabel 3.36. Rataan Nilai Penguasaan Aset Rumah tangga di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (Rp)

Jenis Aset	Sambas	Landak
Alat pertanian	62.350	56.850
Alat transportasi	166.000	947.000
Alat komunikasi	12.000	8.875
Alat rumah tangga	237.000	506.750
Total nilai aset	477.350	1.519.475

Sumber: Data primer, 2006.

Pola Konsumsi Pangan dan Masalah Kesehatan

Jenis makanan dan frekuensi makan merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan sesuai standar gizi. Status gizi seseorang atau masyarakat berkaitan erat dengan kebiasaan makan orang atau masyarakat. Makanan minimal harus mengandung zat-zat gizi yang diperlukan tubuh seperti karbohidrat sebagai sumber tenaga, protein sebagai sumber pembangun, lemak, vitamin, dan mineral. Frekuensi makan penduduk di Kabupaten Sambas dan Landak umumnya tiga kali sehari.

Makanan pokok utama rumah tangga contoh di dua kabupaten penelitian adalah beras. Jenis sayur dan buah-buahan yang dikonsumsi tergantung dari apa yang diusahakan oleh rumah tangga bersangkutan di lahan pertaniannya dan atau pemberian dari tetangganya. Pola makan masih tergantung dari yang ada disekitarnya. Jika mereka menjual hasil produksi komoditas yang diusahakan digunakan untuk membeli kebutuhan lain seperti ikan, tahu, garam, minyak goreng, dan lain-lain.

Pola konsumsi tidak terlepas dengan masalah aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan. Untuk masalah ini ketersediaan pangan di tingkat wilayah agregat provinsi dan atau kabupaten relatif memadai. Namun demikian, untuk wilayah yang terpencil dengan sarana serta prasarana transportasi yang terbatas, distribusi dan ketersediaan pangan sampai ke tingkat desa untuk dapat diakses rumah tangga dan atau individu masih menjadi kendala. Selain itu, kualitas pangan yang dikonsumsi rumah tangga dan individu juga masih menjadi kendala. Hal ini lebih disebabkan oleh daya beli dan pendapatan rumah tangga yang terbatas.

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah Kabupaten Sambas dan Landak yang merupakan wilayah perbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur), maka daerah ini dikenal sebagai sumber pemasok tenaga kerja (TKI/TKW). Di satu sisi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri menjadi solusi bagi pemecahan masalah pengangguran dan menjadi sumber pendapatan rumah tangga maupun devisa negara,

namun di sisi lain hal ini berdampak pada pola asuh anak terutama pada TKW yang meninggalkan anak balita.

Masalah gizi yang dihadapi oleh rata-rata rumah tangga miskin dan rawan pangan di wilayah penelitian adalah masalah gizi makro dan gizi mikro. Di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, PN Garam bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat melaksanakan program 'Iodisasi' melalui fortifikasi iodium. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dilaksanakan pula antara lain program terapi gizi buruk melalui penerapan "TFC" – *therapy feeding center*, yaitu memonitor kondisi kesehatan penduduk yang rawan gizi/kesehatan selama satu bulan jika ada penyakit langsung dirujuk ke rumah sakit; dan pemberdayaan Posyandu. Namun demikian, biaya operasional yang tersedia belum dapat menjangkau semua Posyandu yang ada, oleh karenanya pemberdayaan diprioritaskan pada Posyandu yang berbasis masyarakat dengan petugas masyarakat setempat yang sudah terlatih.

Partisipasi rumah tangga yang menyimpan pangan ditemukan di Kabupaten Landak. Sekitar 60% rumah tangga menyimpan gabah dengan rata-rata jumlah yang disimpan sekitar 3,1 ku gabah per rumah tangga. Untuk rumah tangga di Kabupaten Sambas, sebanyak 35% rumah tangga melakukan penyimpanan gabah dengan jumlah sekitar 1,2 ku per rumah tangga. Gabah tersebut berasal dari hasil produksi sendiri sebagai cadangan untuk kebutuhan makan, dan hanya sedikit yang dicadangkan untuk dijual (Tabel 3.37).

Penyimpanan dalam bentuk beras ditemukan di kedua lokasi penelitian, dengan persentase 55% di Kabupaten Sambas dan 45% di Landak. Asal beras yang disimpan sebagian besar berasal dari produksi sendiri. Peruntukan beras simpanan umumnya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Tidak ditemukan rumah tangga yang menyimpan jenis-jenis makanan pokok lain seperti jagung, ubi jalar dan umbi-umbian. Sedangkan untuk pangan ubi kayu walaupun rumah tangga di Kabupaten Landak melakukan penyimpanan, namun partisipasinya relatif kecil, yaitu hanya 5% dari total rumah tangga contoh.

Konsumsi pangan merupakan jumlah makanan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayati. Situasi konsumsi pangan seperti yang disajikan pada Tabel 3.38 dapat analisis dari pola konsumsi pangan pokok dan perubahannya apabila kondisi kurang pangan maupun paceklik. Tampak bahwa di Kabupaten Sambas dan Landak pola pangan pokok beras, masing-masing partisipasinya mencapai 100%.

Tabel 3.38 memperlihatkan bahwa pada saat terjadi kekurangan pangan (paceklik) rumah tangga melakukan penyesuaian pola konsumsi dengan melakukan perubahan terhadap jumlah, dan jenis. Khusus untuk rumah tangga contoh di Sambas, mereka juga melakukan perubahan kualitas pangan yang dikonsumsi.

Tabel 3.37. Pola Penyimpanan Makanan Pokok Rumah Tangga di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (%)

Uraian	Sambas	Landak
A. GABAH		
1. Jml RMT yang menyimpan	35,00	60,00
2. Jumlah yang disimpan (kg)	121,43	306,36
3. Tujuan menyimpan		
a. Kebutuhan makan	85,71	100,00
b. Dijual	14,29	11,11,
4. Sumber simpanan		
a. Produksi sendiri	100,00	100,00
b. Beli	-	-
B. BERAS		
1. Jml RMT yang menyimpan	55,00	45,00
2. Jumlah yang disimpan (kg)	11,89	8,44
3. Tujuan menyimpan		
a. Kebutuhan makan	100,00	100,00
a. Sosial	-	-
4. Sumber simpanan		
a. Produksi sendiri	57,14	71,43
b. Membeli	28,57	28,57
c. Diberi saudara	14,29	-
d. Raskin	-	-
C. UBI KAYU		
1. Jml RMT yang menyimpan	-	5,00
2. Jumlah yang disimpan (kg)	-	9,00
3. Tujuan menyimpan		
a. Kebutuhan makan	-	100,00
5. Sumber simpanan		
a. Produksi sendiri	-	-
b. Membeli	-	100,00

Sumber: Data primer, 2006.

Tabel 3.38. Situasi Konsumsi Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (%)

Uraian	Sambas	Landak
1. Pola Konsumsi Pangan Pokok		
- Beras	100,00	100,00
2. Perubahan Pola Konsumsi dalam kondisi kurang pangan		
- Jumlah	66,67	50,00
- Jenis	22,22	50,00
- Kualitas	11,11	-
3. Kondisi Paceklik, konsumsi pangan		
1. Tetap	56,25	76,47
2. Menurun	37,50	23,53
3. Meningkatkan	6,25	-

Sumber: Data primer, 2006.

Salah satu faktor penyebab masalah gizi adalah terbatasnya pengetahuan dan kesadaran gizi masyarakat. Pada umumnya orang merasa kebutuhan gizinya telah terpenuhi apabila merasa kenyang. Anggapan tersebut kurang tepat karena bisa saja seseorang dikatakan kenyang pangan tetapi lapar gizi. Oleh karena itu, perlu perhatian dalam memilih makanan, tidak hanya dilihat dari kuantitas bahan pangannya saja, tetapi juga kualitas pangan atau nilai gizi makanan tersebut. Tabel 3.39 menyajikan keragaan zat gizi utama (karbohidrat dan protein hewani serta nabati) yang sering dikonsumsi rumah tangga contoh menurut jenis pangan.

Tabel 3.39. Keragaan Zat Gizi Utama yang Sering Dikonsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Sambas dan Landak menurut Jenis Pangan, 2006 (%)

Zat Gizi/Jenis Pangan	Sambas	Landak
Sumber Karbohidrat		
1. Beras	75,00	23,53
2. Jagung	-	-
3. Ubi jalar + Umbi lainnya	-	-
4. Beras + jagung	18,75	5,88
5. Beras + ubi kayu	6,25	70,59
Sumber Protein Nabati		
1. Tahu + Tempe	50,00	72,50
2. Kacang lainnya	14,29	6,25
3. Tahu + Kacang lainnya	7,14	-
4. Tempe + Kacang Merah	-	-
5. Tempe + Kacang lainnya	14,29	12,50
6. Kac Merah + Kacang Lainnya	-	12,50
Sumber Protein Hewani		
1. Ikan segar + ikan awetan	81,25	64,70
2. Telur	-	-
3. Ikan segar + telur	6,25	23,53
4. Ikan segar + daging babi		
5. Ikan awetan + telur	6,25	11,76
6. Lainnya	6,25	

Sumber: Data primer, 2006.

Zat gizi utama sumber karbohidrat sesuai dengan pola pangan pokok yang dikonsumsi, telah diulas di bab sebelumnya. Yang menarik disini bahwa walaupun beras sebagai pangan pokok bagi penduduk Kabupaten Landak, namun sebagai sumber karbohidrat selain beras juga ubi kayu, meskipun ubi kayu bukan sebagai pangan pokok.

Protein dapat dibedakan antara protein nabati dan hewani. Sumber protein nabati pada umumnya dari jenis kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu dan tempe. Tahu dan tempe merupakan pangan sumber protein utama yang banyak dikonsumsi rumah tangga di Kabupaten Sambas dan Landak. Sumber protein hewani yang sering dikonsumsi rumah tangga contoh adalah ikan segar dan ikan awetan. Jenis produk ikan awetan disini adalah ikan asin dan ikan pindang.

Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber vitamin dan mineral dalam pola konsumsi sehari hari. Beberapa jenis buah yang agak sering dikonsumsi rumah tangga contoh adalah pisang dan pepaya. Jenis buah ini tidak musiman sehingga mudah ditemukan di pasaran. Namun demikian, tanaman buah ini banyak diusahakan sendiri oleh petani. Selain buah tersebut, jeruk juga banyak dikonsumsi terutama di Kabupaten Sambas dan Landak, mengingat daerah ini (Sambas) sebagai daerah sentra produksi jeruk.

Jenis sayuran yang sering dikonsumsi adalah daun ubi kayu, kangkung dan bayam. Sementara itu, ada beberapa jenis sayuran spesifik lokasi yang sering dikonsumsi yaitu daun paku-pakuan. Seringnya konsumsi sayuran tersebut karena memang ketersediaan sayuran ini cukup banyak yang biasanya diperoleh dari hutan sekitarnya.

Untuk melihat keragaman pangan yang dikonsumsi rumah tangga, maka dalam bahasan ini ditampilkan hasil wawancara *recall* sehari yang lalu. Pangan disini dikelompokkan menjadi 12 kelompok, yaitu: padi-padian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, daging, telur, ikan, susu, kacang-kacangan, minyak/lemak, gula, dan lainnya. Lainnya dalam hal ini adalah garam dan bumbu-bumbu. Semakin banyak kelompok jenis pangan yang dikonsumsi berarti semakin beragam pola konsumsi rumah tangga tersebut dan cenderung semakin baik kualitasnya. Bila diketahui kuantitas untuk masing-masing kelompok jenis pangan yang dikonsumsi, maka dapat dianalisis dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam PPH selain beragam juga proporsi antar kelompok jenis pangan harus seimbang sesuai kebutuhan. Akan tetapi dalam bahasan ini tidak terdapat data kuantitatif. Data yang tersedia terbatas pada jumlah kelompok jenis pangan.

Tabel 3.40. Keragaman Diversifikasi Konsumsi Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006

Uraian	Sambas	Landak
Rataan jumlah jenis pangan yang dikonsumsi		
- Jumlah jenis pangan	6,00	7,00
- Persen thd total jenis pangan (n = 12)	50,00	58,33
Jumlah jenis pangan yang dikonsumsi		
- Minimum	4	5
- Maximum	9	10

Sumber: Data primer, 2006.

Tampak bahwa rata-ran jumlah jenis pangan di Kabupaten Sambas dan Landak masing-masing 6 dan 7 jenis atau sekitar 50 – 60% dari total kelompok jenis pangan yang dianalisis. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga contoh di daerah penelitian, dilakukan analisis regresi sederhana terhadap skor diversifikasi konsumsi rumah tangga sebagai peubah tidak bebas (*dependent variable*) dan peubah-peubah karakteristik rumah tangga sebagai peubah bebas (*independent variables*). Hasil analisis regresi tersebut disajikan pada Tabel 3.41.

Hasil estimasi yang disajikan pada Tabel 3.41 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan istri dan tingkat pendapatan rumah tangga/kapita berpengaruh nyata (dengan tingkat kepercayaan 90%) terhadap diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga contoh di Kabupaten Sambas. Kedua peubah tersebut berpengaruh positif terhadap tingkat diversifikasi konsumsi rumah tangga, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan (formal) istri semakin tinggi pula skor diversifikasi konsumsi rumah tangga. Hal ini logis, mengingat semakin tinggi tingkat pendidikan dapat diharapkan semakin tinggi pula pengetahuan pangan dan gizi para istri yang bersangkutan. Selanjutnya, hal ini diharapkan berpengaruh terhadap pengetahuan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang.

Tabel 3.41. Hasil Dugaan Parameter yang Mempengaruhi Tingkat Diversifikasi Konsumsi Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Sambas

Peubah Bebas	Dugaan Parameter	
	Sambas	Landak
Intersep	2,7848 (1,2157)	5,7391 (1,1103)
LMAN	- 4,9939 (6,6758)	-3,9270* (2,6677)
PDIS	0,3337** (0,1856)	0,1627* (0,1183)
LKAP	0,0001** (0,0000)	-
PENA	0,0230 (1,3319)	1,4665 (1,6604)
DKSO	-	0,6269 (0,7244)
R ²	0,5139	0,2596

Catatan: Peubah tidak bebas : Skor diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga

Peubah bebas: LMAN : luas lahan pertanian/JART

PDIS : pendidikan istri (tahun)

LKAP : pendapatan total rumah tangga/JART

PENA : Ragam kegiatan penyuluhan

DKSO : Keikutsertaan ART dalam kegiatan sosial

**) nyata pada taraf kepercayaan 90 %

*) nyata pada taraf kepercayaan 80 %

(...) *standard error*

Selain itu, untuk implementasi pengetahuan pangan dan gizi tersebut, diperlukan pendapatan yang memadai untuk menerapkan pola konsumsi yang beragam, bergizi, dan seimbang atau terdiversifikasi. Di Kabupaten Sambas diperoleh hasil estimasi bahwa pendapatan/kapita secara nyata berpengaruh positif terhadap tingkat diversifikasi konsumsi.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan/kapita semakin tinggi pula tingkat diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga (Tabel 3.41).

Di Kabupaten Landak, diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga secara nyata dipengaruhi oleh tingkat pendidikan istri dengan pengaruh positif, sedangkan penguasaan lahan pertanian/kapita berpengaruh negatif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa semakin luas lahan pertanian per kapita, maka tingkat diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga tidak semakin baik, atau diversifikasi konsumsi rumah tangga semakin menurun. Dikaitkan dengan rata-rata penguasaan lahan bahwa di Kabupaten Landak, selain lahan sawah tadah hujan sebagian besar lahan yang dikuasai rumah tangga contoh adalah lahan kering (kebun karet). Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa semakin luas lahan yang dikuasai, maka beban kerja para istri semakin berat, karena pada dasarnya para wanitalah yang banyak terlibat mengusahakan lahan pertanian (mengelola sawah dan menyadap karet).

Dengan kesibukan tersebut, walaupun sebenarnya tingkat pendidikan istri berpengaruh positif terhadap diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga, namun untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut terkendala oleh kesibukan. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab peubah luas penguasaan lahan pertanian/kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga contoh di Kabupaten Landak.

Dalam bulan-bulan tertentu selama 12 bulan kalender, beberapa rumah tangga sering mengalami kekurangan pangan. Tabel 3.42 memperlihatkan partisipasi rumah tangga yang mengalami kekurangan pangan di lokasi contoh menurut bulan kejadian. Terdapat perbedaan bulan rumah tangga yang mengalami kekurangan pangan antara di Kabupaten Sambas dan Landak. Di Kabupaten Sambas, bulan-bulan dimana rumah tangga banyak mengalami kekurangan pangan terjadi pada bulan Juni, September, Oktober, dan November dengan persentase sekitar 20 – 30% dari rumah tangga contoh. Sementara itu, di Kabupaten Landak frekuensi kekurangan pangan umumnya terjadi pada bulan November, Januari, dan Februari. Pada bulan tersebut ketersediaan pangan relatif terbatas karena panen belum tiba, sedangkan pendapatan terbatas.

Berdasarkan kehidupan sehari-hari, Tabel 3.43 menyajikan persepsi rumah tangga tentang kondisi kelaparan. Untuk mensiasati kondisi kelaparan, ada beberapa strategi (*coping mechanism*) yang dilakukan oleh rumah tangga, antara lain melakukan perubahan jenis pangan pokok. Di Kabupaten Sambas jarang sekali dijumpai rumah tangga yang melakukan perubahan pola pangan pokok selain beras, sedangkan di Kabupaten Landak sekitar 10 persen yang melakukan perubahan tersebut, karena sebelumnya juga banyak yang mengkonsumsi beras dan ubi kayu. Selain perubahan pola pangan pokok, pada umumnya rumah tangga juga mengurangi frekuensi makan, dari 3 kali menjadi 2 kali makan sehari.

Tabel 3.42. Jumlah Rumah Tangga yang Mengalami Kekurangan Pangan Setahun yang Lalu di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (%)

Bulan	Sambas	Landak
Januari	15,00	35,00
Februari	10,00	30,00
Maret	5,00	10,00
April	15,00	5,00
Mei	15,00	5,00
Juni	20,00	0,00
Juli	15,00	0,00
Agustus	20,00	5,00
September	30,00	5,00
Oktober	30,00	10,00
November	25,00	40,00
Desember	15,00	5,00

Sumber: Data primer

Tabel 3.43. Persepsi Rumah Tangga tentang Kondisi Kelaparan di Kabupaten Sambas dan Landak, 2006 (%)

Persepsi	Sambas	Landak
- Kekhawatiran tidak cukup makan pada masa datang	80,00	75,00
- Pernah melakukan perubahan jenis pangan pokok yg mempunyai nilai sosial lebih rendah	5,00	10,00
- Mengurangi frekuensi makan atau jumlah makanan	35,00	30,00
- Tidak cukup makan	35,00	25,00
- Ada ART yg mengalami kurang gizi	0,00	10,00

Sumber: Data primer.

Rumah tangga yang pernah mengalami tidak cukup makan di Kabupaten Sambas dan Landak relatif kecil karena kebutuhan pangannya sebagian besar tercukupi. Namun demikian, sebagian besar rumah tangga contoh menyatakan adanya kekhawatiran tidak dapat mencukupi kebutuhan pangannya di masa datang dengan persentase sebesar 80% di Sambas dan 75% di Landak.

Berkaitan dengan kondisi kelaparan, menarik untuk disimak bahwa walaupun rumah tangga di Kabupaten Landak yang mengalami tidak cukup makan relatif sedikit (25%) tetapi jumlah rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga kurang gizi mencapai 10%. Tingginya penduduk yang kurang gizi juga mencerminkan rendahnya kualitas penduduk di wilayah tersebut. Hal ini diduga lebih disebabkan kurangnya pengetahuan tentang pangan dan gizi oleh sebagian besar penduduk.

3.2.2. Penyebab Rawan Pangan dan Gizi Kronis

Sesuai dengan hasil pemetaan wilayah rawan pangan di Kalimantan Barat, terdapat 4 kabupaten dengan kategori prioritas I yaitu Kabupaten Landak, Sambas, Sintang, dan Kuala Kapuas. Dengan pertimbangan ini Tim memilih Kabupaten Sambas dan Landak sebagai lokasi kasus untuk dikaji lebih lanjut. Kabupaten Sambas merupakan kabupaten baru pemekaran dari kabupaten induk, yaitu Kabupaten Sambas yang lama (dengan ibu kota Singkawang). Suatu hal yang aneh kalau Kabupaten Sambas disebut sebagai daerah rawan pangan, mengingat daerah ini sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Barat. Secara agregat total ketersediaan pangan kabupaten termasuk surplus, tetapi masih terdapat dua kecamatan (dari 16 kecamatan yang ada) masih kurang dilihat dari sisi ketersediaan pangan, yaitu Kecamatan Sajad dan Kecamatan Sajingan Besar.

Selain itu, Kabupaten Sambas juga sebagai wilayah sentra produksi jeruk yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian wilayah. Sektor pertanian menyumbangkan sekitar 42% dari total PDRB kabupaten. Jadi indikator dominan yang mempengaruhi rawan pangan lebih ke faktor di luar ketersediaan pangan, antara lain faktor kesehatan dan indeks kualitas hidup manusia. Terkait dengan kualitas manusia, Pemerintah daerah (Bupati) yang baru terpilih mempersiapkan kualitas penduduk dengan memonitor 1000 pasangan usia subur (PUS). Tahun 2011 ditargetkan semua desa memiliki Polindes (Poliklinik Desa) paling tidak untuk dua desa yang berdekatan. Pengembangan Polindes bertujuan antara lain untuk mengamati perkembangan kesehatan ibu hamil, melahirkan, dan perawatan anak sampai sampai usia balita. Untuk mengatasi kekurangan tenaga bidan, maka direncanakan dipilih warga setempat untuk disekolahkan kebidanan dengan bantuan biaya dari pemerintah daerah.

Sementara itu, untuk Kabupaten Landak dengan ibukota Ngabang dipilih sebagai daerah penelitian, selain termasuk kabupaten rawan pangan, juga termasuk kelompok wilayah yang perlu mendapat prioritas I (menurut Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian, tahun 2006) dalam penanganan masalah rawan pangan. Kabupaten Landak merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Dari sisi ketersediaan pangan, Kabupaten Landak termasuk surplus, namun apabila dilihat dari indikator kemiskinan, kesehatan dan sarana, wilayah ini tergolong daerah rawan pangan.

Penyebab rawan pangan dan gizi kronis di kabupaten penelitian, yaitu Kabupaten Sambas dan Landak mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Di antara berbagai faktor tersebut, berdasar hasil pengumpulan data dan informasi di lokasi penelitian terdapat beberapa faktor yang diidentifikasi menjadi faktor utama terjadinya rawan pangan dan gizi kronis di daerah penelitian seperti diuraikan pada bagian berikut.

a. Penyebaran penduduk yang tidak merata antar daerah

Penduduk merupakan potensi sumber daya dan pelaku pembangunan termasuk pembangunan ketahanan pangan. Oleh karenanya, dengan ketersediaan sumber daya alam dan teknologi produksi yang sudah tertentu, jumlah, dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia di suatu wilayah merupakan faktor penentu keberhasilan dalam menghasilkan dan menyediakan pangan untuk kebutuhan penduduk di wilayah yang bersangkutan. Di wilayah Kabupaten Sambas dan Landak, penyebaran penduduk yang tidak merata baik antarkecamatan, antardesa, antarkawasan pantai dan bukan pantai, dan atau antar daerah dengan aksesibilitas tinggi dan aksesibilitas rendah; merupakan salah satu faktor penyebab rawan pangan dan gizi di wilayah tersebut.

Ketidakmerataan penyebaran penduduk mengakibatkan di wilayah tertentu terjadi surplus pangan sedangkan di wilayah lain terjadi defisit. Apabila kondisi tersebut kurang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendistribusikan bahan pangan yang dibutuhkan penduduk dari daerah surplus ke daerah defisit, maka ketersediaan pangan di tingkat wilayah menjadi tidak terjamin. Apabila sarana dan prasarana untuk distribusi memadai, maka ketersediaan pangan di tingkat wilayah terjamin. Namun, karena kepadatan penduduk dan atau populasi penduduk yang terbatas di suatu wilayah, sehingga potensi sumber daya alam tidak mampu dikelola dengan baik maka masalah kesempatan kerja, pendapatan dan daya beli rumah tangga terhadap pangan menjadi terbatas. Kondisi tersebut secara langsung dan tidak langsung berakibat terbatasnya kemampuan rumah tangga dan atau individu untuk memperoleh pangan sesuai dengan kebutuhan. Apabila hal tersebut terjadi dan dalam periode waktu lama dan atau sering terjadi, maka masalah rawan pangan baik bersifat transien maupun kronis akan terjadi. Apabila ketidakcukupan pangan dan gizi tersebut terjadi pada anak balita maka status rawan gizi kronis akan terjadi. Jadi, ketidakmerataan penyebaran penduduk merupakan salah satu faktor penyebab secara tidak langsung terhadap rawan pangan dan gizi kronis di Kabupaten Sambas dan Landak.

b. Terbatasnya akses rumah tangga terhadap air bersih dan pelayanan kesehatan

Berdasar pemetaan wilayah rawan pangan dengan menggunakan 10 indikator yang dilakukan Dewam Ketahanan Pangan bekerja sama dengan WFP (World Food Program) tahun 2004, di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 8 kabupaten yang termasuk 100 kabupaten wilayah rawan pangan. Artinya, Hanya ada satu kabupaten dan 3 kota yang tidak termasuk wilayah rawan pangan. Adapun ke delapan kabupaten rawan pangan tersebut adalah Kabupaten Landak, Sambas, Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Ketapang, Pontianak, dan Bangkayang. Bila dikaji lebih lanjut, kerawanan pangan disebabkan oleh faktor-faktor terbatasnya akses rumah tangga terhadap air bersih, terbatasnya akses terhadap

pelayanan kesehatan (Puskesmas) dan terbatasnya akses terhadap jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat, tingginya angka kematian bayi, tingginya jumlah bayi dengan berat badan di bawah standar, dan beberapa indikator akses lainnya.

Sebagian besar rumah tangga di kedua kabupaten ini umumnya menggunakan air hujan dan atau air sungai sebagai sumber air minum. Artinya, faktor kebersihan dan sanitasi lingkungan yang menjamin kesehatan penduduk masih perlu mendapat perhatian. Kondisi kesehatan (dan gizi) yang kurang baik akan berpengaruh terhadap kemampuan bekerja sehingga produktivitas kerja rendah. Produktivitas kerja rendah akan menyebabkan terbatasnya pendapatan dan selanjutnya hal ini akan menyebabkan terbatasnya akses terhadap pangan yang berarti pula merupakan potensi yang tinggi terhadap terjadinya rawan pangan.

c. Terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana ekonomi

Keterbatasan terhadap sarana dan prasarana ekonomi seperti akses jalan dan transportasi, pasar, kesempatan kerja, dan pendidikan secara tunggal maupun kompleks antarpeubah tersebut ujungnya akan berdampak pada kapasitas rumah tangga dan individu untuk akses terhadap kecukupan pangan yang dibutuhkan. Seluruh peubah tersebut akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan kemiskinan. Seperti diketahui, apabila masalah kemiskinan terjadi maka kerawanan pangan dan gizi kemungkinan besar akan terjadi pula, sebagaimana telah banyak bukti empiris yang menunjukkan hal tersebut.

d. Distribusi pangan antar wilayah tidak lancar

Dilihat dari indikator ketersediaan pangan secara wilayah pada level kabupaten, kondisi kedua kabupaten tergolong baik, bahkan untuk Kabupaten Sambas merupakan wilayah surplus produksi beras di Kalimantan Barat. Namun demikian, masalah kerawanan pangan dan gizi buruk masih ditemukan di wilayah Kabupaten Sambas dan Landak. Masalah distribusi antarwilayah merupakan penyebab terjadinya rawan pangan dan gizi kronis di wilayah ini. Seperti diketahui, masalah pengangkutan bahan pangan ke daerah-daerah terpencil menuntut biaya tinggi, seringkali nilai bahan pangan yang diangkut lebih rendah dari biaya transportasinya. Oleh karena itu masalah kerawanan pangan dan gizi kronis di wilayah ini sering terjadi di daerah-daerah yang terpencil atau terisolasi.

Distribusi bahan pangan antarwilayah merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin ketersediaan pangan di wilayah pada level yang lebih rendah (kecamatan, desa, kelompok masyarakat di wilayah yang terisolir). Ketidatlancaran distribusi pangan antarwilayah selain dapat mempengaruhi terjaminnya ketersediaan pangan di wilayah yang

tergolong defisit pangan atau pada daerah-daerah dengan asesibilitas rendah, juga akan berpengaruh terhadap harga pangan yang tidak stabil dan cenderung tinggi. Tingginya harga pangan akan berpengaruh terhadap akses rumah tangga atau individu terhadap pangan, selanjutnya akan menyebabkan terjadinya kerawanan pangan.

e. Daya beli masyarakat terbatas

Data karakteristik wilayah Kabupaten Sambas maupun Landak menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di kedua wilayah tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan rumah tangga. Di sisi lain, data produksi dan produktivitas beberapa komoditas pertanian di kedua wilayah tersebut belum menunjukkan kinerja yang optimal. Pada kondisi demikian, apabila keterjaminan harga hasil pertanian tidak menguntungkan petani dalam mengusahakan komoditas pertanian, maka pendapatan dari pertanian tidak mampu menjamin kesejahteraan petani. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya pendapatan dan atau daya beli rumah tangga. Selanjutnya dengan terbatasnya pendapatan menyebabkan terbatasnya daya beli dan akses rumah tangga terhadap pangan. Akhirnya, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kerawanan pangan di tingkat rumah tangga dan atau individu.

f. Terbatasnya pengetahuan pangan dan gizi

Penduduk Kalimantan Barat dan juga di Kabupaten Sambas dan Landak terdiri dari berbagai suku/etnis. Oleh karena itu, dari sisi budaya juga beragam tergantung dari etnis masing-masing. Terkait dengan hal tersebut dalam pola asuh anak, misalnya, pentingnya Air Susu Ibu (ASI) masih kurang difahami oleh para ibu khususnya di daerah pedalaman. Biasanya ibu yang melahirkan jarang menyusui anaknya begitu lahir. Selain itu, karena tuntutan pekerjaan (di kebun/ladang) tak jarang para ibu menitipkan anaknya ke nenek atau sanak keluarganya.

Berdasarkan surveilen petugas lapangan selama tahun 2005, telah ditemukan kasus gizi buruk di Kalimantan Barat 608 kasus. Dari jumlah tersebut yang berakibat kematian sebanyak 41 kasus (6,7%). Kasus gizi buruk ini antara lain ditemukan di Kabupaten Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, dan Landak. Terbatasnya pengetahuan gizi serta akses terhadap fasilitas kesehatan menyebabkan banyaknya ditemukan kasus gizi buruk di wilayah tersebut. Sementara itu, kasus kematian bayi dengan gizi buruk antara lain disebabkan adanya penyertaan infeksi berat, pulang paksa, dan kemauan ibu untuk tetap dirawat di pelayanan kesehatan masih rendah. Penyebab kurang gizi atau gizi buruk adalah makanan tidak seimbang dan penyakit infeksi sebagai akibat tidak cukupnya persediaan pangan dan pola asuh anak yang tidak memadai, serta sanitasi /air bersih dan pelayanan kesehatan dasar yang tidak memadai.

g. Masalah pola asuh anak

Sementara itu, masalah pola asuh anak muncul sebagai salah satu konsekuensi logis dari kondisi geografis wilayah Kabupaten Sambas dan Landak yang berbatasan dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Kedekatan wilayah menjadi pendorong sebagian tenaga kerja untuk bekerja sebagai TKI/TKW karena tertarik untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Muncul masalah baru dalam pola asuh anak, karena umumnya para TKW meninggalkan anak balita. Di saat sang ibu bekerja mencari nafkah ke luar negeri, maka pengasuhan anak balita diserahkan pada nenek dan atau sanak famili. Dalam pengasuhan tersebut, apabila orang yang mengasuh tidak memiliki pengetahuan tentang pangan dan gizi serta kesehatan anak, maka masalah gizi buruk akan terjadi. Hal ini terbukti dengan masih ditemukannya masalah gizi buruk pada rumah tangga contoh di kabupaten Landak yang mencapai sekitar 10% dari total rumah tangga contoh.

3.2.3. Alternatif Penanggulangan Rawan Pangan dan Gizi Kronis

Alternatif penanggulangan rawan pangan dan rawan gizi kronis di Kabupaten Sambas dan Landak diuraikan pada bagian berikut. Sebelum merumuskan alternatif penanggulangan, dikemukakan terlebih dahulu tentang beberapa program yang telah dilaksanakan di daerah penelitian terkait dengan upaya pemantapan ketahanan pangan dan atau penanggulangan kemiskinan.

a. Program-program yang sedang dilaksanakan

Dalam upaya menjaga ketersediaan pangan khususnya beras, wilayah Kalimantan Barat telah menetapkan program sasaran satu juta ton beras yang diharapkan tercapai pada tahun 2007. Untuk mendukung program tersebut, mulai TA 2006 juga dilaksanakan kegiatan peningkatan produksi melalui program Pengembangan Kawasan Agribisnis Terpadu (KUAT) di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Diharapkan melalui program ini, disamping akan mendorong peningkatan produksi baik padi maupun komoditi lainnya, juga diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan petani.

Di masa mendatang, dalam rangka memantapkan ketersediaan pangan di daerah, sedang diupayakan kemungkinan dikembangkannya "cadangan pangan provinsi, kabupaten, bahkan cadangan pangan desa" sebagai upaya mendukung cadangan pangan nasional. Dalam upaya meningkatkan akses rumah tangga terhadap pangan, pihak Pemda terus melakukan penanganan di bidang sarana transportasi, agar alur bahan pangan dari daerah sentra ke daerah yang kurang akan semakin lancar. Mengingat masih banyak wilayah di daerah Kalimantan Barat sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat, dengan dibukanya akses jalan sampai ke pelosok diharapkan biaya transportasi dapat ditekan.

Untuk lebih mendekatkan bahan pangan kepada masyarakat khususnya daerah yang tergolong minus, masyarakat didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya setempat. Mulai tahun 2005 dengan dukungan dana Dekonsentrasi telah dirintis pelaksanaan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan. Kegiatan ini diharapkan menjadi dorongan untuk mempercepat peningkatan ketahanan pangan di daerah melalui pemberdayaan masyarakat miskin.

Untuk mengamankan harga gabah di tingkat petani, disamping dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) yang dilaksanakan sejak tahun 2003, Pemerintah Provinsi sejak tahun 2000 telah menyediakan dana pembelian gabah yang pengelolaannya diserahkan Bank Kalbar sebesar 2,5 milyar Rupiah. Disamping itu, beberapa kabupaten sentra produksi juga menyiapkan dana untuk pembelian gabah. Mengingat di beberapa daerah padi sawah nonirigasi ditanam hanya satu kali dan periode panen relatif panjang (tidak serentak), sehingga perputaran dana LUEP maksimal hanya bisa dua kali, maka perlu ditinjau kembali tentang keefektifan dana talangan tersebut dalam mendukung kebijakan stabilisasi harga gabah.

Di kabupaten Sambas, pada TA 2005 dana LUEP yang dialokasikan sebesar 800 juta rupiah, sedangkan tunggakan yang masih ada sekitar Rp 60 juta (7,5%). Pada TA 2006 dianggarkan Rp 450 juta dengan jumlah sasaran 8 unit LUEP. Pengalokasian dana talangan tersebut akan lebih berdaya guna bila target sasaran diprioritaskan di daerah sentra produksi, dimana masa panennya relatif serentak sehingga perbedaan harga gabah saat panen dan tidak panen sangat signifikan dan berfluktuasi. Selain itu, petani dianjurkan menanam varietas yang disukai pasar (konsumen) terutama varietas IR 64 dan Ciherang serta menggalakkan dan menumbuhkan kegiatan lumbung pangan desa dalam rangka pelaksanaan sistem tunda jual.

Program yang terkait dengan penanggulangan rawan pangan antara lain adalah bantuan bibit padi dan sayuran dengan nilai bantuan sebesar 5 juta rupiah per kelompok. Selain itu juga dijalankan kegiatan Gerakan Sadar Pangan dan Gizi (GSPG) sebagai program lanjutan Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) yang dimulai tahun 2001 dengan sasaran kelompok wanita tani. Total dana Rp 30 juta dengan sistem bergulir. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pertanian di tingkat lokal, mendorong diversifikasi pangan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Untuk mengatasi masalah gizi, telah dilaksanakan antara lain kegiatan revitalisasi Posyandu dan revitalisasi Puskesmas untuk melakukan pembinaan/penyuluhan dan intervensi gizi. Bentuk kegiatannya adalah melalui pemberian makanan tambahan dan pengobatan serta mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah sebagai upaya peringatan dini. Dalam revitalisasi Posyandu, antara lain dilakukan dengan membiayai operasional kegiatan Posyandu yang dimulai

TA 2006. Kegiatan ini juga terpadu dengan kegiatan pendidikan untuk anak usia prasekolah (balita) atau disebut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Model Posyandu masyarakat ini difasilitasi dengan arena permainan untuk anak-anak. Upaya tersebut diharapkan mendorong masyarakat tertarik untuk mengunjungi Posyandu tanpa harus diajak oleh petugas/kader kesehatan yang bertugas.

b. Alternatif upaya penanggulangan

Upaya untuk mengatasi kerawanan pangan atau meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sambas dan Landak terutama adalah komitmen pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perekonomian daerah yang memperhitungkan aspek penguatan sumber-sumber kehidupan dalam jangka panjang yang menjamin terbentuknya ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah secara berkelanjutan. Kebijakan dan program yang ditetapkan mampu membangkitkan masyarakat sebagai penggerak berbagai aset dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dan ancaman. Selain itu, upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sambas dan Landak yang telah dilakukan dengan berbagai cara tersebut perlu dilakukan secara simultan, sinergis, konsisten, dan berkelanjutan.

Pemecahan masalah keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, sarana, dan prasarana dapat dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap pangan. Upaya tersebut perlu dilakukan dengan meningkatkan dan membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat melalui fasilitasi dan dukungan yang kondusif terhadap para investor yang tertarik menginvestasikan modalnya dalam pengembangan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan masyarakat setempat. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut termasuk didalamnya adalah upaya mengatasi kendala dalam hal distribusi bahan pangan antarwilayah terutama pada wilayah-wilayah yang terisolir.

Peningkatan pendapatan dan daya beli rumah tangga dapat dilakukan dengan meningkatkan ketrampilan melalui edukasi, sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan. Program pemberdayaan masyarakat masih rendah. Upaya ini dapat melibatkan LSM (juga untuk kontrol pemerintah). Peningkatan ketrampilan, pengolahan, dan pemasaran pangan/pertanian harus diinisiasi dan menjadi tanggung jawab pemerintah, dengan sasaran terutama kaum ibu dan wanita di perdesaan. Selain itu, di sektor pertanian, upaya peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan peningkatan efisiensi produksi melalui penerapan teknologi produksi, mulai dari penggunaan benih unggul, pengelolaan, dan pemupukan seimbang sesuai rekomendasi dan peningkatan teknologi panen dan pascapanen.

Diversifikasi produksi dan konsumsi pangan perlu didorong di Kabupaten Landak. Untuk mendorong diversifikasi konsumsi pangan maka sentuhan teknologi pengolahan produk dengan bahan baku setempat perlu digalakkan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan di perdesaan, dengan inisiasi dari pemerintah didukung oleh swasta dan masyarakat setempat. Pengembangan industri pengolahan di perdesaan diharapkan bermanfaat dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan mendorong diversifikasi penyediaan produk pangan berbahan baku lokal.

Dalam hal pola asuh anak, upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah melalui pengembangan rumah/panti penitipan anak yang dikelola oleh swasta dengan dukungan pemerintah. Pembangunan panti penitipan anak diprioritaskan di daerah atau desa-desa dengan populasi wanita/ibu yang memiliki balita bekerja di luar negeri cukup banyak. Fungsi rumah penitipan anak tersebut, selain dalam hal pengasuhan dan pendidikan, sekaligus juga pemberian pangan dan gizi sesuai kebutuhan anak. Upaya ini diharapkan mampu menekan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita.

Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga diakui dapat mempengaruhi kemudahan dalam adopsi teknologi. Oleh sebab itu, peningkatan pendidikan juga merupakan hal penting untuk menanggulangi masalah rawan pangan dan gizi.

3.3. Provinsi Jawa Timur

Untuk merepresentasikan kondisi rawan pangan dan rawan gizi kronis di Jawa Timur dipilih dua kabupaten sebagai contoh penelitian, yaitu Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sampang. Keduanya termasuk dalam kelompok 100 kabupaten di Indonesia yang mengalami rawan pangan (DKP dan WFP, 2005). Subbab ini akan menyajikan karakteristik wilayah dan karakteristik rumah tangga rawan pangan dan gizi di kedua kabupaten contoh tersebut. Penyajian hasil analisis antara kedua kabupaten tidak dapat dilakukan persis sama karena ketersediaan data yang dapat diakses di masing-masing kabupaten berbeda.

3.3.1. Karakteristik Wilayah dan Rumah tangga

Sumber daya Alam

Produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah sangat terkait dengan potensi sumber daya alam di wilayah tersebut sebagai unsur pendukung utama proses produksi. Potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan kondisi lingkungan produksi yang kondusif merupakan modal dasar bagi keberhasilan program peningkatan ketersediaan pangan tingkat wilayah sekaligus pemacu peningkatan

kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Oleh sebab itu informasi dan gambaran potensi sumber daya alam dalam pembahasan tentang pangan menjadi penting.

Kabupaten Bondowoso memiliki wilayah seluas 122,9 ribu ha atau sekitar 3,1 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya terbagi dalam 20 kecamatan, 195 desa, dan 10 kelurahan. Topografi wilayah meliputi dataran rendah (30,7%), perbukitan (24,9%) dan pegunungan (44,4%). Wilayah pegunungan yang terletak di bagian timur adalah pegunungan Ijen, sedangkan yang di sebelah barat adalah pegunungan Argopuro. Sekitar 54,5% wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki ketinggian tempat kurang dari 100 m di atas permukaan laut (dpl), 43,3% berada pada ketinggian antara 100-1000 m dpl, dan sekitar 2,2% berada pada ketinggian lebih dari 1000 m dpl. Terdapat beberapa sungai yang cukup panjang dan dimanfaatkan sebagian masyarakat antara lain adalah Bedadung, Sampeyan, Mayang, Marwan, dan Deluang. Jenis tanah di Bondowoso yang cukup dominan adalah regosol. Proporsi luas wilayah dengan jenis tanah tersebut mencapai 47,8% (Tabel 3.44). Selain jenis tanah tersebut masih terdapat jenis tanah lain, seperti jenis tanah andosol, latosol, mediteran, litosol, dan grumosol.

Tabel 3.44. Karakteristik Sumber daya Alam Kabupaten Bondowoso, 2004

Uraian	Karakteristik
Topografi	30,7% dataran rendah; 24,9% perbukitan dan 44,4% pegunungan. 54,5% wilayah memiliki ketinggian < 100 m dpl; 13,5% wilayah dengan ketinggian 100-500 m dpl; 29,9% wilayah dengan ketinggian 500-1000 m dpl, 2,2% wilayah dengan ketinggian > 1000 m dpl
Jenis tanah	litosol = 3,1%; regosol = 47,8%; andosol = 20,6%; grumosol = 0,3%; mediteran = 12,7%; latosol = 15,4%
Iklim	Musim hujan dari November-Mei dan musim kemarau dari Juni-Oktober. Curah hujan rata-rata 1505 mm/th (kisaran 908-2160). CH tertinggi terjadi pada bulan Februari. Jumlah hari hujan (HH) 8 hari/bulan, dengan kisaran maksimum 11 HH/bulan dan minimum 4 HH/bulan.
Hidrologi	Terdapat beberapa sungai: Bedadung (70 km), Sampeyan (61 km), Mayang (56 km), Marwan (32 km) dan Deluang (30 km)

Sumber: Bondowoso Dalam Angka 2004

Kabupaten Sampang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura. Wilayah kabupaten Sampang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara dan Selat Madura di sebelah selatan. Kabupaten Sampang terbagi atas 12 kecamatan dengan 180 desa. Luas wilayah kabupaten adalah 1233,3 ribu ha. Secara umum topografi kabupaten Sampang terdiri atas wilayah berbukit di bagian tengah dengan

kelerengan antara 25-40% dan dataran rendah di wilayah sepanjang pantai Selatan dan Utara. Ketinggian tempat berkisar antara 1,5 - 118 m dpl. Daerah perbukitan beriklim sedang, sedangkan di daerah dataran beriklim kering atau kering sekali. Curah hujan rata-rata di kabupaten ini 1124,6 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 71,8 hari/tahun (Tabel 3.45). Seperti di Kabupaten Bondowoso, di wilayah Kabupaten Sampang juga terdapat banyak sungai. Sebagian bermuara di Selat Madura di sebelah selatan dan sebagian yang lain bermuara ke arah Laut Jawa di sebelah utara. Namun demikian, sungai-sungai tersebut mengalami penurunan debit yang cukup drastis pada musim kemarau. Keberadaan sungai tak mampu mengubah ancaman kekeringan yang terjadi di wilayah kabupaten ini.

Tabel 3.45. Karakteristik Sumber daya Alam Kabupaten Sampang, 2004

Uraian	Karakteristik
Topografi	Wilayah bagian tengah berbukit dengan kelerengan antara 25-40%. Wilayah sepanjang pantai Selatan dan Utara dataran rendah. Ketinggian tempat berkisar antara 1,5 -118 m dpl
Iklim	Daerah perbukitan beriklim sedang, sedangkan di daerah dataran beriklim kering atau kering sekali. Curah hujan rata-rata 1124,6 mm/tahun (kisaran 280-1990) dengan jumlah hari hujan 71.8 hari/tahun (kisaran 11-130)
Hidrologi	Terdapat banyak sungai yang terpisah di bagian utara dan selatan. Sungai Kamuning adalah terpanjang di bagian utara (20 km), di bagian selatan adalah Sungai Sodung (22 km).

Sumber: Sampang Dalam Angka 2004

Dari data penggunaan lahan (Tabel 3.46) dapat ditunjukkan bahwa meskipun pertanian lahan kering tegalan/ladang relatif dominan (31,5% dari total luas lahan), tetapi potensi pertanian berbasis lahan sawah di Kabupaten Bondowoso juga masih cukup besar (sekitar 25,0%). Untuk lahan sawah, sebagian besar areal merupakan sawah beririgasi teknis. Di Kabupaten ini juga terdapat areal perkebunan yang cukup luas. Akan tetapi, sebagian besar areal perkebunan tersebut merupakan perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan. Diperkirakan proporsi perkebunan rakyat hanya sekitar 13% dari total areal perkebunan yang ada.

Kondisi tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi di Kabupaten Sampang. Di Kabupaten Sampang potensi lahan sawah irigasi relatif kecil. Dari sekitar 16,8% areal pertanian sawah, proporsi sawah irigasi hanya 2,8%. Sebagian besar sawah yang ada merupakan sawah tadah hujan. Di sisi lain, potensi pertanian berbasis lahan kering cukup besar. Luas lahan tegalan/ladang mencapai 65,3% dari total penggunaan lahan di kabupaten tersebut. Kondisi demikian, sekali lagi mengesankan wilayah Kabupaten Sampang sebagai daerah yang “kering”. Kekeringan di Sampang tidak hanya terbatasnya air irigasi tetapi juga termasuk ketersediaan air untuk keperluan rumah tangga. Kekeringan tersebut

pada akhirnya juga mempengaruhi penyebaran wilayah-wilayah miskin dan situasi rawan pangan di kabupaten ini.

Tabel 3.46. Luas Lahan menurut Penggunaannya di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2004

Uraian	Bondowoso (ha)	Proporsi (%)	Sampang (ha)	Proporsi (%)
Sawah				
1. Irigasi				
- Teknis	24.755	20,14	3.441	2,79
- 1/2 teknis	2.745	2,23	872	0,71
- Sederhana	2.948	2,40	346	0,28
- Desa	63	0,05	74	0,06
2. Tadah hujan	681	0,55	15.856	12,86
<i>Sub jumlah</i>	31.192	25,38	20.589	16,69
Nonsawah				
1. Pekarangan	12.795	10,41	12.569	10,19
2. Tegal/ladang	38.719	31,50	80.587	65,35
3. Pd rumput		0,00	75	0,06
4. Tambak		0,00	5.263	4,27
5. Kolam	17	0,01		0,00
6. Lhn tdk diusahakan	52	0,04	641	0,52
7. Hutan rakyat	9.441	7,68	986	0,80
8. Hutan negara	20.486	16,67	210	0,17
9. Perkebunan	5.206	4,24	21	0,02
10. Lainnya	4.994	4,06	2.384	1,93
<i>Sub jumlah</i>	91.710	74,62	102.736	83,31
Total luas	122.902	100,00	123.325	100,00

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, 2005.

Salah satu persoalan sumber daya lahan yang menonjol di Kabupaten Sampang adalah luasnya lahan kritis. Areal lahan kritis diperkirakan mencapai 26,2% dari luas lahan kabupaten ini. Sebagian besar (97,5%) lahan kritis berada di luar kawasan hutan. Terbentuknya areal lahan kritis antara lain disebabkan oleh adanya arus air permukaan, banjir, abrasi air laut, dan penggalian penambangan yang dilakukan masyarakat. Untuk menekan laju pertambahan areal lahan kritis, pemerintah daerah telah melakukan program penghijauan sejak beberapa tahun lalu. Akan tetapi dengan keterbatasan dana, pelaksanaan program tersebut belum mampu mengurangi secara signifikan luas lahan kritis yang ada.

Sumber Daya Manusia

Dalam konteks ketahanan pangan, posisi sumber daya manusia tidak hanya sebagai obyek yang akan menerima dampak perubahan

situasi pangan tetapi juga sebagai subjek yang dituntut untuk mampu mencukupi pangan sesuai kebutuhan. Ini berarti peningkatan kinerja ketahanan pangan tidak hanya membutuhkan peran aktif sumber daya manusia dalam penciptaan daya beli pangan, tetapi juga peran dalam pemahaman akan pentingnya pangan dan gizi bagi pertumbuhan dan kesehatan tumbuh. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia sesuai potensi dan kapasitas yang dimilikinya menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan ketahanan pangan.

Penduduk Kabupaten Bondowoso pada tahun 2004 berjumlah 699.188 jiwa. Jumlah penduduk tersebut cenderung meningkat setiap tahun dengan laju pertumbuhan sekitar 0,82%/tahun. Jumlah penduduk wanita lebih tinggi dibanding penduduk pria. Proporsi penduduk wanita mencapai 51,4% dari total penduduk. Secara regional, tingkat kepadatan penduduk pada tahun tersebut mencapai 448,2 orang/km². Struktur penduduk cenderung didominasi oleh penduduk usia kerja yang mencapai 75% dari total penduduk.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Sesuai ketentuan BPS dan Departemen Tenaga Kerja, batasan usia kerja dalam hal ini adalah 15 tahun keatas. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2004, TPAK di Kabupaten Bondowoso sebesar 67,8%. Terkait pasar tenaga kerja dapat disebutkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di pasar kerja berbeda antara pria dan wanita. Tingkat kesempatan kerja (TKK) penduduk pria di kabupaten ini dapat mencapai 80,5%, sedangkan TKK untuk penduduk wanita hanya 47,0% (Tabel 3.47).

Dari total penduduk yang berusia kerja, proporsi mereka yang berstatus bekerja hanya sekitar 66,0%. Secara implisit hal ini mengindikasikan bahwa kesempatan kerja di wilayah Kabupaten Bondowoso relatif terbatas. Keterbatasan ini terkait dengan langkanya kegiatan investasi atau kegiatan produktif lain yang dapat memberikan lapangan kerja di wilayah tersebut. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian hingga kini masih menjadi sektor andalan dalam perekonomian wilayah di Bondowoso. Tak kurang dari 70,0% penduduk menggantungkan hidupnya pada aktivitas di sektor pertanian. Situasi ini memberikan petunjuk bahwa kebijakan pembangunan untuk masa mendatang di kabupaten ini seharusnya diarahkan pada pengembangan sektor pertanian. Bila penciptaan nilai tambah produk pertanian dapat ditingkatkan, produktivitas sektor pertanian juga dapat meningkat. Selanjutnya, dengan adanya peningkatan ini maka kesejahteraan masyarakat dapat menjadi lebih baik.

Penyerapan penduduk di sektor industri/kerajinan masih sangat kecil, hanya 3,4%. Adapun penyerapan di sektor perdagangan mencapai hampir 9,0%. Rendahnya tingkat penyerapan ini mengindikasikan bahwa sektor usaha sekunder belum berkembang di Bondowoso. Unit-unit usaha industri maupun perdagangan di wilayah ini masih terbatas dalam jumlah maupun skala usaha. Industri berskala sedang dan besar hanya

berjumlah 43 unit, dimana 27 unit diantaranya bergerak di bidang makanan dan minuman yang menyerap 2.789 tenaga kerja. Empat unit bergerak di bidang kimia dan bahan bangunan dan dapat menyerap 1.834 orang tenaga kerja, serta 12 unit yang lain bergerak di bidang industri kerajinan umum yang menyerap 520 orang tenaga kerja.

Kondisi pasar tenaga kerja yang kurang dinamis di Bondowoso juga terindikasi dari banyaknya tenaga kerja yang hanya berstatus sebagai buruh. Data statistik status pekerjaan utama penduduk menunjukkan bahwa proporsi mereka yang pekerjaan utamanya menjadi buruh mencapai sekitar 44%. Proporsi penduduk yang berusaha sendiri hanya 28,8% dan berusaha yang dibantu buruh tidak tetap sebesar 17,7% (Tabel 3.47).

Tabel 3.47. Kinerja Sumber daya Manusia dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bondowoso, 2004

Aspek	Karakteristik
Karakteristik penduduk	699.188 jiwa; laju pertumbuhan 0,82%/th; 3 orang/RT; penduduk usia kerja 75%; densitas penduduk 448,2 orang/km ² ; sex ratio : 0,94
Ketenagakerjaan	TPAK :67,8 %, TTK : Pria 80,5 %; wanita 47,0%
Status penduduk usia kerja	Bekerja 65,9%; mencari pekerjaan 1,9%; sekolah 3,8%; lainnya 29,4%
Penyerapan tenaga kerja menurut sektor	Sektor primer 70,0%; sekunder 12,4%; tertier 17,6%
Penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama	Berusaha sendiri 28,8%; berusaha dibantu buruh tidak tetap 17,7%; berusaha dibantu buruh tetap 0,8%; buruh 43,8%; pekerja tidak dibayar 8,9%
Penduduk miskin	Pra KS= 104 960; KS-I= 52 731
Balita di bawah grs merah	2,91% (1287 balita)
Balita gizi buruk	4,0% (Jatim: 2,7%)
Prevalensi KEP	23,7% (Jatim: 19,3%)

Sumber: Bondowoso Dalam Angka 2004

Hasil pendataan penduduk miskin menunjukkan bahwa di Bondowoso jumlah penduduk miskin masih relatif besar. Pada tahun 2004 jumlah keluarga prasejahtera dan Sejahtera I (Pra KS dan KS-1) mencapai 157.691 KK atau sekitar 66,3% dari total KK (kepala keluarga). Akan tetapi dari pendataan kemiskinan menggunakan indikator baru (PKIB) diketahui jumlah penduduk miskin hanya 39,8%. Terlepas dari perbedaan angka antarsumber tersebut, tingginya proporsi rumah tangga miskin diduga tidak terlepas dari situasi keterbatasan penguasaan potensi sumber daya di tingkat rumah tangga, tingkat perkembangan lingkungan ekonomi yang berjalan lambat, disamping situasi pasar tenaga kerja yang kurang dinamis.

Tujuan pembangunan nasional hakekatnya adalah membangun manusia seutuhnya. Ini berarti bahwa pembangunan seharusnya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai

tingkat kehidupan yang sejahtera sebagai output dari pendayagunaan sumber daya secara optimal melalui berbagai kegiatan ekonomi.

Salah satu ciri sumber daya manusia berkualitas adalah sehat, aktif, dan produktif. Kondisi tersebut hanya dapat dicapai bila kecukupan pangan dan gizi masyarakat telah dapat dipenuhi. Indikasi kecukupan pangan dan gizi lebih mudah diamati dengan melihat kondisi kesehatan penduduk usia muda, yaitu pada kelompok balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, diketahui bahwa prevalensi kurang energi protein (KEP) di Bondowoso sebesar 23,7%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata prevalensi KEP Provinsi Jawa Timur (19,3%). Namun demikian, hasil pemantauan status gizi balita menunjukkan bahwa proporsi balita yang berat badannya di bawah normal (di bawah garis merah dalam Kartu Menuju Sehat, KMS, yang dipakai di Posyandu) relatif kecil, yaitu hanya 2,9% dari total balita yang ditimbang di Posyandu. Selain itu, hasil monitoring juga menunjukkan bahwa jumlah balita yang mengalami gizi buruk di kabupaten ini hanya sekitar 4,0%.

Bila dikaitkan dengan pemilihan lokasi contoh penelitian, terkesan bahwa proporsi jumlah balita dengan berat badan di bawah normal serta insiden gizi buruk yang relatif rendah tidak mencirikan Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu daerah yang tergolong rawan gizi. Ketidakesesuaian tersebut terjadi karena penetapan status kabupaten rawan pangan dalam peta FIA menggunakan indikator yang terlalu umum dan tidak secara langsung menunjukkan kondisi riil rawan pangan dan gizi. Dinas Kesehatan biasanya mencanangkan program pemberian makanan tambahan (PMT) bila insiden rawan pangan dan gizi meluas. Beberapa tahun terakhir ini program tersebut tidak dilaksanakan karena tidak ada kasus gizi buruk yang serius.

Untuk kabupaten Sampang, jumlah penduduk pada tahun 2004 sebanyak 787.641 orang dengan laju pertumbuhan sekitar 2,7%/tahun. Bila dibandingkan dengan luas wilayah, tingkat kepadatan penduduk kabupaten ini mencapai 634,3 orang/km². Seperti yang terjadi di Bondowoso, jumlah penduduk wanita di Kabupaten Sampang juga lebih banyak dibandingkan penduduk pria. Rasio jenis kelamin sebesar 0,95 (Tabel 3.48). Angka itu menunjukkan bahwa untuk setiap 100 penduduk wanita di kabupaten ini terdapat sekitar 95 penduduk pria.

Sekitar dua pertiga (66,0%) penduduk Sampang termasuk dalam usia kerja. Tidak diperoleh angka pasti mengenai kesempatan kerja di kabupaten ini. Akan tetapi, pada tahun 2004 tercatat jumlah pencari kerja sebanyak 5.001 orang, dimana 2.809 orang diantaranya adalah tenaga kerja pria dan 2.192 orang yang lain adalah wanita. Dari pencari kerja tersebut, sekitar 50% diantaranya memiliki latar belakang diploma/sarjana muda dan sarjana; 45,9% adalah lulusan SMU dan kurang dari lima persen yang lain adalah tamatan SLTP dan SD (Tabel 3.48).

Tabel 3.48. Potensi Sumber daya Manusia dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Sampang

Aspek	Karakteristik
Karakteristik penduduk	Jumlah penduduk :787.641 orang; kepadatan penduduk :634,3 orang/km ² ; laju pertumbuhan 2,72%/th; sex ratio : 0,95
Ketenagakerjaan	Penduduk usia kerja :65,7%; jumlah pencari kerja 5.001 orang, laki-laki 2.809 orang dan perempuan 2.192 orang. Tamat SD 57 orang; SLTP 111 orang; SMU 2.294 orang; diploma/sarjana 1.167 orang; sarjana 1.372 orang
Penduduk miskin	333.984 orang
Balita dibawah grs merah	3,08% (1.147 balita)
Balita gizi buruk	3,08% (Jatim 2,7%)
Prevalensi KEP	26,0% (Jatim 19,3%)

Sumber: Sampang Dalam Angka 2004; Strategi penanggulangan kemiskinan kab Sampang 2003-2007

Salah satu kendala dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sampang adalah masih tingginya angka kemiskinan. Kualitas sumber daya alam yang buruk dan tingkat penguasaannya yang rendah oleh rumah tangga menjadi salah satu akar penyebab kemiskinan utama di daerah ini. Data statistik menunjukkan angka kemiskinan di kabupaten ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode 2000-2004 laju pertumbuhan penduduk miskin sebesar 3,9%/tahun. Tahun 2004 jumlah penduduk miskin mencapai 333.984 jiwa, atau sekitar 42,4% dari total penduduk Sampang.

Dibandingkan Kabupaten Bondowoso prevalensi kurang energi protein (KEP) di Kabupaten Sampang sedikit lebih tinggi, yaitu mencapai 26,0%. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata prevalensi KEP Provinsi Jawa Timur (19,3%). Proporsi balita yang memiliki berat badan di bawah normal (di bawah garis merah dalam KMS) sebesar 3,1% dari total balita yang ditimbang di Posyandu, sedangkan jumlah balita yang mengalami gizi buruk juga 3,1%.

Pada Tabel 3.49 disajikan kinerja sumber daya manusia dan ketenagakerjaan di tingkat rumah tangga contoh. Rumah tangga rawan pangan dan gizi umumnya terdiri dari 3-5 orang anggota keluarga. Di antara responden masih ada yang memiliki anak usia di bawah lima tahun (balita). Meskipun umumnya anak-anak dari rumah tangga rawan pangan dan gizi dapat menikmati fasilitas pendidikan, akan tetapi masih dijumpai kasus anak putus sekolah. Selain itu juga ditemukan kasus anak-anak usia sekolah yang ikut bekerja. Sebagaimana diketahui, rumah tangga rawan pangan dan gizi umumnya adalah rumah tangga miskin. Pada kelompok rumah tangga miskin, jumlah anggota rumah tangga merupakan aset penting karena dapat menjadi sumber tenaga kerja potensial. Jumlah anggota rumah tangga putus sekolah di Kabupaten

Sampang yang lebih tinggi dibanding di Kabupaten Bondowoso dapat mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Sampang lebih parah dibandingkan di Bondowoso.

Tabel 3.49. Karakteristik Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2006

Karakteristik	Bondowoso	Sampang
Umur KK (tahun)	58,4	54,9
Pendidikan formal KK(tahun)	2,9	4,44
Pekerjaan Utama KK (%):		
1. pertanian	84,2	100,0
2. nonpertanian	15,8	0,0
Umur Isteri (tahun)	42,5	47,5
Pendidikan formal Isteri (tahun)	2,7	4,0
Pekerjaan Utama Isteri (%):		
1. pertanian	81,8	66,7
2. nonpertanian	18,2	33,3
Jumlah anggota RT (orang)	3,2	4,8
Jumlah anak (orang)	1,5	3,2
Jml ART anak usia balita (0-5 th) ¹⁾	1,2	1,3
	(19)	(50)
Jml ART putus sekolah (orang) ¹⁾	1,0	2,0
	(9,5)	(5,0)
Jml ART bersekolah (orang)	1,1	2,3
Jml ART bekerja (orang)	1,9	1,9
Jml ART bekerja < 15 tahun (orang)	0,7	0,2
Jml ART bekerja >= 15 tahun (orang)	1,7	1,9

Sumber : Data primer, 2006

Keterangan: Angka dalam kurung adalah jumlah responden yang menjawab

¹⁾ Rataan dari jumlah responden yang menjawab

Rataan umur kepala keluarga (KK) rumah tangga rawan pangan sudah cukup tua, khususnya di Bondowoso, sementara umur isteri masih relatif muda (kurang dari 50 tahun). Namun demikian, capaian tingkat pendidikan formal keduanya relatif rendah. Di kabupaten Bondowoso rata-rata pendidikan KK dan isteri hanya sampai kelas 3 SD, sedangkan di Kabupaten Sampang rata-rata pendidikan keduanya sampai kelas 4 SD. Di kalangan masyarakat setempat, yang umumnya berasal dari etnis Madura, pendidikan formal masih dianggap kebutuhan sekunder karena mereka lebih mementingkan pendidikan informal keagamaan melalui pesantren-pesantren yang tumbuh di sekitar tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, banyak dijumpai masyarakat yang tidak dapat membaca-tulis huruf latin, tetapi lancar dalam membaca-tulis huruf arab.

Sebagaimana kecenderungan di tingkat wilayah, sektor pertanian juga memiliki peran strategis dalam kehidupan rumah tangga rawan

pangan dan gizi. Hal ini karena sebagian besar KK rawan pangan dan gizi memiliki pekerjaan utama di sektor pertanian. Bahkan di Kabupaten Sampang partisipasi rumah tangga yang bekerja di sektor tersebut mencapai seluruh responden (100%). Di kedua kabupaten contoh, para isteri umumnya juga ikut bekerja membantu suami. Akan tetapi bidang pekerjaan para isteri tersebut juga belum banyak yang beranjak dari sektor pertanian.

Indikasi tingkat kesejahteraan yang lebih rendah di Kabupaten Sampang juga dapat terlihat dari perbandingan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Meskipun jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di kedua kabupaten relatif sama, akan tetapi ukuran rumah tangga di Sampang lebih besar dibandingkan di Bondowoso. Dengan demikian, beban tanggungan anggota rumah tangga yang bekerja di Sampang menjadi lebih berat dibandingkan dengan di Bondowoso.

Perekonomian

Secara regional kinerja perekonomian suatu kabupaten dapat dilihat dari struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2003 PDRB Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 650.165.121 (dalam harga konstan). Nilai tersebut meningkat 3,8% dibandingkan nilai PDRB tahun 2002. Dalam hitungan per kapita, angka PDRB tahun 2003 adalah Rp 917.474 atau dalam nilai nominal sebesar Rp 2.321.026. Angka PDRB per kapita tersebut merupakan gambaran kasar tingkat pendapatan rata-rata penduduk Kabupaten Bondowoso pada tahun yang bersangkutan.

Pada uraian sebelumnya telah diungkapkan bahwa sektor pertanian masih menjadi andalan bagi sebagian besar penduduk di Bondowoso. Secara makro peran sektor pertanian tersebut juga terlihat dari struktur pembentukan PDRB kabupaten. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.50, kontribusi sektor pertanian mencapai 48,6 pada tahun 2003. Meskipun dengan kecenderungan menurun, tetapi pangsa kontribusi tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan sektor atau lapangan usaha yang lain. Kontribusi terbesar kedua berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran (16,3%). Untuk sektor-sektor yang lain, kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Bondowoso dibawah 10%. Selain di sektor pertanian, kecenderungan penurunan pangsa PDRB juga terjadi pada sektor konstruksi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

Pada sektor pertanian, pangsa terbesar berasal dari subsektor tanaman bahan makanan. Kontribusi subsektor tersebut sebesar 33,9% pada tahun 2003. Pada urutan kedua pangsa terbesar berasal dari subsektor perkebunan dengan nilai 8,6%. Pangsa subsektor peternakan, perikanan dan kehutanan masing-masing hanya sebesar 6,1%, 0,3%, dan 0,3%. Telah disinggung sebelumnya bahwa di daerah Bondowoso terdapat areal perkebunan yang sebagian besar dikelola oleh perusahaan besar.

Tabel 3.50. Perkembangan Pangsa Sektorial dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Bondowoso Atas Harga Konstan (%)

No	Sektor	2002	2003	Perubahan (%)
1.	Pertanian	48,70	48,60	-0,21
2.	Pertambangan dan penggalian	0,21	0,21	0,00
3.	Industri pengolahan	8,68	8,92	2,76
4.	Listrik, gas dan air bersih	0,51	0,54	5,88
5.	Konstruksi	3,72	3,65	-1,88
6.	Perdagangan, hotel, dan restoran	16,03	16,28	1,56
7.	Pengangkutan dan komunikasi	3,04	3,04	0,00
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	9,84	9,69	-1,52
9.	Jasa-jasa	9,27	9,09	-1,94
Total (Rp.)		626.389.440	650.165.121	3,80

Sumber: Bondowoso Dalam Angka tahun 2004

Rincian PDRB terbaru Kabupaten Sampang tidak dapat diperoleh. Akan tetapi Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sampang Tahun 2006-2026 menyebutkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Sampang selama beberapa tahun menunjukkan pola yang relatif tetap. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, struktur PDRB Sampang juga didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Pada tahun 2003 kontribusi ketiga sektor tersebut masing-masing sebesar 59,5%, 14,2% dan 10,2%. Pendapatan per kapita pada tahun tersebut sebesar Rp 2.186.393. Sektor pertanian didominasi oleh peran subsektor tanaman pangan. Jenis pangan yang potensial untuk dikembangkan terutama adalah padi dan jagung karena terdapat di hampir seluruh wilayah kecamatan. Pangsa sektor industri dalam PDRB masih rendah (kurang dari 10%), sehingga dapat mengindikasikan bahwa usaha industri kurang berkembang di wilayah ini, termasuk industri pengolahan hasil pertanian. Pemasaran hasil-hasil pertanian masih lebih banyak dalam bentuk asalan dan kurang tersentuh teknologi.

Hasil analisis data primer menunjukkan, rataan pendapatan rumah tangga rawan pangan di Kabupaten Bondowoso dan Sampang masing-masing sekitar Rp 552.000 dan Rp 474.000 per kapita/tahun. Sementara itu, rataan nilai penguasaan aset rumah tangga (yang meliputi alat pertanian, alat transportasi, alat komunikasi, dan alat rumah tangga) di masing-masing kabupaten mencapai Rp 285.905 dan Rp 771.250. Meskipun tidak setiap rumah tangga menguasai lahan sebagai basis produksi, akan tetapi 48% dari pendapatan rumah tangga rawan pangan di Kabupaten Sampang dan 74% di Bondowoso berasal dari sektor pertanian. Sebagian besar pangsa pendapatan tersebut berasal dari kegiatan di luar usahatani, yaitu sebagai buruh tani.

Tabel 3.51. Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2006 (%)

Sumber pendapatan	Kabupaten	
	Bondowoso	Sampang
PERTANIAN:	73,63	47,88
Usahatani padi	0,32	0,00
Usahatani nonpadi	0,00	0,00
Tegal/pekarangan/kolam	0,29	19,01
Pernakan	0,15	1,98
Nelayan	0,00	0,00
Luar usahatani	72,86	26,89
NON PERTANIAN:	26,37	52,12
PNS/swasta/ pensiunan	0,00	0,00
Usaha sendiri	1,04	9,53
Buruh industri	0,00	0,00
Buruh bangunan	2,93	2,11
Pedagang	3,11	0,00
Jasa	0,50	0,09
Lainnya	18,80	40,39
Total pendapatan	100,00	100,00
(Rp /kapita/tahun)	(552024)	(474421)

Sumber: data primer, 2006.

Pangsa pendapatan rumah tangga dari sektor nonpertanian di Kabupaten Sampang, mencapai 52% dari pendapatan total rumah tangga. Selain dari hasil kegiatan industri rumah tangga, pangsa pendapatan non-pertanian yang tergolong besar adalah pendapatan transfer dan mencari barang di alam bebas. Industri rumah tangga yang berkembang di daerah penelitian antara lain adalah pembuatan bata merah dan kerajinan tangan dari bambu. Adapun pendapatan transfer merupakan pendapatan kiriman dari anggota rumah tangga yang bekerja di luar daerah dan pendapatan dari alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Oleh karena keterbatasan lapangan kerja di dalam desa, banyak warga desa yang merantau ke luar daerah untuk bekerja. Selain beberapa kota di dalam negeri, daerah tujuan migrasi mereka juga mencakup kota-kota di negara lain, khususnya di Malaysia dan Arab Saudi.

Sekitar 95% rumah tangga contoh di Kabupaten Bondowoso menyatakan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Di Kabupaten Sampang, kesulitan tersebut bahkan dirasakan oleh seluruh rumah tangga. Selain terbatasnya lowongan kerja, kesulitan dalam mencari pekerjaan menurut responden juga karena penguasaan ketrampilan pencari kerja relatif kurang. Hal itu antara lain disebabkan karena mereka memiliki latar belakang pendidikan rendah. Pada beberapa kasus, pencari kerja tidak dapat memperoleh pekerjaan karena ketidaksesuaian antara ketrampilan yang dimiliki dengan kualifikasi yang dikehendaki, oleh perusahaan.

Meskipun tingkat penguasaan lahan relatif sempit, akan tetapi rumah tangga rawan pangan tidak sepenuhnya adalah konsumen murni. Hasil analisis menunjukkan, sekitar 31,3% rumah tangga di Bondowoso dan 56,3% rumah tangga di Sampang menyatakan pernah menjual hasil produksi dari usaha pertanian yang dikelolanya. Sebagian besar produksi digunakan untuk kebutuhan konsumsi sendiri. Di Bondowoso terdapat sekitar 40% petani yang menjual seluruh hasil pertanian mereka. Tempat pemasaran produk adalah kepada pedagang keliling, warung terdekat, atau pasar desa. Di Bondowoso bahkan ada yang memasarkan produk pertaniannya hingga ke pasar kabupaten (Tabel 3.52).

Tabel 3.52. Akses Rumah Tangga terhadap Pasar di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2006

Uraian	Kabupaten	
	Bondowoso	Sampang
1. Jml RT yg pernah menjual hasil produksi nya (%)	31,25	56,25
2. Tempat memasarkan hasil :		
- Warung terdekat	40,00	-
- Pasar desa	-	77,78
- Pedagang keliling	40,00	22,22
- Pasar Kabupaten	20,00	-
3. Proporsi yg dijual thd hasil :		
- 100%	40,00	-
- 75 - < 100%	-	22,22
- > 50 - 75%	20,00	-
- > 30 - 50%	40,00	33,33
- 10 - 30%	-	44,44
4. Jml RT yang pernah membeli makanan pokok	100,00	100,00
5. Sistim pembelian pangan (%)		
- Harian	47,62	30,00
- Mingguan	9,52	65,00
- Tidak menentu	42,86	5,00
6. Sumber pembelian pangan (%)		
- Warung terdekat	100,00	65,00
- Pasar Desa	-	30,00
- Pasar Kecamatan	-	-
- Pedagang keliling	-	5,00

Sumber: data primer, 2006.

Dalam hal pangan pokok, oleh karena hasil usahataniannya tidak mencukupi, rumah tangga rawan pangan masih harus membeli bahan pangan pokok untuk kebutuhan konsumsi mereka. Pada umumnya mereka membeli pangan pokok di warung terdekat atau di pasar desa. Terdapat perbedaan pola dalam pembelian pangan pokok. Di Bondowoso, pembelian umumnya dilakukan dengan pola harian (47,5%) dan tidak menentu (42,5%), namun di Sampang terutama dilakukan secara mingguan (65%).

Permodalan adalah salah satu aspek penting untuk mendukung pengembangan usaha produktif di tingkat rumah tangga. Penguasaan permodalan pada kelompok rumah tangga rawan pangan di daerah contoh penelitian umumnya terbatas. Selain penguasaan aset dan perolehan pendapatan rumah tangga yang rendah, kendala aksesibilitas terhadap sumber-sumber permodalan juga menghambat pengembangan usaha produktif rumah tangga. Di daerah penelitian di Bondowoso, lembaga permodalan yang dapat diakses rumah tangga rawan pangan adalah bank keliling. Adapun di Kabupaten Sampang, lembaga permodalan tersebut berbentuk lembaga adat dan lembaga sosial. Di kedua kabupaten, partisipasi kelompok rumah tangga dalam pemanfaatan sumber permodalan masih rendah (sekitar 10,6% di Bondowoso dan 12,5% di Sampang). Sejauh ini pemanfaatan sumber permodalan tersebut masih lebih ditujukan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sarana dan Prasarana

Dalam konteks pembangunan, ketersediaan sarana dan prasarana diperlukan sebagai prasyarat pengembangan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Sebagai contoh, kemudahan akses suatu wilayah dapat mempercepat pengembangan kawasan, sumber daya manusia maupun usaha ekonomi yang tumbuh di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu agenda yang senantiasa diupayakan dalam setiap tahapan pembangunan.

Di kedua kabupaten, ketersediaan sarana jalan dan alat transportasi masih perlu ditingkatkan. Aksesibilitas wilayah ditunjang dengan ketersediaan jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa. Sebagian jalan sudah diaspal. Di Bondowoso panjang jalan kabupaten yang sudah beraspal mencapai lebih dari 700.000 km, sedangkan di Sampang lebih dari 423.000 km (Tabel 3.53). Sebagian ruas jalan yang lain masih berupa jalan kerikil atau tanah. Dari sisi kualitas, kondisi jalan dengan kualitas baik di Bondowoso hanya sekitar 62% dari panjang jalan beraspal, sedangkan di Sampang mencapai 68%. Dengan kata lain 32-38% ruas jalan di kedua kabupaten masih diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya.

Terdapat beberapa jenis moda transportasi umum di kedua kabupaten, seperti bis/mini bis, mobil penumpang umum hingga truk. Namun, sesuai dengan potensi wilayah dalam kabupaten, ketersediaan alat transportasi tersebut belum dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah desa secara penuh. Di beberapa wilayah jumlah dan frekuensi layanan alat transportasi masih sangat terbatas. Pada kondisi demikian moda transportasi yang berkembang umumnya adalah angkutan sepeda motor (ojeg). Angkutan sepeda motor ini, khususnya di perdesaan, relatif lebih fleksibel tetapi populasinya masih terbatas. Keterbatasan armada tersebut menyebabkan ongkos ojeg menjadi mahal. Sebagai gambaran, dari desa Sumberwaru ke Kecamatan Binakal di Kabupaten Bondowoso yang berjarak sekitar 3 km, ongkos ojeg sebesar Rp 5000 sekali jalan di

siang hari. Pada malam hari, terlebih bila kondisi hujan, ongkos tersebut dapat meningkat menjadi dua kali lipat. Transportasi yang relatif mahal menyebabkan mobilitas penduduk menjadi rendah.

Tabel 3.53. Sarana dan Prasarana di Kabupaten Bondowoso, 2004

Aspek	Karakteristik
Jalan kabupaten	Jenis permukaan aspal 701577 km; kerikil 140.530 km; tanah 444.443 km
Kondisi aspal	Kondisi baik 440.278 km; sedang 34.721 km; rusak ringan 191.550 km; rusak berat 35.028 km
Transportasi	Jml bus/mini bus 13 unit; pick up 618 unit; truk barang 272 unit; truk tangki 5 unit; sepeda motor 15.252 unit; jeep 174 unit; sedan 276 unit; colt station 1.036 unit
Sarana pos	Kantor pos 1 unit; pos pembantu 10 unit; pos desa 5 unit; bis surat 55 unit
Sarana komunikasi	SST terpasang 13.749 unit; telepon umum 200 unit; wartel 31 unit; warkom 229 unit; warnet 6 unit warnet sekolah 45 unit
Sekolah umum	SD 546 unit, SLTP 45 unit, SLTA 15 unit Rasio murid-guru: SD 13,8; SLTP 12,8; SLTA 11,8
Madrasah	Ibtidaiyah 83 unit; Tsanawiyah 78 unit; Aliyah 26 unit Rasio murid-guru: MI 6,5; MTs 5,1 dan MA 4,7
Pondok pesantren	Jumlah ponpes 136 unit; jumlah santri 13.909 orang
Jml tenaga kesehatan	Dokter 76 orang; perawat 337 orang; bidan 37 orang; bidan desa 156 orang; dukun terlatih 322 orang
Fasilitas kesehatan	Puskesmas 23 unit ; pusling 23 unit; poliklinik 4 unit; laboratorium medis 25 unit; rumah bersalin 2 unit; apotik 5 unit; toko obat 220 unit; posyandu 959 unit

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2004

Kelancaran komunikasi penduduk kedua kabupaten dengan luar daerah saat ini dipermudah dengan tersedianya fasilitas telekomunikasi yang makin beragam. Baik di Kabupaten Bondowoso maupun Sampang, penduduk telah dapat menikmati warung telekomunikasi dan bahkan warung internet diluar fasilitas sambungan telepon biasa. Disamping itu, fasilitas telepon seluler juga sudah menjangkau kedua wilayah. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut melengkapi sarana pelayanan pos dalam aktifitas komunikasi penduduk.

Dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia, salah satu kebutuhan dasar yang penting adalah penyediaan sarana pendidikan. Kultur yang berkembang di masyarakat setempat mengindikasikan, kesadaran menyekolahkan anggota keluarganya (anaknya) secara formal di sekolah-sekolah umum relatif lebih rendah bila dibandingkan dorongan menyekolahkan ke sekolah-sekolah agama (madrasah) dan sekolah infomal melalui pondok pesantren. Hal ini menyebabkan tingkat

melek huruf arab lebih tinggi dibandingkan tingkat melek huruf latin. Banyak diantara penduduk yang bisa membaca huruf arab tetapi tidak bisa baca tulis huruf latin.

Dari sisi fasilitas, ketersediaan sekolah-sekolah untuk menampung siswa cukup memadai. Demikian pula dengan jumlah guru/pengasuh siswa. Angka rasio murid terhadap guru mengindikasikan bahwa, kecuali untuk sekolah dasar atau setingkat sekolah dasar di Sampang, beban mengajar seorang guru di kedua kabupaten masih termasuk ringan. Setiap guru rata-rata hanya melayani pengajaran untuk maksimal 15 orang siswa. Dalam hal pendidikan informal, jumlah pondok pesantren yang terdapat di kedua kabupaten juga cukup banyak, di atas 100 unit.

Sarana pengembangan pendidikan lain yang dapat dinikmati adalah adanya berbagai bantuan untuk siswa sekolah. Dari hasil wawancara diketahui bahwa anggota rumah tangga yang masih sekolah, khususnya yang masih di tingkat dasar, pernah memperoleh bantuan pendidikan. Bantuan tersebut ada yang berupa keringanan dan pembebasan biaya sekolah, pemberian buku dan alat tulis, atau perlengkapan sekolah lainnya.

Faktor lain yang penting dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia adalah faktor kesehatan. Upaya membentuk sumber daya manusia yang produktif sulit dicapai bila mengabaikan faktor kesehatan. Selain kesadaran untuk berperilaku hidup sehat, peningkatan derajat sehat di lingkungan masyarakat juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, termasuk kegiatan penyuluhan dan advokasi tentang kesehatan. Di kedua kabupaten contoh, pelayanan kesehatan secara lengkap disediakan di rumah sakit. Untuk mendekatkan jarak pelayanan dengan masyarakat, pemerintah juga berusaha meningkatkan fasilitas pendukung yang tersedia di Puskesmas, Puskesmas pembantu atau Poliklinik Desa. Di tingkat komunitas, kegiatan Posyandu telah berjalan cukup baik. Pemberdayaan Posyandu makin digalakan untuk memonitor kesehatan para balita dan mengembangkan media penyuluhan gizi dan kesehatan bagi masyarakat setempat (Tabel 3.53 dan Tabel 3.54).

Sarana dan prasarana di tingkat rumah tangga dapat dilihat dari kondisi rumah penduduk beserta fasilitas yang dimilikinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa lebih dari 90,0% rumah tangga rawan pangan menempati rumah milik sendiri, meskipun dengan ukuran relatif kecil. Rata-rata setiap anggota rumah tangga menempati bangunan seluas 10 m². Bila dibandingkan dengan standar luas minimum hunian layak sesuai kriteria kemiskinan menurut BPS, maka angka tersebut mengindikasikan bahwa tempat tinggal rumah tangga rawan pangan masih layak huni dan belum termasuk ciri rumah tangga miskin. Dinding rumah milik keluarga rawan pangan umumnya terbuat dari bilik (bambu), terutama di Bondowoso. Di Kabupaten Sampang, selain bilik bambu, bahan dinding rumah juga ada yang terbuat dari papan atau tripleks yang tebal. Lantai rumah umumnya masih berupa tanah, namun atap rumah seluruh responden sudah menggunakan genting. Sirkulasi

udara dalam rumah responden umumnya kurang baik, khususnya di Sampang, karena ventilasi (jendela) dalam rumah relatif sedikit. Kondisi perumahan seperti itu menggambarkan bahwa karakteristik rumah tangga rawan pangan relatif tidak jauh berbeda dengan rumah tangga miskin.

Tabel 3.54. Sarana dan Prasarana di Kabupaten Sampang, 2004

Aspek	Karakteristik
Jalan kabupaten	Kondisi baik 398 899 km; sedang 110.523 km; rusak berat 73.378 km
Kondisi aspal	423,20 km
Transportasi	Mobil penumpang 499 unit; bus 68 unit pick up 1.330 unit; truk 621 unit
Sarana pos	Kantor pos pembantu 7 unit
Sarana komunikasi	SST 6.940 unit; warnet 1; wartel 814 unit
Fasilitas pendidikan umum	SD 570 unit, SLTP 23 unit, SLTA 14 unit Rasio murid-guru: SD 29,3; SLTP 8,0; SLTA 6,7
Fasilitas pendidikan madrasah	Ibtidaiyah 471 unit; Tsanawiyah 104 unit; Aliyah 27 unit Rasio murid-guru: MI 19,4; MTs 6,8 dan MA 2,3
Pondok pesantren	Jumlah ponpes 181 unit; jumlah santri 38.026 orang
Tenaga kesehatan	dokter 38 orang; bidan 147 orang; perawat 158 orang; tenaga kesehatan Puskesmas 51 orang; dukun bayi terlatih 292 orang; dukun bayi tradisional 140 orang
Fasilitas kesehatan	RS 1 unit; Puskesmas 19 unit; pustu 51 unit; pusling 21 unit; apotik 5 unit; pondok bersalin desa 107 unit; Posyandu 839 unit

Sumber: Kabupaten Sampang Dalam Angka 2004

Fasilitas listrik sudah dapat dinikmati 95,0 rumah tangga rawan pangan di kedua kabupaten. Rumah tangga yang belum dapat menikmati fasilitas tersebut menggunakan lampu minyak tanah sebagai sumber penerangan dalam rumahnya. Dalam hal air bersih, seluruh rumah tangga rawan pangan di Kabupaten Sampang, menggunakan sumur pompa/timba. Akan tetapi di Kabupaten Bondowoso, responden cenderung menggunakan air bersih yang bersumber dari mata air yang terdapat di dalam desa. Untuk memudahkan distribusinya, air tersebut dialirkan melalui pipa paralon atau slang plastik ke rumah penduduk atau tempat penampungan air yang dapat digunakan secara bersama. Sementara penggunaan bahan bakar untuk kegiatan masak memasak sehari-hari hanya mengandalkan kayu bakar.

Fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK) umumnya sudah banyak dimiliki oleh rumah tangga rawan pangan di Sampang, namun di Bondowoso belum. Hal ini karena tidak ada rumah tangga contoh di wilayah tersebut yang memiliki sumur, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Untuk keperluan buang air, sebagian besar rumah tangga contoh memanfaatkan sungai yang melintasi wilayah desa. Sementara pada rumah tangga contoh di Sampang, fasilitas buang air sebagian

sudah menggunakan kloset (36,8%), tetapi pada umumnya (63,2%) mereka menggunakan fasilitas lainnya.

Dengan kondisi rumah dan fasilitas kebersihan serta sanitasi seperti di atas, sebagian rumah tangga rawan pangan di kedua kabupaten menyatakan memiliki keluhan kesehatan. Dalam sebulan terakhir, indikasi sakit yang banyak dikeluhkan mereka adalah panas dingin (92-100%), sesak napas (33-80%) dan asma (20-60%). Keluhan lain adalah gangguan penyakit kulit yang diderita beberapa rumah tangga contoh (33%) di Bondowoso. Dari hasil wawancara diketahui pula bahwa hanya sekitar 63,0% responden di Bondowoso dan 70,0% responden di Sampang yang sudah mengusahakan pengobatan.

Sebagian rumah tangga contoh telah kehilangan anggota keluarga karena meninggal. Di Bondowoso, kasus meninggal lebih banyak menimpa bayi, sedangkan di Sampang kasus meninggal lebih banyak menimpa bukan bayi (balita atau anak-anak di atas 5 tahun). Dari situasi tersebut terkesan bahwa kualitas kesehatan pada rumah tangga rawan pangan relatif rendah. Bila dikaitkan dengan karakteristik tempat tinggal mereka, boleh jadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya derajat kesehatan tersebut adalah karena kualitas lingkungan yang kurang memadai.

Dalam rangka membantu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, pemerintah telah menyediakan fasilitas layanan pengobatan murah melalui penggunaan kartu sehat atau kartu Gakin (keluarga miskin). Fasilitas tersebut diluncurkan pertama kali pada masa krisis sebagai bagian dari program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Mereka yang mendapat pembagian kartu tersebut dapat menggunakannya untuk berobat tanpa dipungut biaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa di kedua kabupaten contoh, tidak semua rumah tangga rawan pangan memiliki kartu sehat. Di Bondowoso, hanya 37,5% rumah tangga rawan pangan yang menyatakan memiliki kartu sehat, sedangkan di Sampang mencapai 68,4%. Selain itu, tingkat penggunaan dari kartu sehat tersebut juga masih rendah. Di Bondowoso hanya sekitar 33,3% rumah tangga yang sudah menggunakannya, sedangkan di Sampang mencapai 60,0%.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa masalah kurang energi protein (KEP) masih dijumpai di kedua kabupaten contoh. Terkait hal itu, pemerintah berusaha merevitalisasi Posyandu sebagai lembaga yang dapat menjadi media untuk memberikan penyuluhan tentang gizi dan kesehatan sekaligus sebagai tempat memonitor perkembangan gizi dan kesehatan bayi dan balita. Hasil wawancara menunjukkan bahwa rumah tangga rawan pangan di lokasi contoh telah mengetahui adanya lembaga tersebut di desa mereka (100%). Akan tetapi, tidak seperti di Sampang, sebagian rumah tangga contoh di Bondowoso menyatakan bahwa mereka belum dapat secara rutin membawa anak balitanya mengunjungi Posyandu dengan alasan karena anaknya penakut. Meskipun belum berjalan secara rutin, penyuluhan kesehatan telah menjangkau kelompok rumah tangga

rawan pangan dan gizi. Sekitar 59,0% responden di Bondowoso dan 95,0% responden di Sampang menyatakan bahwa di desa mereka telah ada penyuluhan tentang kesehatan.

Keragaan Sektor Pertanian

Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung kehidupan sebagian besar masyarakat di kedua kabupaten. Meskipun terdapat areal sawah di kedua kabupaten, tetapi pola pertanian dominan adalah pertanian lahan kering, khususnya di ladang/tegalan. Komoditas yang dominan diusahakan adalah padi, jagung, ubi kayu dan sebagian kacang-kacangan. Di Bondowoso, tanaman padi sawah dapat ditanam hingga tiga kali (padi-padi-padi) karena ketersediaan air yang cukup. Tetapi sayang, sebagian petani di kabupaten ini hanya berstatus sebagai buruh tani atau petani penggarap. Hasil analisis data primer menunjukkan rata-rata luas penguasaan lahan di kabupaten ini kurang dari 0,1 ha. Hal ini karena banyak petani yang menjual atau menggadaikan lahan kepada orang lain, termasuk penduduk luar desa. Akibatnya, lahan pertanian banyak yang menjadi berstatus *absentee land* karena pemiliknya tidak tinggal di dalam desa. Kecenderungan menggadaikan lahan biasanya dipicu oleh kebutuhan modal yang mendesak.

Gambaran penguasaan lahan untuk Kabupaten Sampang sedikit lebih baik. Hampir 50% rumah tangga menguasai lahan antara 0,1-0,5 ha dan 24% menguasai antara 0,6-1,0 ha. Penguasaan lahan yang sempit ini menjadi akar persoalan munculnya masalah kemiskinan di perdesaan dan pada gilirannya mempengaruhi kinerja ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya rumah tangga petani. Pola tanam dominan adalah padi-palawija, khususnya jagung.

Produktivitas tanaman padi secara umum relatif tinggi, sekitar 5,5 ton/ha. Namun angka produktivitas ini diduga bias (*over estimate*) karena dari hasil wawancara kelompok diperoleh angka sekitar 4,5 ton/ha. Angka tersebut bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata produksi tingkat provinsi yang sebesar 5,4 ton/ha. Pada kelompok palawija, kecuali untuk kedele, produktivitas tanaman palawija di Bondowoso lebih tinggi dibandingkan di Sampang. Demikian pula untuk kelompok perkebunan. Selain faktor teknologi, perbedaan ini diduga terkait dengan kondisi lahan pertanian di Sampang yang lebih kering dibandingkan di Bondowoso (Tabel 3.55 dan 3.56).

Bagi masyarakat di kedua lokasi penelitian, tembakau sebetulnya merupakan tanaman andalan. Akan tetapi pengembangan usahatani tembakau terkendala pemilikan modal yang terbatas. Usahatani tembakau membutuhkan biaya relatif besar. Untuk lahan 0,1 ha biaya produksi yang dibutuhkan mencapai Rp 2,5 juta. Akhir-akhir ini harga tembakau cenderung turun sehingga biaya usahatani kerap tidak bisa tertutupi. Banyak petani yang akhirnya harus menanggung rugi dan ter-

bebani hutang. Untuk menutup hutang-hutang tersebut, mereka kadang harus melepas lahannya untuk digadai atau dijual.

Tabel 3.55. Luas Panen dan Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Bondowoso, 2004

Komoditas	Luas panen (ha)	Produktivitas (kw/ha)	Produksi (ton)
Padi	55.305	55,5	306.943
Jagung	40.111	33,1	132.767
Kedelai	865	12,9	1.116
Ubi kayu	8.527	190,9	162.780
Ubi jalar	276	91,5	2.525
Kacang tanah	1.106	13,5	1.493
Kopi robusta	1.169	7,0	818
Tembakau rajang	2.468	7,2	1.767
Tebu	4.754	4,6	21.884

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2004

Tabel 3.56. Luas Panen dan Produktivitas Komoditas Pertanian di Kabupaten Sampang, 2004

No	Komoditas	Luas panen (ha)	Produktivitas (kw/ha)	Produksi (ton)
1	Padi sawah	20773	54,3	112683
2	Padi ladang	10952	44,3	49722
3	Jagung	82033	16,5	135272
4	Ubi kayu	18862	116,1	218989
5	Ubi jalar	2271	83,2	18884
6	K tanah	18965	9,5	17941
7	Kedelai	19892	16,4	32583
8	Tembakau	8150	3,7	2987
9	Kelapa	3022	2,4	721,01

Sumber: Kabupaten Sampang Dalam Angka 2004

Selain pertanian berbasis lahan, petani di kedua wilayah juga banyak yang memelihara ternak dari jenis unggas hingga ruminansia besar. Secara regional dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Bondowoso, perkembangan populasi ternak cenderung meningkat. Hal ini tercermin dari kecenderungan peningkatan produksi pangan hasil ternak (Tabel 3.57). Indikasi perkembangan yang cukup progresif terlihat pada peternakan ayam pedaging dan peternakan sapi, khususnya sapi perah. Peningkatan produksi kedua jenis usaha peternakan pada tahun 2003-2004 mencapai lebih dari 10,0%.

Tabel 3.57. Produksi Pangan Hasil Ternak di Kabupaten Bondowoso (Kg)

No	Komoditas	2003	2004	Perubahan (%)
1.	Daging sapi	1.207.157	1.212.628	0,45
2.	Daging kambing	116.243	117.394	0,99
3.	Daging domba	169.360	171.057	1,00
4.	Ayam buras	420.080	420.164	0,02
5.	Ayam petelur	58.618	58.628	0,02
6.	Ayam pedaging	545.710	619.315	13,49
7.	Daging Itik	10.596	10.621	0,24
8.	Susu sapi (litr)	26.650	29.715	11,50
9.	Telur ayam buras	275.580	275.635	0,02
10.	Telur ayam petelur	783.102	783.258	0,02
11.	Telur itik	276.126	276.181	0,02

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2004

Di Kabupaten Sampang, meskipun mengalami peningkatan produksi lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bondowoso, akan tetapi beberapa jenis ternak tampaknya mengalami penurunan produksi, terutama pada ayam buras dan ayam ras (pedaging dan petelur) (Tabel 3.58). Kecenderungan penurunan ini diduga terkait dengan intensitas serangan penyakit pada ternak ayam yang makin meluas pada periode 2003-2004. Secara nasional, kasus kematian ayam secara massal karena serangan penyakit semakin banyak dilaporkan sejak tahun 2004, khususnya akibat sebaran virus *Afian Influenza* (AI). Akibat virus tersebut banyak peternak ayam mengalami kerugian bahkan hingga ratusan juta rupiah.

Tabel 3.58. Produksi Pangan Hasil Ternak di Kabupaten Sampang (kg)

No	Komoditas	2003	2004	Perubahan (%)
1.	Daging sapi	831.358	944.420	13,60
2.	Daging kambing	20.339	24.150	18,74
3.	Daging domba	2.069	2.475	19,63
4.	Ayam buras	558.451	541.777	-2,99
6.	Ayam pedaging	583.440	542.190	-7,07
7.	Daging Itik	23.759	32.610	37,25
8.	Telur ayam buras	319.054	319.821	0,24
9.	Telur ayam ras	35.640	35.347	-0,82
10.	Telur itik	233.494	237.588	1,75

Sumber: Kabupaten Sampang Dalam Angka 2004

Keragaan penguasaan ternak di tingkat rumah tangga menunjukkan kecenderungan pola yang berbeda antara kedua kabupaten. Di lokasi

penelitian di Bondowoso, preferensi pemeriharaan ternak adalah pada kelompok unggas seperti jenis ayam dan bebek skala pengusahaan relatif kecil karena keterbatasan modal. Nilai penguasaan ternak rata-rata hanya Rp 38.900. Di Kabupaten Sampang, selain unggas, juga ada yang memelihara ternak besar seperti sapi atau kuda. Rataan nilai penguasaan ternak di kabupaten ini mencapai Rp 402.500.

Pola Konsumsi Pangan

Kondisi kesehatan dan status gizi seseorang sangat dipengaruhi oleh konsumsi pangannya. Konsumsi pangan yang baik adalah yang dapat memenuhi kebutuhan basal metabolisme tubuh dalam kuantitas maupun kualitas. Komposisi konsumsi pangan perlu memperhatikan kebutuhan tubuh akan zat gizi, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sesuai norma kecukupan masing-masing.

Secara umum, pola konsumsi penduduk di kedua wilayah kabupaten relatif sama. Meskipun memiliki produksi padi, tetapi sebagian penduduk masih mengkonsumsi jagung sebagai bagian dari makanan pokok sehari-hari. Jagung dapat dimasak sebagai nasi jagung atau menjadi campuran beras. Pola konsumsi campuran beras+jagung sangat dominan baik di Bondowoso (81,0%) maupun Sampang (95%) seperti tampak pada Tabel 3.59. Sebagai bahan campuran, konsumsi jagung meningkat pada musim kemarau atau masa paceklik. Bila pada musim normal perbandingan volume beras:jagung adalah 50:50, pada masa paceklik perbandingan tersebut dapat mencapai rasio 30:70.

Tabel 3.59. Situasi Konsumsi Pangan Rumah Tangga Rawan pangan di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2006 (%)

Uraian	Bondowoso	Sampang
1. Pola konsumsi pangan pokok:		
- Beras	9,52	-
- Jagung	9,52	-
- .Beras+Jagung	80,95	95,00
- .Beras+umbi	-	5,00
2. Perubahan pola konsumsi dlm kondisi kurang pangan		
- Jumlah	14,29	29,41
- Jenis	71,43	47,06
- Kualitas	14,29	23,53
3. Kondisi paceklik, konsumsi pangan (%)		
1.Tetap	-	35,00
2.Menurun	100,00	65,00
3.Meningkat	-	-

Sumber: data primer, 2006.

Frekuensi konsumsi pangan lengkap umumnya dua kali sehari. Pertama dilakukan pada sekitar jam 10 pagi dan makan kedua dilakukan pada sore hari setelah pulang dari kerja (sekitar jam 17.00). Adapun pada pagi hari, sebelum berangkat kerja, umumnya anggota rumah tangga rawan pangan tidak mengkonsumsi pangan lengkap, tetapi cukup mengkonsumsi singkong atau pisang rebus dengan minum kopi dan rokok.

Pada masa kekurangan pangan (*paceklik*), selain mengalami perubahan jenis pangan, rumah tangga rawan pangan juga sering mengalami perubahan kuantitas dan kualitas konsumsi. Selain pola beras+jagung, pola konsumsi pada masa kekurangan pangan berubah menjadi beras + ubi kayu atau bahkan jagung saja sebagai alternatif. Kuantitas pangan yang dikonsumsi rumah tangga mengalami penurunan pada masa *paceklik*, khususnya di Bondowoso yang mencapai 100,0%. Hal itu berbeda dengan di Sampang, dimana sebagian rumah tangga rawan pangan (35%) masih ada yang mempertahankan kuantitas konsumsi pangan seperti pada masa normal.

Di kedua lokasi penelitian, penyimpanan (*cadangan*) pangan belum banyak dilakukan oleh responden. Tingkat partisipasi penyimpanan oleh rumah tangga rawan pangan di kedua kabupaten relatif rendah. Kondisi seperti ini antara lain disebabkan volume perolehan pangan hasil produksi relatif sedikit karena penguasaan lahan yang rendah. Pencadangan pangan dari hasil pembelian juga sangat terbatas karena kendala pendapatan. Bahan pangan yang disimpan adalah bahan pangan pokok seperti gabah/beras, jagung, atau ubi kayu. Selain tujuan konsumsi sendiri, penyimpanan bahan pangan kadang juga dimaksudkan untuk mendukung kegiatan sosial, dimana bahan pangan tersebut diberikan dalam bentuk *natura* sebagai sumbangan.

Pedoman konsumsi bagi seseorang agar dapat hidup sehat adalah dengan mengkonsumsi bahan pangan secara beragam dalam jenis dan seimbang dalam komposisi asupan gizi. Keragaman pangan menjadi penting karena kandungan gizi antarjenis pangan berbeda-beda, sehingga bila keragaman pangan tinggi maka asupan gizi makin lengkap dan sesuai kebutuhan. Hasil analisis secara *recall* terhadap konsumsi satu hari sebelum dilakukan wawancara (Tabel 3.60) menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga rawan pangan di Bondowoso mengkonsumsi 4,6 jenis bahan pangan (kisaran 3-7 jenis), sedangkan di Sampang sekitar 6,2 jenis bahan pangan (kisaran 5-9 jenis). Sumber pemenuhan karbohidrat dalam konsumsi mereka berasal dari konsumsi pangan campuran beras+jagung atau beras+ubi kayu. Kebutuhan protein nabati terutama dipenuhi dari konsumsi tahu dan tempe (sekitar 95% di kedua kabupaten) dan sedikit dari konsumsi tempe+kacang merah. Dibandingkan protein nabati, konsumsi protein hewani relatif lebih beragam. Hal ini dimungkinkan dengan adanya kemudahan untuk memperoleh pangan sumber protein hewani seperti ikan (*awetan* maupun segar) dan telur di lokasi penelitian.

Tabel 3.60. Skor Diversifikasi Konsumsi Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2006

Uraian	Bondowoso	Sampang
Rataan jumlah jenis pangan yang dikonsumsi:	4,6	6,2
Jumlah minimum jenis pangan yang dikonsumsi	3	5
Jumlah maksimum jenis pangan yang dikonsumsi	7	9

Sumber: data primer, 2006

Sayuran dan buah adalah jenis bahan pangan yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Beberapa jenis buah yang memiliki preferensi konsumsi cukup tinggi di daerah penelitian adalah pisang dan pepaya. Kedua jenis buah ini tidak mengenal musim sehingga tersedia sepanjang waktu. Jenis sayuran yang sering dikonsumsi adalah daun ubi kayu, kangkung, dan bayam.

Keragaman konsumsi pangan dapat merefleksikan kecukupan kebutuhan pangan dengan komposisi gizi yang makin seimbang. Skor keragaman (diversifikasi) konsumsi yang tinggi menjadi penting untuk mengatasi masalah rawan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keragaman konsumsi pangan pada rumah tangga rawan pangan, dilakukan regresi terhadap beberapa peubah yang terkait dengan aspek produksi maupun aspek konsumsi di masing-masing kabupaten penelitian.

Semula, sebagaimana telah disinggung dalam subbab metodologi, peubah bebas yang dimasukkan dalam model regresi terdiri dari beberapa peubah tunggal yang berdiri sendiri, yaitu peubah: jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan kepala keluarga (KK), tingkat pendidikan isteri, luas pemilikan lahan pertanian, tingkat pendapatan rumah tangga dan beberapa peubah boneka (*dummy*) terkait dengan aspek penyuluhan dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Akan tetapi, dari pengolahan awal diperoleh hasil pendugaan yang kurang sesuai dengan harapan. Selain inkonsistensi pada tanda peubah, hasil pengolahan awal juga hanya menghasilkan koefisien determinasi (R^2) yang rendah. Oleh sebab itu, pada tahap pengolahan selanjutnya dilakukan modifikasi terhadap peubah yang masuk dalam model. Hasil regresi akhir yang diperoleh disajikan pada Tabel 3.61.

Hasil analisis menunjukkan bahwa di kabupaten Bondowoso, skor diversifikasi konsumsi pangan dipengaruhi secara nyata oleh luas pemilikan lahan pertanian perkapita dan pangsa pendapatan pertanian. Semakin tinggi pemilikan lahan dan semakin besar pangsa pendapatan pertanian, maka skor diversifikasi akan meningkat. Secara implisit hasil ini menunjukkan bahwa faktor aksesibilitas pangan (secara fisik maupun ekonomi) merupakan determinan penting untuk meningkatkan keragaman konsumsi rumah tangga rawan pangan di Bondowoso. Terkait hal

itu, upaya meningkatkan kapasitas produksi pangan dan hasil pertanian lainnya yang menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga menjadi faktor kritical penting dalam menanggulangi masalah rawan pangan dan gizi di wilayah tersebut.

Tabel 3.61. Faktor Determinan Keragaman Konsumsi Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan Di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2006

Peubah/kabupaten	Parameter dugaan	T-hitung
<u>Kab Bondowoso:</u>		
Intersep	2,860882 ^B	0,0171
Luas lahan/kapita (LMAN)	18,556505 ^B	0,0297
Pangsa pendapatan pertanian (PANG)	1,977455 ^D	0,1208
Keragaman penyuluhan (PENA)	0,879573	0,2673
R ² = 0,5106; F-value= 3,130		
<u>Kab Sampang:</u>		
Intersep	4,663225 ^A	0,0004
Luas lahan/kapita (LMAN)	1,301644	0,7132
Pendapatan/kapita (LKAP)	0,000001449 ^C	0,0771
Keragaman penyuluhan (PENA)	0,475548 ^C	0,0552
Keikutsertaan keg sosial (DKSO)	0,270541	0,8111
R ² = 0,4591; F-value= 3,182		

Keterangan: A, B, C dan D menunjukkan status nyata masing-masing pada taraf α = 1, 5, 10 dan 15 %.

Di kabupaten Sampang, hasil regresi menunjukkan bahwa skor konsumsi pangan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan total perkapita dan intensitas dan keragaman kegiatan penyuluhan tentang pangan dan gizi. Peubah luas lahan per kapita dan keikutsertaan dalam kegiatan sosial tidak berpengaruh nyata terhadap skor diversifikasi konsumsi pangan di kabupaten ini. Hasil ini mengindikasikan bahwa selain upaya peningkatan pendapatan rumah tangga, penanggulangan masalah rawan pangan juga membutuhkan dukungan kegiatan penyuluhan berbagai aspek yang terkait dengan pangan dan gizi. Upaya pemberdayaan (revitalisasi) posyandu dan kelompok tani (wanita tani) sebagai media penyuluhan bidang kesehatan dan pertanian di Kabupaten Sampang perlu mendapat prioritas dalam skala pembangunan daerah.

Rumah tangga dikategorikan sebagai rawan pangan bila dalam periode tertentu mengalami kesulitan memperoleh dan kekurangan konsumsi bahan pangan. Data tahun terakhir ini mengindikasikan, periode kesulitan atau kelangkaan pangan yang cukup berat di Bondowoso terjadi pada bulan Januari hingga Februari. Antara 61-66% rumah tangga menyatakan mengalami kekurangan pangan pada periode waktu tersebut. Di Sampang, periode kekurangan pangan yang agak berat

terutama terjadi pada bulan Agustus. Pada bulan tersebut sekitar 60% rumah tangga contoh mengalami kekurangan pangan. Bila dikaitkan dengan kalender pertanian, kekurangan ketersediaan pangan tersebut terjadi pada waktu menunggu masa panen atau saat iklim semakin kering (kemarau). Untuk menyiasati kondisi tersebut masyarakat biasanya melakukan beberapa strategi *coping*. Mulai dari mengubah jenis konsumsi pangan pokok, mengurangi frekuensi, hingga menjual aset rumah tangga yang hasilnya dapat digunakan untuk membeli pangan.

Tabel 3.62. Proporsi Rumah Tangga yang Mengalami Kekurangan Pangan di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, Jawa Timur, 2006 (%)

Bulan	Bondowoso	Sampang
Januari	61,90	5,00
Februari	66,67	15,00
Maret	52,38	20,00
April	38,10	10,00
Mei	42,86	10,00
Juni	42,86	20,00
Juli	33,33	40,00
Agustus	33,33	60,00
September	38,10	40,00
Oktober	42,86	15,00
November	47,62	10,00
Desember	57,14	10,00

Sumber: data primer, 2006.

Dalam menghadapi situasi kelaparan, berbagai respon dapat dilakukan seseorang. Hasil analisis menunjukkan lebih dari 70,0% rumah tangga contoh di kedua kabupaten penelitian pernah melakukan perubahan jenis pangan pokok. Perubahan tersebut adalah dengan mengonsumsi jenis pangan pokok yang mempunyai nilai sosial lebih rendah, misalnya dari beras ke jagung atau ubi kayu. Lebih dari 80,0% rumah tangga contoh juga mengurangi frekuensi makan atau mengurangi jumlah makanan. Sebagian besar (70-75%) rumah tangga contoh menyatakan pernah mengalami kekurangan pangan hingga dua bulan berturut-turut, meskipun belum sampai menyebabkan insiden kurang gizi pada anggota rumah tangga. Fluktuasi dalam kecukupan pangan yang dialami rumah tangga rawan pangan seperti digambarkan di atas, menimbulkan rasa pesimisme akan situasi kecukupan pangan yang lebih parah di masa datang. Sebagian besar rumah tangga contoh di kedua kabupaten menyatakan kekhawatiran akan mengalami tidak cukup makan pada masa mendatang. Di Sampang, kekhawatiran tersebut bahkan dikemukakan oleh seluruh rumah tangga contoh (Tabel 3.63).

Tabel 3.63. Persepsi Rumah Tangga terhadap Kondisi Kelaparan di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, 2006 (%)

Persepsi	Bondowoso	Sampang
- Kekhawatiran tidak cukup makan pada masa datang	80,95	100,00
- Pernah melakukan perubahan jenis pangan pokok yg mempunyai nilai sosial lebih rendah	71,43	95,00
- Mengurangi frekuensi makan atau jumlah makanan	90,48	85,00
- Tidak cukup makan	71,43	75,00
- Ada ART yg mengalami kurang gizi	0,00	5,00

Sumber: Data primer

3.3.2. Penyebab Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis

Faktor penyebab rawan pangan dan rawan gizi di kedua kabupaten contoh penelitian relatif tidak banyak berbeda. Akar masalahnya terutama berkaitan dengan kemiskinan yang menyebabkan lemahnya daya beli terhadap pangan. Faktor determinan lain adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, pasar output, dan modal. Deliniasi faktor penyebab untuk masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut.

a. Kemiskinan karena pemilikan lahan sempit

Pendapatan rumah tangga rawan pangan yang berkisar antara Rp 450 - 550 ribu per kapita/tahun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak, termasuk kebutuhan pangan. Rendahnya pendapatan tersebut antara lain karena tingkat penguasaan aset produktif, khususnya lahan pertanian yang sangat terbatas. Lahan pertanian yang ada umumnya adalah lahan kering dengan rata-rata luas pemilikan lahan kurang dari 0,5 ha (bahkan di Bondowoso <0,1 ha). Sebagian rumah tangga rawan pangan hanya berstatus penggarap (khususnya di Bondowoso), sehingga hasil usahatani pun tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dengan 3-5 orang anggotanya. Kondisi ini menjadi makin berat karena harga komoditas unggulan, seperti tembakau, cenderung turun dan mengakibatkan kerugian. Petani akhirnya terbebani hutang biaya modal yang cukup besar. Pada kasus di Bondowoso, untuk membayar hutang tersebut petani banyak yang menggadaikan atau menjual lahannya kepada orang luar desa. Situasi ini menyebabkan munculnya *absentee land* di lokasi penelitian. Informasi dari sumber kunci menyebutkan bahwa di desa contoh di Bondowoso luas *absentee land* mencapai 60% dari total luas sawah dan lahan kering, sehingga petani banyak yang hanya berstatus sebagai penggarap atau buruh tani.

Untuk mencari tambahan penghasilan dari kegiatan di luar pertanian tidak mudah bagi masyarakat di lokasi penelitian, termasuk

rumah tangga rawan pangan, karena kesempatan kerja sangat terbatas. Oleh sebab itu, dorongan melakukan migrasi ke luar daerah menjadi meningkat. Akan tetapi, lagi-lagi mereka membutuhkan modal kapital yang cukup besar. Keterbatasan kesempatan kerja akhirnya tidak hanya menambah pengangguran di dalam desa, tetapi juga menyebabkan tingkat upah tenaga kerja menjadi rendah.

b. Keterbatasan sumber daya air

Ketersediaan air sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usahatani dan kebutuhan rumah tangga. Kondisi daerah penelitian yang relatif kering atau karena berada di daerah ketinggian dengan topografi berbukit dimana aliran irigasi tidak menjangkau, menyebabkan areal pertanian menjadi lahan kering yang memiliki produktivitas rendah atau bahkan menjadi lahan marjinal. Faktor kekeringan menjadi kendala upaya pengolahan lahan yang lebih intensif dan berdiversifikasi. Akibat lebih jauh, petani akhirnya kurang bergairah untuk menggarap lahan karena pendapatan yang diperoleh rendah. Di Bondowoso, kondisi ini juga menjadi pendorong terjadinya migrasi lokal menuju daerah yang relatif subur (surplus) di bagian selatan sehingga tekanan penduduk di wilayah bagian selatan menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah utara dan timur. Di Sampang, kelangkaan air juga dirasakan untuk keperluan rumah tangga dan ternak. Situasi demikian menyebabkan kehidupan masyarakat khususnya kelompok miskin menjadi semakin sulit.

c. Keterbatasan pasar

Pemanfaatan sumber daya lokal belum dapat optimal karena tidak adanya penampungan hasil (permintaan pasar) yang tetap. Situasi seperti ini terjadi, misalnya pada usaha kerajinan tangan (besek) dari bambu di Bondowoso. Usaha kerajinan yang biasa dilakukan masyarakat ini akhirnya tidak dapat berkembang meskipun potensi bahan bakunya cukup tersedia. Di wilayah ini hanya sekitar 10% desa yang sudah memiliki pasar sendiri.

d. Kualitas Sumber daya Manusia Rendah

Secara umum, tenaga kerja tidak memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mendapatkan lapangan kerja. Hal ini karena tingkat pendidikan mereka umumnya rendah. Di desa penelitian, penduduk hanya memiliki pendidikan tingkat sekolah dasar. Mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena alasan ekonomi. Pada situasi demikian solusi yang diambil umumnya adalah dengan memilih masuk ke sektor informal, dengan konsekuensi tidak ada jaminan dan keteraturan dalam penerimaan pendapatan untuk mendukung kehidupan mereka. Atau, mereka terpaksa mau bekerja sebagai buruh yang dibayar dengan upah rendah.

e. Kondisi infrastruktur tidak memadai

Di beberapa wilayah sarana transportasi utama adalah ojeg motor. Selain itu, kondisi jalan menuju desa juga masih banyak yang rusak dan belum diaspal. Hal ini mengakibatkan ongkos transport mahal. Ongkos transport yang mahal menyebabkan interaksi penduduk dengan lingkungan luar terbatas dan pemasaran barang dan jasa, termasuk produk-produk pertanian, mengalami kesulitan. Lemahnya dukungan infrastruktur memperparah situasi keterbatasan pasar.

f. Terbatasnya akses terhadap lembaga permodalan

Rumah tangga rawan pangan umumnya hanya mengandalkan modal pribadi dalam pengembangan usaha produktif karena belum ada lembaga modal yang dapat memberi pinjaman kepada mereka. Kasus di Bondowoso, satu-satunya lembaga yang dapat diakses adalah rentenir yang berkeliling untuk menawarkan pinjaman uang, namun mengenakan bunga yang sangat tinggi. Besaran bunga mencapai 30% untuk jangka waktu pinjaman 10 bulan. Dampak dari situasi demikian, petani cenderung melakukan pola usaha konvensional sebagaimana kebiasaan selama ini dan sulit mengadopsi pembaharuan dalam teknik berproduksi.

3.3.3. Alternatif Kebijakan Penanggulangan

Dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan rumah tangga serta penyebab rawan pangan dan rawan gizi kronis di kedua kabupaten, dapat dirumuskan beberapa alternatif kebijakan penanggulangannya. Alternatif kebijakan penanggulangan rawan pangan dan gizi untuk kedua kabupaten relatif tidak berbeda karena akar penyebabnya relatif sama.

Kabupaten Bondowoso

- a. Pemberian bantuan pangan kepada rumah tangga rawan pangan berisiko tinggi, antara lain yang memiliki balita dan KK yang berusia lanjut. Pemberian bantuan paling tidak dilakukan untuk 6 bulan sehingga terdapat cukup waktu bagi kelompok sasaran untuk memperbaiki status kecukupan pangan dan gangguan kesehatan yang mungkin sedang diderita. Selain pangan pokok, pada rumah tangga rawan pangan yang memiliki balita dapat diberikan paket makanan pendamping ASI (MP-ASI) untuk menjamin kebutuhan gizi pada anak balita mereka.
- b. Pengembangan paket bantuan sarana produksi pertanian untuk meringankan beban biaya usahatani dan menekan kerugian. Pemberian bantuan tersebut sekaligus juga dimaksudkan untuk mendorong diversifikasi usahatani di areal pertanian kelompok sasaran.

- c. Pemberian paket bantuan ternak untuk menambah sumber dan tingkat pendapatan rumah tangga petani/peternak yang mengalami rawan pangan. Pemberian paket tersebut perlu diikuti dengan advokasi dan penyuluhan yang intensif, khususnya berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit yang berpotensi menimbulkan kerugian
- d. Peningkatan kapasitas lahan pertanian melalui upaya perluasan areal dan atau peningkatan intensitas tanam dengan mendorong upaya pencarian sumber air alternatif dan peningkatan kualitas sistem jaringan irigasi serta pemeliharaan sumber-sumber air alami yang sudah ada.
- e. Pengembangan pola bantuan pembiayaan yang dapat meringankan dan mendorong pelaku usaha untuk berkreasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal.
- f. Mendorong berkembangnya diversifikasi pertanian dan diversifikasi sumber usaha untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan pendapatan rumah tangga melalui introduksi teknologi pertanian terpadu, mekanisasi pertanian, dan pengembangan iklim usaha yang kondusif.
- g. Pengembangan usaha industri yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya lokal, khususnya hasil-hasil pertanian, dan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, khususnya di daerah-daerah yang berdekatan dengan wilayah marjinal untuk mengurangi arus migrasi ke kota.
- h. Pembatasan luas *absentee land*. Pembatasan ini dapat dilakukan dengan memberikan "pajak" atau denda yang tinggi kepada pemilik yang membiarkan lahan pertaniannya ditelantarkan dan tidak tergarap.
- i. Pemberdayaan kelembagaan pangan dan gizi yang sudah ada di lingkungan masyarakat, seperti Posyandu, kelompok tani/wanita tani, kader gizi, dan penyuluh pertanian agar dapat lebih berperan dalam kegiatan peningkatan wawasan, pengetahuan, dan penguasaan ketrampilan terkait pangan dan gizi di kalangan masyarakat yang termasuk rawan pangan dan gizi. Pengembangan kegiatan Pokbang dan Posyandu sekaligus juga dimaksudkan untuk mempermudah monitoring situasi tumbuh kembang anak balita yang rawan pangan dan gizi.
- j. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar, seperti jalan, jembatan, dan alat transportasi, untuk memudahkan mobilitas penduduk dan pergerakan barang dan jasa sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih cepat, menekan perbedaan harga, dan meningkatkan efisiensi pemasaran produk lokal, khususnya produk pertanian.

- k. Peningkatan peran institusi dan dewan ketahanan pangan daerah dalam memobilisasi sumber daya untuk peningkatan kinerja dan efektifitas koordinasi pelaksanaan program ketahanan pangan secara berkelanjutan di tingkat wilayah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- l. Konservasi dan rehabilitasi daerah tangkapan air dan daerah resapan air untuk mempertahankan kelestarian ketersediaan air irigasi maupun air bersih untuk rumah tangga. Dalam kaitan ini termasuk upaya pencegahan penebangan liar di kawasan hutan yang termasuk dalam wilayah kabupaten.
- m. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan sosialisasi norma keluarga kecil sejahtera dalam program keluarga berencana sehingga kepadatan penduduk dan kerusakan lingkungan dapat ditekan.
- n. Mengembangkan kesadaran sosial masyarakat dalam kegiatan penanggulangan masalah pangan dan gizi di lingkungannya sehingga upaya penanggulangannya menjadi lebih cepat dan efektif. Implementasi program ini perlu melibatkan peran tokoh masyarakat (formal dan informal) untuk aktif dalam advokasi kegiatan terkait pangan dan gizi di lingkungan masing-masing.

Kabupaten Sampang

- a. Pemberian bantuan pangan kepada rumah tangga rawan pangan berisiko tinggi, antara lain yang memiliki balita dan KK yang berusia lanjut. Pemberian bantuan paling tidak dilakukan selama 6 bulan sehingga cukup waktu bagi kelompok sasaran untuk memperbaiki status kecukupan pangan dan gangguan kesehatan yang mungkin sedang diderita. Selain pangan pokok, pada rumah tangga rawan pangan yang memiliki balita dapat diberikan paket makanan pendamping ASI (MP-ASI) untuk menjamin kebutuhan gizi pada anak balita mereka.
- b. Pengembangan paket bantuan sarana produksi pertanian untuk meringankan beban biaya usahatani dan menekan kerugian. Pemberian bantuan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong diversifikasi usahatani di areal pertanian kelompok sasaran.
- c. Pemberian paket bantuan ternak untuk menambah sumber dan tingkat pendapatan rumah tangga petani/peternak yang mengalami rawan pangan. Pemberian paket tersebut perlu diikuti dengan advokasi dan penyuluhan yang intensif, khususnya berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit yang berpotensi menimbulkan kerugian.
- d. Peningkatan kapasitas lahan pertanian melalui upaya perluasan areal dan atau peningkatan intensitas tanam dengan mendorong

- upaya pencarian sumber air alternatif, seperti pengembangan irigasi pompa air tanah dan peningkatan kualitas jaringan irigasi, serta pemeliharaan sumber-sumber air alami yang sudah ada.
- e. Pengembangan pola bantuan pembiayaan yang dapat meringankan dan mendorong pelaku usaha untuk berkreasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal.
 - f. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian wilayah yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat ranan pangan dan gizi
 - g. Pengembangan usaha industri yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya lokal, khususnya hasil-hasil pertanian, dan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat untuk mengurangi arus migrasi ke kota.
 - h. Pemberdayaan kelembagaan pangan dan gizi yang sudah ada di lingkungan masyarakat, seperti Posyandu, kelompok tani/wanita tani, kader gizi, dan penyuluh pertanian agar dapat lebih berperan dalam kegiatan peningkatan wawasan, pengetahuan dan penguasaan ketrampilan terkait pangan dan gizi di kalangan masyarakat yang termasuk rawan pangan dan gizi. Pengembangan kegiatan Pokbang dan Posyandu sekaligus juga dimaksudkan untuk mempermudah monitoring situasi tumbuh kembang anak balita yang rawan pangan dan gizi.

3.4. Sintesa Penyebab Rawan Pangan dan Gizi Kronis serta Alternatif Kebijakan Penanggulangannya

Berdasarkan karakteristik wilayah dan menggali informasi dari berbagai *stakeholder* di daerah termasuk wawancara dengan group interview dan rumah tangga, dapat diidentifikasi penyebab terjadinya rawan pangan dan gizi kronis di masing-masing wilayah seperti pada Tabel 3.64. Sementara, alternatif strategi kebijakan penanggulangannya disajikan pada Tabel 3.65. Hal utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah komitmen dari pemerintah, terutama pemerintah daerah dan lembaga legislatif (DPRD) di masing-masing wilayah, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Terlebih untuk Provinsi Papua yang telah menjadi wilayah otonomi khusus (otsus) pada tahun 2001, yang tentu saja mendapat dana tambahan selain dana APBN dan lainnya. Alokasi dana Otsus ditetapkan sebesar 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

Peningkatan daya beli masyarakat melalui diversifikasi usaha, penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian, dan nonpertanian yang berbasis di perdesaan adalah hal yang mutlak dilakukan untuk pencegahan rawan pangan dan gizi kronis di tingkat rumah tangga.

Terlebih untuk Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk paling besar dibandingkan dengan provinsi lain dan jumlah penduduk miskinnya juga demikian besar, maka upaya peningkatan pendapatan masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Upaya lain yang strategis dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai serta peningkatan sarana dan prasarana fisik seperti pembukaan dan perbaikan jalan, peningkatan sarana transportasi, dan penyediaan akses terhadap permodalan.

Tabel 3.64. Penyebab Wilayah dan Rumah Tangga Rawan Pangan dan Gizi Kronis

1. Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua • Topografi wilayah yang bergunung/berbukit-bukit • Musim yang tidak menentu (kering/hujan/frost) • Keterisolasian wilayah dan sarana transportasi terbatas • Pola pertanian yang masih tradisional dan ketersediaan pangan tergantung pada alam • Pemasaran hasil pertanian terbatas di ibukota kabupaten saja • Proses pemekaran wilayah di era otonomi daerah • Penyimpangan dana APBN dan otonomi khusus tahun 2004 dan 2005 • Pola paternalistik dan ikatan klen yang kuat • Pendidikan dan pengetahuan masih rendah • Konsumsi pangan tergantung pada komoditas yang ditanam dan di hutan • Pengelolaan lahan komunal, tergantung pada kepala klen/adat
2. Kabupaten Sambas dan Landak, Provinsi Kalimantan Barat • Penyebaran penduduk yang tidak merata antar wilayah • Akses rumah tangga terhadap air bersih dan pelayanan kesehatan terbatas • Terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana ekonomi • Distribusi pangan antarwilayah tidak lancar terutama ke wilayah terpencil • Terbatasnya lapangan pekerjaan di luar pertanian • Daya beli masyarakat terbatas • Pengetahuan pangan dan gizi yang rendah • Masalah pola asuh anak
3. Kabupaten Bondowoso dan Sampang, Provinsi Jawa Timur • Kemiskinan karena pemilikan lahan sempit • Keterbatasan sumber daya air dan adanya lahan kritis • Keterbatasan pasar output • Pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja rendah • Kondisi infrastruktur tidak memadai • Terbatasnya akses terhadap lembaga permodalan untuk usaha • Kualitas sumber daya manusia rendah

Tabel 3.65. Alternatif Strategi Kebijakan Penanggulangan Rawan Pangan dan Gizi Kronis

1. Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

Jangka pendek

- Bantuan pangan berupa beras perlu ditinjau kembali
- Pembukaan lahan untuk pengembangan areal tanaman ubi jalar
- Pembentukan dan pengembangan kelembagaan/program terkait pangan, gizi, dan kesehatan

Jangka Menengah

- Komitmen yang kuat dari pemerintah dan legislatif tingkat pusat dan daerah serta masyarakat
- Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan, dan kesehatan
- Peningkatan jumlah tenaga pertanian dan kesehatan
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga yang melibatkan laki-laki
- Peningkatan pengetahuan pangan, gizi, dan kesehatan melalui KIE

Jangka panjang :

- Membuka keterisolasian wilayah (antardesa/ kecamatan kabupaten)
 - Pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik
-

2. Kabupaten Sambas dan Landak, Provinsi Kalimantan Barat

Jangka Pendek

- Program pengembangan kawasan agribisnis terpadu (KUAT)
- Peningkatan pemberdayaan kelembagaan/program terkait pangan, gizi dan kesehatan
- Peningkatan pengetahuan pengasuhan anak balita pada kaum wanita

Jangka Menengah

- Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan perekonomian daerah
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Peningkatan ketrampilan kaum perempuan
- Pengembangan industri pengolahan di perdesaan dengan bahan baku lokal

Jangka panjang

- Peningkatan sarana dan prasarana terutama transportasi (jalan, perahu, angkutan umum) dan kesehatan
 - Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan industri pengolahan di perdesaan dengan bahan baku lokal
-

Tabel 3.65. Lanjutan

3. Kabupaten Bondowoso dan Sampang, Provinsi Jawa Timur

Jangka pendek

- Pemberian bantuan pangan kepada rumah tangga rawan pangan berisiko tinggi
- Pengembangan paket bantuan sarana produksi pertanian, ternak, dan pembiayaan
- Pengembangan usaha industri yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya lokal khususnya hasil-hasil pertanian
- Pemberdayaan kelembagaan pangan dan gizi yang sudah ada di lingkungan masyarakat.

Jangka Menengah

- Peningkatan lahan pertanian melalui upaya perluasan areal dan atau peningkatan intensitas tanam
- Mendorong berkembangnya diversifikasi pertanian dan diversifikasi sumber usaha
- Pembatasan luas *absentee land*
- Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah
- Mengembangkan kesadaran sosial masyarakat dalam kegiatan penanggulangan masalah pangan dan gizi

Jangka Panjang

- Konservasi dan rehabilitasi daerah tangkapan air dan resapan air
 - Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
-

IV. RANGKUMAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

4.1. Rangkuman

1. Pengelompokan kabupaten-kabupaten rawan pangan dan gizi kronis dalam kuintil berdasarkan 10 indikator tidak menunjukkan pola sebaran nilai yang unik (khas). Artinya, penggunaan 10 indikator tidak dapat menunjukkan status rawan pangan yang mutlak (absolut) untuk setiap kabupaten. Indikator yang digunakan untuk memetakan rawan pangan dan rawan gizi kronis oleh DKP dan WFP masih mengandung kelemahan terutama dikaitkan dengan ketepatan penggunaan istilah/konsep rawan pangan dengan indikator yang digunakan dalam penentuan rawan pangan dan perhitungan ketersediaan pangan dan fleksibilitas pengukuran indikator.
2. Terdapat 10 indikator tipe wilayah yang dapat dikumpulkan untuk menambah informasi karakteristik 100 kabupaten rawan pangan dan gizi kronis yaitu: 1) produksi padi, palawija, dan perkebunan; 2) populasi ruminansia dan unggas; 3) proporsi rumah tangga petani gurem; 4) proporsi angkatan kerja; 5) proporsi anak umur 7-15 tahun yang tidak sekolah; 6) pangsa pengeluaran pangan rumah tangga dan 7) pendapatan kabupaten (PDRB). Dengan adanya data ini menepis anggapan bahwa indikator yang digunakan untuk pembuatan peta sangat terbatas sesuai ketersediaan data tanpa memperhatikan apakah pemilihan indikator tersebut sesuai dan memiliki pengaruh langsung terhadap kerawanan pangan dan gizi kronis.
3. Indikator yang digunakan untuk pemetaan kecamatan rawan pangan dan gizi kronis tidak dapat sepenuhnya menggunakan 10 indikator seperti pemetaan tingkat kabupaten, karena terbatasnya ketersediaan data. Dibutuhkan indikator tambahan yang disesuaikan dengan potensi wilayah terutama terkait dengan aspek potensi pertanian wilayah untuk mendeteksi kecamatan rawan pangan dan gizi kronis secara akurat.
4. Karakteristik wilayah rawan pangan dan gizi kronis pada umumnya dicirikan dengan: 1) topografi berupa perbukitan/gunung-gunung, dengan iklim yang tidak menentu (kasus di Papua) dan dataran rendah dengan curah hujan yang sedikit (kasus di Jawa Timur dan Kalimantan Barat); 2) kualitas sumber daya manusia (pendidikan, ketrampilan) masih rendah; 3) proporsi penduduk miskin masih tinggi; 4) Sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian dengan penguasaan lahan yang sempit dan produktivitas lahan rendah; serta 4) sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, dan akses terhadap permodalan terbatas. Khusus di Kabupaten Jayawijaya, pola ketersediaan dan konsumsi rumah tangga tergantung dari apa yang ditanam dan apa yang di hutan, sehingga keragaman konsumsinya juga terbatas. Apalagi tugas perempuan di bidang pertanian

sangat berat, sehingga anak-anak kurang mendapat perhatian dalam pola asuh termasuk asupan gizinya.

5. Karakteristik seperti di atas juga menjadi akar penyebab terjadinya rawan pangan dan gizi kronis tingkat wilayah dan rumah tangga. Apalagi kasus di Kabupaten Jayawijaya ditambah dengan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga karena rendahnya daya beli masyarakat akibat keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan non-pertanian.
6. Alternatif strategi kebijakan penanggulangan rawan pangan dan gizi kronis tingkat wilayah dan rumah tangga adalah peningkatan daya beli masyarakat melalui diversifikasi usaha, penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian, dan nonpertanian yang berbasis di pedesaan. Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai serta peningkatan sarana dan prasarana fisik, seperti pembukaan dan perbaikan jalan, membuka keterisolasian wilayah (antar desa/kecamatan kabupaten), peningkatan sarana transportasi dan akses permodalan.

4.2. Implikasi Kebijakan

1. Pengelompokan kabupaten rawan pangan dan gizi kronis dalam kuintil berdasarkan 10 indikator tidak menunjukkan pola sebaran nilai yang unik (khas). Implikasinya adalah pemasyarakatan penggunaan Peta Kerawanan Pangan Indonesia perlu disertai penjelasan memadai mengenai status rawan pangan yang dimaksud dalam peta. Hal ini penting untuk menghindari kesan menghakimi daerah-daerah dan agar program yang ditetapkan lebih terfokus berdasarkan skala prioritas.
2. Selain itu, untuk ke depan, masih perlu penyempurnaan terutama dalam pemilihan jenis indikator dikaitkan dengan konsep rawan pangan yang telah disepakati bersama yang tertuang dalam Undang-undang Pangan. Selain itu juga perlu penyempurnaan dalam perhitungan ketersediaan pangan normatif, fleksibilitas pengukuran dari masing-masing indikator disesuaikan dengan karakteristik kabupaten dan peningkatan keakuratan pencacahan dan perhitungan data. Apabila masih mempertahankan seluruh indikator yang telah ditetapkan, maka akan lebih “fair” apabila dalam penggunaan indikator diberi *rating* (bobot) sehingga bias dalam penetapan prioritas dan target program penanggulangan rawan pangan dan gizi kronis dapat dihindari atau diminimumkan.
3. Kebijakan strategi alternatif penanggulangan rawan pangan dan gizi kronis yang telah ditetapkan agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Untuk terlaksananya kebijakan di atas, diperlukan komitmen

men yang kuat (*political will and political support*) dari pemerintah terutama pemerintah daerah beserta jajarannya dan lembaga legislatif (DPRD) di masing-masing wilayah sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Apalagi status Provinsi Papua sebagai wilayah otonomi khusus (otsus) pada tahun 2001, yang tentu saja mendapat dana tambahan selain dana APBN.

4. Fenomena rawan pangan dan gizi kronis sesungguhnya tidak hanya mencakup aspek ekonomi saja, tetapi juga terkait dengan masalah sosial dan faktor lingkungan. Oleh sebab itu, perencanaan upaya penanggulangan rawan pangan harus mencakup perencanaan pemecahan masalah yang terkait dengan ketiga aspek tersebut secara terpadu. Lebih dari itu, fenomena rawan pangan juga bersifat laten, sehingga orientasi kebijakan penanggulangan masalah tidak dapat hanya bersifat jangka pendek saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan penanggulangan jangka panjang sebagai respon antisipatif.
5. Peningkatan perekonomian daerah harus memperhitungkan aspek penguatan sumber-sumber kehidupan dalam jangka panjang yang menjamin terbentuknya ketahanan pangan wilayah dan rumah tangga secara berkelanjutan. Kebijakan dan program yang ditetapkan mampu membangkitkan masyarakat sebagai penggerak berbagai aset dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dan ancaman tanpa menghilangkan jati diri terutama di Kabupaten Jayawijaya.
6. Peningkatan keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Hasil analisis regresi skor konsumsi pangan rumah tangga mengindikasikan bahwa faktor aksesibilitas pangan (fisik dan ekonomi) adalah determinan penting yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan penanggulangan rawan pangan dan gizi kronis. Kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas pangan tidak hanya terkait dengan upaya peningkatan produksi pangan dan pendapatan rumah tangga saja, tetapi juga upaya lain yang mendukung perbaikan distribusi pangan seperti perbaikan sarana jalan dan transportasi dan pengaturan sistem pemasaran pangan yang lebih efisien dan berkeadilan.
7. Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah pentingnya pemahaman bahwa pemecahan masalah ketahanan pangan dan kemiskinan tidak dapat hanya ditangani oleh sektor pertanian, walaupun jumlah penduduk miskin dan rawan pangan umumnya berada di pedesaan. Upaya pemantapan ketahanan pangan atau mengatasi kerawanan pangan dan penanggulangan kemiskinan memerlukan kerja sama, koordinasi, dan sinergitas dari berbagai instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan partisipasi aktif masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, C.A. 1998. Konsumsi dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Menurut Tipe Agroekologi di Wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tesis Magister. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Adnyana, M.O. 2005. Lintasan dan Marka Jalan Menuju Ketahanan Pangan Terlanjutkan dalam Era Perdagangan Bebas. Orasi Pengukuhan APU Bidang Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Deptan. Bogor.
- Anonim. 2000. Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional 2001-2005. Pemerintah RI bekerja sama dengan World Health Organization (WHO) Jakarta.
- Anonim. 2004. The Economics of Democracy. Financing Human Development in Indonesia. Indonesia Human Development Report 2004. Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan UNDP.
- Anonim. 2005a. Survei Pemantauan Kelaparan. Laporan Penelitian Kerja sama Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Institut Pertanian Bogor dengan World Food Programme.
- Ariani, M, H.P. Saliem, S.H. Suhartini, Wahida, dan H. Supriadi. 2000. Analisis Kebijaksanaan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berpendapatan Rendah. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Departemen Pertanian. Bogor. (Tidak dipublikasikan)
- Aswatini, H. Romdiati, B. Setiawan, A. Latifa, Fitranita, dan A. Situmorang. 2003. Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Isu-isu Demografi. Pusat Penelitian Kependudukan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta.
- Atmarita dan Fallah, TS. 2004. Analisis Situasi Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII. 17-19 Mei 2004. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta.
- Australian Agency for International Development (AusAID). 2004. Food Security Strategy. http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/food_security_strategy04pdg. 27 Desember 2005.
- Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. 2001. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Jakarta.
- Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. 2004. Situasi Ketahanan Pangan (Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional). Jakarta.

- Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2005. Langkah-langkah Penanganan Masalah Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang.
- Badan Pusat Statistik. 2004. Kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik Jakarta.
- Dyah, S. 1996. Relasi Sosial di Pasar Tradisional Silinu-Sinakma *dalam* Astrid, S. S. S. (ed.) Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Suatu Telaahan Analitis Masyarakat Wamena, Irian Jaya. Pustaka Sinar Harapan. LIPI. Jakarta. Hal 45-63.
- Deritana,N; M.Kombong dan G.Yuristianti.A. 2000. Gizi untuk Pertumbuhan dan Perkembangan. Prioritas dan Intervensi yang Dilakukan Oleh Jayawijaya Watch Project. Jayawijaya Women and Their Children's Health Project. Ausaid. Women Vision. Departemen Kesehatan. www.papuaweb.org/dlib/lap/watch/2000-gizi.pdf. dibuka pada tanggal 21 Juni 2006.
- Departemen Kesehatan. 2005. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2005-2009. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2005 Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2005-2009. Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian dan World Food Programme (WFP). 2005. Peta Kerawanan Pangan Indonesia (Atlas of Food Insecurity in Indonesia). Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian dan WFP. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan FAO. 2005. Program Pendukung Desentralisasi Ketahanan Pangan Nasional (PSDKP) Tahap I : 2006-2015. Ringkasan Eksekutif. Jakarta. (Tidak dipublikasikan).
- FANTA. 2004. Measuring Household Food insecurity Workshosp Report. http://www.fantaproject.org/downloads/pdfs/MHFI_workshop04.pdf. 27 Desember 2005.
- Food and Agricultural Organization (FAO). 2001. The State of Food Insecurity in the World. FAO United Nation, Roma, Italy.
- Food and Agricultural Organization (FAO). 2003. Anti-Hunger Programme. A Twin-track Approach to Hunger Reduction Prioritas for National and International Action. Food and Agricultural, United Nation, Rome.
- Hardinsyah dan D. Martianto. 2001. Pembangunan Ketahanan Pangan Berbasis Agribisnis dan Pemberdayaan Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Ketahanan Pangan dan Pemulihan Ekonomi. Hardinsyah (editor) Kerjasama Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi (PSKPG), IPB; Agrindo Aneka Consult; Partnership for Economic Growth (PEG),

- United State Agency for International Development (USAID) dan Badan Bimas Ketahanan Pangan (BBKP). Jakarta.
- Irawan, P.B. 2004. Peranan Pembangunan Manusia dalam Mendukung Pemantapan Ketahanan Pangan. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII, 17-19 Mei. LIPI, Jakarta
- Irawan, P dan S. Irawan. 2005. Poverty and Environment Nexus in Indonesia. Indonesia Decentralized Environmental and Natural Resources Management (IDEN) Project. UNDP Indonesia.
- Jayawijaya Watch Project. 2000. Annual Survei Report. www.papuaweb.org/dlib/lap/watch/2000-survei, dibuka tanggal 21 Juni 2006.
- Martianto, D. 1999. Magnitude, Determinant, and Indicators of Household Food and Nutrition Security in Rural West Java and East Nusa Tenggara, Indonesia. Ph.D. Dissertation. University of the Philippines, Los Banos.
- Martianto, D. 2005. Pemahaman dan Persepsi Masyarakat tentang Rawan Pangan dan Gizi Buruk. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional II Penganeka Ragaman Pangan : Rekonstruksi Kelembagaan Sosial Penanganan dan Pencegahan Rawan Pangan dan Gizi Buruk. Jakarta. (Tidak dipublikasikan)
- Martianto, D. dan M. Ariani. 2001. Analisis Ketahanan Pangan di Indonesia. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 1992/1993. Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia dan Alternatif Upaya Penanggulangannya. Laporan Penelitian. Bogor.
- Radhakrishna, R. and K.V. Reddy. Food Security and Nutrition : Vision 2020. In A.P. Gupta (Ed.) India Vision 2020. Planning Commission, Government India, New Delhi.
- Raharto, A dan Haning Romdiati. 2000. Identifikasi Rumah tangga Miskin. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII. LIPI. Jakarta.
- Rimbawan dan Y.Baliwati. 2002. Masalah Pangan dan Gizi. Dalam buku Pengantar Pangan dan Gizi. Y. F. Baliwati, A. Khomsan, dan C. M. Dwiriani (editor). Penebar Swadaya. Jakarta.
- Robinson, M. 1999. The Human Right to Food and Nutrition. SCN-News. Juli (18).
- Saliem, H.P., E.M. Lokollo, M. Ariani, T.B. Purwantini, dan Y. Marisa. 2001. Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga dan Regional. Laporan Penelitian Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. (Tidak dipublikasikan).
- Saliem, H.P, M. Ariani, Y. Marisa dan Tri Bastuti. 2002. Analisis Kerawanan Pangan Wilayah dalam Perspektif Desentralisasi Pemba-

- ngunan. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. (Tidak dipublikasikan)
- Sawit, M. H. dan M. Ariani. 1997. Ketahanan Pangan : Konsep, Kebijakan dan Pelaksanaannya. Makalah disampaikan pada Seminar Pra-Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VI, Bulog. Jakarta 26 - 27 Juni. (Tidak dipublikasikan)
- Soetrisno, N. 1997. Konsep dan Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Repelita VII. Makalah dalam Pra-WKNPG VI, Jakarta 26-27 Juni. Bulog. (Tidak dipublikasikan)
- Sukandar, D., D. Briawan, Y. Heryanto, M. Ariani dan M.D. Andrestian. 2001. Kajian Indikator Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga: Di Provinsi Jawa Tengah. PSKPG, LP. IPB. Bogor.
- Statistics Division. 2005. Millenium Development Goal Indicators Database. <http://millenniumindicators.un.org>. 30 July 2005.
- Tim. Peneliti Pusat Penelitian Ub-ubian dan Sagu, Universitas Negeri Papua. 2003. Pengkajian Penanggulangan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Biak-Numfor, Jayawijaya dan Merauke. Laporan Akhir. Universitas Negeri Papua bekerjasama dengan BBKP Provinsi Papua. Manokwari. (Tidak dipublikasikan)
- UNDP China. 2001. Food security and Sustainable Agriculture. <http://www.oecd.org/> Sgt/an. 28 Desember 2005.
- Witoro. 2003. Menemukan Kembali dan Memperkuat Sistem Pangan Lokal. <http://www.elsppat.or.id/download/file/witoro.pdf>. 5 Januari 2006.

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>

PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
Jl. Ahmad Yani 70 Bogor 16161 Indonesia, Telp. 0251-333964, Faks. 0251-314496
E-mail: caser@indosat.net.id, publikasi_psekp@yahoo.co.id
Website: <http://pse.litbang.deptan.go.id>